BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target pencapaian sasaran, serta nomenklatur program sampai dengan akhir periode perencanaan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

dan

BUPATI SERUYAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD adalah menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan RPJMD, yaitu:
   a. merumuskan isu-isu strategis pembangunan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Seruyan;
   b. menjabarkan visi dan misi ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan target yang terukur;
   c. menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan;
   d. menetapkan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja, target dan pagu indikatif Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023;

e. menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), disertai target setiap tahun selama Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023;
f. memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten Seruyan mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun 2023.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 diubah sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 13 September 2021

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 56.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 08, 57 /2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi dari waktu ke waktu. Di samping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah Kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 11 Ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 85

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018-2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum	I-5
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
	1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Seruyan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	I-10
	1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Seruyan dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	I-11
	1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Seruyan dengan RTRW Kabupaten Seruyan dan KLHS RPJMD	I-12
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-13
	1.5. Sistematika Penyusunan	I-14
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
	2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
	2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II-2
	2.1.1.3. Topografi	II-3
	2.1.1.4. Hidrologi	II-4
	2.1.1.5. Klimatologi	II-6
	2.1.1.6. Penggunaan Lahan	II-7
	2.1.2. Wilayah Rawan Bencana	II-12
	2.1.3. Demografi	II-18
	2.1.4. Potensi Sumber Daya	II-22

	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
	2.3. Aspek Layanan Umum	II-60
	2.3.1. Layanan Urusan Wajib	II-60
	2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-97
	2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-124
	2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-130
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-135
	2.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	II-154
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
	3.1.2. Neraca Daerah	III-10
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-14
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-19
	3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah	III-25
	3.3. Kerangka Pendanaan	III-28
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-29
	3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-34
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
	4.1. Analisis Dampak Covid-19	IV-1
	4.1.1. Kebijakan Mitigasi Dampak Covid-19	IV-8
	4.1.2. Antisipasi Pemulihan Pembangunan Pasca Pandemi Covid-19	IV-12
	4.1.3. Alternatif Skenario dan Rekomendasi dimasa Pandemi Covid-19	IV-13
	4.2. Permasalahan Pembangunan	IV-16
	4.2.1. Aspek Sosial Budaya	IV-16
	4.2.2. Aspek Perekonomian	IV-25
	4.2.3. Aspek Infrastuktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	IV-28
	4.3. Isu Strategis	IV-31
	4.3.1. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)	IV-31
	4.3.2. Telaahan Isu Strategis Nasional	IV-33

	4.3.3. Telaahan Isu Strategis Provinsi	IV-40
	4.3.4. Telaahan Isu Strategis Kabupaten Seruyan	IV-51
	4.3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039	IV-72
	4.3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	IV-78
	4.3.7. Telaahan RPJMD Daerah Lainnya	IV-96
	4.3.8. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan	IV-99
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1. Visi	V-1
	5.2. Misi	V-3
	5.3. Tujuan dan Sasaran	V-6
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1. Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
	6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	VI-12
	6.2.1. Pengembangan Kawasan Strategis	VI-12
	6.2.2. Pengembangan Kawasan Ekonomi	VI-15
	6.2.3. Pengembangan Infrastruktur Wilayah	VI-17
	6.3. Program Pembangunan Daerah	VI-27
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
	9.1. Kaidah Pelaksanaan	IX-1
	9.2. Pedoman Transisi	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Seruyan	II-13
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-18
Tabel 2.4	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan/Desa/Kelurahan di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-19
Tabel 2.5	Hasil Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2020	II-23
Tabel 2.6	Hasil komoditi Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-24
Tabel 2.7	Jumlah Produksi Budidaya ikan sesuai dengan jenis komoditi di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-24
Tabel 2.8	Jumlah Produksi Ternak sesuai dengan jenis komoditi di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-25
Tabel 2.9	Jumlah dan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-29
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-31
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Seruyan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2020	II-33
Tabel 2.12	PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.13	Inflasi Tahun 2015-2020	II-38
Tabel 2.14	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Melek Huruf Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-45
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-46
Tabel 2.17	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-47
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-48

Tabel 2.19	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2020	II-48
Tabel 2.20	Rasio Penduduk yang bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Seruyan Tahun 2014-2019	II-54
Tabel 2.21	IPG dan IDG Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.22	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-55
Tabel 2.23	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-56
Tabel 2.24	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-57
Tabel 2.25	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-57
Tabel 2.26	Konstribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-58
Tabel 2.27	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-58
Tabel 2.28	Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-59
Tabel 2.29	Pertumbuhan Industri Rumah Tangga Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-59
Tabel 2.30	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-60
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-60
Tabel 2.32	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Serta Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-61
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-62
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-63
Tabel 2.35	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-64

Tabel 2.36	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-65
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-65
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-66
Tabel 2.39	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-67
Tabel 2.40	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-67
Tabel 2.41	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-68
Tabel 2.42	Angka Kelulusan SMA/SMK Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-68
Tabel 2.43	Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-69
Tabel 2.44	Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan Menengah Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-69
Tabel 2.45	Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-70
Tabel 2.46	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-70
Tabel 2.47	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.48	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-71
Tabel 2.49	Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4 di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-72
Tabel 2.50	Perkembangan Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.51	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2020	II-74
Tabel 2.52	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.53	Jumlah Absolut Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.54	Rasio posyandu per satuan balita Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-78

Tabel 2.55	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-80
Tabel 2.56	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.57	Rasio dokter per satuan penduduk Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.58	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.59	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.60	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.61	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.62	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.63	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.64	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.65	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.66	Cakupan kunjungan bayi Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.67	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Seruyan (Km) Tahun 2020	II-87
Tabel 2.68	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seruyan (Km) Tahun 2020	II-88
Tabel 2.69	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Tahun 2016 – 2020	II-88
Tabel 2.70	Daftar panjang jalan menurut keadaan dan status jalan tahun 2020	II-89
Tabel 2.71	Persentase rumah tinggal bersanitasi Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.72	Rasio Jaringan Irigasi Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-90

Tabel 2.73	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.74	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.75	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.76	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.77	Rasio rumah layak huni Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.78	Rasio permukiman layak huni Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.79	Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Seruyan Tahun 2015–2020	II-94
Tabel 2.80	Rasio Jumlah LKSA Kabupaten Seruyan Tahun 2016–2020	II-95
Tabel 2.81	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-95
Tabel 2.82	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2020	II-96
Tabel 2.83	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-97
Tabel 2.84	Jumlah Pencari Kerja, Bursa Kerja dan Pengantar Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-98
Tabel 2.85	Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-99
Tabel 2.86	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.87	Partisipasi perempuan di lembaga Swasta Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2.88	Jumlah KDRT di Kabupaten Seruyan tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2.89	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.90	Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Seruyan tahun 2015-2020	II-103
Tabel 2.91	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Seruyan tahun 2015-2020	II-103

Tabel 2.92	Jumlah Pemohon Sertifikat yang Telah Diselesaikan Menurut Pendaftaran Pertama Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.93	Luas Tanah yang telah Dilaksanakan Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Jenis di Kabupaten Seruyan (m2) Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.94	Penanganan Sampah Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.95	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-106
Tabel 2.96	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-106
Tabel 2.97	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-107
Tabel 2.98	Persentase PKK Aktif Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2020	II-107
Tabel 2.99	Persentase Posyandu aktif Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2020	II-108
Tabel 2.100	Jumlah Bumdes/Bumdesma Aktif dan tidak Aktif Di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-109
Tabel 2.101	Jumlah Desa berdasarkan Status Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun 2019 – 2020	II-110
Tabel 2.102	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016 – 2020	II-110
Tabel 2.103	Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/ Terminal Bus Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-111
Tabel 2.104	Jumlah arus penumpang/barang yang terangkut angkutan umum Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2020	II-112
Tabel 2.105	Persentase Angkutan Darat Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-112
Tabel 2.106	Jumlah uji KIR angkutan umum Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2020	II-113
Tabel 2.107	Pemasangan Rambu-rambu Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-113
Tabel 2.108	Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-114
Tabel 2.109	Jumlah Surat kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2020	II-114
Tabel 2.110	Jumlah Radio/TV Nasional/Lokal di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2020	II-115

Tabel 2.111	Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015–2020	II-115
Tabel 2.112	Jumlah UKM Non BPR/LKM Di Kabupaten Seruyan 2015–2019	II-116
Tabel 2.113	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Di Kabupaten Seruyan 2015–2020	II-116
Tabel 2.114	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-117
Tabel 2.115	Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-117
Tabel 2.116	Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-117
Tabel 2.117	Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-118
Tabel 2.118	Buku Kabupaten Dalam Angka di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.119	Buku PDRB Kabupaten Seruyan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.120	Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Seruyan 2015-2020	II-120
Tabel 2.121	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Seruyan 2015-2020	II-120
Tabel 2.122	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Seruyan 2015-2020	II-120
Tabel 2.123	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-121
Tabel 2.124	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 –2020	II-122
Tabel 2.125	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 –2020	II-122
Tabel 2.126	Pengelolaan Arsip secara baku di Kabupaten Seruyan Tahun 2016 –2020	II-123
Tabel 2.127	Produksi Perikanan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-124
Tabel 2.128	Konsumsi ikan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-125
Tabel 2.129	Laju pertumbuhan produksi perikanan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-125
Tabel 2.130	Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-125
Tabel 2.131	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-126

Tabel 2.132	Cakupan bina kelompok petani Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-126
Tabel 2.133	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-127
Tabel 2.134	Kerusakan Kawasan Hutan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-127
Tabel 2.135	Produksi dan Pemakaian Listrik di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-128
Tabel 2.136	Rasio elektrifikasi Di Kabupaten Seruyan sampai dengan akhir Tahun 2020	II-129
Tabel 2.137	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-130
Tabel 2.138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-130
Tabel 2.139	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-131
Tabel 2.140	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-132
Tabel 2.141	Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-133
Tabel 2.142	Nilai SAKIP Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2019	II-134
Tabel 2.143	Jumlah Informasi Manajemen Pemda di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-135
Tabel 2.144	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015–2020	II-136
Tabel 2.145	Angka Kriminalitas di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-137
Tabel 2.146	Rasio Ketergantungan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015–2020	II-138
Tabel 2.147	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan Tahun 2012-2020	II-140
Tabel 2.148	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan Tahun 2012-2020	II-142
Tabel 2.149	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	II-156
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-4

Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-5
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-6
Tabel 3.5	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-7
Tabel 3.6	Pembiayaan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-9
Tabel 3.7	Neraca Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-11
Tabel 3.8	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-20
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-22
Tabel 3.10	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-23
Tabel 3.11	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-24
Tabel 3.12	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-25
Tabel 3.13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-26
Tabel 3.14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020	III-27
Tabel 3.15	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun Berkenaan Tahun 2016-2020	III-28
Tabel 3.16-A	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2020	III-30
Tabel 3.16-B	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2023	III-32
Tabel 3.17	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2018-2023	III-34
Tabel 3.18-A	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2020	III-35
Tabel 3.18-B	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2023	III-36
Tabel 3.19	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	III-38
Tabel 3.20	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Saruyan Tahun Anggaran 2019-2023	III-40
Tabel 4.1	Keterkaitan Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah Aspek Sosial Budaya	IV-21
Tabel 4.2	Keterkaitan Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah Aspek Perekonomian	IV-27

Tabel 4.3	Keterkaitan Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah Aspek Infrastuktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	IV-29
Tabel 4.4	Sustainable Development Goals	IV-32
Tabel 4.5	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025	IV-51
Tabel 4.6	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahap Ketiga dan Keempat	IV-58
Tabel 4.7	Alternatif Skenario dan Rekomendasi pencapaian TPB terkait Daya Dukung dan Daya Tampung	IV-80
Tabel 4.8	Alternatif Skenario dan Rekomendasi dengan Upaya Tambahan	IV-83
Tabel 4.9	Capaian Indikator TPB Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2020	IV-89
Tabel 4.10	Identifikasi RPJMD Daerah Lain	IV-96
Tabel 4.11	Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	IV-100
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	V-7
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	V-8
Tabel 5.3	Kesesuaian dan konsistensi visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan terhadap visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	V-12
Tabel 5.4	Kesesuaian dan konsistensi visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan terhadap visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	V-14
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	VI-7
Tabel 6.3-A	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018-2020	VI-28
Tabel 6.3-B	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2023	VI-47
Tabel 7.1-A	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan 2018-2020	VII-2
Tabel 7.1-B	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan 2021-2023	VII-3

Tabel 7.2-A	Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Seruyan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2020	VII-4
Tabel 7.2-B	Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Seruyan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2023	VII-70
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	VIII-2
Tabel 8.2	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	VIII-3
Tabel 8.3	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	VIII-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Seruyan	II-2
Gambar 2.2	Peta status ketersediaan air (a) dan pangan (b) tahun 2016	II-6
Gambar 2.3	Peta komposisi status hutan berdasarkan fungsinya	II-9
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-34
Gambar 2.5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2016-2020	II-35
Gambar 2.6	Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB) di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-36
Gambar 2.7	Perbandingan Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB) Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2019	II-37
Gambar 2.8	Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-39
Gambar 2.9	Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2018	II-40
Gambar 2.10	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-42
Gambar 2.11	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2020	II-43
Gambar 2.12	Perkembangan IPM di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020	II-44
Gambar 2.13	Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2020	II-45
Gambar 2.14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-51
Gambar 2.15	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2020	II-51
Gambar 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-53

Gambar 2.17	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2020	II-53
Gambar 2.18	Estimasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kab. Seruyan Tahun 2016-2020	II-75
Gambar 4.1	Persentase Perusahaan yang Mengurangi Pegawai di Masa Pandemi	IV-10
Gambar 4.2	Sektor Terdampak Covid-19 Berdasarkan Turunnya Permintaan	IV-11
Gambar 4.3	Persentase Perusahaan yang Mengalami Penurunan Pendapatan di Kalimantan Tengah	IV-12
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Seruyan Tahun Tahun 2019-2023	VI-12
Gambar 6.2	Peta Kawasan Strategis	VI-14
Gambar 6.3	Pola Ruang (Pengembangan Kawasan Ekonomi)	VI-16
Gambar 6.4	Struktur Ruang (Rencana Pengembangan Infrastruktur)	VI-26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan daerah, dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan. Penyusunan perencanaan yang terarah dapat mewujudkan pembangunan lebih berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan maupun sasaran pembangunan daerah, dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tingkat daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan mutlak tersedia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan Tahap III dan Tahap IV RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025, serta penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Seruyan YULHAIDIR dan Wakil Bupati Seruyan Hj. ISWANTI, SE, MM, yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.

Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah terjadi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut terdapat point penting terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan evaluasi RPJMD guna penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 pada Tahun 2021 sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang baru. Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023. Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 adalah hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD 2018-2023 yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, berimplikasi pada perubahan Pengelolaan Keuangan daerah dan Perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Adanya pandemi COVID-19 yang membutuhkan Strategi dan Kebijakan di daerah yang memerlukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam penanganan pandemi maupun dampak dari pandemi tersebut.
4. Hasil evaluasi atas pelaksanaan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 bahwa:
   a. Target pendapatan daerah perlu ditinjau kembali terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena persentase capaian pendapatan daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 cukup rendah.
   b. Perlu penyesuaian program baik nama program maupun jumlah program yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
   c. Perlunya dilengkapi data-data yang lebih komprehensif khususnya data capaian indikator kinerja utama dan data capaian penyelenggaraan urusan pemerintah yang menggambarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah.

Hasil dari evaluasi dokumen RPJMD yang telah dilaksanakan, menganjurkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Program sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat bahwa perubahan RPJMD ini dilakukan pada tahun 2021 dimana masih tersisa dua tahun masa jabatan di dalamnya, dengan demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2018-

2023 harus berpedoman kepada perubahan RPJMD dengan mengacu tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. RPJMD ini bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Maka RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan serta landasan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Seruyan pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Seruyan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan antara lain memperhatikan RPJMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Selanjutnya, sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan bersama kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus membangun sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan

berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Seruyan dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025. Secara lebih detail telaahan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang tahap IV disajikan pada Bab IV.

Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan Penetapan Perda RPJMD nanti, maka dokumen ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah kabupaten. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD tahunannya. Dalam pelaksanaannya, RKPD menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Seruyan dengan RTRW Kabupaten Seruyan dan KLHS RPJMD

Berdasarkan amanat Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023. KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Selain menelaah beberapa dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diuraikan diatas, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya. Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya yang memiliki keterhubungan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 adalah untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta permasalahan/isu strategis pembangunan. Hasil perubahan RPJMD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Seruyan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Perubahan RPJMD sebagai pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati Seruyan didalam pelaksanaan pembangunan pada periode jabatan;
2. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Seruyan yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Perubahan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. Perubahan RPJMD sebagai upaya mempertajam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ditingkat daerah dengan merasionalisasi indikator kinerja serta merestrukturisasi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
5. Perubahan substansi RPJMD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 terdiri dari 9 (Sembilan) bab yang saling terkait, meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

Memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Memuat perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian pembangunan periode RPJMD lalu, serta isu-isu strategis daerah 5 (lima) tahun selanjutnya.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan periode 2018-2023.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab IX. Penutup

Memuat pengaturan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan kondisi daerah dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah terkini Kabupaten Seruyan. Kondisi daerah digambarkan dengan dukungan berbagai data dan informasi yang disajikan dalam 4 (empat) Aspek, yaitu: Aspek Geografi dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah ± 15.211,62 Km^2 atau ± 11,6% dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan jumlah dan nama serta luas kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km^2)	Persentase terhadap luas Kabupaten
1.	Seruyan Hilir	10	4.320,10	28.40
2.	Seruyan Hilir Timur	6	1.323,41	8,70
3.	Danau Sembuluh	8	1.442,06	9,48
4.	Seruyan Raya	5	806,22	5,30
5.	Hanau	7	509,59	3,35
6.	Danau Seluluk	6	543,05	3,57
7.	Seruyan Tengah	20	1.245,83	8,19
8.	Batu Ampar	9	620,63	4,08
9.	Seruyan Hulu	20	3.024,07	19,88
10.	Suling Tambun	9	1.376,65	9,05
	Seruyan	**100**	**15.211,62**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Seruyan 2019 - 2039

Peta wilayah Kabupaten Seruyan disajikan pada gambar berikut ini.

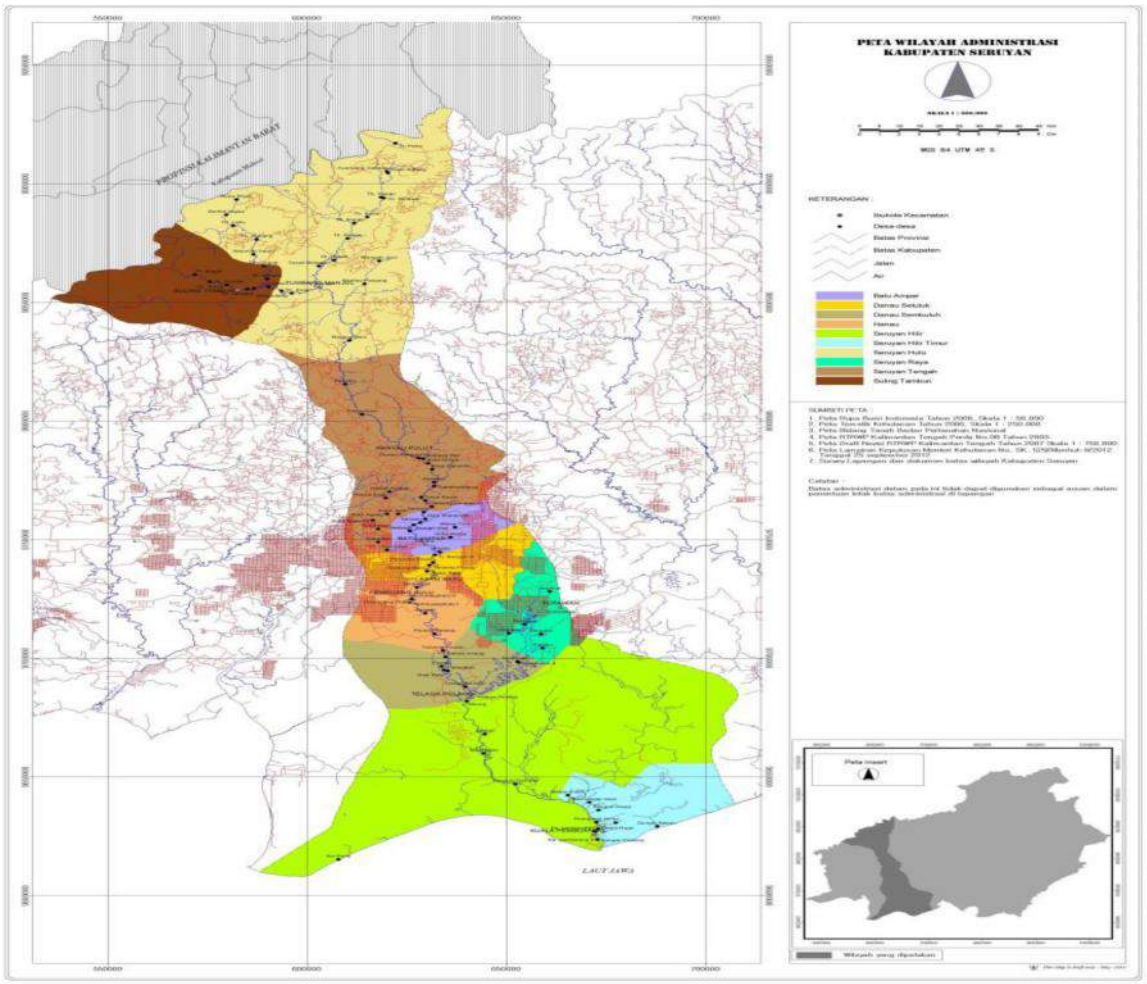

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Seruyan

Sumber: RTRW Kabupaten Seruyan 2019 - 2039

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomi Kabupaten Seruyan terletak antara 0°47’ - 3°32’ Lintang Selatan dan 111°19’ - 112°51’ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau.

Dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan terletak di tengah-tengah sehingga hal ini merupakan posisi geostrategis. Dengan posisi Kabupaten Seruyan yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kotawaringin Timur, posisi geostrategis ini akan meningkatkan keunggulan komparatif pelabuhan laut Segintung yang dimiliki Kabupaten Seruyan, terutama akan menarik perekonomian dari kabupaten yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Seruyan.

2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Seruyan memiliki topografi bervariasi membujur secara vertikal dari selatan ke utara. Wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan sampai bagian tengah, dan melebar dari arah Timur ke Barat meliputi kawasan pantai dan dataran rendah dari selatan ke tengah dengan kemiringan 0–1% terletak antara 0–4 m dari permukaan laut. Sedangkan wilayah bagian tengah sampai utara merupakan dataran tinggi yang berbukit.

Berdasarkan peta Geologi 1:250.000 oleh Pusat Penelitian Pengembangan Geologi, Kabupaten Seruyan memiliki 12 (duabelas) formasi Geologi, yaitu:

1. Endapan Aluvial (Qa) berumur holosen
2. Endapan Rawa (Qar) berumur holosen
3. Endapan Rawa (Qs) berumur holosen
4. Endapan Sungai (Qas) berumur holosen
5. Formasi Dahor (TQd) berumur pliosen-miosen
6. Intrusi Sintang (Toms) berumur ologosen akhir
7. Batuan Gunung api kerabai (Kuk) berumur kapur atas
8. Granit Mandahan (Kgm) berumur kapur
9. Formasi Granit Sukadana (Kus) berumur kapur atas
10. Tonait Sepauk (Kls) berumur kapur atas
11. Formasi Kuayan (TRvk) berumur trias
12. Batuan Malihan Pinoh (PzTRp) berumur perem awal

Dari 12 formasi batuan diatas terdapat 4 formasi batuan yang rawan erosi dan tanah longsor. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik unsur batuan penyusun formasi tersebut, dalam hal ini jenis batuan, tingkat permeabilitas, kekompakan, ukuran butir, dan mineral penyusunnya. Formasi atau satuan batuan tersebut adalah Endapan Aluvial (Qa), Endapan Rawa (Qar), Endapan Sungai (Qs) dan Formasi Dahor (TQd).

Selain hal tersebut perlu diperhatikan struktur geologi yang mempengaruhi formasi batuan di Kabupaten Seruyan. Ada beberapa formasi dibagian utara kabupaten Seruyan yang didominasi oleh struktur lipatan dan sesar yang berpengaruh kuat terhadap tingkat kerawanan bencana tanah longsor dan banjir.

2.1.1.4 Hidrologi

Secara umum pola sungai di Kabupaten Seruyan adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Sungai Seruyan dengan panjang sekitar 350 km, merupakan sungai utama yang mengalir dari pegunungan Schwaner di utara menuju Laut Jawa di bagian Selatan. Dari Sungai Seruyan ada 6 (enam) buah anak sungai yang besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai sarana transportasi. Keenam anak sungai tersebut adalah Danau Sembuluh, Kuala Besar, Manjul, Salau, Pukun, dan Kale. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta irigasi persawahan. Selain air sungai penduduk juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman air tanah berkisar antara 1 sampai 7 meter pada sistem lahan dataran seperti di Kecamatan Seruyan Hilir.

Sistem jaringan sumber daya air salah satunya terdiri atas Sumber air yang meliputi Danau yang tersebar di seluruh kecamatan yaitu Danau Sembuluh, Danau Bayuku, Danau Rangas, Danau Bahaya, Danau

Batu Hirang, Danau Seribu, Danau Alam, Danau Segintung, Danau Tanjung Baru, Danau Baung, Danau Laki Bini, Danau Tengkorak, Danau Hantasan Samut, Danau Sari, Danau Kumis, Danau Bogam, Danau Rasau Bungkuk, Danau Empat Belas, Danau Tongkang, Danau Gajah Mina, Danau A'as, Danau Seluluk, Danau Panjang, Danau Pinggir Padang, Danau Burung, Danau Bakung, Danau Marma, Danau Kepala Buaya, Danau Batakan, Danau Pondok Paikat, Danau Tampudau, Danau Jajangkit, Danau Mukat, Danau Bangaluan, Danau Kumpai Panjang, Danau Silip, Danau Simpang Pipih, Danau Belanti, Danau Baru, Danau Parang Batang, Danau Gelanggang, Danau Jahitan dan Danau Papudak.

Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023, secara keseluruhan kemampuan ekosistem menyediakan air di Kabupaten Seruyan per tahun adalah 27.035 juta m^3. Jumlah ini masih lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan air per tahun untuk rumah tangga (4juta m^3) dan irigasi pertanian dan perkebunan (8.013 juta m^3). Namun, distribusi secara spasial menunjukkan beberapa wilayah memiliki kebutuhan air untuk irigasi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ketersediaan air di daerah tersebut. Hal ini secara spesifik dapat ditemui di wilayah-wilayah dengan tutupan lahan perkebunan, pertanian dan tambak. Diperlukan infrastruktur irigasi yang baik untuk meningkatkan penyediaan air di bagian tengah Kabupaten Seruyan yang didominasi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, bagian utara harus tetap dijaga tutupan hutannya sehingga dapat terus berfungsi sebagai area resapan air wilayah Kabupaten Seruyan.

Gambar 2.2
Peta status ketersediaan air (a) dan pangan (b) tahun 2016

(a)

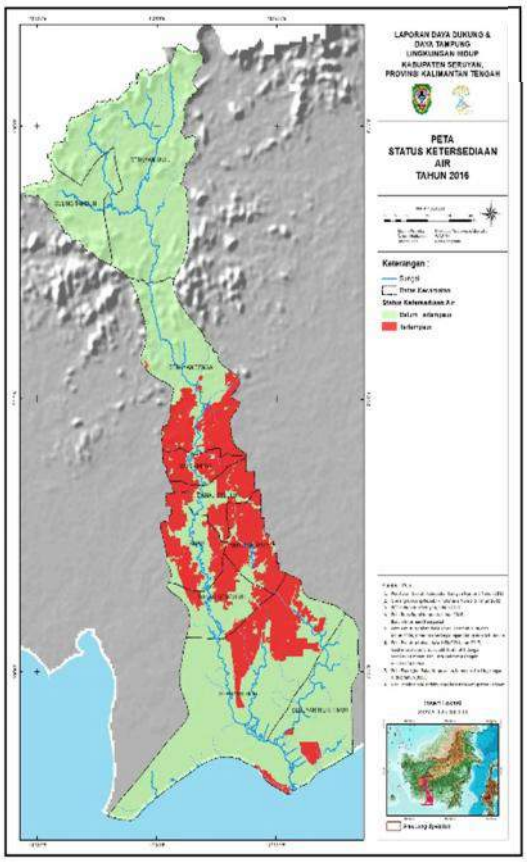

(b)

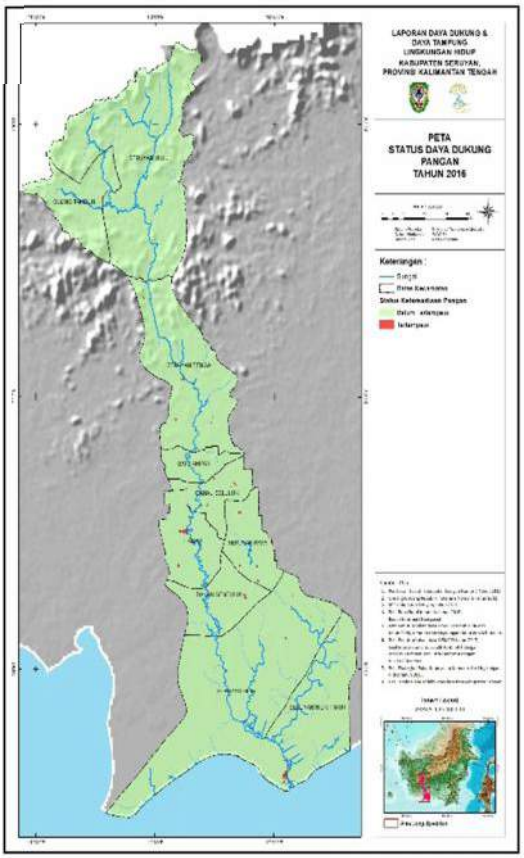

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Seruyan 2018 - 2023

2.1.1.5 Klimatologi

Kabupaten Seruyan termasuk kategori Tipe Iklim A yaitu Sangat Basah. Hal itu tergambar dari hasil perhitungan perhitungan jumlah bulan-bulan terkering dan bulan-bulan basah setiap tahun kemudian dirata-ratakan, yang hasil nilainya yaitu sebesar 0,124 (Q = 0,124). Menurut RePPProT Curah di Kabupaten Seruyan cukup tinggi dengan curah hujan tahunan terendah 2.300 mm/tahun dan tertinggi mencapai 4.300 mm/tahun. Jumlah bulan basah terendah berkisar dari 0-5 bulan dalam setahun dan jumlah bulan basah tertinggi berkisar antara 6-11 bulan. Sedangkan jumlah bulan kering relatif kecil yaitu 0–1 bulan dalam setahun dan jumlah bulan kering tertinggi berkisar 5–6 bulan dalam setahun. Rata-rata suhu di Kabupaten Seruyan yaitu 20^{o}–32^{o}C dengan kelembaban relatif (RH) rata-rata 75%.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Seruyan meliputi:

1. Pertanian

   Tahun 2020 luas lahan pertanian secara keseluruhan adalah 15.617 Ha, yang terdiri dari lahan pasang surut seluas 798 ha, lahan rawa/lebak 978 ha, lahan ladang/huma 9.045 ha dan lahan tadah hujan 4.796 ha, dengan total produksi 18.797,64 ton. Potensi padi sawah dengan luas panen 3.576 Ha dan produksi 9.215,35 ton. Potensi padi lahan kering dengan luas panen 3.105 Ha, dan produksi 8.035,74 ton. Tanaman jagung dengan luas panen 237 Ha, produksi 613,12 ton. Luas panen kacang tanah 9 Ha dan produksi 9,94 ton. Luas panen ubi kayu 44 Ha, produksi 681,56 ton, dan luas panen ubi jalar 22 Ha dan produksi 241,93 ton.

2. Perkebunan

   Lahan perkebunan tahun 2020 terutama karet yang luas arealnya mencapai 16.475 Ha, kelapa sawit seluas 649.954,50 Ha, kelapa dalam seluas 1.873 Ha, kopi robusta seluas 222 Ha, jambu mente seluas 134,50 Ha, aren 84 Ha, dan lada seluas 18 Ha. Untuk perkebunan besar swasta berupa perkebunan kelapa sawit sebanyak 37 unit dari jumlah tersebut 31 unit sudah operasional, dengan rincian 20 unit di Kabupaten Seruyan, 11 unit di lintas kabupaten dan 6 unit belum operasional.

3. Hutan

   Luas hutan di Kabupaten Seruyan berdasarkan RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2018 terbagi dalam hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove dan hutan rawa primer seluas 745.021,88 Ha atau 48,96 % dari luas Kabupaten Seruyan yang terdapat pada semua kecamatan. Komposisi status hutan berdasarkan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 antara lain :

- Hutan Lindung tersebar di Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun dengan luas kurang lebih 30.788,42 hektar.
- Hutan produksi tetap (HP) yang tersebar di Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Tengah dan Kecamatan Seruyan Hulu dengan luas kurang lebih 357,722,32 hektar.
- Hutan produksi terbatas (HPT) yang tersebar di Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun dengan luas kurang lebih 417,924,09 hektar.
- Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tersebar di Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan luas kurang lebih 259.384,25 hektar
- Kawasan sempadan pantai berada di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur dengan luas kurang lebih 1.263,51 Km.
- Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 24.248,55 hektar
- Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas kurang lebih 235.988,40 hektar, Terdapat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Hanau;
- Kawasan mangrove dengan luas kurang lebih 9.195,95 hektar terdapat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- Kawasan Reservat Danau Sembuluh dengan luas kurang lebih 2.385,65 hektar.

Gambar 2.3
Peta komposisi status hutan berdasarkan fungsinya

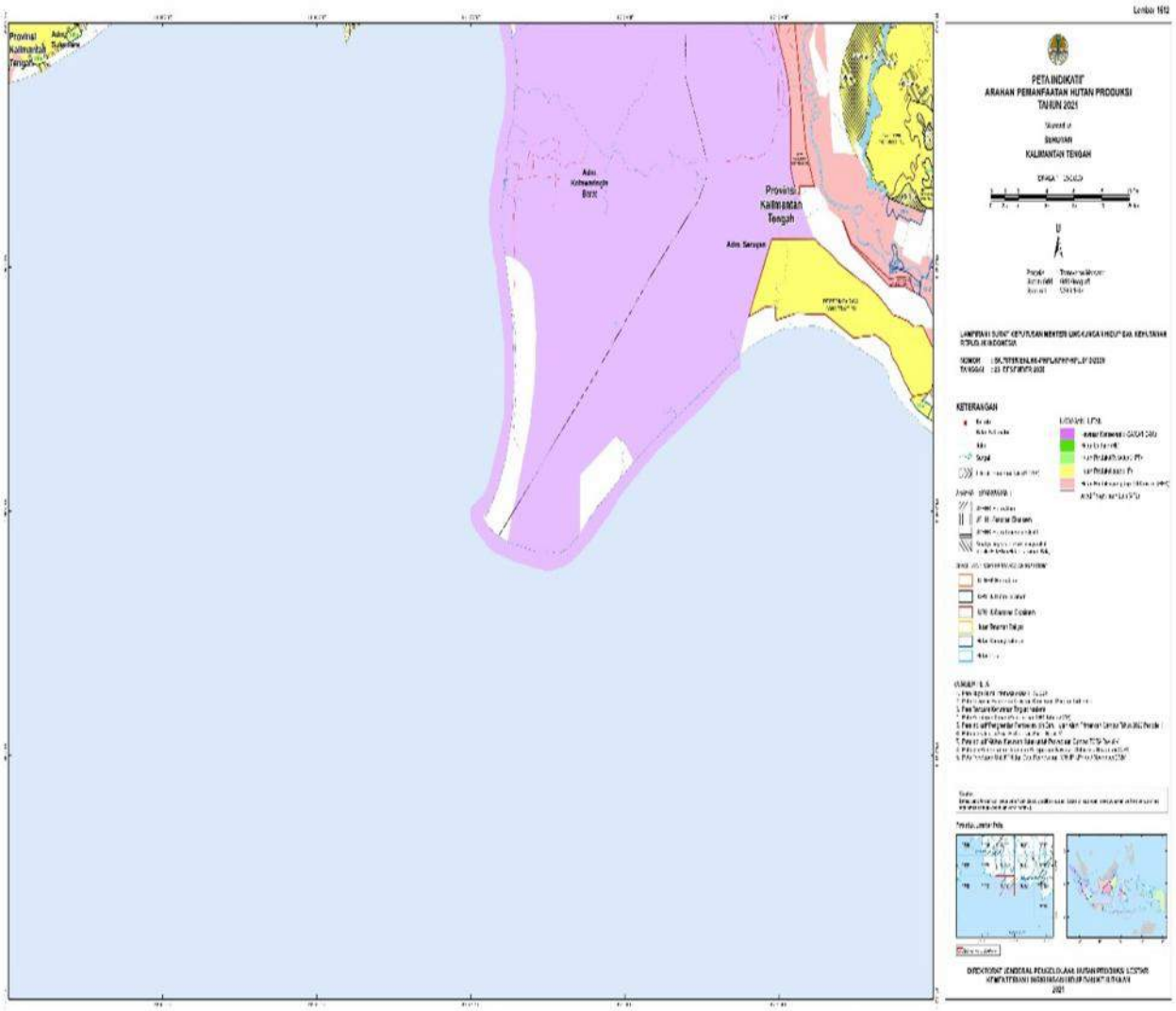

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021

4. Perikanan

   Produksi perikanan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari hasil perikanan budidaya sebesar 14.457,88 ton/tahun yang terdiri dari budidaya air tawar dan budidaya air payau, serta hasil dari perikanan tangkap sebesar 20.819,04 ton/tahun terdiri dari penangkapan perairan laut dan perairan umum daratan pada Tahun 2020.

5. Peternakan

   Pada tahun 2020 peternakan di Kabupaten Seruyan populasi yang terbanyak adalah sapi potong sebanyak 8.796 ekor, ternak kambing

sebanyak 5.488 ekor, ternak babi sebanyak 4.741 ekor dan kerbau 36 ekor. Semua populasi ternak ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun. Sedangkan populasi unggas sebagian besar adalah berupa ayam buras sebanyak 90.420 ekor, dan itik 19.151 ekor. Semua populasi unggas ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

6. Pertambangan

   Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat menjanjikan, yang telah berproduksi adalah bahan galian Zircon disusul dengan bahan galian biji besi. Untuk bahan galian yang masih dalam penyidikan dan penelitian antara lain emas diperkirakan terdapat di bagian utara dan timur, batubara diperkirakan bagian sebelah timur dan barat Kabupaten Seruyan, uranium di bagian timur Kabupaten Seruyan, minyak bumi diperkirakan di lepas pantai sebelah selatan Kabupaten Seruyan, Nikel dan Kaolin sebelah utara Kabupaten Seruyan.

7. Pariwisata

   Pariwisata di Kabupaten Seruyan terdapat wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Wisata alamnya yang ada di Kabupaten Seruyan berjumlah 74 lokasi diantaranya Pesona wisata Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Siamuk, Pantai Sandurian di Kecamatan Seruyan Hilir, Kawasan wisata Pantai Sungai Bakau di Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Arung Jeram di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. Air Terjun di Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun yang memiliki ± 160 riam. Wisata Danau Sembuluh yang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh. Wisata Budaya berada di empat lokasi/desa meliputi Pesta Tewah di Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), makam keramat Datu Wali

Sungai Pujung, Batu Doho Desa Pangke dan Situs Tiang Pantar di Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah. Dan wisata sejarah ditampilkan di lima lokasi yaitu meriam pengantin di Desa Sembuluh, makam Keramat Rangkang di Desa Terawan, Situs Tangga Batu, dan tugu perjuangan Sepan Biha di Kecamatan Seruyan Hulu.

8. Industri kecil dan menengah

   Industri kecil dan menengah yang berkembang di Kabupaten Seruyan yang tergabung dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berjumlah 19.812 buah, terdiri dari usaha mikro sebanyak 18.476 buah, usaha kecil 1.236 buah, dan usaha menengah sebanyak 100 buah. Dengan tenaga kerja yang terlibat sebanyak 46.594 orang, dan jenis usaha meliputi jasa, industri pengolahan, perdagangan, perkebunan, peternakan, dan simpan pimjam. Koperasi yang ada di Kabupaten Seruyan berjumlah 272 unit, terbanyak adalah Koperasi Perkebunan 90 unit, Koperasi Serba Usaha 83 unit, Koperasi Karyawan 26 unit, KUD 19 unit, dan KPRI 13 unit. Sarana perdagangan meliputi pasar tradisional 27 unit, dan pasar daerah satu unit.

9. Fasilitas Umum dan Sosial

   Pembangunan fasilitas umum dan sosial berada di pusat desa/kelurahan, ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten. Di Kota Kuala Pembuang diproyeksikan sesuai dengan standar sebuah kota modern lengkap dengan:

   a) Pembangunan fasilitas umum seperti; Sport Center, Terminal Angkutan Umum, Taman.
   b) Rumah Ibadah.
   c) Rumah Sakit.
   d) Kawasan pendidikan.
   e) Kawasan Bisnis (Business Center) seperti Kawasan perkantoran, pasar, Lembaga Perbankan (BRI, BPD, BNI, Bank Mandiri).

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Seruyan, meliputi:

1. Potensi Bencana

   Untuk wilayah Kalimantan Tengah termasuk Kabupaten Seruyan, potensi rawan bencana terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor, bencana banjir dan kebakaran hutan, lahan dan gambut. Berdasarkan karakteristik penyebab bencana, dapat diidentifikasi kawasan rawan bencana tersebut sebagai berikut:

   a. Kawasan rawan bencana tanah longsor

      Pada bagian utara dan tengah Kabupaten Seruyan tersebar di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Seluluk dan Kecamatan Hanau; berupa potensi bencana longsor lereng dan longsor tebing sungai yang pada umumnya sudah dihuni sebagai kawasan pemukiman (terbangun).

   b. Kawasan kebakaran hutan, lahan dan gambut

      Bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut kerap terjadi di Kabupaten Seruyan, terdapat sejumlah titik kebakaran hutan lahan dan gambut yang tersebar di seluruh Kecamatan. Kawasan rawan kebakaran hutan/lahan adalah kawasan yang sebelumnya telah terjadi kebakaran (bekas kebakaran) dan lokasi spot-nya tersebar pada kawasan bergambut yang tersebar di Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Hanau, Batu Ampar dan Seruyan Tengah. Oleh karena itu usaha pengelolaan kawasan rawan kebakaran hutan, lahan dan gambut perlu diwaspadai.

   c. Kawasan rawan bencana banjir

      Kawasan rawan bencana banjir berupa banjir genangan dan banjir bandang (*flash flood*). Potensi banjir bandang hanya dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, khususnya daerah-daerah di sekitar sungai besar meliputi Sungai Seruyan. Sedangkan banjir genangan berpotensi terjadi di semua wilayah Kecamatan kecuali Kecamatan Seruyan Hulu.

d. Kawasan gelombang pasang dan abrasi

Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Seruyan. Sedangkan kawasan rawan abrasi berpotensi terjadi pada garis pantai di pesisir pantai. Kawasan rawan abrasi pantai di Kabupaten Seruyan terdapat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur khususnya sekitar pesisir pantai.

Tabel 2.2
Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Seruyan

No	Kawasan Rawan Bencana	Lokasi/Kecamatan	Luas (Ha)/Panjang (km)
I.	Longsor		
1.	Zona A	Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah	195.231,50 Ha
2.	Zona B	Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah	44.157,03 Ha
3.	Zona C	Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah	341.912,77 Ha
II.	A. Banjir		
	Bandang	Seruyan Hulu	172.472,37 Ha
	B.Genangan/Luapan		
	1. Pasang Surut A1	Seruyan Hilir	120.952,09 Ha
	2. genangan A2	Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah	27.885,90 Ha

Sumber: RTRW Kabupaten Seruyan 2019 – 2039

2. Tingkat Ancaman

a. Kabupaten Seruyan memiliki indeks ancaman bencana banjir tinggi dan penduduk terpapar tinggi, sehingga memiliki tingkat ancaman bencana banjir TINGGI.

b. Indeks ancaman kebakaran hutan, lahan dan gambut tinggi dan penduduk terpapar tinggi, sehingga tingkat ancaman kebakaran hutan, lahan dan gambut adalah TINGGI.

c. Indeks ancaman kebakaran tinggi dan penduduk terpapar sedang sehingga tingkat ancaman bahaya kebakaran gedung dan rumah adalah TINGGI.

d. Indeks ancaman bencana cuaca buruk (ekstrim) tinggi dan penduduk terpapar sedang, sehingga tingkat ancaman bencana cuaca buruk (ekstrim) adalah TINGGI.
e. Indeks ancaman kekeringan tinggi dan indeks penduduk terpapar sedang, sehingga tingkat ancaman bahaya kekeringan adalah TINGGI.
f. Indeks ancaman bahaya tanah longsor rendah dan indeks penduduk terpapar rendah, sehingga tingkat bahaya ancaman tanah longsor adalah RENDAH.
g. Indeks ancaman kegagalan teknologi tinggi, penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahaya bencananya SEDANG.
h. Indeks ancaman wabah penyakit rendah dan penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahayanya RENDAH.
i. Indeks ancaman konflik sosial tinggi, dan penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahayanya SEDANG

3. Tingkat Kerentanan
   a. Pengkajian risiko bencana banjir di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitar, kerusakan hutan dan lahan serta kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir tersebut adalah:
      a) 107.123 jiwa penduduk yang tinggal/beraktifitas disekitar wilayah pesisir dengan penduduk terpapar sebesar 3.180 jiwa.
      b) 25.356 Ha lingkungan akan rusak
      c) 716 milyar kerugian ekonomi kerugian daerah
   b. Pengkajian resiko bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitar, kerusakan lahan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut tersebut adalah:
      a) 151.065 jiwa penduduk yang tinggal /beraktifitas wilayah Kabupaten Seruyan
      b) 8,056 Ha lingkungan akan rusak

c) 14 milyar kerugian ekonomi

c. Pengkajian resiko bencana kebakaran gedung dan rumah di wilayah Kabupaten Seruyan miliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan gedung/rumah dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:
   a) 196 jiwa penduduk terkena dampak
   b) 49 unit rumah rusak berat
   c) Kerugian daerah rendah

d. Pengkajian resiko bencana cuaca buruk (ekstrim) di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan ringan terhadap gedung/rumah dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:
   a) 2.536 jiwa penduduk terkena dampak
   b) Kerugian daerah rendah

e. Pengkajian resiko bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitarnya, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kekeringan adalah:
   a) 12.455 jiwa penduduk terkena dampak
   b) 492 Ha kerusakan lingkungan
   c) 376 milyar kerugian daerah

f. Pengkajian resiko bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat kecil, baik terhadap penduduk karena jauh dari pemukiman, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor adalah:
   a) Sangat kecil penduduk terkena dampak
   b) 4.009 Ha kerusakan lingkungan
   c) 175 juta kerugian daerah

g. Pengkajian resiko bencana kegagalan teknologi di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat kecil baik

terhadap penduduk karena jauh dari pemukiman, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kegagalan teknologi adalah:

a) Sangat kecil penduduk terkena dampak
b) Sungai Seruyan dan Danau Sembuluh
c) Penduduk disekitar pabrik

h. Pengkajian resiko bencana wabah penyakit di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat besar terhadap penduduk, terkait munculnya Pandemi Covid-19 sampai dengan bulan Maret 2021 berdasarkan data pantauan Covid-19 di Kabupaten Seruyan telah terkonfirmasi positif sebanyak 476 kasus, dengan total kesembuhan sejumlah 461 orang dan meninggal sejumlah 4 orang, termasuk kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana wabah penyakit adalah:

a) Sangat kecil penduduk terkena dampak
b) Terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi

i. Pengkajian resiko bencana konflik sosial di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sedang baik terhadap penduduk, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana konflik sosial adalah:

a) Sangat kecil penduduk terkena dampak
b) Lahan yang kena konflik
c) Penduduk/pemilik lahan

4. Tingkat Kapasitas

Berdasarkan capaian-capaian penanggulangan bencana selama ini, indeks ketahanan daerah berada pada level 2, yaitu daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan resiko bencana

dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.

5. Berdasarkan analisis terhadap indeks tingkat ancaman, indeks kerugian, indeks penduduk terpapar dan indeks kapasitas, dapat diperoleh tingkat resiko bencana di Kabupaten Seruyan, yaitu:
   a. bencana banjir tingkat resikonya tinggi
   b. bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut tingkat resikonya tinggi
   c. bencana kekeringan tingkat resikonya tinggi
   d. bencana cuaca buruk tingkat resikonya sedang
   e. bencana kebakaran gedung dan rumah tingkat resikonya rendah
   f. bencana tanah longsor tingkat resikonya rendah
   g. bencana konflik sosial tingkat resikonya tinggi
   h. bencana wabah penyakit tingkat resikonya tinggi
   i. bencana kegagalan teknologi tingkat resikonya rendah
   j. bencana prioritas yang terdapat di Kabupaten Seruyan adalah banjir, kebakaran hutan, lahan dan gambut, kekeringan dan konflik sosial.

2.1.3 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 sebanyak 151.065 jiwa. Penduduk di Kabupaten Seruyan terdiri dari 79.108 orang laki-laki dan 71.957 orang perempuan, atau dengan kata lain penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan, dengan nilai sex rationya mencapai 110 persen. Jika dibandingkan dari sepuluh kecamatan yang berada di Kabupaten Seruyan, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Seruyan Hilir yaitu sebanyak 36.169 orang, sedangkan penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Suling Tambun, yaitu hanya sekitar 2.877 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1. Seruyan Hilir	18.820	17.349	36.169	108
2. Seruyan Hilir Timur	5.256	4.814	10.070	109
3. Danau Sembuluh	6.557	5.884	12.441	111
4. Seruyan Raya	8.409	7.481	15.890	113
5. Hanau	9.760	8.891	18.651	110
6. Danau Seluluk	8.096	7.293	15.389	111
7. Seruyan Tengah	11.839	10.710	22.549	111
8. Batu Ampar	4.042	3.763	7.805	107
9. Seruyan Hulu	4.820	4.404	9.224	109
10. Suling Tambun	1.509	1.368	2.877	110
Kabupaten Seruyan	**79.108**	**71.957**	**151.065**	**110**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Ditinjau dari kepadatan penduduk, paling banyak terkonsentrasi di Kecamatan Hanau yaitu 36 orang/km^2 dan Kecamatan Danau Seluluk yaitu 28 orang/km^2. Kepadatan penduduk di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan/Desa/ Kelurahan di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

No.	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan*		Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/Km^2)
			Km^2	%	Jumlah	%	
1.	**SERUYAN HILIR**		**4.320,10**	**28,40**	**36.169**	**23,94**	**8**
	1	Kuala Pembuang I*	49,00	0,32	9.359	6,20	191
	2	Kuala Pembuang II*	74,00	0,49	11.225	7,43	152
	3	Pematang Limau	817,10	5,37	3.588	2,38	4
	4	Sungai Perlu	544,00	3,58	263	0,17	0
	5	Tanjung Rangas	680,00	4,47	2.564	1,70	4
	6	Muara Dua	475,00	3,12	723	0,48	2
	7	Jahitan	741,00	4,87	773	0,51	1
	8	Baung	882,00	5,80	1.548	1,02	2
	9	Persil Raya	14,00	0,09	3.096	2,05	221
	10	Sungai Undang	44,00	0,29	3.030	2,01	69
2.	**SERUYAN HILIR TIMUR**		**1.323,42**	**8,70**	**10.070**	**6,67**	**8**
	1	Mekar Indah	16,00	0,11	876	0,58	55
	2	Halimaung Jaya	15,00	0,10	719	0,48	48
	3	Bangun Harja	15,00	0,10	1.236	0,82	82
	4	Kartika Bhakti	24,00	0,16	1.753	1,16	73
	5	Pematang Panjang	1.120,42	7,37	4.328	2,86	4
	6	Sungai Bakau	133,00	0,87	1.158	0,77	9
3.	**DANAU SEMBULUH**		**1.442,06**	**9,48**	**12.441**	**8,24**	**9**
	1	Telaga Pulang	326,53	2,15	2.333	1,54	7
	2	Cempaka Baru	201,00	1,32	599	0,40	3
	3	Palingkau	132,00	0,87	195	0,13	1
	4	Ulak Batu	190,00	1,25	276	0,18	1
	5	Paren	93,00	0,61	497	0,33	5
	6	Banua Usang	233,53	1,54	919	0,61	4
	7	Sembuluh I	182,00	1,20	3.929	2,60	22
	8	Sembuluh II	84,00	0,55	3.693	2,44	44
4.	**SERUYAN RAYA**		**806,22**	**5,30**	**15.890**	**10,52**	**20**
	1	Terawan	206,22	1,36	3.475	2,30	17
	2	Selunuk	231,00	1,52	4.540	3,01	20
	3	Lanpasa	123,00	0,81	2.280	1,51	19
	4	Bangkal	144,00	0,95	4.435	2,94	31
	5	Tabiku	102,00	0,67	1.160	0,77	11

No.	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan*		Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/Km²)
			Km²	%	Jumlah	%	
5.	**HANAU**		**509,59**	**3,35**	**18.651**	**12,35**	**37**
	1	Tanjung Hanau	50,00	0,33	931	0,62	19
	2	Parang Batang	83,29	0,55	1.109	0,73	13
	3	Bahaur	76,00	0,50	1.313	0,87	17
	4	Pembuang Hulu I	64,00	0,42	6.049	4,00	95
	5	Pembuang Hulu II	98,00	0,64	5.304	3,51	54
	6	Derangga	58,00	0,38	3.420	2,26	59
	7	Paring Raya	80,30	0,53	525	0,35	7
6.	**DANAU SELULUK**		**543,05**	**3,57**	**15.389**	**10,19**	**28**
	1	Asam Baru	80,00	0,53	4.539	3,00	57
	2	Tanjung Hara	70,00	0,46	753	0,50	11
	3	Tanjung Paring	91,00	0,60	1.000	0,66	11
	4	Tanjung Rangas II	107,00	0,70	432	0,29	4
	5	Panimba Raya	70,00	0,46	212	0,14	3
	6	Rungau Raya	125,05	0,82	8.453	5,60	68
7.	**SERUYAN TENGAH**		**1.245,83**	**8,19**	**22.549**	**14,93**	**18**
	1	Gantung Pengayuh	59,88	0,39	1.012	0,67	17
	2	Teluk Bayur	67,97	0,45	367	0,24	5
	3	Suka Mandang	79,00	0,52	2.657	1,76	34
	4	Ayawan	74,00	0,49	1.832	1,21	25
	5	Mugi Panyuhu	50,00	0,33	350	0,23	7
	6	Bukit buluh	60,00	0,39	377	0,25	6
	7	Tumbang Bai	86,00	0,57	810	0,54	9
	8	Durian Tunggal	54,00	0,35	526	0,35	10
	9	Rantau Pulut*	83,00	0,55	3.366	2,23	41
	10	Pangke	247,51	1,63	547	0,36	2
	11	Penyumpa	114,50	0,75	282	0,19	2
	12	Sukorejo	9,13	0,06	1.675	1,11	183
	13	Bumi Jaya	9,13	0,06	1.571	1,04	172
	14	Suka Jaya	9,31	0,06	1.182	0,78	127
	15	Panca Jaya	9,23	0,06	537	0,36	58
	16	Tangga Batu	196,22	1,29	237	0,16	1
	17	Ringin Agung	9,18	0,06	892	0,59	97
	18	Batu Agung	9,31	0,06	1.621	1,07	174
	19	Suka Makmur	9,23	0,06	1.330	0,88	144
	20	Suka Maju	9,23	0,06	1.378	0,91	149
8.	**BATU AMPAR**		**620,63**	**4,08**	**7.805**	**5,17**	**13**
	1	Sebabi	83,00	0,55	620	0,41	7
	2	Sandul	97,98	0,64	2.035	1,35	21
	3	Kalang	88,98	0,58	478	0,32	5
	4	Derawa	92,88	0,61	400	0,26	4
	5	Wanatirta	9,93	0,07	1.268	0,84	128

No.	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan*		Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/Km²)
			Km²	%	Jumlah	%	
	6	Suka Mulya	9,13	0,06	1.066	0,71	117
	7	Durian Kait	92,74	0,61	743	0,49	8
	8	Sahabu	88,99	0,59	989	0,65	11
	9	Batu Manangis	57,00	0,37	206	0,14	4
9.	**SERUYAN HULU**		**3.024,07**	**19,88**	**9.224**	**6,11**	**3**
	1	Tumbang Bahan	92,00	0,60	407	0,27	4
	2	Tumbang Kalam	99,00	0,65	249	0,16	3
	3	Tusuk Belawan	60,00	0,39	391	0,26	7
	4	Marandang	164,00	1,08	196	0,13	1
	5	Tumbang Suei	169,00	1,11	229	0,15	1
	6	Tumbang Manjul	412,69	2,71	2.673	1,77	6
	7	Mojang Baru	491,69	3,23	306	0,20	1
	8	Rantau Panjang	242,00	1,59	494	0,33	2
	9	Mongoh Juoi	485,69	3,19	270	0,18	1
	10	Sapundu Hantu	62,00	0,41	329	0,22	5
	11	Tumbang Kubang	37,00	0,24	386	0,26	10
	12	Tumbang Laku	173,00	1,14	449	0,30	3
	13	Tanjung Paku	61,00	0,40	469	0,31	8
	14	Buntut Sapau	111,00	0,73	284	0,19	3
	15	Tumbang Taberau	57,00	0,37	173	0,11	3
	16	Riam Batang	49,00	0,32	279	0,18	6
	17	Tumbang Sepan	46,00	0,30	95	0,06	2
	18	Tumbang Setawai	49,00	0,32	229	0,15	5
	19	Tumbang Kasai	59,00	0,39	345	0,23	6
	20	Tumbang Darap	104,00	0,68	971	0,64	9
10.	**SULING TAMBUN**		**1.376,65**	**9,05**	**2.877**	**1,90**	**2**
	1	Tumbang Magin	203,16	1,34	199	0,13	1
	2	Tumbang Setoli	231,16	1,52	601	0,40	3
	3	Tumbang Hentas	169,00	1,11	57	0,04	0
	4	Tumbang Langkai	227,16	1,49	665	0,44	3
	5	Tumbang Salau	212,17	1,39	149	0,10	1
	6	Tumbang Gugup	72,00	0,47	597	0,40	8
	7	Rangkang Munduk	95,00	0,62	203	0,13	2
	8	Tanjung Tukal	156,00	1,03	144	0,10	1
	9	Rantau Betung	11,00	0,07	262	0,17	24
		JUMLAH	**15.211,62**	**100,00**	**151.065**	**100,00**	**10**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

2.1.4 Potensi Sumber Daya

Kabupaten Seruyan memiliki potensi daerah yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Sektor pertambangan dalam beberapa tahun ke belakang memiliki potensi yang besar, seperti batubara, zircon, biji besi, dan galena. Sejak moratorium Gubernur Kalimantan Tengah diterbitkan, seluruh perusahaan pertambangan, baik itu perusahaan yang saat ini sedang melangsungkan tahapan operasi produksi maupun eksplorasi, seluruhnya menghentikan aktivitas produksinya. Moratorium Gubernur tersebut menjadikan peranan sub sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Seruyan mengalami pertumbuhan negatif.

Potensi sumber daya Kabupaten Seruyan meliputi:

1. pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Seruyan Tahun 2020 terdiri dari lahan sawah 15.617 Ha dan bukan lahan sawah 1.308.566 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

- Lahan sawah :
  - Tadah hujan 4.796 Ha
  - Rawa pasang surut 798 Ha
  - Rawa lebak 978 Ha
  - Ladang / huma 9.045 Ha
- Lahan pertanian bukan sawah :
  - Tegal / kebun 61.293 Ha
  - Perkebunan 671.134 Ha
  - Ditanami pohon/hutan rakyat 19.733 Ha
  - Padang penggembalaan/padang rumput 10.234 Ha
  - Hutan Negara 12.550 Ha
  - Sementara tidak diusahakan 478.592 Ha
  - Lainnya (tambak, kolam, empang, dll) 55.030 Ha

Tabel 2.5
Hasil Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2020

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi sawah	3.576	9.215,35
2	Padi lahan kering / lading	3.105	8.035,74
3	Jagung	237	613,12
4	Kacang tanah	9	9,94
5	Ubi kayu	44	681,56
6	Ubi jalar	22	241,93
Jumlah		**6.993**	**18.797,64**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Seruyan

Pisang kepok merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman hortikultura di Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 hasil produksi pisang sebesar 91.073 kwintal dan yang menjadi penyumbang tingkat produksi pisang yang tinggi di Kabupaten Seruyan adalah pisang kepok tetapi hasil produksi pisang kepok di kabupaten seruyan mengalami tren penurunan tingkat produksi yang dipengaruhi adanya serangan penyakit pisang yang disebabkan oleh bakteri Blood Deases, pathogen ini menyerang pada batang buah dan daun, buah pisang yang terserang penyakit ini berwarna hitam dan lama-lama mengeras. Penularan pathogen ini melalui serangga, aliran air dan tanah yang sudah terinfeksi sebagai akibat dari adanya serangan bakteri pisang berdampak pada hasil produksi pisang.

2. Perkebunan

Kabupaten Seruyan merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan, terutama karet yang luas arealnya mencapai 16.475 Ha, kelapa sawit seluas 649.954,50 Ha, kelapa dalam seluas 1.873 Ha, kopi robusta seluas 222 Ha, jambu mente seluas 134,50 Ha, aren 84 Ha, dan lada seluas 18 Ha sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Hasil komoditi Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun 2020

No	Jenis Komoditas Perkebunan	Luas Areal (Hektar)	Luas Panen (Hektar)	Jumlah Produksi (Ton)	Produksi Per Hektar (Ton)
1	Kelapa sawit	649.954,50	21.334,89	44.218,78	2,07
2	Karet	16.475,00	8.601,00	4.039,95	0,47
3	Kelapa dalam	1.873,00	1.274,50	1.495,32	1,17
4	Kopi robusta	222,00	31,00	24,25	0,78
5	Jambu mente	134,50	4,00	3,60	0,90
6	Aren	84,00	27,00	7,33	0,27
7	Lada	18,00	15,00	2,66	0,18
Jumlah		**668.761,00**	**31.287,39**	**49.791,89**	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

Dari sisi produksi yang paling besar adalah kelapa sawit sebanyak 44.218,78 Ton, karet sebanyak 4.039,95 Ton, kelapa dalam sebanyak 1.495,32 Ton, kopi robusta 24,25 Ton, aren 7,33 Ton, jambu mente 3,60 Ton, dan lada sebanyak 2,66 Ton. Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas utama di Kabupaten Seruyan, hal tersebut tergambar dari jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang cukup banyak baik yang sudah berproduksi maupun pada tahap beroperasi, yaitu sebanyak 37 Perusahaan.

3. Perikanan

Sektor Perikanan di Kabupaten Seruyan sangat potensial, sebab komoditi yang dihasilkan berupa jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Adapun produksi budidaya perikanan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Produksi Budidaya ikan sesuai dengan jenis komoditi di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

No	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
1	Mas	57,12
2	Nila	1.614,56
3	Patin	2.804,47
4	Lele	29,51
5	Betutu	7,51
6	Jelawat	322,73

No	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
7	Belida	25,73
8	Bandeng	6.647,46
9	Gabus	49,47
10	Belanak	878,38
11	Udang Api-Api	2.020,94
12	Udang Windu	-
Jumlah		**14.457,88**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

4. Peternakan

Pada tahun 2020 peternakan di Kabupaten Seruyan populasi yang terbanyak adalah sapi potong sebanyak 8.796 ekor, ternak kambing sebanyak 5.488 ekor, ternak babi sebanyak 4.741 ekor dan kerbau 36 ekor. Semua populasi ternak ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun. Sedangkan populasi unggas sebagian besar adalah berupa ayam buras sebanyak 90.420 ekor, dan itik 19.151 ekor. Semua populasi unggas ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Seruyan Tengah, Batu Ampar, Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

Tabel 2.8
Jumlah Produksi Ternak sesuai dengan jenis komoditi di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

No	Nama Ternak	Populasi (Ekor)	
		2019	2020
1	Ayam Ras Pedaging	554.250	21.200
2	Ayam Buras	82.952	90.420
3	Ayam Ras Petelur	1.270	0
4	Babi	4.459	4.743
5	Domba	0	0
6	Itik	2.163	19.151
7	Kambing	5.522	5.487
8	Sapi Potong	8.586	8.796
9	Kerbau	36	34

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

Dari sektor peternakan yang mengalami perkembangan setiap tahunnya adalah populasi ayam buras dan sapi potong sehingga ayam buras dan sapi potong merupakan potensi yang sangat potensial di Kabupaten Seruyan.

5. Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat menjanjikan, yang telah berproduksi adalah bahan galian Zircon disusul dengan bahan galian biji besi. Untuk bahan galian yang masih dalam penyidikan dan penelitian antara lain emas diperkirakan terdapat di bagian utara dan timur, batubara diperkirakan bagian sebelah timur dan barat Kabupaten Seruyan, uranium di bagian timur Kabupaten Seruyan, minyak bumi diperkirakan di lepas pantai sebelah selatan Kabupaten Seruyan, Nikel dan Kaolin sebelah utara Kabupaten Seruyan.

6. Pariwisata

Ada beberapa ragam jenis wisata potensial yang dapat dikembangkan secara terpadu antara lain meliputi:

a. Wisata Alam
   1) Pesona wisata Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Seruyan Hilir yang dikenal dengan keindahan alam, flora dan faunanya yang mana salah satu flora yang ada diwilayah tersebut adalah orang utan.
   2) Kawasan wisata Pantai Gosong Buaya di Kecamatan Seruyan Hilir (Kelurahan Kuala Pembuang) dan wisata Sungai Bakau yang terletak Kecamatan Seruyan Hilir Timur (Desa Sungai Bakau).
   3) Taman Nasional Bukit Raya dengan keindahan dan keaslian hutan tropisnya di Kecamatan Seruyan Hulu.
   4) Arung Jeram di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.
   5) Air Terjun di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun yang memiliki ± 160 riam.

6) Wisata Danau Sembuluh yang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh.

b. Wisata Budaya

Pesta Tewah di Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.

c. Wisata Sejarah

Wisata ini yang sangat dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Seruyan antara lain:

1) Sandung, tempat menyimpan tulang-tulang orang yang sudah meninggal yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.
2) Sepundu (patung) timbal bagi arwah orang yang sudah meninggal dari suku dayak yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan PDRB

Struktur ekonomi yang dibangun oleh sektor-sektor produksi bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Sektor dengan nilai tambah yang besar menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah dan semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekonomi tersebut.

PDRB Kabupaten Seruyan atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 8.768,50 miliar rupiah yang merupakan total Nilai Tambah Bruto (NTB) dari seluruh lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Seruyan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Seruyan masih didominasi oleh kegiatan produksi sumber daya alam, yaitu pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang terlihat dari besarnya peranan kategori ini terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Seruyan. Besarnya sumbangan sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Seruyan menunjukan ekonomi Kabupaten Seruyan masih bergantung pada sumber daya alam (*recource base*).

Dua kategori dengan penyumbang terbesar pada PDRB tahun 2020 adalah Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 36,12 persen; serta Kategori Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,92 persen. Sementara itu, kategori lainnya berkontribusi terhadap PDRB dengan persentase kurang dari 10 persen. Kategori dengan peranan terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Seruyan adalah Kategori Pengadaan Listrik dan Gas; Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah; dan Kategori Jasa Perusahaan. Pada tahun 2016-2020 peranan kategori ini hanya berkisar antara 0,01 sampai 0,02 persen.

Data menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir kontribusi aktivitas non pertanian semakin meningkat dengan rata-rata sumbangsih per tahunnya mencapai lebih dari 60 persen. Secara kuantitas aktivitas ekonomi Kabupaten Seruyan di luar Pertanian digerakkan oleh sektor-sektor penghasil output barang seperti Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor. Sementara kontribusi sektor-sektor penghasil jasa seperti Jasa Perusahaan dan Informasi & Komunikasi tidak sebesar penghasil barang, namun perkembangannya cukup menggembirakan. Hal ini menunjukkan sektor-sektor penghasil jasa juga patut menjadi perhatian untuk dikembangkan lebih jauh.

Tabel 2.9
Jumlah dan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seruyan
Tahun 2016-2020

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha (PDRB)	2016		2017		2018		2019*		2020**	
	Jumlah	Distribusi	Jumlah	Distribusi	Jumlah	Distribusi	Jumlah	Distribusi	Jumlah	Distribusi
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.518,00	36,44	2.716,30	35,81	2.828,20	35,08	2.989,20	34,95	3.166,90	36,12
B. Pertambangan dan Penggalian	48,90	0,71	49,40	0,65	53,20	0,66	58,00	0,68	56,00	0,64
C. Industri Pengolahan	2.159,40	31,25	2.478,50	32,67	2.603,70	32,30	2.726,30	31,88	2.710,80	30,92
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,20	0,02	1,30	0,02	1,40	0,02	1,50	0,02	1,60	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,00	0,01	1,10	0,01	1,30	0,02	1,40	0,02	1,40	0,02
F. Konstruksi	668,50	9,68	684,50	9,02	723,10	8,97	767,40	8,97	749,60	8,55
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	420,70	6,09	471,70	6,22	537,30	6,67	584,00	6,83	569,60	6,50
H. Transportasi dan Pergudangan	136,40	1,97	153,20	2,02	178,70	2,22	193,00	2,26	211,60	2,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,70	1,20	90,40	1,19	97,20	1,21	103,10	1,21	106,00	1,21
J. Informasi dan Komunikasi	45,90	0,66	49,00	0,65	53,10	0,66	57,90	0,68	66,30	0,76

Lapangan Usaha (PDRB)	2016		2017		2018		2019*		2020**	
	Jumlah	Distribusi	Jumlah	Distribusi	Jumlah	Distribusi	Jumlah	Distribusi	Jumlah	Distribusi
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	66,20	0,96	70,90	0,93	74,60	0,92	80,40	0,94	88,50	1,01
L. Real Estate	101,30	1,47	113,30	1,49	126,10	1,56	135,00	1,58	139,70	1,59
M, N. Jasa Perusahaan	0,70	0,01	0,80	0,01	0,90	0,01	0,90	0,01	0,90	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	268,20	3,88	286,40	3,78	322,20	4,00	355,50	4,16	368,30	4,20
P. Jasa Pendidikan	235,40	3,41	249,60	3,29	274,80	3,41	299,90	3,51	324,30	3,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95,80	1,39	105,80	1,39	118,30	1,47	127,20	1,49	135,90	1,55
R, S, T, U. Jasa Lainnya	59,00	0,85	63,30	0,83	67,70	0,84	71,50	0,84	71,20	0,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**6.909,30**	**100,00**	**7.585,60**	**100,00**	**8.061,80**	**100,00**	**8.552,20**	**100,00**	**8.768,50**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka Tahun 2021
**: Angka sementara, ** Angka sangat sementara*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dari 5.196,3 miliar rupiah pada Tahun 2016 menjadi 5.908,3 miliar rupiah pada Tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun bertambah sebesar 13,70 %.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seruyan
Tahun 2016-2020

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha (PDRB)	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.957,3	2.040,1	2.130,7	2.251,3	2.203,8
B. Pertambangan dan Penggalian	35,1	34,7	35,6	37,4	37,0
C. Industri Pengolahan	1.595,8	1.738,4	1.859,2	1.961,9	1.885,2
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,8	0,9	0,9	1,0	0,9
F. Konstruksi	490,8	488,7	489,8	495,8	464,1
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	302,5	317,9	342,8	359,0	357,1
H. Transportasi dan Pergudangan	101,8	109,9	119,5	124,4	130,1
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58,5	61,4	64,4	66,6	66,4
J. Informasi dan Komunikasi	41,2	42,9	44,7	46,4	49,2
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	52,4	55,1	56,6	60,5	64,3
L. Real Estate	83,8	87,9	91,9	96,4	98,7
M, N. Jasa Perusahaan	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	208,3	212,5	226,1	238,8	236,6
P. Jasa Pendidikan	158,8	160,1	168,2	179,6	190,0
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,3	71,0	74,4	77,3	79,3
R, S, T, U. Jasa Lainnya	41,4	42,7	43,9	45,0	44,1
PDRB	**5.196,3**	**5.465,5**	**5.750,3**	**6.042,9**	**5.908,3**

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka Tahun 2021
**: Angka sementara, ** Angka sangat sementara*

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian rill di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat dari pada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara rill dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Kinerja ekonomi Kabupaten Seruyan selama tahun 2020 mengalami pelambatan dibanding tahun 2019. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Seruyan tahun 2020 minus 2,23 persen, sedangkan tahun 2019 mencapai 5,09 persen. Pelambatan ekonomi di tahun 2020 utamanya disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya. Selain terjadinya pelambatan pertumbuhan pada lapangan usaha tersebut untuk tahun 2020 terdapat juga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas 6,21 persen; Transportasi dan Pergudangan 4,54 persen; Informasi dan Komunikasi 6,13 persen.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Seruyan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha (PDRB)	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,35	4,23	4,44	5,66	-2,11
B. Pertambangan dan Penggalian	-7,68	-1,26	2,75	4,98	-1,12
C. Industri Pengolahan	6,07	8,94	6,94	5,52	-3,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,43	-0,26	4,43	3,00	6,21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,19	9,06	7,44	2,76	-5,75
F. Konstruksi	5,97	-0,43	0,24	1,23	-6,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,90	5,08	7,84	4,74	-0,55
H. Transportasi dan Pergudangan	8,04	7,95	8,69	4,16	4,54
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,99	4,93	4,82	3,47	-0,28
J. Informasi dan Komunikasi	4,32	4,21	4,14	3,79	6,13
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,55	5,03	2,74	6,84	6,40
L. Real Estate	5,26	4,90	4,63	4,81	2,40
M, N. Jasa Perusahaan	3,52	2,83	4,14	4,43	-5,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,12	2,01	6,39	5,62	-0,93
P. Jasa Pendidikan	4,61	0,78	5,07	6,77	5,79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,09	7,05	4,83	3,85	2,53
R, S, T, U. Jasa Lainnya	2,37	3,25	2,80	2,44	-2,05
PDRB	**5,12**	**5,18**	**5,21**	**5,09**	**-2,23**

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka Tahun 2021
**: Angka sementara, ** Angka sangat sementara*

Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, maka posisi Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 berada dibawah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi provinsi minus 1,4 persen, sedangkan posisi Kabupaten Seruyan berada di minus 2,23

persen. Pada tahun yang sama, laju pertumbuhan ekonomi nasional berada pada minus 2,1 persen.

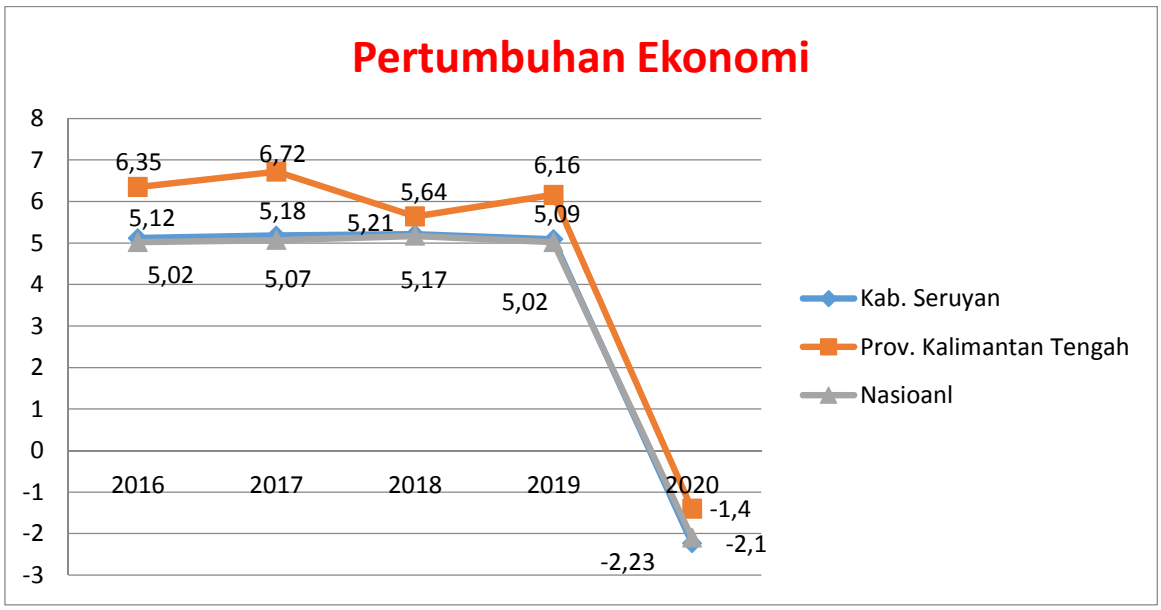

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber:
1. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *BPS Kabupaten Seruyan*
3. *BPS RI*

Pada Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan minus 2,23 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di 5,09 persen. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan berada pada urutan ketiga terendah setelah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berada pada minus 3,09 persen, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

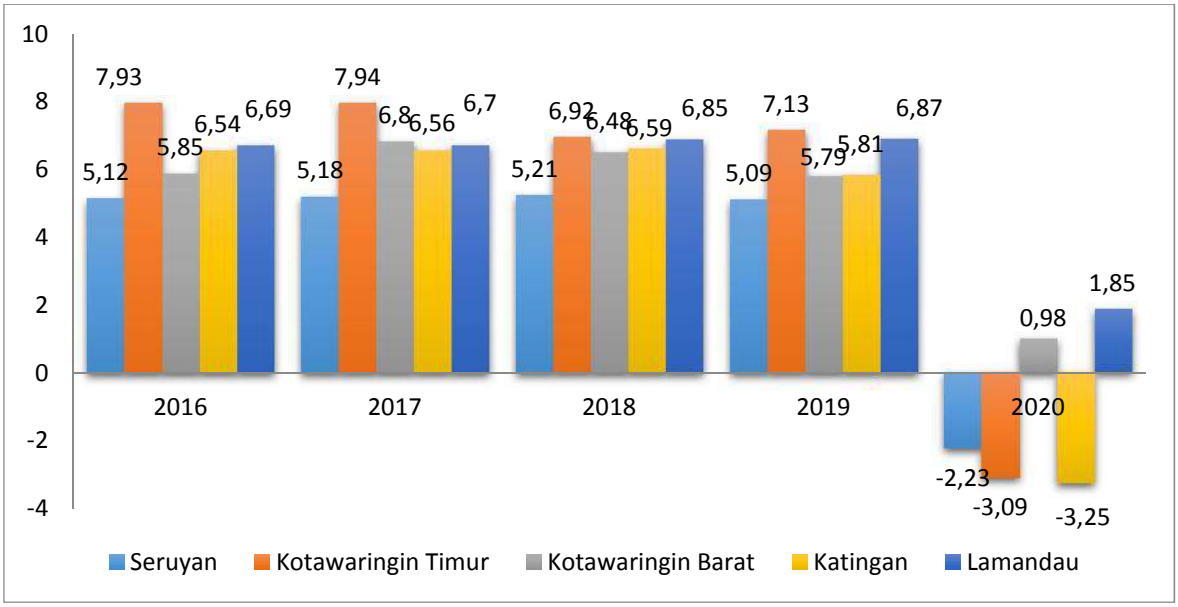

Gambar 2.5
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2016-2020

Sumber:
1. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *BPS Kabupaten Seruyan*

2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah di capai suatu daerah adalah dengan menghitung pendapatan Per Kapitanya. Pendapatan Per Kapitanya dihitung dengan membagi nilai nominal pendapatan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat.

Akan tetapi untuk menghitung nilai pendapatan per kapita diperlukan data pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Seruyan (*Net Income Factor Abroad*). Dalam penghitungannya data ini sulit untuk didapatkan, oleh karenanya untuk gambaran kasar pendapatan Per Kapita digunakan PDRB Per Kapita sebagai pendekatan dalam mengukur rata-rata pendapatan penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB Per Kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan 2016-2020

No.	Indikator/ *Indicators*	Tahun/*Year*				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB(Miliar Rupiah)/ *GRDP(Billion Rupiahs)*					
	- ADHB/*at current price*	6 909,31	7 585,62	8 061,83	8 552,21	8 768,46
	- ADHK/*at 2010 constant price*	5 196,33	5 465,51	5 750,25	6 042,86	5 908,28
	- Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen)/ *Growth of GRDP at 2010 Constant Price (percent)*	5,12	5,18	5,21	5,09	-2,23
2	PDRB per Kapita(Juta Rupiah)/ *Per Capita GRDP(Million Rupiahs)*					
	- ADHB/*at current price*	37,90	39,93	40,75	41,54	40,96
	- ADHK/*at 2010 constant price*	28,50	28,77	29,07	29,35	27,60
	- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (persen)/ *Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price (percent)*	0,83	0,93	1,03	0,98	-5,97

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan

Selama kurun waktu lima tahun terakhir PDRB per kapita, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten Seruyan pada Tahun 2016 sebesar Rp.37,90 juta, meningkat menjadi Rp.40,96 juta pada tahun 2020. PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan dari Rp.28,50 juta pada tahun 2016 menjadi Rp.27,60 juta pada tahun 2020.

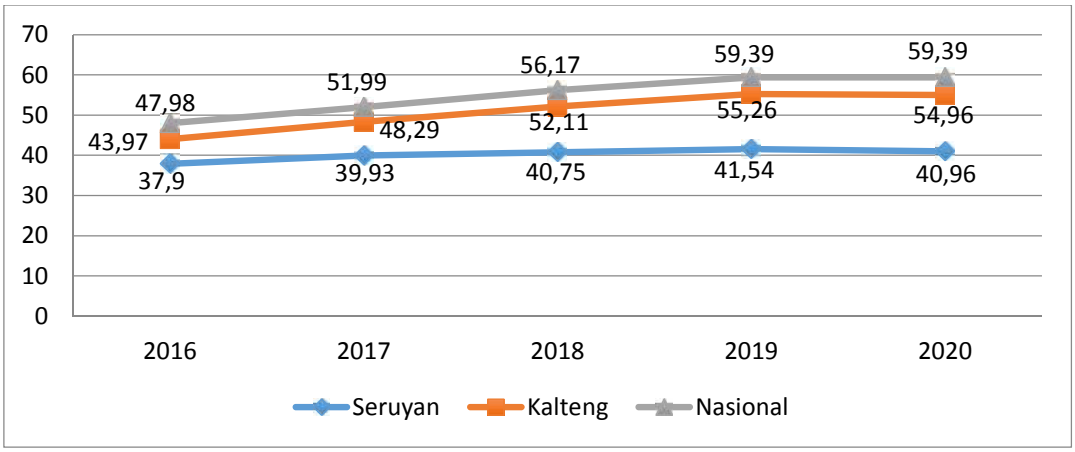

Gambar 2.6
Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB) di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Pusat

Bila dibandingkan dengan Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB) Provinsi Kalimantan Tengah, maka posisi Kabupaten Seruyan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dibawah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, Pendapatan Per Kapita provinsi sebesar 54,96 juta, sedangkan posisi Kabupaten Seruyan berada di angka 40,96 juta. Pada tahun yang sama, Pendapatan Per Kapita nasional berada pada angka 59,39 juta.

Selanjutnya jika disandingkan dengan Kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019, Pendapatan Per Kapita Kabupaten Seruyan berada pada urutan kelima terendah setelah Kabupaten Katingan yang berada pada angka 48,45 juta, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

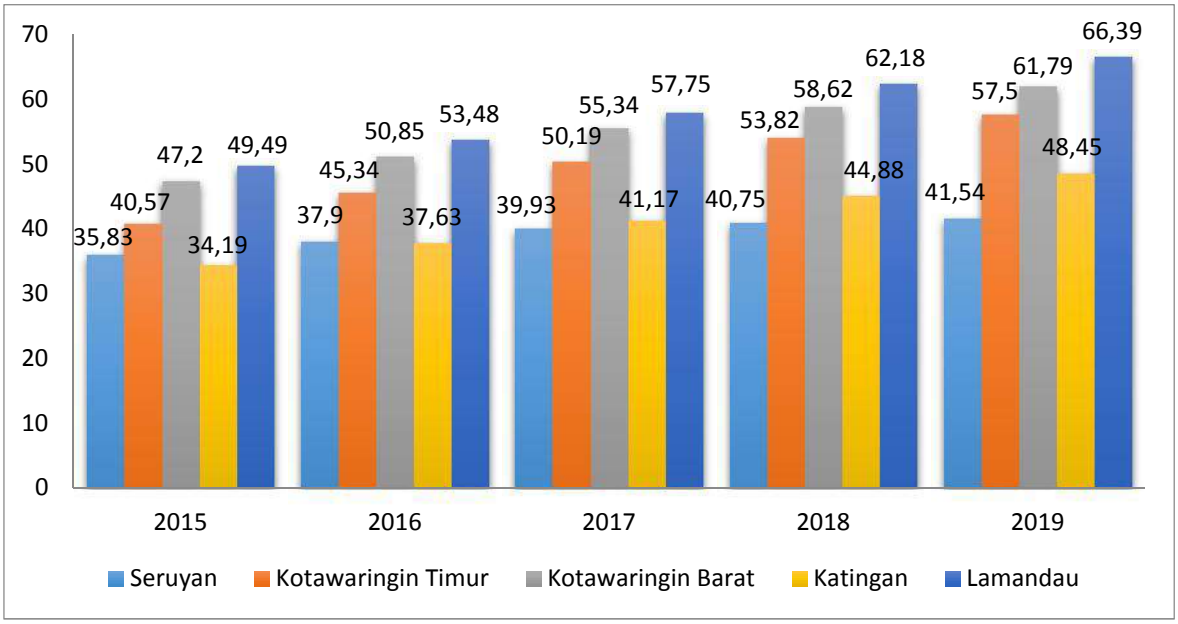

Gambar 2.7
Perbandingan Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB)
Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2019

Sumber:
1. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *BPS Kabupaten Seruyan*

3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan gambaran kenaikan harga secara terus menerus. Laju inflasi Kabupaten Seruyan memiliki potensi terjadi kenaikan harga-harga saat awal tahun atau tahun baru dan musim liburan sekolah, hal ini menyebabkan lonjakan permintaan barang/jasa tertentu. Selain itu, inflasi di Kabupaten Seruyan juga dipengaruhi oleh faktor seperti cuaca ekstrim, yang akan menyebabkan gangguan pasokan pada beberapa komoditas sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang kemudian akan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Palangkaraya dan Kota Sampit. Untuk data inflasi Kabupaten Seruyan, mengacu data Kota Sampit sebab secara geografis lebih dekat dibandingkan dengan Kota Palangkaraya.

Tabel 2.13
Inflasi Tahun 2015-2020

Uraian	Indeks dan IHK					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kabupaten Seruyan (mengacu pada Kota Sampit)	5,72	2,46	3,29	6,02	2,02	1,62

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka Tahun 2021

Inflasi Kota Sampit pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2015 berada pada angka 5,72 dan mengalami penurunan menjadi 1,62 pada tahun berikutnya, namun angka ini berangsur naik kembali pada tahun-tahun berikutnya, hingga 6,02 pada Tahun 2018. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 1,62.

4. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidak seimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Pengelompokan nilai Koefisien Gini adalah:

- G < 0,3 = ketimpangan rendah
- 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang
- G > 0,5 = ketimpangan tinggi

Dalam menghitung nilai koefisien gini, maka dibutuhkan data-data seperti Jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Berikut ini disajikan data perkembangan indeks gini tahun 2015-2020.

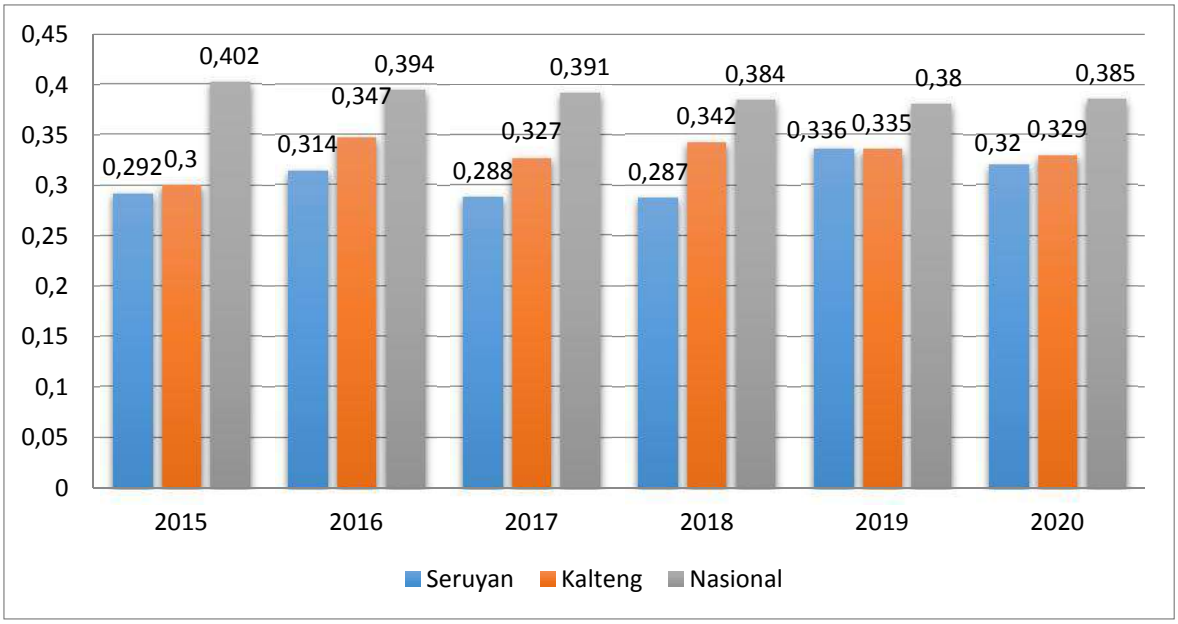

Gambar 2.8
Perkembangan Indeks Gini
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Sumber:
1. *BPS Kabupaten Seruyan*
2. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
3. *BPS Pusat*

Tingkat ketimpangan pendapatan (indeks gini) Kabupaten Seruyan setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi, yaitu pada Tahun 2015 nilai indeks gini Kabupaten Seruyan berada pada 0,292 dan pada Tahun 2018 turun menjadi 0,287 sementara pada Tahun 2020 naik kembali menjadi 0,32. Meskipun mengalami kenaikan, indeks gini tersebut masuk dalam kategori ketimpangan sedang, karena di bawah batas ketimpangan (≤0,5).

Dibandingkan dengan Nasional, indeks gini Kabupaten Seruyan tergolong lebih rendah dikarenakan kondisinya di bawah Nasional sebesar 0,380, namun diatas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,335. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018, indeks gini Kabupaten Seruyan berada pada urutan pertama terendah setelah Kabupaten Katingan dan Lamandau yang masing-masing berada pada angka 0,30, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

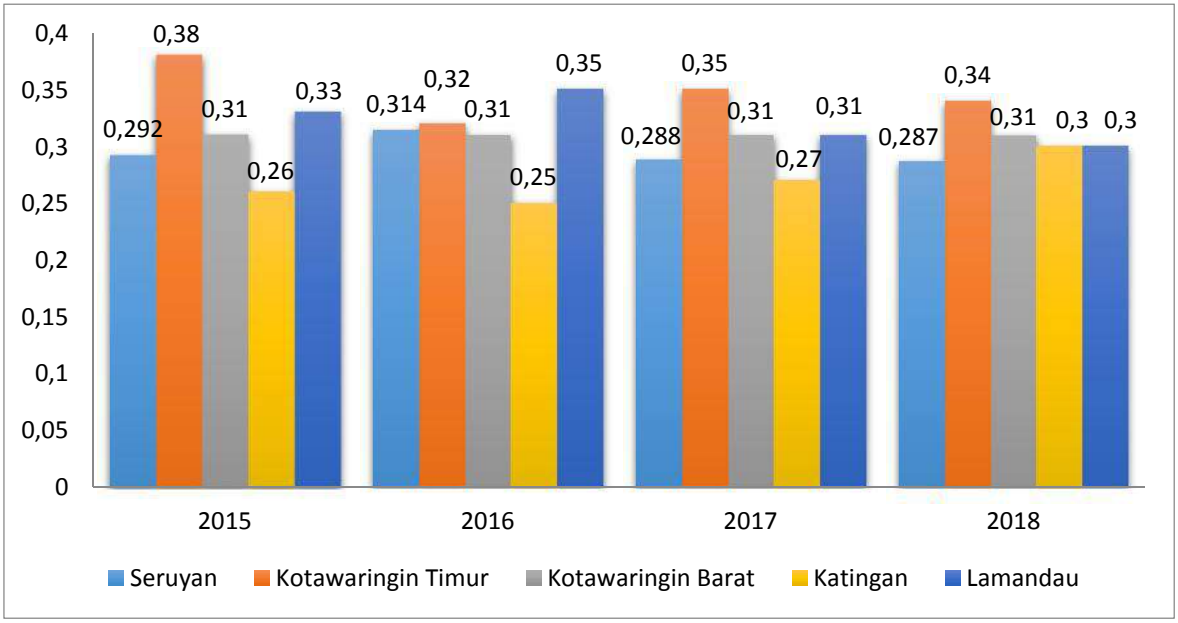

Gambar 2.9
Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2018

Sumber:
1. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *BPS Kabupaten Seruyan*

5. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Indikator kemiskinan di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020 disajikan berikut ini:

Tabel 2.14
Indikator Kemiskinan
di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	14,57	14,04	14,56	14,66	14,53
2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	387.592	415.798	428.539	454.971	504.264
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,08	7,46	7,43	7,19	6,85
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,37	0,99	1,09	1,26	0,87
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,33	0,20	0,27	0,31	0,16

Sumber: Seruyan Dalam Angka, 2020

Data diatas menunjukkan peningkatan garis kemiskinan sampai mencapai Rp 504.264 per kapita per bulan. Kenaikan Garis Kemiskinan dipengaruhi oleh harga-harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Dengan tingkat harga yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, garis kemiskinan pun ikut meningkat.

Berbeda dengan Garis Kemiskinan, kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sampai dengan 2020 penduduk miskin di Kabupaten Seruyan mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yaitu berada pada posisi 6,85 persen. Penurunan ini salah satunya disebabkan adanya peningkatan standar hidup layak yang diukur melalui indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP). Peningkatan standar hidup tersebut mendorong kenaikan daya beli masyarakat yang kemudian bersaing ketat dengan inflasi harga. Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 seiring dengan turunnya tingkat inflasi bulanan di Kota Sampit yang merupakan kota penghitungan inflasi terdekat dengan Kabupaten Seruyan.

Indikator kemiskinan lainnya yang dapat diukur dengan Garis Kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan. Pada Tahun 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Seruyan sebesar 0,87, turun dari tahun 2019 yang sebesar 1,26. Penurunan nilai

Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Seruyan mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil.

Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan sebesar 0,16, turun dari tahun 2019 yang sebesar 0,31. Penurunan nilai indeks ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin makin rendah.

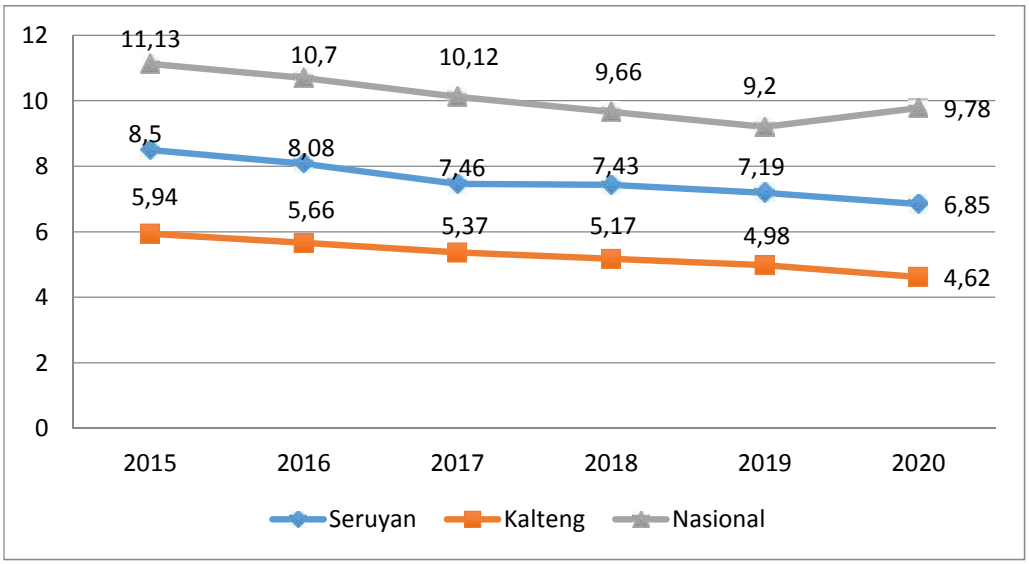

Gambar 2.10
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020

Sumber:
1. *BPS Kabupaten Seruyan*
2. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
3. *BPS Pusat*

Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan bahwa kelompok penduduk miskin pada tahun 2020 berada dalam kondisi semakin berdaya dan tidak terlalu timpang. Hal menggembirakan ini juga ditunjukkan dengan semakin berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan

yang cukup menggembirakan. Persentase penduduk miskin Pada tahun 2020 mencapai 6,85 persen, yang turun dari 7,19 persen pada tahun 2019.

Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah, maka posisi Kabupaten Seruyan masih diatas namun di bawah dari angka nasional. Persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 adalah 4,62 persen, sedangkan nasional jauh diatas Kabupaten Seruyan yaitu 9,78 persen. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Seruyan berada pada urutan kelima tertinggi setelah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berada pada angka 5,62 persen, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

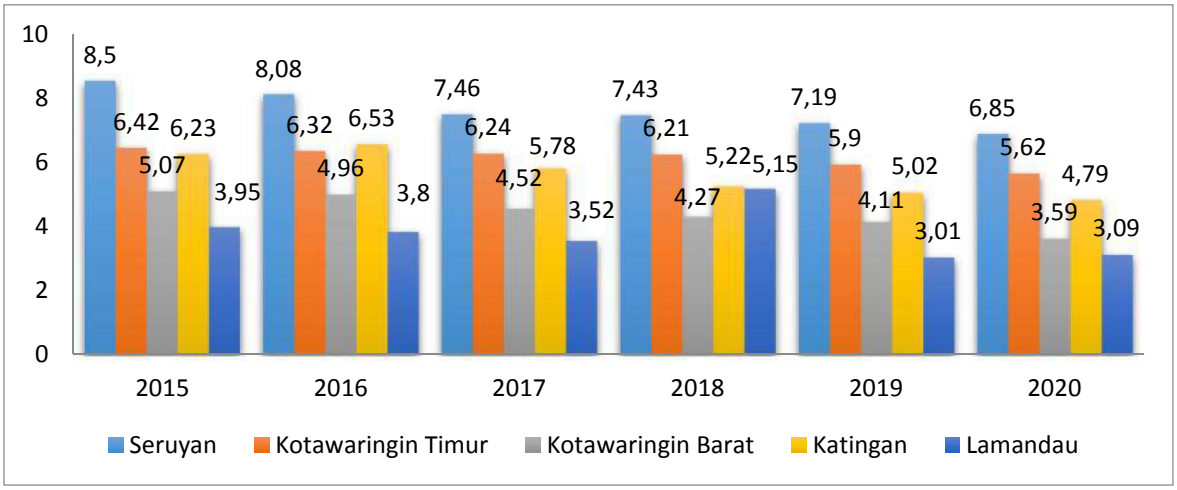

Gambar 2.11
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2020

Sumber:
1. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *BPS Kabupaten Seruyan*

6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM terdiri dari 3 (tiga) komponen indeks yaitu: peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Secara umum peluang hidup dicerminkan atas angka harapan hidup, pengetahuan dicerminkan atas harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sedangkan standar hidup layak dicerminkan oleh

Purchasing Power Parity (PPP) yang menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita.

Data beberapa tahun menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Seruyan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 sebesar 64,77 persen meningkat terus hingga menjadi 67,58 persen pada Tahun 2020. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, IPM Kabupaten Seruyan masih dibawah IPM Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seruyan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut:

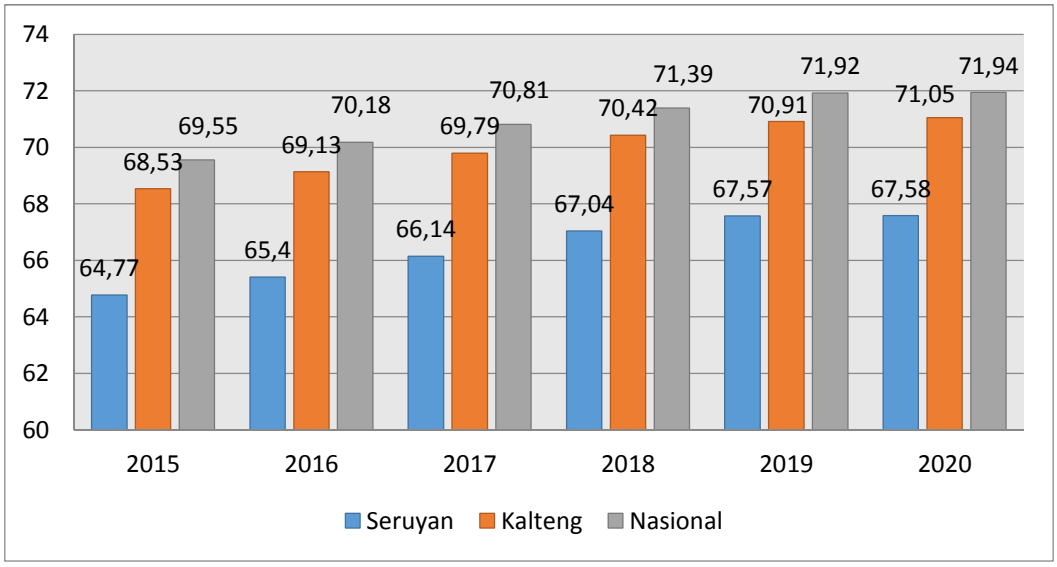

Gambar 2.12
Perkembangan IPM
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Sumber:
1. *BPS Kabupaten Seruyan*
2. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
3. *BPS Pusat*

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seruyan berada pada urutan kelima terendah setelah Kabupaten Katingan yang berada pada angka 68,68 persen, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

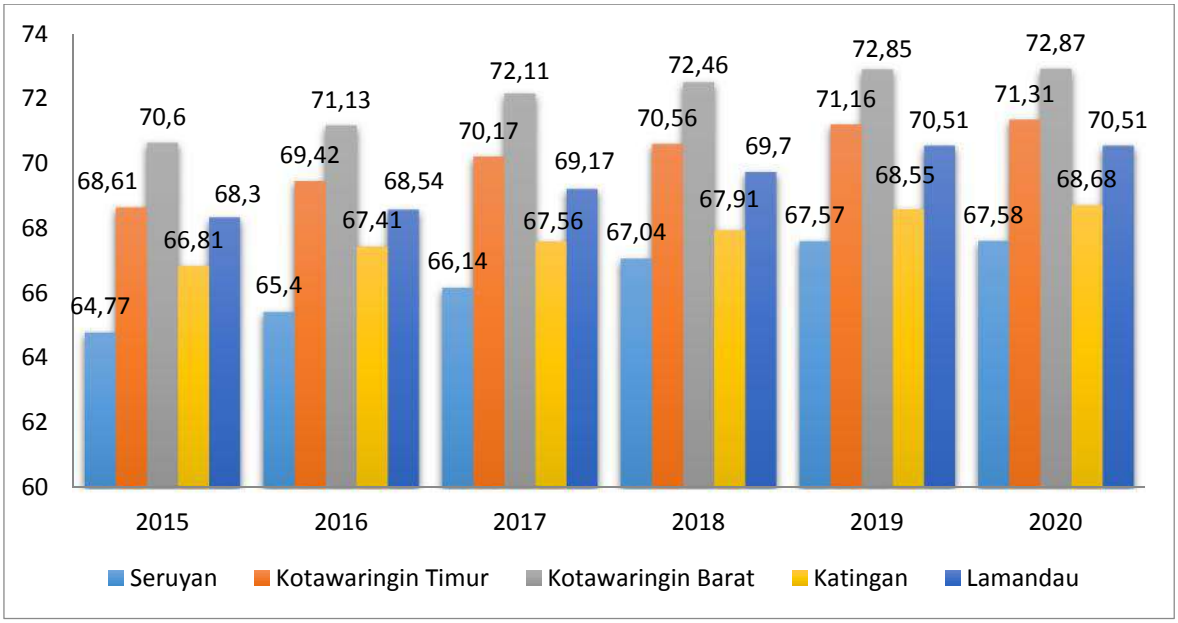

Gambar 2.13
Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2020

Sumber:
1. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *BPS Kabupaten Seruyan*

7. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Melek Huruf adalah 100%.

Berdasarkan statistik, dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Angka melek huruf pada tahun 2015 sebesar 98,53 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi 98,89 persen. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 98,87 persen. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Melek Huruf
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf	98,53	98,82	98,87	98,89	98,87	98,87

Sumber:1. Neraca Pendidikan Kab. Seruyan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, BPS
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

8. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun atau setingkat Diploma III.

Untuk menghitung angka rata-rata lama sekolah maka digunakan data jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun ke atas dan juga data jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas. Berikut adalah hasil olah kedua data tersebut sehingga menjadi angka rata-rata lama sekolah.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-Rata Lama Sekolah	7,45	7,49	7,75	7,98	7,75	7,79

Sumber:1. Neraca Pendidikan Kab. Seruyan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, BPS
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 sebesar 7,45 tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 7,49 tahun, dan sampai dengan 2018 terus mengalami kenaikan hingga menjadi 7,98 tahun, akan tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 7,75 tahun dan tahun 2020 naik kembali menjadi 7,79 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Seruyan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP.

9. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 sebesar 12,33 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,33 tahun atau setara dengan SMA kelas 3. Perkembangan angka harapan lama sekolah dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.17
Perkembangan Harapan Lama Sekolah
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	11,08	11,56	11,62	11,68	11,62	12,33

Sumber: Neraca Pendidikan Kab. Seruyan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, BPS.

10. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum AHH adalah 85 tahun. Sementara itu target Kementerian Kesehatan di tahun 2020 adalah 72 tahun.

Dari data, dapat diketahui bahwa AHH di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020 selalu meningkat. Angka harapan hidup Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sebesar 69,22 persen, dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar 69,26 persen. Apabila dibandingkan dengan standar UNDP dan target Kementerian Kesehatan maka pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	69,22	69,23	69,24	69,25	69,26

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka Tahun 2021

11. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Menurut WHO, BBLR dikelompokkan menjadi tiga group yaitu prematuritas, *intra uterine growth restriction* (IUGR) dan karena keduanya. BBLR sering digunakan sebagai indikator dari IUGR di negara berkembang karena tidak tersedianya penilaian usia kehamilan yang valid. BBLR ini berbeda dengan prematur karena BBLR diukur dari berat, sedangkan prematur diukur dari umur bayi dalam kandungan. BBLR belum tentu prematur, sementara prematur belum tentu BBLR kalau berat lahirnya diatas 2500 gram. Namun banyak kasus dengan kedua kondisi ini muncul bersamaan karena penyebabnya saling berhubungan.

Tabel 2.19
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2020

Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk/ Ditangani	
010. Seruyan Hilir	623	0	0	0
011. Seruyan Hilir Timur	414	2	0	0
020. Danau Sembuluh	302	6	1	0
021. Seruyan Raya	267	5	5	0
030. Hanau	504	0	0	1
031. Danau Seluluk	328	10	0	1
040. Seruyan Tengah	488	5	5	0
041. Batu Ampar	141	3	3	0
050. Seruyan Hulu	76	6	0	0
051. Suling Tambun	36	0	0	0
Kab. Seruyan 2020	**3179**	**37**	**14**	**2**
2019	**3344**	**66**	**39**	**3**
2018	**3257**	**27**	**72**	**3**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

12. Status Gizi Balita

Status gizi Balita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai status gizi balita biasanya dilakukan dengan Indek Massa Tubuh (IMT) yaitu pengukuran tubuh dibandingkan umur (BB/U atau TB/U). Hasil perhitungan ada 4 kategori yaitu gizi lebih (z-score >+2 SD); gizi baik (z-score -SD sampai +2 SD); gizi kurang (z-score < -2 SD sampai -3 SD); dan gizi buruk (z-score < -3 SD).

Kekurangan gizi terutama pada anak-anak balita dapat menyebabkan meningkatnya risiko kematian, terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan mental serta kecerdasan. Dalam beberapa hal dampak kekurangan gizi bersifat permanen yang tidak dapat diperbaiki walaupun pada usia berikutnya kebutuhan gizi terpenuhi. Kekurangan gizi biasanya terjadi secara tersembunyi dan sering terluputan dari pengamatan.

Dalam hal kasus balita gizi buruk di Kabupaten Seruyan yang ditemukan terjadi penurunan kasus, dari tahun 2016 dilaporkan sebanyak 22 balita gizi buruk, tahun 2017 sebanyak 9 balita gizi buruk dan tahun 2018 sebanyak 3 balita gizi buruk sedangkan tahun 2019 sebanyak 3 balita gizi buruk dan tahun 2020 ditemukan serta ditangani sebanyak 2 balita gizi buruk. Kasus gizi buruk tersebut mendapatkan perawatan oleh masing-masing Puskesmas dengan cakupan 100%.

13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO *(International Labour Organization)*, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan,

bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau yang mencari pekerjaan. Bila TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya jumlahnya lebih besar dari jumlah angkatan kerja. Berikut adalah tabel yang menyajikan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seruyan dari tahun 2015 ke tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 sebesar 74,23 persen, dan pada tahun 2016 BPS tidak melakukan pendataan TPAK. Selanjutnya pada tahun 2017 menurun menjadi 72,86 persen, dan tahun 2018 kembali naik menjadi 74,50 persen, namun pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 71,09 persen dan 65,04 persen pada tahun 2020. TPAK Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan TPAK Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional berada dibawah Provinsi dan Nasional, dimana TPAK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sebesar 68,40 persen dan Nasional sebesar 67,77 persen.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seruyan pada periode 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

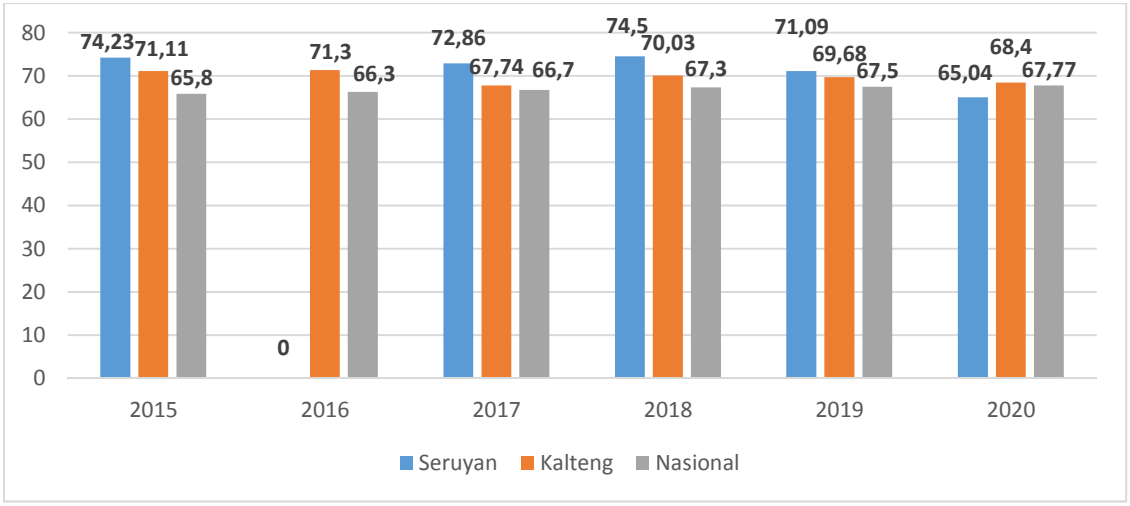

Gambar 2.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS RI, BPS Sakernas Agustus 2018-2020

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seruyan berada pada urutan keempat terendah setelah Kabupaten Katingan yang berada pada angka 64,55 persen, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

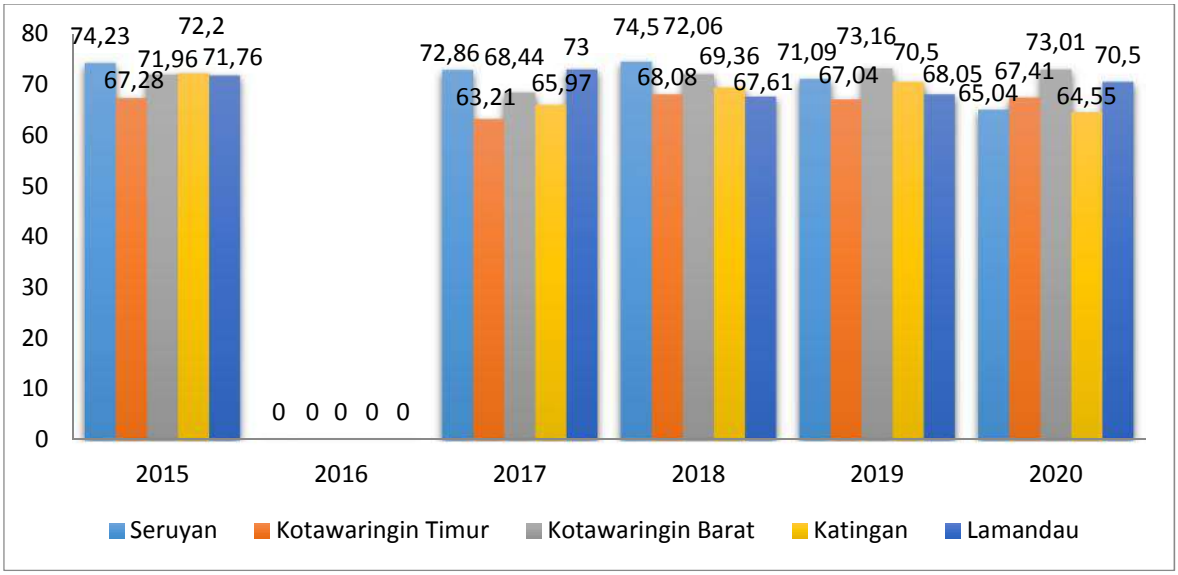

Gambar 2.15
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2020

Sumber:
1. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *BPS Kabupaten Seruyan*

14. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Indikator ini untuk melihat berapa persen pengangguran terbuka di Kabupaten Seruyan setiap tahun. Pengangguran terbuka adalah baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan). Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikali dengan 100%.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seruyan mengalami fluktuasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada Tahun 2015 sebesar 4,64 persen, dan pada tahun 2016 BPS tidak melakukan pendataan TPT. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat hingga menjadi 4,79 persen, dan tahun 2018 turun menjadi 4,28 persen, namun pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 4,45 persen dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 4,30 persen. TPT Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional berada dibawah, dimana TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sebesar 4,58 persen dan Nasional sebesar 7,07 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Kabupaten Seruyan pada periode 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

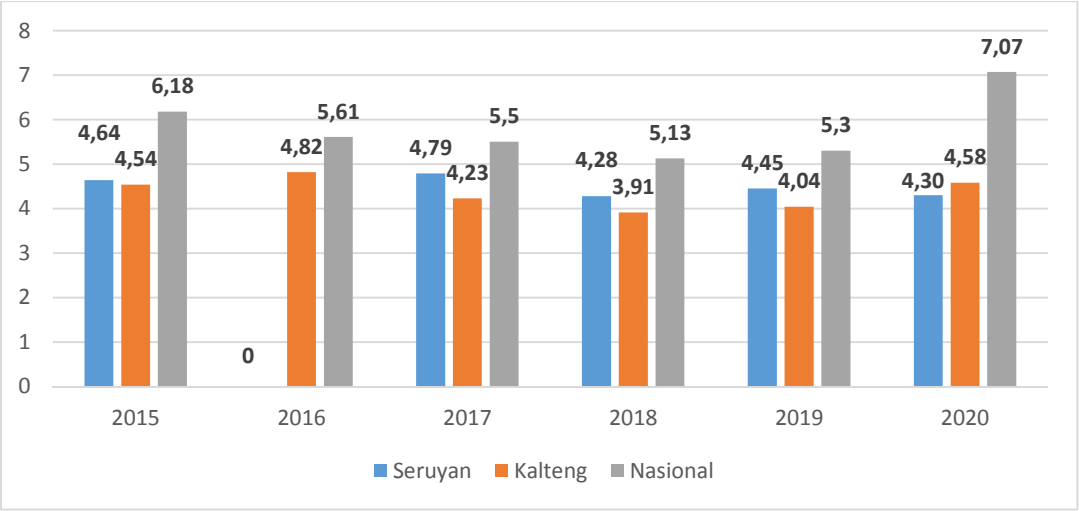

Gambar 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS RI, BPS Sakernas Agustus 2018-2020

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seruyan berada pada urutan keempat terendah setelah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada pada angka 4,76 persen, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

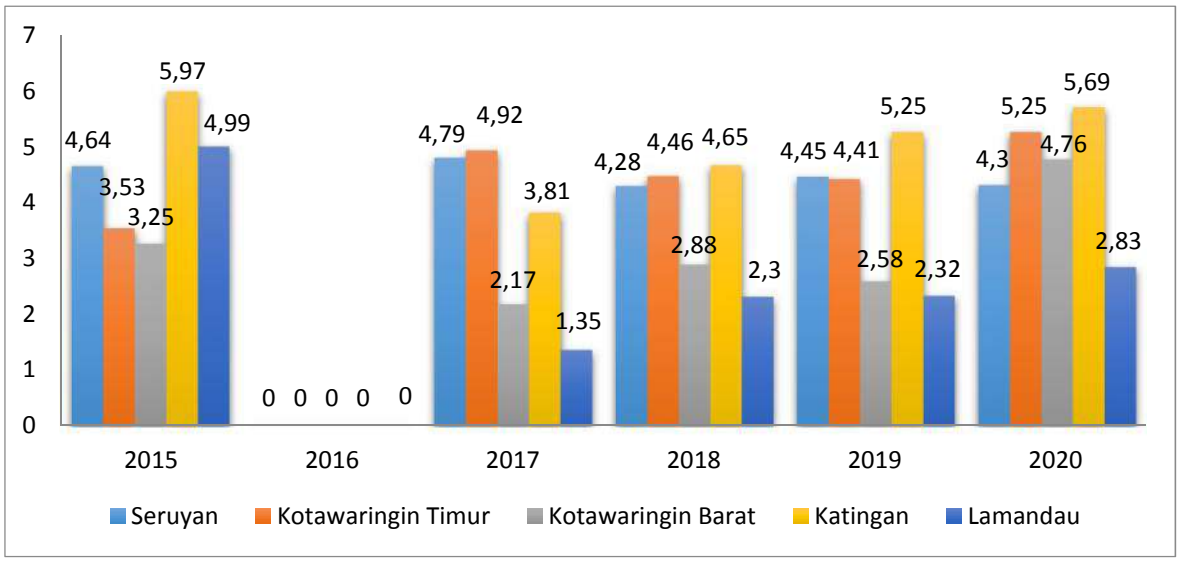

Gambar 2.17
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan
dengan Kabupaten sekitar Tahun 2015-2020

Sumber:
1. *BPS Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *BPS Kabupaten Seruyan*

15. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja atau tingkat kesempatan kerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

Tabel 2.20
Rasio Penduduk yang bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Seruyan Tahun 2014 dan 2019

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TKK	95,60	95,36	n.a	95,21	95,60	95,51

1. *BPS Kabupaten Seruyan*
2. *BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker*

Berdasarkan pada tabel diatas pada indikator Rasio Penduduk yang Bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2014 hingga tahun 2019 tercapai dikisaran 95 persen lebih.

16. Indeks Pembangunan Gender

Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan secara periodik data mengenai IPG dan IDG seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Publikasi terakhir adalah tahun 2015. Adapun IPG dan IDG Kabupaten Seruyan tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
IPG dan IDG Kabupaten Seruyan
Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender(IPG)	88,64	88,64	88,52	89,46	89,44
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,13	70,13	72,38	70,07	70,07

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa IPG Kabupaten Seruyan tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan sampai 88,52, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 89,46 dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 89,44. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kesetaraan IPM antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2020 bila dibandingkan tahun sebelumnya.Sementara itu angka IDG mengalami peningkatan dan penurunan pada periode 2016 sampai dengan 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari tahun ketahun kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi di Kabupaten Seruyan semakin baik.

17. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Seruyan pada kurun waktu 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.22
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Seruyan Tahun 2020

18. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2015-2020 menunjukkan kecenderungan pelambatan. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 36,86 persen sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 36,56 persen, namun kembali naik pada tahun 2019 sebesar 37,04 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 37,55 persen. Kondisi ini menunjukkan mulai terjadi proses pergeseran dari sektor pertanian ke sektor lainnya. Walaupun mengalami pelambatan beberapa tahun terakhir, namun sektor pertanian masih menempati posisi pertama penyumbang ekonomi Kabupaten Seruyan. Berikut disajikan data Kontribusi Sektor pertanian di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020.

Tabel 2.23
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	36,86	36,59	36,56	36,95	37,04	37,55

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka

19. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 36,86 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 37,55 persen. Walaupun mengalami pelambatan beberapa tahun terakhir, namun sektor pertanian/perkebunan masih menempati posisi pertama penyumbang ekonomi Kabupaten Seruyan. Berikut disajikan data Kontribusi Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020.

Tabel 2.24
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	36.86	36.59	36.56	36.95	37.04	37.55
2	Produksi sektor pertanian (Ton)	42,607.80	57,594.00	33,892.63	20,790.72	15,041.70	18,797.64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

20. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) di Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2015-2020 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 Kontribusi sektor pertanian (palawija) sebesar 4,29 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 5,73 persen.

Adapun Kontribusi sektor pertanian (palawija) di Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB (%)	4.29	4.35	5.05	5.15	5.22	5.73

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

21. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Konstribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB di Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 35,43 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sehingga menjadi 37,59 persen.

Adapun konstribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB di Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.26
Konstribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi (%)	35.43	35.93	36.53	36.90	37.08	37.59
2	Produksi sektor perkebunan (Ton)	5,494,994.53	2,918,541.32	3,607,963.90	3,644,043.54	3,680,483.97	3.728.251,92
	• Produksi perkebunan Masyarakat	11,368.24	37,112.51	37,336.80	37,710.17	38,087.27	49.791,89
	• Produksi Perkebunan Besar Swasta (PBS)	5,483,626.29	2,881,428.81	3,570,627.10	3,606,333.37	3,642,396.70	3,678.460,03

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

22. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2015-2020 terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki prospek yang baik. Berikut disajikan Tabel Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020.

Tabel 2.27
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	6,07	6,11	6,22	6,33	6,48	6,82

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka Tahun 2020

23. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri di Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2015-2020 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan sektor lainnya, maka sektor industri menempati peringkat kedua penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Seruyan, setelah posisi pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 2.28
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	30,77	30,96	31,93	32,51	32,56	31,88

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka Tahun 2020

24. Pertumbuhan Industri Rumah Tangga

Pertumbuhan jumlah unit usaha pada industri rumah tangga mengalami fluktuasi dari tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,31 persen, pada tahun 2016 pertumbuhan industri rumah tangga mengalami kenaikan menjadi 15,57 persen, namun pada tahun 2017 hingga dengan tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi 2,29 persen, dan pada tahun 2020 naik menjadi 2,89 persen.

Tabel 2.29
Pertumbuhan Industri Rumah Tangga
Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Unit Usaha	411	475	496	506	519	
2	Pertumbuhan (%)	7,31	15,57	4,42	2,02	2,29	2,89

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Seruyan

25. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 sebesar 81,85. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang bernilai 78,64. Statistik IKM terhadap pelayanan publik di Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.30
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

INDIKATOR	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80,79	78,66	79,32	80,03	78,64	81,85

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kabupaten Seruyan

2.3. Aspek Layanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

A. Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a. Angka Partisipasi Sekolah PAUD

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikaitkan dengan keadaan putus sekolah. Berikut Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Kabupaten Seruyan menurut kelompok umur Tahun 2020.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Tahun
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
5 – 6	25,11	24,05	49,16	2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

b. Rasio Guru/Murid

Data pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan fluktuasi jumlah murid. Pada tahun 2016 jumlah murid TK sebanyak 4.645 orang dan tahun 2017 mencapai 7.299 orang, namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2020 jumlah murid TK turun menjadi 4.151 orang. Jumlah murid diimbangi dengan penambahan jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak yang diikuti oleh kecenderungan peningkatan jumlah guru. Walaupun pada Tahun 2019 jumlah guru sempat mengalami penurunan dari 441 orang menjadi 341 orang di tahun 2020.

Tabel 2.32
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Serta Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Jenis Sekolah	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal	Jumlah Sekolah (Unit)	101	214	106	106	103
	Jumlah Murid (Jiwa)	4.645	7.299	5.049	5.035	4.151
	Jumlah Guru (Jiwa)	408	701	468	441	341
	Rasio Murid Terhadap Guru	1 : 11	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 12

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

2. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa

memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Sejak tahun 2007 pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK SD dan SMP di Kabupaten Seruyan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI	114.62	106.88	106.74	111.11	93.39	116,48
APK SMP/MTs	95.23	92.38	93.22	101.39	70.54	87.42

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan data, diketahui bahwa APK di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 untuk jenjang SD sebesar 114,62 persen dan menurun pada tahun 2016 menjadi 106,88 persen. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 111,11 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 93,39 persen dan pada tahun 2020 naik kembali menjadi 116,48 persen. Kondisi APK SD yang diatas 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk Kabupaten Seruyan yang bersekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Seruyan mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Dan diketahui bahwa APK SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 95,23 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 92,38 persen, namun

pada tahun 2018 terjadi kenaikan hingga menjadi 101,39 persen, selanjutnya pada tahun 2020 turun menjadi 87,42 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 12 sampai 15 tahun belum maksimal. Masih ada anak usia 12 sampai 15 tahun yang belum bersekolah.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, Sementara itu, APK SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 63,14 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi 84,47 persen, namun mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 50,26 persen. Perkembangan APK SMA di Kabupaten Seruyan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APK SMA/MA/SMK	63.14	68.44	84.47	71.82	57.04	50.26

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA/PT dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Berikut disajikan tabel Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020.

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI	95,60	95,50	95,08	95,60	92,39	97,99
APM SMP/MTs	70,30	70,40	74,70	74,75	64,91	81,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa APM Kabupaten Seruyan untuk jenjang SD/MI tahun 2015 sebesar 95,60 persen, dan mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 92,39 persen, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 97,99 persen. Melihat data tersebut dapat diartikan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 namun Kondisi tersebut bermakna bahwa anak usia sekolah SD/MI secara keseluruhan bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI. Dan untuk Data APM SMP/MTs selama kurun waktu 2015 sampai 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada periode tahun 2015 yaitu 70,30 persen, meningkat hingga tahun 2018 menjadi 74,75 persen. Meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 64,91 persen, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga menjadi 81,28 persen.

d. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Murni (APM) di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah.

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Seruyan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Murni untuk SMA di Kabupaten Seruyan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.36
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APM SMA/MA /SMK	52,70	50,40	52,10	52,59	51,39	47,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Selanjutnya untuk data diatas menyajikan data APM SMA/MA/SMK menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan. Dimana APM SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 52,70 persen, namun menurun pada tahun 2016 menjadi 50,40 persen. Namun APM SMA/MA/SMK tersebut mengalami peningkatan kembali sampai dengan tahun 2018 hingga menjadi 52,59 persen, namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 47,87 persen.

e. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikaitkan dengan keadaan putus sekolah. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Seruyan masih dijumpai anak putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar. Berikut APS Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020.

Tabel 2.37
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	95,60	95,50	95,08	95,46	92,39	97,99
APS SMP	70,30	70,40	74,70	59,96	64,91	81,28

Sumber: .Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa APS Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana APS Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 95,60 persen, menurun hingga tahun 2019 menjadi 92,23 persen, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 97,99 persen. Dan untuk jenjang SMP pada tahun 2015 sebesar 70,30 persen, meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi 74,70 persen, namun pada tahun 2018 turun menjadi 59,96 persen. Namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terus terjadi peningkatan hingga menjadi 81,28 persen

f. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa APS di untuk jenjang SMA Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 52,70 persen, dan menurun di tahun 2016 menjadi 50,40 persen, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 52,10 persen. Namun pada tahun berikutnya terjadi penurunan kembali, dan pada tahun 2020 menjadi 47,87 persen.

Adapun Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 2.38
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APS SMA	52,70	50,40	52,10	45,11	51,39	47,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

g. Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 Angka putus sekolah sebesar 0,2 persen, meningkat di tahun 2016 menjadi 0,27 persen, lalu pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 0,03 persen, namun pada tahun 2020 menjadi 0,89 persen.

Sedangkan angka putus sekolah untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 sampai dengan 2020 juga mengalami fluktuasi dari 0,43 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 0,81 persen pada tahun 2016, dan pada berikutnya hingga tahun 2018 turun menjadi 0,08 persen, namun pada tahun 2020 naik menjadi 3,93 persen. Adapun angka putus sekolah di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,2	0,27	0,03	0,03	0,40	0,89
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,43	0,81	0,09	0,08	0,80	3,93

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

h. Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah

Berdasar angka putus sekolah untuk jenjang SMA/SMK di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 0,17 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 1,08 persen. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 0,34 persen, namun pada tahun 2020 meningkat kembali hingga menjadi 6,00 persen.

Adapun angka putus sekolah di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.40
Angka Putus Sekolah SMA/SMK
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK	0,17	1,08	0,39	0,34	1,37	6,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

i. Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar

Angka Kelulusan di Kabupaten Seruyan untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 sebesar 98,07 persen, mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi 99,3 persen, namun pada tahun 2019 turun menjadi 96,98 persen dan meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 98,53 persen.

Untuk jenjang SMP/MTs angka kelulusan pada tahun 2015 sebesar 98,98 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 87,17 persen, namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 98,17 persen akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan 97,53 persen, namun pada tahun 2020 kembali naik 99,35 persen. Adapun Angka Kelulusan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.41
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan(AL) SD/MI	98,07	98,8	99,12	99,3	96,98	98,53
Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs	98,98	87,17	98,06	98,17	97,53	99,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

j. Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Menengah

Selanjutnya untuk jenjang SMA/SMK, angka kelulusan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, yang semula 99,03 persen ditahun 2015 menjadi 98,13 persen di tahun 2016, namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan hingga menjadi 98,89 persen, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 turun menjadi 95,56 persen dan 91,31 persen.

Adapun Angka Kelulusan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.42
Angka Kelulusan SMA/SMK
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan(AL) SMA/SMK	99,03	98,13	98,56	98,89	95,56	91,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

k. Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan Dasar

Dari data yang ada diketahui bahwa angka melanjutkan di Kabupaten Seruyan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar

92,17 persen, mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 82,64 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 96,46 persen, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 95,97 persen. Adapun data mengenai Angka Melanjutkan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.43
Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan Dasar
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	92,17	87,17	82,64	86,44	96,46	95,97

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

l. Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan Menengah

Untuk Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK pada tahun 2015 sebesar 69,77 persen, mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 65,94 persen, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 75,8 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi 67,52 persen.

Adapun data mengenai Angka Melanjutkan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.44
Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan Menengah
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK (%)	69,77	65,94	66,93	69,91	75,8	67,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

m. Fasilitas Pendidikan

1) Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.45
Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	168	170	171	173	421	519
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	55	60	65	65	97	223
Jumlah	**223**	**230**	**236**	**238**	**518**	**742**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 berjumlah 223 sekolah dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 742 sekolah.

2) Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.46
Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA
Kondisi Bangunan Baik
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	21	21	21	21	21	21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020 tidak mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 berjumlah 21 sekolah dan hingga tahun 2020 berjumlah 21 sekolah.

3) Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar mempunyai rumus jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun ditambah 13 s.d 15 tahun dikali dengan 10.000. Berikut ini disajikan data jumlah sekolah pada tingkat pendidikan SMP dan sederajat. Selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan kondisi akhir tahun 2020 sebanyak 122 orang.

Tabel 2.47
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

No	Jenis Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	135,62	127,05	127,05	124	122,56

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

4) Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu, rasio guru/murid juga indikator untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk menghitung rasio guru terhadap murid dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.48
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI						
Jumlah Guru	1.584	1.442	1.418	1.418	1.471	1.467
Jumlah Murid	20.801	19.747	20.422	23.691	20.589	20.624
Rasio	76,15	73,02	69,43	59,85	71,44	71,13
SMP/MTs						
Jumlah Guru	663	589	566	566	652	657
Jumlah Murid	7.312	7.043	7.149	7.722	7.596	7.251
Rasio	90,67	83,63	79,17	73,29	85,83	90,61

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

5) Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4

Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4 di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020 menunjukan trend peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 79,89 persen, meningkat hingga tahun 2017 menjadi 94,60 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 83,56 persen, dan kembali meningkat hingga tahun 2020 menjadi 87,68 persen. Adapun data Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4 tahun 2015-2020 di Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.49
Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Jenis Sekolah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4	79,89	80,33	94,60	83,56	85,74	87,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

B. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Seruyan, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum AHH adalah 85 tahun.

Dari data, dapat diketahui bahwa AHH di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020 selalu meningkat. Angka harapan hidup Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sebesar 69,22 persen, meningkat pada tahun 2018 sebesar 69,83 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 69,25 persen. Apabila dibandingkan dengan standar UNDP dan target Kementerian Kesehatan maka pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.50
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	69,22	69,59	69,83	69.83	69,25

Sumber: Seruyan Dalam Angka, 2020

2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Menurut WHO, BBLR dikelompokkan menjadi tiga group yaitu prematuritas, *intra uterine growth restriction* (IUGR) dan karena keduanya. BBLR sering digunakan sebagai indikator dari IUGR di negara berkembang karena tidak tersedianya penilaian usia kehamilan yang valid. BBLR ini berbeda dengan prematur karena BBLR diukur dari berat, sedangkan prematur diukur dari umur bayi dalam kandungan. BBLR belum tentu prematur, sementara prematur belum tentu BBLR kalau berat lahirnya diatas 2500 gram. Namun banyak kasus dengan kedua kondisi ini muncul bersamaan karena penyebabnya saling berhubungan.

Tabel 2.51
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2020

Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk/ Ditangani	
010. Seruyan Hilir	623	0	0	0
011. Seruyan Hilir Timur	414	2	0	0
020. Danau Sembuluh	302	6	1	0
021. Seruyan Raya	267	5	5	0
030. Hanau	504	0	0	1
031. Danau Seluluk	328	10	0	1
040. Seruyan Tengah	488	5	5	0
041. Batu Ampar	141	3	3	0
050. Seruyan Hulu	76	6	0	0
051. Suling Tambun	36	0	0	0
Kab. Seruyan 2020	**3179**	**37**	**14**	**2**
2019	**3344**	**66**	**39**	**3**
2018	**3257**	**27**	**72**	**3**

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka

3. Status Gizi Balita

Status gizi Balita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai status gizi balita biasanya dilakukan dengan Indek Massa Tubuh (IMT) yaitu pengukuran tubuh dibandingkan umur (BB/U atau TB/U). Hasil perhitungan ada 4 kategori yaitu gizi lebih (z-score >+2 SD); gizi baik (z-score -SD sampai +2 SD); gizi kurang (z-score < -2 SD sampai -3 SD); dan gizi buruk (z-score < -3 SD).

Kekurangan gizi terutama pada anak-anak balita dapat menyebabkan meningkatnya risiko kematian, terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan mental serta kecerdasan. Dalam beberapa hal dampak kekurangan gizi bersifat permanen yang tidak dapat diperbaiki walaupun pada usia berikutnya kebutuhan gizi terpenuhi. Kekurangan gizi biasanya terjadi secara tersembunyi dan sering terluputan dari pengamatan.

Dalam hal kasus balita gizi buruk di Kabupaten Seruyan yang ditemukan terjadi penurunan kasus, dari tahun 2016 dilaporkan sebanyak 4 balita gizi buruk, tahun 2017 sebanyak 3 balita gizi buruk dan tahun 2018 sebanyak 3 balita gizi buruk sedangkan tahun 2019

sebanyak 3 balita gizi buruk Sedangkan pada tahun 2020 balita gizi buruk ditemukan dan dilaporkan serta ditangani sebanyak 2 balita gizi buruk. Kasus gizi buruk tersebut mendapatkan perawatan oleh masing-masing Puskesmas dengan cakupan 100%.

4. Angka Kematian Bayi

Salah satu indikator yang paling menonjol dalam menilai derajat kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB = IMR). Angka Kematian Bayi dihitung dari banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Manfaat dari IMR ini, adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Angka kematian bayi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Rendah jika AKB kurang dari 20
2. Sedang jika AKB antara 20 – 49
3. Tinggi jika AKB antara 50 – 99

Estimasi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Seruyan per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016-2020 sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.18
Estimasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Kab. Seruyan Tahun 2016-2020

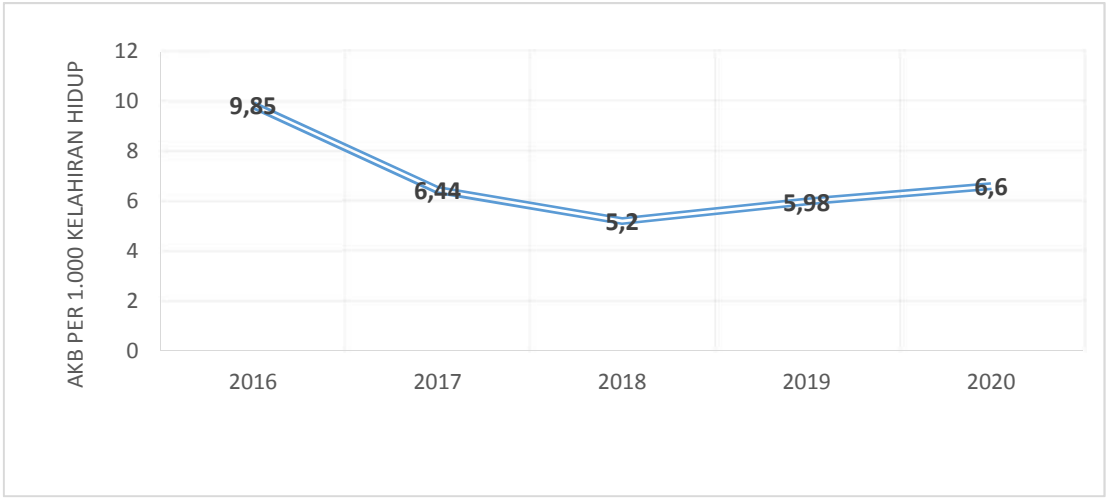

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan gambar diatas, AKB Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sebesar 9,85 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 6,44 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 dan 2019 hingga menjadi 5,2 per 1.000 dan 5,98 per 1.000 kelahiran hidup kemudian pada tahun 2020 menunjukan peningkatan AKB yang dilaporkan 6,6 per 1.000 kelahiran hidup.

5. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Formulasi Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi (AKB).

Berikut ini akan ditampilkan AKHB dan AKB selama periode tahun 2016-2020.

Tabel 2.52
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
AKB	9,85	6,44	6,27	5,78	6,6
AKHB	990,05	993,56	993,73	994,22	993,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2020

Pada tabel diatas terlihat pencapaian AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi) menunjukan tren fluktuatif, dimana pada tahun 2016 AKHB sebesar 990,05 dan capaian AKHB tahun 2017 (993,56), 2018 (993,73), 2019 (994,22) dan capaian tahun 2020 (993,40).

6. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan perempuan. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul seperti perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet dan abortus. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidak setaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan.

Berikut tabel Jumlah Absolut Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.53
Jumlah Absolut Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

NO	Kematian Ibu	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Absolut	8	4	5	8	2
2.	Jumlah kelahiran Hidup	2945	2952	2643	3332	3075
3.	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	271,6	135	133.87	257.1	131.2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2016 sebesar 8, dengan AKI sebesar 271.6 per 100.000 kelahiran hidup, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 4 dengan AKI sebesar 135.23 per 100.000 kelahiran hidup, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 5 dengan AKI sebesar 2.643 per 100.000 kelahiran hidup, akan tetapi mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 hingga menjadi 8 dengan AKI sebesar 3.331 per 100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2020 menunjukkan perbaikan, ditandai dengan adanya penurunan AKI menjadi 2 dengan AKI sebesar 3.075 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan pada periode sebelumnya.

7. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada termasuk yang ada pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan pengembangan masyarakat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). UKBM diantaranya terdiri dari Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Polindes (Pos Bersalin Desa), Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu). Polindes/Poskesdes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan melalui menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

Kegiatan utama Poskesdes yaitu pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans perilaku berisiko, lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawat daruratan kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan). Pelayanan yang diberikan Poskesdes Salah satu jenis UKBM yang telah sejak lama dikembangkan dan mengakar di masyarakat adalah Posyandu. Dalam menjalankan fungsinya, Posyandu diharapkan dapat melaksanakan 5 program prioritas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan Diare.

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Seruyan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.54
Rasio posyandu per satuan balita
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio posyandu per satuan balita(Per 100 Balita)	7,8	7,4	7,11	7,86	6,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan, dimana Rasio posyandu per 100

balita pada tahun 2016 sebesar 7,8 dan Akan tetapi Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2017 menurun menjadi 7,4 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 dan 2019 hingga menjadi 7,11 dan 7,86 dan pada tahuin 2020 mengalami penurunan menjadi 6,57.

8. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkatan pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan Pemerintahan Daerah setempat.

Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut : 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Pembangunan Puskesmas tiap kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara kesehatan masyarakat. Puskesmas dalam perkembangannya, dari tahun ke tahun diupayakan terus meningkat yang bertujuan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau oleh masyarakat dan merata sampai di daerah terpencil. Dengan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dihaarapkan dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu wilayah kecamatan, atau beberapa desa/kelurahan di satu wilayah kecamatan dan disetiap kecamatan harus ada minimal satu unit Puskesmas. Dasar pertimbangan untuk membangun dan menentukan wilayah kerja Puskesmas antara lain faktor luas wilayah, kondisi geiografis, dan kepadatan penduduk.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Seruyan pada tahun 2019 sebanyak 12 unit, dengan rincian jumlah Puskesmas perawatan 7 unit dan Puskesmas non perawatan 5 unit. Selain itu, Kabupaten Seruyan

memiliki 16 unit Puskesmas keliling dan 82 unit Puskesmas pembantu (Pustu). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap Puskesmas adalah rasio Puskesmas per 10.000 penduduk. Rasio Puskesmas per 10.000 penduduk pada tahun 2019 di Kabupaten Seruyan sebesar 0,63 (dibulatkan 1). Cukup ideal sesuai dengan Standar Nasional 1 Puskesmas melayani 10.000 penduduk.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas untuk wilayah Kabupaten Seruyan, beberapa Puskesmas non perawatan diupayakan tahun ke depan ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas perawatan.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.55
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 Penduduk	0,55	0,59	0.60	0.63	0.54
·Puskesmas per 1.000 Peduduk	0,06	0,06	0.06	0.06	0.058
·Poliklinik per 1.000 Penduduk	0,09	0,09	0.09	0.09	0.09
·Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk	0,40	0,41	0.43	0.46	0.38

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
Sumber : Indikator rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk dari lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,55 per 1.000 penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 0,60 dan 0.63 per 1.000 penduduk dan juga tahun 2020 mengalami penurunanan hingga menjadi 0.54 per 1.000 penduduk.

9. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Data menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Seruyan dari tahun 2016 ke tahun 2020, disertai dengan adanya peningkatan tempat tidur rumah sakit yang jumlahnya tiap tahun meningkat. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan rasio tempat tidur dari 0,58 meningkat menjadi 1,32 per 1.000 penduduk. Berikut disajikan Rasio Tempat Tidur per 1.000 penduduk di Kabupaten Seruyan tahun 2016-2020.

Tabel 2.56
Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	90	119	50	75	200
2	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
3	Jumlah Penduduk	155.763	159.519	158.231	147.712	151.065
4	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk	0,58	0,75	0,32	0,51	1,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

10. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.57
Rasio dokter per satuan penduduk
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio dokter per satuan penduduk (Per 1.000 penduduk	0,14	0,26	0,26	0,112	0,204

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sebesar 0,14 per 1.000 penduduk dan pada tahun 2017 dan 2018 naik menjadi 0,26 mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 0,112 per 1.000 penduduk. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 0,204 per 1.000 penduduk.

11. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga medis yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Seruyan terdiri dari tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.58
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 100.000 penduduk)	283	313	355	360.39	662

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sebesar 283 per 100.000 penduduk, lalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020 mencapai 662 per 100.000 penduduk.

12. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.59
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	10	7	10	18	2,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sebesar 10 persen mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 7 persen namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 10 persen dan pada tahun 2019 menurun lagi menjadi 18 persendantahun 2020 menurun menjadi 2.99 persen.

13. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.60
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	67	65,72	70	67	28.45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Seruyan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan, dimana Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2016 sebesar 67 persen mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 70 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 28.45 persen.

14. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	51	77	83	50	62.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* (uci) di kabupaten Seruyan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana

cakupan desa/kelurahan UCI pada tahun 2016 sebesar 51 persen, meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 77 persen dan 83 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 50 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 62.4 persen.

15. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah 100 persen.

Tabel 2.62
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.63
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	29	16	14.77	53.29	15.81

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Seruyan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2016 sebesar 29 persen, menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 16 persen dan 14.77 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada

tahun 2019 menjadi 53.29 persen, namun menurun kembali pada tahun 2020 hingga menjadi 15.81 persen.

17. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sama yaitu 100.

Tabel 2.64
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

18. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.65
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	5,58	13,67	15.58	16.50	20.23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Seruyan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2016 sebesar 5,58 persen, meningkat pada tahun 2017 menjadi 13,67 persen. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan menjadi 15,58 persen dan 16,50 persen. Selanjutnya Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2020 menjadi 20,23 persen.

19. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.66
Cakupan kunjungan bayi
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan kunjungan bayi (%)	95	69	73	61	29.48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Seruyan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2016 sebesar 95, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 69, pada tahun 2018mengalami peningkatan sebesar 73 tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 61 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena covid sebesar 29.48 persen.

20. Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian

penyakit terhambat. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan.

Adapun penanganan Covid 19 di lakukan dengan cara :

a) Pelaksanaan 3T yaitu Tracking, Testing dan Treatment;
b) Penyampaian Informasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan (Prokes);
c) Pemantauan Pelaksanaan Isolasi Mandiri;
d) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Covid-19.

Untuk vaksinasi tahap pertama tersedia 7.300 vaksin dan yang sudah digunakan sebanyak 6.480 vaksin, sedangkan pada tahap kedua tersedia 24.069 vaksin dan yang sudah digunakan sekitar 3.700 vaksin.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Tabel 2.67
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Seruyan (Km) Tahun 2020

Kecamatan	Panjang Jalan *(Km)*			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Seruyan Hilir	64.21	24.95	8.00	163.67
Seruyan Hilir Timur	27.96	26.40	11.80	55.10
Danau Sembuluh	18.90	3.10	-	10.24
Seruyan Raya	25.20	-	-	39.80
Hanau	10.10	7.80	0.40	16.70
Danau Seluluk	12.46	9.70	1.00	46.70
Seruyan Tengah	38.75	53.30	13.80	119.60
Batu Ampar	15.45	15.70	5.80	18.85
Seruyan Hulu	-	0.420	-	165.25
Suling Tambun	-	-	-	20.00
Jumlah/Total	**213.03**	**141.15**	**40.80**	**655.91**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Tabel 2.68
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seruyan (Km) Tahun 2020

Kecamatan	Panjang Jalan *(Km)*			
	Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
Seruyan Hilir	64.21	24.95	171.67	260.83
Seruyan Hilir Timur	27.96	26.40	66.90	121.26
Danau Sembuluh	18.90	3.10	10.24	32,24
Seruyan Raya	25.20	-	39.80	65.00
Hanau	10.10	7.80	17.10	35.00
Danau Seluluk	12.46	9.70	47.70	69.86
Seruyan Tengah	38.75	53.30	133.40	225.45
Batu Ampar	15.45	15.70	24.65	55.80
Seruyan Hulu	-	0.20	165.25	165.45
Suling Tambun	-	-	20.00	20.00
Jumlah/Total	**213.03**	**141.15**	**696.71**	**1.050.89**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Seruyan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 14,51 persen, dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi 20,27 persen.

Tabel 2.69
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan Kondisi Baik	152.84	158.55	175.86	188.92	213.03
2.	Panjang Jalan Kondisi Sedang	90.38	107.23	106.08	55.57	141.15
3.	Panjang Jalan Kondisi Rusak	810.26	787.7	769.02	803.81	696.71
4.	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik	14.51	15.05	16.73	17.98	20.27

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2020

2. Daftar panjang jalan menurut keadaan dan status jalan

Panjang jalan nasional, provinsi dan kabupaten menurut keadaan dan status jalan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Daftar panjang jalan menurut keadaan dan status jalan tahun 2020

KEADAAN	STATUS JALAN (2020)		
	JALAN NEGARA (KM)	JALAN PROVINSI (KM)	JALAN KABUPATEN (KM)
I. JENIS PERMUKAAN			
a. Diaspal	82,33	77.19	213.03
b. Kerikil	-	41.95	141.15
c. Tanah	-	83.150	696.71
d. Tidak dirinci	-	-	-
JUMLAH	**82,33**	**188.31**	**1050.89**
II. KONDISI JALAN			
a. Baik	82,33	77.19	213.03
b. Sedang	-	41.95	141.15
c. Rusak	-	1.78	40.80
d. Rusak Berat	-	67.69	655.91
JUMLAH	**82,33**	**188.31**	**1050.89**
III. KELAS JALAN			
a. Kelas 1	-	-	.
b. Kelas II	-	-	.
c. Kelas III	-	-	.
d. Kelas IIIA	-	-	.
e. Kelas III B	-	-	.
f. Kelas III C	-	-	.
g. Kelas tidak dirinci	82,33	188,31	1050.89
JUMLAH	82,33	188,31	1050.89

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2020

3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.71
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tinggal bersanitasi	33.22	41.53	30.29	57.32	54.90

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2016 sebesar 33,22 persen, naik pada

tahun 2017 menjadi 41,53 persen, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 30,29 persen. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 57,32 persen, dan tahun 2020 persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan lagi menjadi 54,90 persen. Ini dikarenakan adanya penambahan jumlah rumah tangga setiap tahunnya sebesar 4-5%, sedangkan anggaran untuk bantuan akses sanitasi setiap tahun menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan rata-rata hanya mampu kurang dari 1% pertahunnya dari jumlah rumah tangga pertahunnya.

4. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.72
Rasio Jaringan Irigasi
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jaringan Irigasi	20.10	20.10	19.32	22.5	22.8

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana Rasio Jaringan Irigasi pada tahun 2016 sebesar 20,10 persen, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 19,32 persen dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 22,5 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 22,8 persen.

5. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.73
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	n.a	0.107	0.201	75.12	75.12

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2017 sebesar 0,107 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,201 persen. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 75,12 persen, namun pada tahun 2020 masih dengan angka yang sama yaitu sebesar 75.12 persen.

6. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan pendudukdi Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.74
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	n.a	27.62	25.21	29.09	30.29

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan dari 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2017 sebesar 27,62 persen, menurun pada tahun 2018 menjadi 25,21 dan 2019 meningkat menjadi 29,09 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 30.29 persen.

7. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.75
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0.11	n.a	0.2	2.33	2.33

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sebesar 0,11 persen, kemudian tahun 2017 tidak ada data yang tercatat kemudian tahun 2018 sebesar 0,2 persen dan 2019 menjadi 2,33 persen, namun pada tahun 2020 masih dengan angka yang sama yaitu sebesar 2.33 persen.

8. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.76
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	n/a	9,09	12,05	13,23	14,05

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2017 sebesar 9,09 persen, mengalami kenaikan tahun 2018 menjadi 12,05 persen. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 13,23 persen dan tahun 2020 sebesar 14,05.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, salah satu indikator yang dapat dilih atadalah rumah layak huni. Adapun Rasio rumah layak huni di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.77
Rasio rumah layak huni
di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio rumah layak huni	46,07	46,07	47,92	54,56	52,57

Sumber: Disperkimtan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio rumah layak huni di Kabupaten Seruyan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana Rasio rumah layak huni pada tahun 2016 sebesar 46,07 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 47,92 persen. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 54,56 persen, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 52,57 persen.

Adapun faktor yang mempengaruhi menurunnya angka rasio yaitu jumlah rumah layak huni yang tertangani tidak seimbang dengan peningkatan jumlah rumah tidak layak huni, kondisi fisik rumah yang menurun dari kondisi layak huni menjadi tidak layak huni yang meningkat dari tahun ketahun. Disamping itu pembangunan rumah baru secara mandiri karena keterbatasan ekonomi maka rumah yang terbangun tidak sesuai dengan ketentuan rumah layak huni juga merupakan faktor yang ikut menentukan menurunnya angka rasio rumah layak huni.

2. Rasio permukiman layak huni

Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.78
Rasio permukiman layak huni
di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio permukiman layak huni	0	0	46.07	49.91	48.21

Sumber: Disperkimtan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 46,07 persen, meningkat pada tahun 2019 menjadi 49,91 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 48,21 persen.

Beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya angka rasio permukiman layak huni yaitu bencana alam seperti banjir yang pernah terjadi di beberapa kecamatan secara bersamaan yang menyebabkan beberapa infrastruktur dan rumah warga yang rusak parah serta faktor bertambahnya jumlah penduduk terutama untuk rumah tangga baru yang masih belum mampu mempunyai rumah sendiri sehingga mempengaruhi rasio permukiman layak huni.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Tabel 2.79
Rasio Jumlah Linmas
Kabupaten Seruyan Tahun 2015–2020

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Linmas	392	740	783	702	708	730
2	Jumlah penduduk	150.172	155.763	159.519	158.231	147.712	151.065
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	26,10	47,51	49,09	44,37	47,93	48,32

Sumber: SatPol-PP Kabupaten Seruyan, 2020

F. Sosial

1. Sarana sosial

Sarana sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sangat penting karena sebagai wadah untuk mendapatkan layanan kesejahteraan untuk anak-anak tidak mampu atau tidak memiliki keluarga, di Kabupaten Seruyan dari tahun 2016 sebanyak 8 unit, tahun 2017 sebanyak 6 unit dan tahun 2018 sebanyak 8 Unit (LKSA Hj. Maskacil, Al mustaghfirin, Pesantren Asseruyaniyah, Darul Mukmin, Pa

Aladin Seruyan Hilir, Hidayatul Amin, Hidayatul Salikin Pembuang Hulu, Rodatul tolibin Seruyan Raya) dan tahun 2019 dan 2020 menurun, LKSA berkurang karena sudah tidak aktif lagi sebanyak 4 unit yaitu LKSA Hj. Maskacil, Al mustaghfirin, Hidayatul Salikin Pembuang Hulu, Rodatul tolibin Seruyan Raya.

Tabel 2.80
Rasio Jumlah LKSA
Kabupaten Seruyan Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	8	6	8	4	4

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Adapun data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

Tabel 2.81
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah
Lansia Terlantar	3465
Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (LP)	232
Orang dengan HIV-AID (ODHA)	3
Eks Korban Nazpa	2
Kelompok Minoritas / Waria	6

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah
Anak yang berhadapan dengan Hukum	13
LKSA (Lembaga Kesejateraan Sosial Anak)	165
Penyandang Disabilitas	835
Penyandang Disabilitas Fisik/Tubuh (Tuna Daksa)	386
Penyandang Disabilitas Fisik / Mata (Tuna Netra)	14
Penyandang Disabilitas Fisik / Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	17
Penyandang Disabilitas Mental / Mental Retardasi (Tuna Grahita)	60
Penyandang Disabilitas Mental / Mental Eks Psikotik (Tuna Laras / Gila)	138
Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	220
Bencana Alam	14
Bencana Sosial	65

Sumber Data : Dinas Sosial 2021

3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Potensi dan Sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.

Adapun Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Seruyan sebagaimana berikut:

Tabel 2.82
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2020

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah
Pendamping Disabilitas	1
Pendamping ODGJ	1
Pendamping Lansia	1
TSKS	10
Karang Taruna	42
Taruna siaga Bencana	71
Pendamping Sisial PKH	16

Sumber Data : Dinas Sosial 2021

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun adalah merupakan Jumlah sengketa/perselisihan Hubungan Industrial yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun (kasus) pada tahun 2015 tercatat 16 kasus dan tahun 2016 tercatat 18 kasus, pada tahun 2019 meningkat signifikan menjadi 339 kasus,dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 133 kasus. Hal ini menunjukan bahwa masih perlu pembinaan terhadap pekerja dan pengusaha di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.83
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	16	18	15	14	339	133

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Seruyan

2. Penempatan Tenaga Kerja

Lowongan kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan pada Tahun 2015 sebesar 37 lowongan, sementara tahun 2016 tidak ada, tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 100 lowongan, pada tahun 2018 sebesar 121 orang, begitupun dengan pencari kerja terdaftar sejak Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif pada pada tahun 2015 menjadi 140 orang, meningkat pada

tahun 2016 menjadi 275 orang, begitu juga tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 375 orang, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 277 orang. Namun pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 747 orang, hal ini dikarenakan banyak mendaftar tes CPNS daerah.

Hal yang sama terjadi pada pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Seruyan tahun 2015 sebesar 33 orang dan meningkat menjadi 189 orang pada tahun 2016, pada tahun 2017 menurun menjadi 146 orang pada tahun 2018 menurun signifikan menjadi 6 orang serta tahun 2019 menjadi 16 orang. Walaupun data yang ada menunjukkan pencari kerja yang ditempatkan lebih banyak dari lowongan yang ada dikarenakan banyaknya lowongan yang tidak dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dan masih rendahnya kesadaran perusahaan atau pemberi kerja untuk mentaati aturan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan yang mewajibkan seluruh pemberi kerja yang membuka lowongan pekerjaan harus terlebih dahulu melaporkan lowongan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat sekitar.

Tabel 2.84
Jumlah Pencari Kerja, Bursa Kerja dan Pengantar Kerja
Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lowongan kerja terdaftar	37	0	100	121	8	70
Pencari kerja terdaftar	140	275	375	277	747	50
Pencari kerja ditempatkan	33	189	146	6	16	13
Bursa kerja swasta	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengantar kerja	0	0	0	0	0	0

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Seruyan

3. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perangkat hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Seruyan pada Tahun 2015 hingga 2019 dengan jumlah mediator yang masih kosong dikarenakan belum inpassing sebagai mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun 2015

sebanyak 12 peraturan, meningkat pada tahun 2017 menjadi 17 peraturan dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 2 peraturan. Jumlah perjanjian kerja bersama (PKB) pada Tahun 2019 sebanyak 2 perjanjian.

Jumlah Serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) di Kabupaten Seruyan pada Tahun 2015 sebanyak 5 perusahaan, dan pada tahun 2019 menjadi 9 perusahaan. Jumlah lembaga bipartit di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebanyak 10 lembaga naik pada tahun 2019 sebanyak 23 lembaga.

Perusahaan peserta jamsostek aktif di Kabupaten Seruyan pada Tahun 2015 sebanyak 44 perusahaan naik pada Tahun 2019 menjadi 55 perusahaan. Sedangkan tenaga kerja peserta jamsostek aktif selama tahun 2015-2019 selalu mengalami kenaikan dari 30.807 pada tahun 2015 menjadi 37.543 pada Tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 35.711 orang.

Tabel 2.85
Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Mediator	0	0	0	0	0	0
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	12	0	17	13	2	12
Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0	6	0	5	2	2
Jumlah SP / SB	5	11	4	11	9	40
Jumlah Lembaga Bipartit	10	18	21	21	23	24
Perusahaan peserta jamsostek aktif	44	51	51	51	55	61
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	30.807	32.815	35.303	33.042	37.543	35.711

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Seruyan

B. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Seruyan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan.Angka tahun 2016 sebesar 10,37 persen sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menjadi 9,5 persen dan tahun 2018 penurunan hingga 8.74 persen dan tahun 2019 peningkatan hingga 9.5 dan tahun 2020, penurunan sebesar 4.82 persen. Berikut disajikan tabel Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Seruyan tahun 2016-2020.

Tabel 2.86
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10,37	9,5	8.74	9.5	4.82

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan.

2. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Seruyan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 persentase nya sebesar 89,62 persen, pada tahun 2017 naik menjadi 95.17 persen. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan, namun naik kembali pada tahun 2019 hingga menjadi 95 persen dan tahun 2020 pengalami penurunan sebesar 65.02 persen. Adapun data partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Seruyan tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.87
Partisipasi perempuan di lembaga Swasta
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Swasta	89,62	95,17	94.69	95.00	65.02

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan.

3. Rasio KDRT

Salah satu indikator yang dapat disajikan terkait pemberdayaan perempuan dan pelindaungan anak yaitu besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kejadian KDRT di Kabupaten Seruyan pada beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Pada umumnya tidak terdapat KDRT atau penyelesaian tindak pidana KDRT di kepolisian, namun pada Tahun 2016 terdapat 3 kejadian KDRT dan 3 selesai tindak pidana KDRT. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 1 kasus KDRT. Selanjutnya untuk rasio KDRT dikabupaten Seruyan mengalami fluktuasi dimana tahun 2016 sebesar 0,007 persen dan pada tahun 2020 menjadi 0,002 persen.

Tabel 2.88
Jumlah KDRT di Kabupaten Seruyan tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	3	2	0	1	1
2	Selesai Tindak pidana KDRT	3	2	0	1	1
3	Jumlah Rumah Tangga	46.026	47.478	42.824	43.981	45.486
4	Rasio KDRT (%)	0,007	0,004	0,000	0,002	0,002

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan.

4. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Bank Dunia menyatakan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih rendah. Masih rendahnya partisipasi itu karena terhambat masih kurangnya layanan pengasuhan anak baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Berdasarkan data yang ada, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami

fluktuasi dimana tahun 2016 angkanya sebesar 18,97 persen, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 45 persen. Meskipun mengalami Peningkatan ditahun 2020 menjadi 69,84. Adapun data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Seruyan tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.89
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	18,97	28	40	45	69,84

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan.

C. Pangan

Berdasarkan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023, Keseluruhan kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Seruyan adalah 143.065 juta KKal per tahun yang berasal dari total 151.065 penduduk. Sedangkan, ketersediaan pangan Kabupaten Seruyan adalah 92.105 juta KKal per tahun. Jumlah ketersediaan pangan ini mampu memenuhi sekitar 117.368 penduduk atau sekitar 64% dari total penduduk Kabupaten Seruyan. Dari total 5.208 hektar kawasan permukiman, 3.515 hektar dikategorikan terlampaui ketersediaan energi pangannya. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengurangi defisit penyediaan pangan diantaranya adalah dengan melakukan impor bahan pangan dan/atau menambah area budidaya tanaman pangan dan peternakan yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial setempat. Untuk menentukan hal ini tentunya membutuhkan konsultasi publik yang mendalam untuk mendapatkan aspirasi pemangku kepentingan di Kabupaten Seruyan.

1. Ketersediaan pangan utama

Perhitungan ketersediaan pangan utama ini sangat penting dilakukan untuk melihat surplus tidaknya pangan di suatu daerah tertentu. Dengan diketahuinya neraca tersebut maka antisipasi untuk ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dapat dilakukan sejak dini.

Dari data yang tersedia, diketahui bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Seruyan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 31,91 persen, dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 36,31 persen pada tahun 2020.

Adapun ketersediaan pangan utama di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.90
Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Seruyan tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ketersediaan pangan utama	31,91	32,41	34,03	35,05	35,8	36,31

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian.

Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui bahwa Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 sama yaitu 100 persen.

Tabel 2.91
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
di Kabupaten Seruyan tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

D. Pertanahan

1. Persentase Pemohon Sertifikat yang Telah Diselesaikan

Persentase Pemohon sertifikat yang telah diselesaikan merupakan salah satu indikator pelaksanaan dari urusan pertanahan. Jumlah pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan di Kabupaten Seruyan pada kurun 2016-2020 pada umumnya

mendekati 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan sudah baik, data mengenai hal tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Jumlah Pemohon Sertifikat yang Telah Diselesaikan Menurut Pendaftaran Pertama Kecamatan di Kabupaten Seruyan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemohon	1305	3141	5019	529	3078
2	Jumlah Sertifikat yang Diselesaikan	1305	3047	5019	529	3078
3	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan	100	97.00	100	100	100

Sumber: BPN Kab. Seruyan, Tahun 2020

Berdasarkan data luas tanah yang telah dilaksanakan pemberian hak atas tanah menurut jenisnya di Kabupaten Seruyan, selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, data mengenai hal tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.93
Luas Tanah yang telah Dilaksanakan Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Jenis di Kabupaten Seruyan (m^2)
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hak milik	5.937.291	18.808.474	29.311.578	1.414.776	40.664.675
2	Hak guna bangunan	-	459	1.207.345	338.564	190.760
3	Hak pakai	37.410	18.354	30.048	170.093	1.783.700
4	Hak milik transmigrasi	-	-	-	-	6.438.328
5	Hak guna usaha	-	136.341.400	103.490.386	50.288.255	-

Sumber: BPN Kab. Seruyan, Tahun 2020

E. Lingkungan Hidup

1. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Berdasarkan data penanganan sampah yang tertangani masih fluktuatif dan pada tahun 2020 tertangani 62 persen. Hal ini harus menjadi perhatian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan. Berikut disajikan tabel penanganan sampah di Kabupaten Seruyan:

Tabel 2.94
Penanganan Sampah
di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penanganan Sampah	86.13	36.73	16.53	51	51
2	Persentase Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	1.50	1.50	82.00	98	62

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, 2020

Untuk persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk di akhir tahun mengalami penurunan dikarenakan :

a. Ada beberapa tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang dibongkar karena letaknya tidak disetujui warga sekitar.
b. Jumlah tong sampah yang ada terus berkurang karena rusak dan tidak bisa dipakai lagi.
c. Amrol/Bak Besi Sampah yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, salah satunya dari Kepemilikan KTP yang ada di Kabupaten Seruyan.

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 86,40 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 95,27.

Tabel 2.95
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	86,40	90,20	89,64	93,63	93,66	95,27

Sumber: Disdukcapil Kab. Seruyan

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 2.96
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	n/a	n/a	n/a	n/a	19	19
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	n/a	n/a	n/a	n/a	32	32
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	n/a	n/a	n/a	n/a	0,59	0,59

Sumber: DPMDES Kab. Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di kabupaten seruyan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,59.

2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Adapun Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020 sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 2.97
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	5	5	20	80	97	97

Sumber: DPMDES Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Seruyan pada Tahun 2015 sebesar 5 kelompok dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 97.

3. Persentase PKK aktif

Persentase PKK aktif di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 85 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 100 persen. Angka tersebut bertahan sampai tahun 2020.

Tabel 2.98
Persentase PKK Aktif
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PKK Aktif	85	100	100	100	100	100

Sumber: DPMDES Kabupaten Seruyan

Besarnya jumlah PKK aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk

meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

4. Persentase Posyandu aktif

Persentase Posyandu aktif di Kabupaten Seruyan tahun 2015-2020 sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 2.99
Persentase Posyandu Aktif
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Posyandu aktif	100	91	91	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase Posyandu aktif di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 100 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 91 persen, dan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 100 persen.

5. Bumdes/Bumdesma aktif dan tidak aktif

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di Kabupaten Seruyan Tahun 2020 berjumlah 38, yang aktif berjumlah 36 dan Badan Usaha Milik Desa yang tidak aktif berjumlah 2, Bumdes/Bumdesma tersebut tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Seruyan, diantaranya di Kecamatan Seruyan Hilir Timur berjumlah 7 yang aktif, Kecamatan Seruyan Hilir berjumlah 2 yang aktif, Kecamatan Batu Ampar berjumlah 10 yang aktif, Kecamatan Seruyan Raya berjumlah 3 yang aktif dan 1 yang tidak aktif, Kecamatan Hanau berjumlah 1 yang aktif dan 1 tidak aktif, Kecamatan Danau Seluluk berjumlah 5 yang aktif, dan Kecamatan Seruyan Tengah berjumlah 8 yang aktif.

Tabel 2.100

Jumlah Bumdes/Bumdesma Aktif dan tidak Aktif
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Bumdes/ Bumdesma	Bumdes Aktif	Bumdesma Aktif	Bumdes Tidak Aktif
1.	Seruyan Hilir Timur	7	6	1	
2.	Seruyan Hilir	2	1	1	
3.	Batu Ampar	10	9	1	
4.	Seruyan Raya	4	3		1
5.	Hanau	2	1		1
6.	Danau Seluluk	5	5		
7.	Seruyan Tengah	8	8		
	JUMLAH	**38**	**33**	**3**	**2**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase Bumdes/bumdesma aktif di Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 sebesar 95 persen dan persentase Badan Usaha Milik Desa yang tidak aktif sebesar 5 persen dari jumlah total bumdes/bumdesma Kabupaten Seruyan.

6. Desa Mandiri dan Desa Tertinggal

Kabupaten Seruyan mempunyai 97 desa dengan status desa yang berbeda-beda, diketahui bahwa jumlah desa mandiri pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak ada perubahan masih berjumlah 3 desa, desa maju pada tahun 2019 berjumlah 10 desa dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 14 desa, desa berkembang pada tahun 2019 ada 47 desa mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 56 desa, jumlah desa tertinggal pada tahun 2019 ada 32 desa dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 22 desa, begitu juga dengan desa yang statusnya sangat tertinggal pada tahun 2019 ada 5 desa sedangkan pada tahun 2020 sudah berkurang menjadi 2 desa sangat tertinggal, sebagaimana berikut :

Tabel 2.101

Jumlah Desa berdasarkan Status Desa
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2019 – 2020

No	Status Desa	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Mandiri	3	3
2.	Maju	10	14
3.	Berkembang	47	56
4.	Tertinggal	32	22
5.	Sangat tertinggal	5	2
	Jumlah	**97**	**97**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tabel diatas, jumlah status desa mandiri pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami peningkatan yaitu berjumlah 3 desa atau sebesar 3,0 persen, sedangkan untuk jumlah desa tertinggal dan jumlah desa sangat tertinggal mengalami perubahan dimana pada tahun 2019 berjumlah 37 desa atau 38 persen berkurang menjadi 24 desa atau 24 persen pada tahun 2020 dari jumlah total desa yang ada di Kabupaten Seruyan.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Pemerintah terus mensosialisasikan pentingnya program Keluarga Berencana untuk meredam ledakan penduduk. Program KB dengan 2 anak cukup dikhawatirkan tidak akan tercapai jika kesadaran untuk ber-KB rendah. Untuk itu, berikut disajikan perkembangan Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020.

Tabel 2.102
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan

I. Perhubungan

1. Jumlah Terminal Type C/Pelabuhan Laut/Dermaga/Bandara

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Sedangkan terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan pelabuhan laut, udara dan terminal bus di Kabupaten Seruyan. Berikut adalah tabel jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.103
Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Terminal Bus
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelabuhan Laut	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2.	Jumlah Pelabuhan Dermaga	74 Unit	74 Unit	75 Unit	78 Unit	91 Unit	91 Unit
3.	Jumlah Pelabuhan Udara / Bandara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
4.	Jumlah Terminal Bus	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
	Jumlah	**79 Unit**	**79 Unit**	**80 Unit**	**83 Unit**	**96 Unit**	**96 Unit**

Sumber: Dinas Perhubungan

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara/Bandara dan Terminal Bus dari tahun 2015 – 2020 tidak ada penambahan unit. Dan diketahui bahwa dari tahun 2015 – 2020 terdapat penambahan jumlah pelabuhan dermaga sebanyak 17 unit sehingga menjadi 91 unit di tahun 2020.

2. Jumlah arus penumpang/Barang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebanyak 6.049 orang, ditahun 2016 meningkat menjadi 6.884 orang, pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 2.688 orang. Namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2020 mengalami kenaikan hingga menjadi 3.305 orang. Adapun Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2015 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.104
Jumlah arus Penumpang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (org)	6.049	6.884	2.688	3.014	3.110	3.305
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (ton)	6.023	8.549	5.395	5.925	6.108	6.327

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum dan jumlah angkutan barang di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi, dimana mengalami penurunan dan kenaikan yang di sebabkan oleh beberapa faktor.

3. Prosentase Layanan Angkutan Darat

Di dalam hal angkutan darat akan ditunjukkan persentase jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Persentase tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.105
Persentase Angkutan Darat
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkutan Darat	64	95	88	81	82	84
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	9.360	9.898	10.652	13.029	13.169	13.298
Persentase Angkutan Darat	0,68	0,95	0,82	0,62	0,62	0,63

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

4. Jumlah uji KIR angkutan umum

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana Jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun 2015 sejumlah 1.465 unit, di tahun 2016 turun menjadi 1.403 unit, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1.443 unit, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 1.020 unit, akan tetapi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 1.362 unit. Berikut disajikan tabel Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020.

Tabel 2.106
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah uji KIR angkutan umum	1.465	1.403	1.443	1.020	1.130	1.362

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

5. Pemasangan Rambu-rambu

Untuk data Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020 ditunjukan persentasi Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Pada terhadap jumlah rambu-rambu yang seharusnya terpasang dan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.107
Pemasangan Rambu-rambu
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu (unit)	30	201	192	213	214	247
Jumlah Rambu-Rambu Yang Seharusnya Tersedia (unit)	135	251	115	209	208	227
Pemasangan Rambu-Rambu (%)	22,22	80	116,96	101,96	102,88	108,80

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 sebesar 22,22 persen, dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 116,96 persen, menurun pada

tahun 2018 menjadi 101,96 persen, namun terjadi peningkatan kembali hingga tahun 2020 menjadi 108,80 persen.

J. Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.108
Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten Seruyan
Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Telepon Rumah	1.550	1.367	1.440	2.544	2.728	2.791
2.	Jumlah Telepon Seluler	6.828	8.381	9.115	23.775	25.423	26.870
3.	Jumlah Provider Telekomunikasi	3	3	3	3	3	4
4.	Jumlah Penyedia Layanan Internet	8	9	9	1	2	4

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Seruyan

2. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.

Tabel 2.109
Jumlah Surat kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Seruyan
Tahun 2015 – 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Surat kabar Lokal	10	12	10	8	11	13
2.	Jumlah Surat Kabar Nasional	9	11	9	4	11	14
	Jumlah	**19**	**23**	**19**	**12**	**22**	**27**

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Seruyan

3. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang berijin di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.110
Jumlah Radio/TV Nasional/Lokal di Kabupaten Seruyan
Tahun 2015 – 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Radio Lokal	2	2	2	0	0	0
2.	Jumlah TV Lokal	7	9	9	6	7	5
3.	Jumlah TV Nasional	20	20	19	18	18	18
	Jumlah	**29**	**31**	**30**	**24**	**25**	**23**

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Seruyan

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Persentase koperasi aktif

Pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) indikatornya dapat dilihat dari persentase koperasi yang aktif.

Tabel 2.111
Persentase Koperasi Aktif
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015–2020

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	217	230	234	232	237	237
2	Jumlah koperasi	268	282	286	268	273	273
3	Persentase koperasi aktif	80,97	81,56	81,82	86,57	86,81	86,81

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Seruyan

Dari Tabel diatas dapat diketahui persentase koperasi aktif dari tahun 2015 s/d 2020 mengalami kondisi fluktuatif mengikuti perkembangan koperasi, dimana jumlah koperasi aktif terus menerus meningkat seiring peningkatan jumlah koperasi itu sendiri.

2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Terkait data jumlah UKM non BPR/LKM, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.112
Jumlah UKM Non BPR/LKM
Di Kabupaten Seruyan 2015–2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah seluruh UKM	18.697	18.697	19.220	19.938	19.812
2.	Jumlah UKM Non BPR/LKM	17.235	17.145	17.047	16.869	16.293
3.	Persentase UKM Non BPR/LKM	92,18	91,70	88,69	86,96	85,42

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Seruyan

L. Penanaman Modal

1. Jumlah nilai investasi berskala nasional

Kabupaten Seruyan merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan adanya investasi dalam negeri maupun dari asing agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berikut disajikan tabel jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020.

Tabel 2.113
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Di Kabupaten Seruyan 2015–2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	230	228	46	58	67,69	57,60
Nilai investasi berskala nasional (PMA)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Seruyan

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.

Dalam mewadahi kegiatan kepemudaan, maka terdapat berbagai organisasi kepemudaan. Di Kabupaten Seruyan tercatat persentase organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 60 persen pada Tahun 2020. Angka ini menunjukkan peningkatan sejak Tahun 2015.

Tabel 2.114
Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif
Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	40	45	45	55	70	60

Sumber: Disporaparbud Kabupaten Seruyan

2. Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga di Kabupaten Seruyan mengalami fluktuasi. Hal ini ditunjukkan dengan indikator cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2015 berkisar 72 persen dan pada tahun 2019 berkisar 62.5, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 92 persen termasuk cakupan pembinaan KONI Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.115
Cakupan Pembinaan Olahraga
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pembinaan Olahraga	72	72	45	76	62,5	92

Sumber: Disporaparbud Kabupaten Seruyan

3. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Seruyan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2015 dan 2016 sebanyak 30 orang, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 40 orang, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 32 orang pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah atlet berprestasi tidak bertambah dikarenakan kegiatan olahraga atau even kejuaran yang bersifat mengumpulkan orang banyak tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19, ini berdampak pada jumlah atlet berprestasi yang ada di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.116
Jumlah Atlet Berprestasi
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Atlet Berprestasi	30	30	40	33	32	32

Sumber: Disporaparbud Kabupaten Seruyan

4. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga di Kabupaten Seruyan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2015 sebanyak 7 prestasi, dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan mencapai 11 prestasi cabang olahraga pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga semakin baik, dan pada tahun 2020 seluruh kegiatan olahraga yang bersifat mengumpulkan massa tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19, ini berdampak tidak adanya prestasi olahraga di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.117
Jumlah Prestasi Olahraga
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Prestasi Olahraga	7	8	12	9	11	0

Sumber: Disporaparbud Kabupaten Seruyan

N. Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan Lampiran Permendagri No. 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “PDRB Kabupaten”

Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Seruyan, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

1. Buku Kabupaten Dalam Angka

Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi Kabupaten Seruyan terdiri darikondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dan lain-lain.

Adapun data Buku ”Seruyan Dalam Angka” di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.118
Buku Kabupaten Dalam Angka
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Buku Seruyan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan

2. Buku PDRB Kabupaten

Untuk mengetahui sejauhmana hasil pencapaian pembangunan perekonomian Kabupaten Seruyan, BPS Kabupaten Seruyan mengeluarkan secara resmi Buku PDRB Kabupaten yang berisi informasi-informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB Per Kapita, Inflasi, Ketimpangan (Distribusi) Pendapatan, dan lain-lain.

Adapun data Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.119
Buku PDRB Kabupaten Seruyan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Buku PDRB Kabupaten Seruyan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan

O. Persandian

Persandian terkait dengan:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

P. Kebudayaan

Di dalam urusan Kebudayaan, pemerintah Kabupaten Seruyan telah melakukan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Pencapaian atas kegiatan kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.120
Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Di Kabupaten Seruyan 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelengaraan Seni dan Budaya	2	2	3	2	2	0

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Data tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Seruyan relatif tidak mengalami peningkatan. Dan puncaknya pada tahun 2020 semua kegiatan bersifat mengumpulkan orang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dan juga masyarakat pelaku seni dan budaya.

Tabel 2.121
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Di Kabupaten Seruyan 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Dalam rangka mendukung pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Seruyan, pada tahun 2020 terdapat 2 sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Selain itu, terdapat juga 16 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.122
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Di Kabupaten Seruyan 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	5	5	5	5	24	24

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Q. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun untuk usia 05 sampai usia 59 tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Tabel 2.123
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung pada Perpustakaan Umum Daerah (orang)	1.657	7.173	9.845	6.144	11.784	7.855
Jumlah jiwa dalam populasi yang dilayani	150.172	155.763	159.519	158.231	147.712	151.065

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa:

a. Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun selama 6 tahun (dari 2015 sampai 2020) adalah sejumlah 7.409 pengunjung;
b. Jumlah pengunjung tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan karena jangkauan wilayah layanan perpustakaan keliling bertambah dan pelaksanaan kegiatan *story telling* lebih diperbanyak;
c. Jumlah jiwa dalam populasi yang dilayani yaitu dari usia 05 tahun sampai 59 tahun.

2. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Seruyan.

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Adapun jumlah perpustakaan di Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.124
Jumlah Perpustakaan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 –2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perpustakaan Umum Daerah (unit)	1	1	1	1	1	1
Perpustakaan Desa (unit)	41	44	44	44	44	44
Jumlah (unit)	**42**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**

Sumber:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Seruyan

3. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Seruyan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.125
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015 –2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koleksi Judul Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	9.149	9.333	10.275	10.275	10.275	10.559
Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	26.600	27.150	29.136	29.136	29.136	29.952
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	50,5	93	135	35,27	35,27	35,25

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2015 sebesar 26.600 buku, dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 29.952 buku.

R. Kearsipan

1. Pengelolaan arsip secara baku

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengeloaan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
b. Menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
c. Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;
d. Melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
e. Menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
g. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Adapun Pengelolaan Arsip secara baku di Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.126
Pengelolaan Arsip Secara Baku
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2016–2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentaseperangkatdaerah yang mengelola arsipsecarabaku	10	25	10	40	16

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Seruyan

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Seruyan menunjukkan kondisi yang belum optimal. Berdasarkan informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan, hanya terdapat 2 (dua) kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada Tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 hanya 1 (satu) kegiatan.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Statistik produksi perikanan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi selama 6 (enam) tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah produksi perikanan mencapai 55.322,87 ton dan pada tahun 2016 mencapai 36.494,86 ton, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 mengalami penurunan produksi perikanan budidaya maupun tangkap hingga menjadi 27.030,15 ton, kemudian tahun berikutnya sampai dengan tahun 2020 kembali naik menjadi 35.276,92 ton. Produksi perikanan di Kabupaten Seruyan selama tahun 2015-2020 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.127
Produksi Perikanan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Produksi Perikanan (ton):						
-Perikanan Budidaya	8.123,37	10.693,33	9.932,00	11.148,03	12.165,69	14.457,88
-Perikanan Tangkap	47.199,50	25.801,35	17.098,15	19.769,68	19.992,98	20.819,04
Total	**55.322,87**	**36.494,68**	**27.030,15**	**30.917,71**	**32.158,67**	**35.276,92**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

2. Konsumsi ikan

Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Seruyan selama tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi, dimana konsumsi ikan pada tahun 2015 sebesar 37,43 kg/kap/tahun, dan terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2020 mencapai 52,50 kg/kap/tahun.

Tabel 2.128
Konsumsi Ikan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target Daerah (Kg)	50,56	52,67	47,62	48,53	49,30	51,76
Jumlah Konsumsi ikan (Kg)	37,43	45,01	46,95	46,95	52,24	52,50

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

3. Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan

Berdasarkan data, diketahui bahwa laju pertumbuhan produksi perikanan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 3 persen, seterusnya pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 4 persen, dan pada tahun 2019 menjadi 4,6 persen. Laju pertumbuhan produksi perikanan di Kabupaten Seruyan periode 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.129
Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Produksi perikanan (%)	3	3	4	4	4,6	6,7

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

B. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Kunjungan wisatawan ke Kabupten Seruyan selama tahun 2015-2020 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan sebanyak 42.168 orang, namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi 19.164 orang, terjadinya penurunan kunjungan karena adanya regulasi berkaitan dampak covid 19.

Tabel 2.130
Kunjungan Wisatawan
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Wisatawan	42.168	40.265	30.505	35.288	29.922	19.164

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

C. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Seruyan selama tahun 2015 – 2020 mengalami fluktuasi tingkat produktivitas, dimana pada tahun 2016 mengalami kenaikan tingkat produktivitas sebesar 57,23 ku/ha dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 52,95 ku/ha tahun 2017, 2018 dan 2019 tingkat produktivitas yang tetap sebesar 54,53 ku/ha dan pada tahun 2020 tingkat produktivitas mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit yaitu sebesar 55,53 ku/ha.

Tabel 2.131
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktivitas padi atau Bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	52,95 ku/ha	57,23 ku/ha	54,53 ku/ha	54,53 ku/ha	54,53 ku/ha	55,53 ku/ha

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

2. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.132
Cakupan Bina Kelompok Petani
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan bina kelompok petani	25,17	25,67	26,40	100	85	85

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2015 sebesar 25,17 persen dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 hingga menjadi 85 persen.

Peningkatan Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Seruyan dari tahun ketahun tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam

melakukan pembinaan kelompok tani melalui pengembangan SDM, pengembangan modal, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha.

D. Kehutanan

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 tidak ada data yang tercatat, kemudian pada tahun 2018 menjadi 1,93 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,31 persen dan tahun 2020 juga masih 0,31 persen. Adapun Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.133
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	n/a	n/a	1,93	0,31	0,31

Sumber: DLH Kabupaten Seruyan

2. Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2016 yaitu 12 persen, dan pada tahun 2020 menjadi 9,48 persen. Berikut disajikan tabel Kerusakan Kawasan Hutan tahun 2016-2020 di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.134
Kerusakan Kawasan Hutan
di Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kerusakan Kawasan Hutan	12	12,4	4	9,48	9,48

Sumber: DLH Kabupaten Seruyan

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase Produksi dan Pemakaian Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi

dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, terutama bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah ketersediaan daya listrik.

Berdasarkan data diketahui bahwa persentase Produksi dan Pemakaian Listrik pada tahun 2020 sebesar 2,64 persen. Data lebih rinci mengenai persentase Produksi dan Pemakaian Listrik di Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.135
Produksi dan Pemakaian Listrik di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Bulan	Produksi	Banyaknya Pemakaian (KwH)			
		Dijual	Dipakai Sendiri	Susut	Persentase
Januari	1.893.053	1.819.328	38.634	73.725	3,89
Februari	1.751.998	1.649.341	35.755	102.645	5,86
Maret	1.920.180	1.796.202	39.187	123.966	6,46
April	1.873.808	1.919.182	38.241	-45.386	-2,42
Mei	1.994.766	1.899.108	40.710	95.645	4,79
Juni	1.915.148	1.840.553	39.085	74.583	3,89
Juli	1.896.421	1.841.964	38.702	54.444	2,87
Agustus	1.922.205	1.861.366	39.229	60.827	3,16
September	1.917.765	1.834.599	39.138	83.154	4,34
Oktober	1.983.750	1.957.061	40.485	26.677	1,34
November	1.923.892	1.892.676	39.263	31.204	1,62
Desember	1.929.868	2.005.722	39.385	-75.866	-3,93
Jumlah	**22.922.853**	**22.317.102**	**467.813**	**605.618**	**2,64**

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka

2. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi dan rasio kelurahan/desa berlistrik di Kabupaten Seruyan sampai dengan akhir Tahun 2020 adalah:

Tabel 2.136
Rasio Elektrifikasi
Di Kabupaten Seruyan sampai dengan akhir Tahun 2020

No	Data Rasio Elektrifikasi	
1	Jumlah Kelurahan	3 Kelurahan
2	Jumlah Desa	97 Desa
3	Jumlah Rumah Tangga	40.185 Rumah Tangga
4	Jumlah Kelurahan/Desa Berlistrik a. PLN b. Non PLN c. Jumlah	 57 desa/kelurahan 35 desa/kelurahan 92 desa/kelurahan
5	Belum Berlistrik	8 desa/kelurahan
6	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik a. PLN b. Non PLN c. Jumlah	 29.870 Rumah Tangga 3.792 Rumah Tangga 33.662 Rumah Tangga
7	Rasio Elektrifikasi PLN	74,33 %
8	Rasio Elektrifikasi Non PLN	9,44 %
9	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	83,77 %
10	Rasio Elektrifikasi Desa	92,00 %

F. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memeratakan persebaran penduduk terutama di wilayah Indonesia yang luas. Pemerintah membekali terlebih dahulu para calon transmigran terkait cara mengelola lahan dan mengembangkan wilayah transmigrasi melalui pelatihan/kursus. Kegiatan yang memang ditujukan untuk program transmigrasi adalah kegiatan di sektor pertanian dan dengan sasaran pokok program yaitu pengembangan wilayah dan pembangunan permukiman.

2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 yaitu "ada".

Tabel 2.137
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yg Telah Ditetapkan dengan PERDA
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Seruyan

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 yaitu "ada".

Tabel 2.138
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Seruyan

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 yaitu "ada".

Tabel 2.139
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Seruyan

B. Keuangan

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator dalam fungsi penunjang keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Selama 5 (lima) tahun terakhir penetapan APBD Kabupaten Seruyan selalu tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan tertib pelaksanaan administrasi keuangan.

C. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2015 jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kabupaten Seruyan berjumlah 3.409 orang, sementara untuk tahun 2016 dan 2017 jumlah PNS di Kabupaten Seruyan mengalami penurunan jumlah masing-masing berjumlah 3.078 orang dan 3.048 orang. Hingga tahun 2020 jumlah PNS meningkat menjadi 3.134 orang.

Berikut disajikan tabel jumlah pegawai negeri sipil (PNS) menurut pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Seruyan tahun 2015-2020.

Tabel 2.140
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seruyan
Tahun 2015-2020

Pendidikan	2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
SD	12	2	14	11	2	13	7	3	10	7	2	9	6	2	8	6	2	8
SLTP	31	4	35	23	3	26	24	2	26	22	3	25	17	3	20	16	3	19
SLTA	529	286	815	488	276	764	462	245	707	445	235	680	418	216	634	382	198	580
Diploma (DI-III)	297	447	744	271	431	702	245	426	671	230	412	642	243	437	680	299	480	779
S1	850	817	1.667	739	712	1.451	745	732	1.477	718	724	1442	790	829	1619	765	834	1.599
S2	95	38	133	92	28	120	107	48	155	108	44	152	104	41	145	103	45	148
S3	1	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	0	1	1	0	1
Total	**1.815**	**1.594**	**3.409**	**1.625**	**1.453**	**3.078**	**1.591**	**1.457**	**3.048**	**1.531**	**1.421**	**2.952**	**1.579**	**1.528**	**3.107**	**1.572**	**1.562**	**3.134**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Seruyan

D. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang terkait penelitian dan pengembangan mempunyai kewenangan antara lain: melakukan penelitian daerah, merumuskan pengembangan dan inovasi daerah. Kegiatan untuk penelitian dan pengembangan di Kabupaten Seruyan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil kajian yang telah dilakukan sebanyak 23 kajian dan dari hasil kajian tersebut telah dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah sebanyak 4 kajian.

E. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

F. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Jumlah anggota DPRD yang dilayani oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan pada Tahun 2020 adalah 25 orang. Dari 25 orang ini, sebanyak 12 persen merupakan anggota dewan perempuan. Komposisi anggota dewan dari tahun ketahun mengalami perubahan, namun pada Tahun 2020 disajikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.141
Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Fraksi	Jumlah Anggota			Persentase Anggota DPRD Perempuan (%)
	L a k i - L a k i	Perempuan	Jumlah	
PDI Perjuangan	6	1	7	4
Golkar	4	1	5	4
Nasdem	3	-	3	-
Gerindra	3	-	3	-
Demokrat	2	-	2	-
Persatuan Pembangunan	-	1	1	4
PAN	1	-	1	-
PKS	1	-	1	-
Hanura	1	-	1	-
PKB	1	-	1	-
Jumlah	**22**	**3**	**25**	**12**

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan

G. Sekretariat Daerah

1. Nilai SAKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atau yang dulu biasa disebut dengan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Seruyan. LKIPatau LAKIP merupakan salah satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap tahun, SAKIP dinilai untuk memberi gambaran kinerja pemerintah daerah.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kabupaten Seruyan beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2015 mendapatkan predikat C dan meningkat menjadi B dengan nilai 62,60 Poin pada Tahun 2020.

Tabel 2.142
Nilai SAKIP
Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP	C	CC	CC	B (60,47)	B (61, 55)	B (62, 60)

Sumber: Bagian Ortal Setda Kabupaten Seruyan

2. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelengaraaan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Administrasi Negara) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

3. Jumlah Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

Jumlah Informasi Manajemen Pemerintah Daerah adalah Jumlah sistem informasi manajemen Pemerintah Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Jumlah Informasi Manajemen Pemerintah Daerah di Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.143
Jumlah Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Informasi ManajemenPemerintah Daerah	4	4	4	4	4	9

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah informasi manajemen Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dari 4 buah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 hingga tahun 2020 menjadi 9 buah atau persentase peningkatannya sebesar 150%.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi Rumah Tanggaper kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.144
Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015–2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Makanan	53,49	52,48	58,48	52,72	51,33	52,72
2	Konsumsi Non Makanan	46,51	47,52	41,52	47,28	48,67	47,28

Sumber: Kabupaten Seruyan Dalam Angka 2021

2. Angka kriminalitas yang tertangani

Salah satu indikator penting yang banyak digunakan untuk memberi gambaran mengenai aman atau kondusifnya sebuah daerah, yaitu angka kriminalitas. Semakin kecil angka kriminalitas, maka dapat diasumsikan bahwa daerah tersebut aman dan dapat menarik berbagai aktifitas masyarakat, terutama dalam melakukan investasi.

Angka kriminalitas di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Bila ditinjau dari jumlah maupun angka kriminalitas, keduanya menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2020 angka kriminalitas mencapai 4,65 persen dan jumlah kriminalitas sebanyak 69 kasus.

Tabel 2.145
Angka Kriminalitas di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kriminalitas (kasus)	81	125	143	58	61	69
Angka Kriminalitas yang Tertangani (%)	5,39	8,03	8,96	3,96	4,12	4,65

Sumber: 1. Kesbanglinmas
2. Satpol PP

3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Pada Tahun 2015 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Seruyan adalah 43,56 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 44,37 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Hingga tahun 2020 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Seruyan adalah 44,24 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46,33 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan akan semakin baik.

Tabel 2.146
Rasio Ketergantungan
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2015–2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	40.455	41.980	42.381	42.050	41.255	41.551
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	3.919	4.217	4.707	4.055	3.988	4.780
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	44.374	46.197	47.088	46.105	45.243	46.331
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	105.798	109.566	112.431	100.231	102.469	104.734
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	43,56	42,98	42,48	46,00	44,15	44,24

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Seruyan
Disnakertras Kabupaten Seruyan

Rekap seluruh indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada Bab II ini meliputi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.147
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Seruyan Tahun 2012-2020

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	62,39	62,81	63,49	64,77	65,40	66,14	67,04	67,57	67,58
2	Persentase penduduk miskin	Persen	8,82	7,91	8,77	8,50	8,08	7,46	7,43	7,19	6,85
3	Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,99	4,52	4,40	4,64	n/a	4,79	4,28	4,45	4,30
4	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,16	6,28	5,31	5,17	5,02	5,15	5,21	5,09	-2,23
5	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	30,73	32,73	34,44	35,829	37,898	39,93	40,75	41,54	40,96
6	Indeks Gini	Poin	n/a	n/a	0,300	0,292	0,314	0,288	0,287	0,336	0,32
7	Laju Inflasi	Persen	4,69	7,25	7,90	5,72	2,46	3,29	6,02	2,02	1,62
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	CC (55,55)	B (60,03)	B (60,19)
9	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	Disclaimer	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
10	Nilai SAKIP	Predikat	C	C	C	C	CC	CC	B (60,47)	B (61,55)	B (62,60)
11	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	n/a	n/a	n/a	80,79	78,66	79,32	80,03	78,64	81,85
12	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,76	7,81	7,03	7,45	7,49	7,75	7,98	7,75	7,79
13	Harapan lama sekolah	Tahun	11,34	11,75	11,80	11,08	11,56	11,62	11,68	11,62	12,33
14	Angka Melek Huruf	Persen	98,81	99,20	97,53	98,53	98,82	98,87	98,89	98,87	98,87
15	Angka harapan hidup	Tahun	68,41	68,49	68,58	68,88	69,22	69,23	69,24	69,25	69,26
16	Kontribusi Agroindustri terhadap PDRB sektor Industri	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,09	1,31	1,62
17	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,024	0,014	0,014
18	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	31,93	31,38	32,80

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
19	Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	36,56	37,04	37,04
20	Skor pola pangan harapan	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	91,50	79,6	80,1
21	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	65,60	69,06	68,37	74,23	n/a	72,86	74,90	71,66	65,04
22	Indeks Aksesibilitas	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	53,45	97	97
23	Persentase rumah tangga berakses air minum	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5,63	4,351	0,279
24	Rasio elektrifikasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	47,10	49,78	57
25	Rasio Rumah layak huni	Persen	n/a	64,59	49	73	46,07	46,07	47,92	54,56	52,57
26	Persentase wilayah desa yang terhubung dengan jalan kondisi mantap	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	39	17,98	20,78
27	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Segintung	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	4,87
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54,98	56,70
29	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,3	4,3
30	Angka kriminalitas	Persen	n/a	3,12	5,19	5,39	8,03	8,96	3,96	4,12	4,65

Tabel 2.148
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Seruyan Tahun 2012-2020

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,16	6,28	5,31	5,17	5,02	5,15	5,21	5,19	-2,23
2	Laju inflasi	Persen	4,69	7,25	7,90	5,72	2,46	3,29	6,02	2,02	1,62
3	PDRB per kapita Atas Harga Berlaku	Juta Rupiah	30,73	32,73	34,44	35,829	37,898	39,93	40,75	41,54	40,96
4	Indeks Gini	Poin	n/a	n/a	0,300	0,292	0,314	0,288	0,287	0,336	0,32
5	Persentase penduduk miskin	Persen	8,82	7,91	8,77	8,50	8,08	7,46	7,43	7,19	6,85
6	IPM	Poin	62,39	62,81	63,49	64,77	65,40	66,14	67,04	67,57	67,58
7	Angka Melek Huruf	Persen	98,81	99,20	97,53	98,53	98,82	98,87	98,89	98,87	98,87
8	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,76	7,81	7,03	7,45	7,49	7,75	7,98	7,75	7,79
9	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,34	11,75	11,80	11,08	11,56	11,62	11,68	11,62	12,33
10	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,41	68,49	68,58	68,88	69,22	69,59	69,83	69,83	69,25
11	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	65,60	69,06	68,37	74,23	n/a	72,86	74,90	71,66	65,04
12	Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,99	4,52	4,40	4,64	n/a	4,79	4,28	4,45	4,30
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	88,13	88,13	88,87	88,42	88,64	88,64	88,52	89,46	89,44
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persen	62,32	64,71	69,47	69,70	70,13	70,13	72,38	70,07	70,07
15	Opini BPK	Predikat	Disclaimer	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
16	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	38,57	38,77	38,30	36,86	36,59	36,56	36,95	37,04	37,55
17	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	5,84	5,75	5,89	6,07	6,11	6,22	6,33	6.48	6.82
18	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	29,18	29,41	30,37	30,77	30,96	31,93	32,51	32.56	31.88
19	Pertumbuhan Industri Rumah Tangga	Persen	n.a	10,80	18,02	6,81	13,47	n/a	2,02	2.29	2.89

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
20	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Poin	n/a	n/a	n/a	80,79	78,66	79,32	80,03	78,64	81,85
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
2.1.	**Fokus Layanan Urusan Wajib**										
A	**Pendidikan**										
1	**Pendidikan Dasar**										
1.1	APK SD	Persen	n/a	114.64	108.31	114.62	106.88	106.74	111,11	93,39	116,48
1.2	APM SD/SDLB/MI	Persen	92,86	92,23	95,20	95,60	95,50	95,08	95,60	92,39	97,99
1.3	Angka partisipasi sekolah SD	Persen	117,33	114,64	108,31	114,62	106,88	n/a	95,54	92,39	102,26
1.4	Rasio Guru terhadap murid	Rasio	69,80	81,86	73,87	76,15	73,02	n/a	59,85	71,44	71,13
2	**Pendidikan Menengah**										
2.1	APK SMP/MTs	Persen	n/a	99.62	95.3	95.23	92.38	93.22	101,39	70,54	87,42
2.2	APK SMA/SMK/MA	Persen	n/a	60.81	61.86	63.14	68.44	84.47	71,82	57,04	50,26
2.3	Angka partisipasi sekolah SMP	Persen	96,15	99,62	95,3	95,23	92,38	n/a	69,96	64,91	81,28
2.4	Rasio Guru terhadap murid	Rasio	876,89	87,52	101,43	90,67	83,63	n/a	73,29	85,83	90,61
3	**APM**										
3.1	APM SD/MI	Persen	92,86	92,23	95,20	95,60	95,50	95,08	95,60	92,39	97,99
3.2	APM SMP	Persen	77,29	78,86	67,34	70,30	70,40	74,70	74,75	64,91	81,28
3.3	APM SMA	Persen	66,76	42,57	51,92	52,70	50,40	52,10	52,59	51,39	47,87
4	**Angka Partisipasi Sekolah**										
4.1	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	Persen	92,86	92,23	95,20	95,60	95,50	95,08	95,46	92,39	97,99
4.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	77,29	78,86	67,34	70,30	70,40	74,70	59,96	64,91	81,28
4.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	66,76	42,57	51,92	52,70	50,40	52,10	36,54	51,39	47,87
5	**Angka Putus Sekolah**										
5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	n/a	0,17	0,3	0,2	0,27	0,03	0,03	0,40	0,89
5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	n/a	0,18	1,30	0,43	0,81	0,09	0,08	0,80	3,93

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK	Persen	n/a	0,06	0,10	0,17	1,08	0,39	0,34	1,37	6,00
5	**Angka Kelulusan**										
5.1	Angka Kelulusan(AL) SD/MI	Persen	n/a	100	100	98,07	98,8	99,12	99,3	96,98	98,53
5.2	Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs	Persen	n/a	100	99,7	98,98	87,17	98,06	98,17	97,53	99,35
5.3	Angka Kelulusan(AL) SMA/SMK	Persen	n/a	100	96,28	99,03	98,13	98,56	98,89	95,56	91,31
6	**Angka Melanjutkan**										
6.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	Persen	n/a	100	91,65	92,17	87,17	82,64	86,44	96,46	95,97
6.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK (%)	Persen	n/a	82,85	90,09	69,77	65,94	66,93	69,91	75,80	67,52
7	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	n/a	163	168	168	170	171	173	421	519
8	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	n/a	51	55	55	60	65	65	97	223
9	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	n/a	19	21	21	21	21	21	21	21
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio	n/a	0,13263	0,00075	0,00075	135,62	127,05	127,05	124	122,56
11	Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4	Persen	n/a	66,71	n.a	n.a	80,33	94,60	96,28	85,74	87,68
B	**Kesehatan**										
1	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran hidup	Per 1.000	7,1	2,43	7,15	9,4	9,85	6,44	6,27	5,78	6,6
2	AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000	7,1	2,43	7,15	9,4	9,85	6,44	6,27	5,78	6,6
3	AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi)		992.9	997.57	992.85	990.6	990,05	993,56	993,73	994,22	993,40
4	Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000	187.1	242.52	336.42	228.05	271.64	135.23	133,87	257,15	131,20
5	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 1.000	0,84	0,86	0,85	0,75	7,8	7,4	7,11	7,86	6,57

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		balita									
6	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1.000	0,54	0,50	0,50	0,54	0,55	0,59	0,60	0,63	0,544
7	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	/1.000	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,058
8	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	/1.000	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,097
9	Rasio Pustu persatuan penduduk	/1.000	0,34	0,34	0,34	0,39	0,40	0,41	0,43	0,46	0,388
10	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1.000	0,006	0,006	0,006	0,01	0,01	0,01	0,62	0,63	0,971
11	Rasio dokter per satuan penduduk	/1.000	0,15	0,23	0,21	0,16	0,14	0,26	0,26	0,112	0,204
12	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1.000	2,31	2,33	2,36	2,68	2,83	3,13	3,55	3,60	6,62
13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	14,7	23	21	24	10	7	10	18	29,9
14	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	79	72	72,3	75,1	67	65,72	70	67	28,45
15	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	Persen	53	52	51	48	51	77	83	50	62,46
16	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	15	57	49	15	29	16	14,77	53,29	15,81
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	n/a	23	23	2,09	5,58	13,67	15,58	16,50	20,23

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
20	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100.4	84	102,2	70	95	69	73,15	61	29.48
21	Cakupan puskesmas	Persen	110	120	120	120	120	120	120	120	120
22	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	55	52	58	69	73	79	81	82	80
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	n/a	0,5	0,6	0,7	14,54	15,04	16,73	17,98	20,27
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	n/a	40	35	47	33,22	41,53	30,29	57,32	54,90
3	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	n/a	45,65	49,55	53,45	59,3	22,98	19,32	22,5	22,8
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	n/a	0,001	0,801	0,001	n/a	107,24	0,201	75,12	75,12
5	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	n/a	5,61	9,51	13,01	n/a	27,62	25,21	29,09	30,29
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	n/a	1	2	7	0,11	n/a	0,2	2,33	2,33
7	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	n/a	10	18	n/a	n/a	9,09	12,05	13,23	14,05
D	**Perumahan dan Kawasan Pemukiman**										
1	Rasio rumah layak huni	Persen	n/a	64,59	49	73	46,07	46,07	47,92	54,56	52,57
2	Rasio permukiman layak huni	Persen	n/a	0,73	1,81	3,53	0	0	46,07	49,91	48,21
E	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**										
1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Persen	n/a	43,40	62,48	26,10	47,51	49,09	44,37	47,93	48,32
F	**Sosial**										
1	Sarana sosial seperti LKSA	unit	8	8	8	8	8	6	8	4	4

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
G	**Tenaga Kerja**										
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	kasus	n/a	15	17	16	18	15	14	339	133
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
1	Jumlah KDRT	Kasus	0	0	0	2	3	2	0	1	1
2	Selesai Tindak pidana KDRT	Kasus	1	0	0	1	3	2	0	1	1
I	**Pangan**										
1	Ketersediaan pangan utama	Persen	n/a	60	25,65	41,66	32,41	34,03	35,05	35,8	36.31
J	**Pertanahan**										
1	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan	Persen	100	100	100	99,76	100	n/a	100	100	100
K	**Lingkungan Hidup**										
1	Presentase Penanganan Sampah	Persen	6,18	38,20	16,45	14,38	n/a	n/a	16,53	51	51
L	**Kependudukan dan Catatan Sipil**										
1	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	persen	64,57	71,26	87,88	86,40	90,20	89,64	94,63	93,66	95,27
2	Rasio bayi berakte kelahiran	persen	25,06	33,59	42,43	41,79	42,61	92,95	95,09	97,77	99,73
3	Rasio pasangan berakte nikah	persen	2,06	2,53	6,19	14,41	23,68	30,70	48,42	38,15	37,16
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Per1000	289,306	300,555	362,051	429,148	429,278	468,628	545,300	576,182	599,890
5	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Sudah/belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,59	0,59
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	0	5	5	5	5	20	80	97	97
3	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	82	85	100	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	Persen	0	100	100	100	91	91	100	100	100
N	**Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana**										
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	n/a	2 anak	2 anak	3anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
O	**Perhubungan**										
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Terminal Bus	Unit	55	65	65	79	79	80	83	96	96
2	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	n/a	4995	6189	6.049	6.884	2.688	3.014	3.110	3.305
3	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	n/a	84.723	4.524	6.023	8.549	5.395	5.925	6.108	6.327
4	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	n/a	1499	1158	1465	1403	1443	1020	1130	1362
5	Persentase Angkutan Darat	Persen	0,13	0,13	0,09	0,68	0,95	0,82	0,62	0,62	0,63
6	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	n/a	50	327	30	201	192	209	214	247
7	Rasio ijin trayek lintas daerah kabupaten dalam satu kabupaten	Persen	n/a	n/a	n/a	-	-	3	3	3	3
8	Persentase kepemilikan KIR	Persen	n/a	n/a	n/a	68,01	57,48	59,12	40.30	31,12	35,09

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	angkutan umum										
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Persen	n/a	n/a	n/a	0,02	0,038	0,038	0,032	0,034	0,032
P	**Komunikasi dan Informatika**										
1	Jumlah surat kabar Nasional	Unit	n/a	n/a	n/a	9	11	9	4	11	14
2	Jumlah Surat kabar Lokal	Unit	n/a	n/a	n/a	10	12	10	8	11	13
Q	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**										
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	87.43	82.11	84.4	80.97	81.56	81.82	86,57	86,81	86,81
2	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM	unit	11.67	11.81	11.897	17.235	17.145	17.047	16.869	13.05	16,70
3	Persentase UKM Non BPR/LKM	Persen	90,40	90,48	90,40	92,18	91,70	88,69	86,96	86.95	83,30
R	**Penanaman Modal**										
1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Persen	n/a	n/a	219	230	228	46	58	67,69	57,60
S	**Kepemudaan dan Olahraga**										
1	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Persen	20	25	30	40	45	45	55	70	60
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	15	15	18	72	72	45	76	62,5	92
3	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	20	25	25	30	30	40	33	32	32
4	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang Olahraga	5	5	7	7	8	12	9	11	0
T	**Statistik**										
1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/tidak ada	n/a	Ada	Ada	n/a	Ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku PDRB Kabupaten	Ada/tidak ada	n/a	Ada	n/a	n/a	Ada	ada	ada	ada	ada

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
U	**Kebudayaan**										
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	4	2	2	3	2	2	0
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	2	2	3	5	5	5	5	24	24
V	**Perpustakaan**										
1	Jumlah Pengunjung pada Perpustakaan Umum Daerah (orang)	Orang	4.555	3.146	2.985	1.657	7.173	9.845	6.144	11.784	7.855
2	Jumlah jiwa dalam populasi yang dilayani	Jiwa	126.382	138.235	144.302	150.172	155.763	159.519	158.231	147.712	151.065
3	Jumlah Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Desa	Unit	1 PUD dan 29 PD	1 PUD dan 36 PD	1 PUD dan 39 PD	1 PUD dan 41 PD	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 44 PD
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	n/a	38,75	47,25	50,5	93	135	35,27	35,27	35,25
W	**Kearsipan**										
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	10	40	16
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	n/a	1	n/a	n/a	n/a	2	2	2	1
2.2	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**										
A	**Kelautan dan Perikanan**										
1	Laju pertumbuhan produksi perikanan (%)	Persen	2%	2,5%	2,5%	3%	3%	4%	4%	4,6%	6,7%
2	Konsumsi ikan	kg/tahu	n/a	26,97	22,95	37,43	45,01	46,95	46,95	52,24	52,50

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		n									
3	Produksi Perikanan	ton/tahun	24.072,38	29.045,25	24.480,30	55.322,87	36.494,68	27.030,15	31.755,29	32.160,67	35.276,92
	- Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	5.977,68	8.249,45	7.156,26	8.123,37	10.693,33	9.932,00	12.150,71	12.167,69	14.457,88
	- Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	18.094,70	20.795,80	17.324,04	47.199,50	25.801,35	17.098,15	19.604,58	19.992,98	20.819,04
B	**Pariwisata**										
1	Kunjungan wisata	Orang	19.301	19.386	34.289	42.168	40.265	30.505	35.288	29.922	19.164
C	**Pertanian**										
1	Produktivitas padi atau Bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	n/a	140	86,28	121,52	122	136,9	142,06	144,56	145,07
2	Cakupan bina kelompok petani	Persen	n/a	100	50	100	25,67	100	100	85	85
D	**Kehutanan**										
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	n/a	1,63	1,8	1,82	0	n/a	1,93	0,31	0,31
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	n/a	4	4	4	0	n/a	4	9,48	9,48
E	**Energi dan Sumberdaya Mineral**										
1	Persentase Pemakaian Listrik (kWh)	Persen	n/a	n/a	30,49	1,80	2,84	n/a	3,36	3,97	2.64
2	Produksi Listrik (kWh)	kWh	n/a	1.441.209	1.590.030	1.589.483	n/a	n/a	1,789,978	1.757.277	2,005,722
F	**Ketransmigrasian**										

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.3	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
A	**Perencanaan Pembangunan**										
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		n/a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		n/a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		n/a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
B	**Keuangan**										
1	Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	status	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
C	**Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan**										
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	Orang	3.062	3.089	3.141	3.409	3.078	3.048	2.952	3.107	3.134
F	**Sekretariat DPRD**										
1	Jumlah anggota DPRD	Anggota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
G	**Sekretariat Daerah**										
1	Nilai LKjIP atau LAKIP	Predikat	C	C	C	C	CC	CC	B (60,47)	B (61,55)	B (62,60)
2	Jumlah Informasi Manajemen Pemda	Jumlah	4	4	4	4	4	n/a	4	4	9
2.4	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menurut PDRB	rupiah	1.918.676.40	2.126.948.10	2.351.917.40	2.596.011.90	2.859.950.60	n/a	2.873.779	3.698.760	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	Pengeluaran per kapita	ribu rupiah	7.873	7.919	7.958	8.026	8.331	8.658	8.469	8.564	n/a
3	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Persen	n/a	3,12	5,19	5,39	8,03	8,96	3,96	4,12	4,65
4	Rasio ketergantungan	Persen	42,36	41,11	44,85	43,56	42,98	42,48	46,00	44,15	44,24

2.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat
6. Sosial

Adapun jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan
    1) Pendidikan anak usia dini
    2) Pendidikan dasar
    3) Pendidikan kesetaraan
2. SPM Kesehatan
    1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
    2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
    3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
    4) Pelayanan kesehatan balita

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif

3. SPM Pekerjaan Umum
   1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
   2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. SPM Perumahan Rakyat
   1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
   2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
   2) Pelayanan informasi rawan bencana
   3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
   5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. SPM Sosial
   1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
   2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
   3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
   4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Tabel 2.149
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020
1. SPM PENDIDIKAN								
1	Pendidikan anak usia dini	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	n/a	n/a	n/a	64,91	81,22
2	Pendidikan dasar	Persentase warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	n/a	n/a	n/a	93,39	98,38
3	Pendidikan kesetaraan	Persentase warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisifasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	n/a	n/a	n/a	24,53	98,83
2. SPM KESEHATAN								
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen	n/a	80,43	85,73	75,31	n/a
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	n/a	68,04	70,39	48,27	n/a

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	n/a	70,21	73,06	74,02	n/a
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	n/a	43,39	46,76	41,31	n/a
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	40,26	20,39	25,50	n/a
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	5,40	5,89	12,59	n/a
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	17,68	18,59	23,21	n/a
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	15,7	16,05	36,47	n/a
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	50,32	72,05	39,67	n/a
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	n/a	39,14	100	44,88	n/a
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	n/a	16,74	100	25,67	n/a

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	n/a	100	100	100	n/a
3. SPM PEKERJAAN UMUM								
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	Persen	2,81	0,77	21,33	22,72	68,75
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	33,22	41,53	30,29	54,85	9,95
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah rumah layak huni yang disediakan dan direhabilitasi bagi korban bencana	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Jumlah rumah layak huni yang disediakan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	15
5. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga yang mendapatkan layanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	n/a	n/a	n/a	90	90
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	Persen	n/a	n/a	n/a	85	92,22

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	n/a	n/a	n/a	25	70,63
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	n/a	n/a	n/a	90	90
6. SPM SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas telantar di luar panti yang direhabiltasi sosial	Orang	9	12	17	111	262
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar di luar panti yang direhabiltasi sosial	Orang	186	194	150	120	188
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah lanjut usia telantar di luar panti yang direhabiltasi sosial	Orang	251	305	285	583	425
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang direhabiltasi sosial	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Orang	n/a	n/a	n/a	1.042	3.605

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya,

sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.1.1.Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target dan realisasi Pendapatan Daerah selama Tahun 2016-2020 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2016-2020

(Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2016	1.055.473.357.413,83	1.042.119.074.996,41	98,73
2017	1.096.108.633.022,68	1.100.045.651.364,40	100,36
2018	1.112.473.041.177,71	1.126.581.199.242,13	101,27
2019	1.230.888.428.870,43	1.123.014.379.268,72	91,24
2020	1.093.091.792.783,67	1.012.112.273.086,79	92,59

Sumber: LKPD Kabupaten Seruyan

Rata-Rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan rincian objek pendapatan Tahun 2016-2020 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN	**1.042.119.074.996,41**	**1.100.045.651.364,40**	**1.126.581.199.242,13**	**1.123.014.379.268,72**	**1.012.112.273.086,79**	**(0,44)**
Pendapatan Asli Daerah	**56.880.204.216,94**	**110.713.320.379,04**	**93.253.508.652,60**	**88.983.634.301,93**	**70.352.253.285,82**	**10,67**
Pajak daerah	7.470.165.209,50	60.038.441.174,53	46.849.541.357,55	32.508.779.709,74	16.400.860.044,65	120,32
Retribusi daerah	8.807.509.079,00	10.212.958.554,44	16.457.594.997,00	11.288.991.679,14	11.615.822.184,36	9,72
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5.435.727.770,65	6.535.824.524,00	7.529.299.395,00	7.453.171.538,00	7.738.215.980,00	7,65
Lain-lain PAD yang sah	35.166.802.157,79	33.926.096.126,07	22.417.072.903,05	37.732.691.375,05	34.597.355.076,81	4,51
Dana Perimbangan	**768.567.140.019,00**	**726.456.906.684,00**	**699.787.163.268,00**	**723.356.804.730,00**	**629.786.446.179,00**	**(2,43)**
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	147.138.526.019,00	109.962.950.684,00	83.370.757.268,00	93.939.152.730,00	63.542.944.179,00	(13,83)
Dana alokasi umum	621.428.614.000,00	616.493.956.000,00	616.416.406.000,00	629.417.652.000,00	566.243.502.000,00	(1,75)
Dana alokasi khusus						
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**2.632.327.376,00**	**2.345.935.274,00**	**17.913.306.572,00**	**20.614.680.000,00**	**20.180.589.517,85**	**133,14**

Sumber: LKPD Kabupaten Seruyan

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 0,44 persen per tahun. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,67 persen per tahun, Dana Perimbangan tumbuh negatif sebesar 2,43 persen per tahun, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 133,14 persen per tahun.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah tahun anggaran 2016-2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator makro ekonomi, juga pelaksanaan kebijakan belanja daerah diperoleh nilai realisasi belanja daerah, seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2016-2020

(Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2016	1.274.198.530.053,67	1.022.117.647.747,78	80,22
2017	1.327.014.291.141,95	1.047.643.987.088,27	78,95
2018	1.172.851.546.786,60	1.039.448.271.728,80	88,63
2019	1.577.567.066.014,50	1.247.458.582.270,84	79,07
2020	1.332.899.691.459,48	1.067.590.823.883,07	80,10

Sumber: LKPD Kabupaten Seruyan

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2016-2020 berfluktuasi setiap tahunnya. Anggaran belanja tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.577.567.066.014,50 dengan realisasi sebesar 79,07 persen. Anggaran terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.172.851.546.786,60 dengan realisasi sebesar 88,63 persen. Realisasi Belanja Daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020 bertumbuh dengan rata rata pertumbuhan 1,46 persen per tahun. Belanja Daerah diformulasikan kedalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2016-2020 seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi	
	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2016	626.163.516.509,73	395.954.131.238,05
2017	613.248.888.841,54	434.395.098.246,73
2018	595.872.597.903,80	443.575.673.825,00
2019	769.265.317.899,71	769.265.317.899,71
2020	570.699.832.220,57	496.890.991.662,50

Sumber: LKPD Kabupaten Seruyan

Belanja Tidak Langsung dibelanjakan untuk keperluan Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya termasuk Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung terbagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Rincian realisasi belanja tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**395.954.131.238,05**	**434.395.098.246,73**	**443.575.673.825,00**	**478.193.264.371,13**	**96.890.991.662,50**
Belanja Pegawai	241.785.852.647,25	247.371.739.854,24	253.686.730.750,00	270.879.097.385,13	271.069.154.923,50
Bunga	-	15.636.330.000,00	-	-	-
Subsidi	-	-	-	1.711.438.202,00	1.837.392.910,00
Hibah	11.037.217.800,00	19.942.340.109,00	29.929.623.097,00	13.487.249.700,00	9.629.095.300,00
Bantuan Sosial	278.602.332,00	226.331.387,00	296.621.770,00	7.603.736.460,00	6.077.845.931,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	1.301.424.606,00	5.794.821.284,18	4.673.139.908,00	4.775.807.022,00	2.359.669.469,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	141.551.033.852,80	145.423.535.612,31	154.989.558.300,00	179.735.935.602,00	170.984.973.000,00
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	34.932.860.129,00
BELANJA LANGSUNG	**626.163.516.509,73**	**613.248.888.841,54**	**595.872.597.903,80**	**769.265.317.899,71**	**570.699.832.220,57**
Belanja Pegawai	58.360.745.221,00	71.793.360.716,17	78.020.821.142,73	109.740.487.246,19	107.317.680.710,00
Belanja Barang dan Jasa	210.072.293.549,37	220.194.433.957,96	203.038.386.985,75	294.573.121.357,90	197.758.185.803,64
Belanja Modal	357.730.477.739,36	321.261.094.167,41	314.813.389.775,32	364.951.709.295,62	265.623.965.706,93
TOTAL BELANJA	**1.022.117.647.747,78**	**1.047.643.987.088,27**	**1.039.448.271.728,80**	**1.247.458.582.270,84**	**1.067.590.823.883,07**

Sumber: LKPD Kabupaten Seruyan

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. tabel berikut menyajikan gambaran realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 3.6
Pembiayaan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun					Capaian (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**225.225.172.639,84**	**238.717.509.888,47**	**283.619.174.164,60**	**364.252.101.677,93**	**239.807.898.675,81**	**3,81**
Penggunaan SiLPA	225.225.172.639,84	238.717.509.888,47	283.619.174.164,60	364.252.101.677,93	239.807.898.675,81	3,81
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**6.500.000.000,00**	**7.500.000.000,00**	**6.500.000.000,00**	**-**	**-**	**0,41**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	7.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-	-	0,41
PEMBIAYAAN NETO	**218.725.172.639,84**	**231.217.509.888,47**	**277.119.174.164,60**	**364.252.101.677,93**	**239.807.898.675,81**	**4,57**

Sumber: LKPD Kabupaten Seruyan

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan, antara lain: rasio lancar (current ratio) dan rasio quick (quick ratio). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan, antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (debt to asset ratio) dan rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis, antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

Tabel 3.7
Neraca Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
ASET	**3.937.454.245.074**	**13.142.428.947.171**	**4.536.337.430.809,37**	**3.286.260.652.787,00**	**3.279.683.519.259,68**
ASET LANCAR	**287.079.154.518**	**4.497.100.081.550**	**419.509.000.096,62**	**297.609.206.206,44**	**219.714.919.823,43**
Kas	**237.152.216.668**	**280.963.982.174**	**363.037.975.277,93**	**239.097.279.437,81**	**160.808.701.155,24**
- Kas di Kas Daerah	237.151.964.925	280.961.879.458	360.859.277.128,44	233.101.103.566,48	153.859.426.086,35
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	2.102.716	10.254.452,00	2.849.722,00	5.535.198,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	251.743	-	2.168.443.697,49	5.993.326.149,33	36.258.868,00
- Kas di Bendahara Kapitasi JKN	-	-	-	-	1.446.189.085,42
- Kas di Bendahara BOS APBN	-	-	-	-	2.193.888.034,47
- Kas di Bendahara BLUD	-	-	-	-	3.267.403.883,00
Piutang	**5.689.290.307**	**695.485.701.000**	**20.617.732.210,44**	**20.712.715.295,54**	**7.123.943.664,34**
- Piutang Pajak	4.623.730.980	583.322.380.500	6.883.927.851,00	7.700.013.998,61	8.800.031.325,58
- Piutang Retribusi	1.065.559.327	112.163.320.500	4.519.590.154,00	318.061.887,00	222.191.403,00
- Piutang Dana Perimbangan	-	-	8.397.481.260,62	11.032.184.883,39	0,00
- Piutang PAD Lainnya	96.043.336	9.618.145.500	816.732.944,82	1.662.454.526,54	3.395.065.453,60
- Penyisihan Piutang	-	-	-	-	(5.467.515.418,82)
- Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	174.170.900,98
- Piutang Lain-Lain	-	-	-	-	-
Persediaan	**44.237.647.543**	**3.520.650.398.376**	**35.853.292.608,25**	**41.693.800.806,03**	**51.782.275.003,84**
Persediaan	44.237.647.543	3.520.650.398.376	35.853.292.608,25	41.693.800.806,03	**51.782.275.003,84**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**42.591.271.167**	**49.543.608.690**	**55.282.963.263,00**	**56.627.777.604,00**	**56.753.601.166,00**
- Investasi Non Permanen	-	-	0	0	0
- Dana Bergulir	-	-	0	0	0
- Investasi Permanen	42.591.271.167	49.543.608.690	55.282.963.263,00	56.627.777.604,00	56.753.601.166,00

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	42.591.271.167	49.543.608.690	55.282.963.263,00	56.627.777.604,00	56.753.601.166,00
ASET TETAP	**3.448.898.709.546**	**3.711.160.010.134**	**3.973.415.357.616,97**	**4.347.030.716.059,60**	**2.917.285.796.418,43**
- Tanah	205.049.549.405	205.318.017.775	199.852.137.537,00	199.911.606.997,26	200.711.631.497,26
- Peralatan dan Mesin	263.449.761.177	299.343.587.211	316.010.052.143,83	378.567.489.672,02	440.642.173.617,33
- Gedung dan Bangunan	782.286.416.782	783.712.138.287	788.456.356.446,69	854.460.724.153,79	896.367.332.647,29
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.924.121.463.396	2.318.074.499.188	2.543.740.279.924,43	2.771.783.471.529,83	2.949.328.686.848,26
- Aset Tetap Lainnya	22.109.751.030	19.721.242.046	15.435.120.734,02	27.658.155.400,02	38.567.609.829,02
- Konstruksi dalam Pengerjaan	251.881.767.756	84.990.525.627	109.921.410.831,00	114.649.268.306,68	115.926.129.106,68
- Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	(1.724.257.767.127,41)
DANA CADANGAN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- Dana Cadangan	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	**158.885.109.843**	**4.884.625.246.798**	**143.413.073.095,78**	**140.688.341.397,03**	**92.506.335.379,14**
Kas yang dibatasi penggunaannya		1.950.056.703	1.214.126.400,00	710.619.238,00	710.619.238,00
Tagihan Penjualan Angsuran	1.703.618.475	163.441.117.500	1.703.618.475,00	1.703.618.475,00	1.701.618.475,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	43.702.273.912	4.572.111.175.928	49.828.671.689,78	49.757.492.038,03	50.194.140.733,04
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	0,00
Aset Tak Berwujud	7.485.127.277	9.108.578.777	16.572.638.250,00	9.997.613.250,00	7.467.432.816,41
Aset Lain-Lain	105.994.090.179	139.964.374.593	74.094.018.281,00	78.518.998.396,00	32.432.524.116,70
KEWAJIBAN	**15.743.598.260**	**329.504.415.000**	**4.648.783.850,00**	**727.254.238,00**	**3.448.252.952,97**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**15.743.598.260**	**329.504.415.000**	**4.648.783.850,00**	**727.254.238,00**	**3.448.252.952,97**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	34.986.259.000	329.504.415.000	4.648.783.850,00	727.254.238,00	913.294.238,00
Utang Bunga	14.941.382.000	-	-	-	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	0,00

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Utang Jangka Pendek Lainnya	802.216.260	-	-	-	
Utang Beban	-	-	14.129.331.232,55	2.181.057.716,11	2.527.950.760,93
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	7.007.954,04
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**-**	**-**	**-**	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EKUITAS DANA LANCAR	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	-	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-
Cadangan Piutang	-	-	-	-	-
Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA INVESTASI	**-**	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-
RK-PPKD	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**15.743.598.260**	**329.504.415.000**	**4.648.783.850,00**	**3.279.683.519.259,68**	**3.286.260.652.787,00**

Sumber: Neraca Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efi siensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2016 – 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat

dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Arah kebijakan pendapatan daerah kabupaten Seruyan diarahkan pada:

1. Arah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   a. Mengoptimalkan penerimaan PAD;
   b. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah termasuk prosedur dan mekanismenya;
   c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
   d. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
   e. Penguatan data basis pajak daerah;
   f. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
   g. Meningkatkan dan pengembangan asset pemerintah daerah secara profesional.
2. Arah kebijakan untuk meningkatkan dana perimbangan
   a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21;
   b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
   c. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kabupaten dan provinsi.

Arah Kebijakan belanja daerah kabupaten Seruyan diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Seruyan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja daerah tahun 2016 sampai 2020 disusun dengan

pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Penganggaran Belanja Langsung
   a. Diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan serta peningkatan infrastruktur daerah bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat;
   b. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
   c. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran, dan jumlah personilnya.
2. Kebijakan untuk Belanja Tidak Langsung
   a. Belanja Pegawai
      1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
      2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNSD.
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD.
5) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

b. Belanja Bunga dianggarkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD.
c. Belanja Subsidi Belanja subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.
d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
e. Belanja Bagi Hasil Pajak diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.
f. Belanja Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan pada jenis belanja

bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

g. Belanja Tidak Terduga, penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Arah kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seruyan selama tahun 2016-2020 sebagai berikut:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi SILPA tahun anggaran sebelumnya;
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal (investasi) daerah, Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya. Apabila akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, terlebih dahulu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran yang berada pada perangkat daerah. Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran selama periode yang direncanakan.

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah merupakan perbandingan anggaran dengan realisasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara serial serta menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Seruyan, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			Rata-Rata Perubahan (%)
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	
A	Belanja Tidak Langsung	465.406.508.879	427.856.231.988	91,90%	465.406.508.879	434.395.098.247	93,30%	497.816.184.3456	443.575.673.825	89,10	506.132.257.292	478.193.264.371	94,48	650.635.677.474	496.890.991.663	76,37	3,07%
1	Belanja Pegawai	272.870.441.259	241.785.852.647	88,60%	272.870.441.259	247.371.739.854	90,70%	288.013.998.596	253.686.730.750	88,08	287.435.289.277	270.879.097.385	94,24	305.128.676.259	271.069.154.924	88,84	2,34%
2	Belanja Subsidi	0	0	0	2.500.000.000	0	0	1.800.000.000	0	0	2.000.000.000	1.711.438.202	85,57	2.000.000.000	1.837.392.910	91,87	1,47%
3	Belanja Hibah	46.285.695.020	42.904.728.550	92,70%	46.285.695.020	19.942.340.109	43,10%	40.407.133.800	29.929.623.097	74,07	16.047.613.700	13.487.249.700	84,05	15.929.692.202	9.629.095.300	60,45	(17,40%)
4	Belanja Bantuan Sosial	487.720.000	313.192.332	64,20%	487.720.000	226.331.387	46,40%	443.897.200	296.621.770	66,82	8.140.500.000	7.603.736.460	93,41	12.376.535.000	6.077.845.931	49,11	489,34%
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.301.424.606	1.301.424.606	100,00%	1,301,424,606	5,794,821,284	445.27%	6.300.000.000	4.673.139.908	74,18	8.431.400.540	7.603.736.460	90,18	8.823.385.998	2.359.669.469	26,74	63,93%
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	143.407.100.368	141.551.033.853	98,70%	143.407.100.368	145.423.535.612	101,40%	157.757.772.300	154.989.558.300	98,25	180.649.803.732	180.649.803.732	100,00	171.122.369.800	170.984.973.000	99,92	4,10%
8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	3.093.382.449	-	-	3.427.650.043	3.427.650.043	100,00	135.255.018.215	34.932.860.129	25,83	183,83%
B	Belanja Langsung	808.729.301.175	576.194.115.760	71,20%	808.729.301.175	614.003.008.492	75,90%	675,035,362,441	595,872,597,904	88.27	1,071,434,808,723.00	769,265,317,899	71.80	650.635.677.474	496.890.991.663	76,37	(18,69%)
1	Belanja Pegawai	61.580.946.718	58.360.745.221	94,80%	61.580.946.718	71.016.876.066	115,30%	83.145.290.846	78.020.821.143	93,84	120.736.190.851	109.740.487.246	90,89	125.822.886.503	107.317.680.710	85,29	14,00%
2	Belanja Barang dan Jasa	369.343.128.822	178.170.192.799	48,20%	369.343.128.822	223.161.330.590	60,40%	255.350.490.380	203.038.386.986	79,51	569.077.750.184	294.573.121.358	51,76	266.354.932.645	197.758.185.804	74,25	5,69%
3	Belanja Modal	377.867.945.634	357.730.477.739	94,70%	377.867.945.634	319.824.801.836	84,60%	336.539.581.215	314.813.389.775	93,54	381.620.867.688	364.951.709.296	95,63	290.086.194.838	265.623.965.707	91,57	(0,05)

Sumber : Diolah dari LRA Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020 dengan rata- rata pertumbuhan 3,07 persen per tahun dan pertumbuhan Belanja Langsung tumbuh negatif 18,69 persen per tahun.

B. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur merupakan Gambaran tentang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan aparatur, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Seruyan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

URAIAN	REALISASI BELANJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Tidak Langsung	**241.465.122.121**	**244.098.099.556**	**253.686.730.750**	**270.879.097.385**	**271.069.154.924**
Belanja Gaji dan Tunjangan	183.098.823.472	169.799.691.096	174.613.291.350	187.320.367.756	190.550.777.592
Belanja Tambahan Penghasilan**)	56.274.008.649	71.088.608.461	72.256.087.261	76.876.681.445	74.906.691.126
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.092.290.000	3.209.800.000	4.683.300.000	4.810.000.000	4.810.000.000
Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	-	-	2.103.151.566	996.413.608	496.656.473
Belanja pemungutan Retribusi Daerah**)	0	0	30.900.573	875.634.582	305.029.733
Belanja Langsung	**167.720.234.095**	**185.075.263.154**	**174.086.459.202**	**245.697.162.755**	**199.627.216.483**
Belanja Honorarium PNS**)	12.977.659.240	15.919.129.507	15.051.341.527	25.101.423.573	21.537.761.062
Belanja Honorarium Non PNS	40.697.502.581	51.556.941.459	57.680.082.242	79.044.679.385	85.870.307.377
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	580.501.600	554.276.000	497.065.125	366.913.750	60.527.000
Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	5.935.246.800	5.065.887.500	3.971.185.000	7.533.871.000	1.027.207.000
Belanja premi asuransi kesehatan	2.795.365.168	2.851.403.956	-	-	-
Belanja makanan dan minuman pegawai***)	14.152.320.485	15.792.905.193	16.786.995.770	19.179.163.850	10.184.965.100
Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	1.251.966.800	1.229.592.800	1.037.819.200	2.393.075.600	540.888.750
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	4.264.527.135	4.928.049.200	5.608.502.000	6.981.435.125	1.995.407.430
Belanja perjalanan dinas**)	63.976.587.722	64.163.404.103	61.965.156.409	83.266.443.887	52.743.059.414
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	192.000.000	176.200.000	216.830.000	1.237.000.000	866.400.000
Belanja Modal (Kantor. Mobil Dinas. Meubelair. peralatan dan perlengkapan dll)	20.896.556.564	22.837.473.436	11.271.481.929	20.593.156.585	24.800.693.351
TOTAL	**409.185.356.216**	**429.173.362.710**	**427.773.189.952**	**516.576.260.140**	**470.696.371.407**

Sumber:Diolah dari LRA Tahun 2016-2020

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur, secara proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2016-2020 Kabupaten seruyan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	409.185.356.216	1.010.550.347.747	40,49
2	Tahun Anggaran 2017	429.173.362.710	1.055.898.106.739	40,65
3	Tahun Anggaran 2018	427.773.189.952	1.045.948.271.729	40,90
4	Tahun Anggaran 2019	516.576.260.140	1.247.458.582.271	41,41
5	Tahun Anggaran 2020	470.696.371.407	1.332.899.691.459	35,31

Sumber: Hasil Analisis

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2016, persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 40,49 persen, angka ini naik menjadi 40,65 persen di tahun 2017 dan 40,90 persen pada tahun 2018, tahun 2019 sebesar 41,41 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 35,31 persen.

C. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan belanja periodik prirotas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Tabel 3.11
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seruyan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	**Belanja Tidak Langsung**	**384.317.580.580**	**410.952.786.453**	**413.349.428.958**	**455.390.840.009**	**444.413.797.393**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	183.098.823.472	169.799.691.096	174.613.291.350	187.320.367.756	190.550.777.592
2	Tambahan Penghasilan PNS	56.274.008.649	71.088.608.461	72.256.087.261	76.876.681.445	74.906.691.126
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.092.290.000	3.209.800.000	4.683.300.000	4.810.000.000	4.810.000.000
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	2.103.151.566	996.413.602	496.656.473
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	30.900.573	875.634.582	305.029.733
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.301.424.606	5.794.821.284	4.673.139.908	4.775.807.022	2.359.669.469
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	141.551.033.853	145.423.535.612	154.989.558.300	179.735.935.602	170.984.973.000
8	Belanja Bunga	-	15.636.330.000	-	-	-
B	**Pembiayaan Pengeluaran**	**6.500.000.000**	**7.500.000.000**	**6.500.000.000**	**-**	**-**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B)	**390.817.580.580**	**418.452.786.453**	**419.849.428.958**	**455.390.840.009**	**444.413.797.393**

Sumber : Diolah dari LRA Tahun 2016-2020

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup defisit dan menyalurkan surplus. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

A. Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Perkembangan defi sit rill anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	1.042.119.074.996	1.099.976.004.667	1.126.581.199.242	1.123.014.379.269	1.012.112.273.087
Dikurangi					
Realisasi Belanja Daerah	1.004.050.347.748	1.048.398.106.739	1.039.448.271.729	1.039.448.271.729	1.039.448.271.729
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.500.000.000	7.500.000.000	6.500.000.000	-	-
Defisit riil	**31.568.727.249**	**44.077.897.928**	**80.632.927.513**	**83.566.107.540**	**27.335.998.642**
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:	**225.225.172.640**	**238.726.599.888**	**283.619.174.165**	**364.252.101.678**	**239.807.898.676**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	225.225.172.640	238.726.599.888	283.619.174.165	364.252.101.678	239.807.898.676
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	**225.225.172.640**	**238.726.599.888**	**202.986.246.651**	**280.685.994.138**	**267.143.897.318**

Sumber: Diolah dari LRA Tahun 2016-2020

Berdasarkan hasil perhitungan penutup defisit riil anggaran selanjutnya dapat disajikan komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada tabel dibawah.

Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seruyan
Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	225.225.172.639	238.726.599.888	283.619.174.165	364.252.101.678	239.807.898.676
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	225.225.172.639	238.726.599.888	283.619.174.165	364.252.101.678	239.807.898.676
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari LRA Kab.Seruyan 2016-2020

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan untuk memberi gambaran tentang pembentukan komposisi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dengan mengetahui SiLPA periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD yang lebih rasional dan terukur pada tahun tersebut. Melalui analisis ini, juga dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan.

Tabel 3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Petumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	225.225.172.639		238.726.599.888		283.619.174.165		364.252.101.678		239.807.898.676		
1.	Pelampauan penerimaan PAD											
2.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan											
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah											
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya											
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan											
6.	Kegiatan lanjutan											

Sumber: Diolah dari LRA Kab.Seruyan 2016-2020

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran. Analisis ini merupakan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.15
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Seruyan
Tahun Berkenaan Tahun 2016-2020

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Saldo kas neraca daerah	237.152.216.668	280.963.982.174	364.252.101.678	239.807.898.676	161.513.785.195
	Dikurangi:					
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	237.152.216.668	280.963.982.174	364.252.101.678	239.807.898.676	161.513.785.195

Sumber: Diolah dari LRA Kab.Seruyan 2016-2020

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan secara umum baik dalam konteks efektifitas kinerja maupun efisiensi anggaran pendanaan pemerintah daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1.Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten seruyan diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan belanja daerah.

Pendapatan Kabupaten Seruyan terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang alokasinya ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan pendapatan asli daerah terbesar bersumber dari pajak daerah.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Kebijakan alokasi belanja tidak langsung untuk belanja hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah, Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan. Sementara itu untuk belanja bantuan sosial terdiri dari belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat termasuk didalamnya pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu di Kabupaten Seruyan.

Tabel 3.16-A
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2020

Uraian	APBD	PROYEKSI RPJMD Murni	
	2018	2019	2020
PENDAPATAN	**1.112.473.041.178**	**1.207.997.858.946**	**1.280.093.128.222**
Pendapatan Asli Daerah	104.149.851.939	124.000.000.000	138.316.791.692
Pajak daerah	52.602.145.244	59.482.857.085	64.311.926.910
Retribusi daerah	10.397.854.756	20.000.392.387	25.814.256.301
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.081.708.668	8.942.697.684	9.568.686.521
Lain-lain PAD yang sah	35.068.143.271	35.574.052.844	38.621.921.959
Dana Perimbangan	901.216.766.000	957.883.408.946	1.008.106.164.030
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	83.533.157.000	145.828.375.946	125.525.785.080
Dana alokasi umum	616.493.956.000	629.972.859.000	691.748.689.500
Dana alokasi khusus	137.310.000.000	122.780.642.000	128.919.674.100
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		59.301.532.000	61.912.015.350
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	107.106.423.239	126.114.450.000	133.670.172.500
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.606.423.239	25.000.000.000	27.500.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	21.124.214.239	0	0
Alokasi Dana Desa	84.482.209.000	101.114.450.000	106.170.172.500
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	1.500.000.000	0	0
BELANJA	**1.172.851.546.787**	**1.304.206.942.075**	**1.346.293.209.966**
Belanja Tidak Langsung	**497.816.184.346**	**499.361.521.444**	**541.557.257.529**
Belanja Pegawai	288.013.998.596	284.642.824.722	322.939.527.962
Belanja Subsidi	1.800.000.000	2.000.000.000	1.800.000.000
Belanja Hibah	40.407.133.800	16.505.355.000	20.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	443.897.200	4.488.000.000	5.443.897.200

Uraian	APBD	PROYEKSI RPJMD Murni	
	2018	2019	2020
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.300.000.000	7.948.324.947	7.440.138.588
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	157.757.772.300	180.303.766.732	180.840.311.329
Belanja Tidak Terduga	3.093.382.450	3.473.250.043	3.093.382.450
Belanja Langsung	**675.035.362.441**	**804.845.420.631**	**804.735.952.437**
Belanja Pegawai	83.091.490.846	113.872.235.514	99.056.603.174
Belanja Barang dan Jasa	251.961.910.380	322.126.344.403	300.373.608.864
Belanja Modal	339.981.961.215	368.846.840.714	405.305.740.399

Sumber: RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023

Tabel 3.16-B
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	APBD	PROYEKSI	
		2021	2022	2023
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.121.389.869.552**	**1.243.799.140.774**	**1.290.984.287.293**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**137.473.857.462**	**121.672.878.077**	**118.157.694.581**
4.1.01	Pajak Daerah	68.908.937.282	67.929.058.917	67.410.100.130
4.1.02	Retribusi Daerah	3.934.579.806	4.463.928.061	5.075.719.687
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.738.215.980	9.279.891.099	10.671.874.763
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.892.124.393	40.000.000.000	35.000.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**966.914.644.590**	**1.104.274.826.822**	**1.154.082.585.044**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**917.848.757.000**	**1.047.755.644.852**	**1.094.987.443.976**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	797.686.263.000	921.408.892.392	962.134.890.770
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	83.909.890.000	91.792.098.750	102.164.508.443
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	578.163.594.000	607.071.773.700	637.425.362.385
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.451.943.000	171.384.183.942	171.384.183.942
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.160.836.000	51.160.836.000	51.160.836.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	8.806.688.000	9.423.156.160	10.082.777.091
4.2.01.05	Dana Desa	111.355.806.000	116.923.596.300	122.769.776.115
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**49.065.887.590**	**56.519.181.970**	**59.095.141.068**
	Pendapatan Bagi Hasil	49.065.887.590	56.519.181.970	59.095.141.068
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.001.367.500**	**17.851.435.875**	**18.744.007.669**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan**	**17.001.367.500**	**17.851.435.875**	**18.744.007.669**
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	17.001.367.500	17.851.435.875	18.744.007.669
5.	**BELANJA**	**1.237.926.702.733**	**1.355.689.320.265**	**1.334.469.649.843**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**802.448.190.422**	**864.745.513.954**	**813.755.415.160**
5.1.01	Belanja Pegawai	335.913.402.545	443.547.833.755	456.194.140.968
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.236.066.577	340.898.958.899	247.262.552.892
5.1.03	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5.1.04	Belanja Hibah	62.413.121.300	62.413.121.300	92.413.121.300
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	15.885.600.000	15.885.600.000	15.885.600.000

Kode	Uraian	APBD	PROYEKSI	
		2021	2022	2023
5.2	**BELANJA MODAL**	**238.979.424.392**	**285.237.942.257**	**305.080.307.692**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.325.231.933	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.774.600.448	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	115.712.092.311	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.167.499.700	-	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**11.406.581.811**	**11.406.581.811**	**11.406.581.811**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.406.581.811	11.406.581.811	11.406.581.811
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**185.092.506.108**	**194.299.282.243**	**204.227.345.179**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.284.351.708	7.239.298.698	7.248.581.982
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	177.808.154.400	187.059.983.545	196.978.763.198
	Dana Desa	111.355.806.000	116.923.596.300	122.769.776.115
	Alokasi Dana Desa	66.207.348.400	69.886.387.245	73.958.987.083
	Lainnya (sewa traspoder)	245.000.000	250.000.000	250.000.000

Sumber: Hasil Analisis

3.3.2.Perhitungan Kerangka Pendanaan

1) Proyeksi SiLPA

Nilai SiLPA pada periode tahun 2018 dan tahun 2021 menggunakan data APBD tahun 2018 dan tahun 2021. Selanjutnya, proyeksi tahun 2019, 2020, 2022 dan tahun 2023 menggunakan dasar pertumbuhan SiLPA pada periode tahun sebelumnya. Proyeksi SiLPA sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2018-2023

Uraian	APBD	Proyeksi RPJMD Murni		APBD	Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	66.878.505.608	98.209.083.129	68.200.081.744	129.499.833.181	134.352.679.490	65.947.862.549

Sumber: Hasil Analisis

2) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2018 dan tahun 2021 menggunakan data APBD tahun 2018 dan tahun 2021, sedangkan untuk proyeksi tahun 2019, 2020, 2022 dan tahun 2023 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja tahun sebelumnya, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.18-A
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2020

No.	Uraian	APBD	Proyeksi RPJMD Murni	
		2018	2019	2020
A	**Belanja Tidak Langsung**	**452.071.770.895**	**500.335.503.275**	**517.009.965.991**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	194.484.880.852	204.711.059.985	215.474.940.244
2	Tambahan Penghasilan PNS	86.570.717.165	102.267.727.573	107.464.587.718
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.710.000.000	4.710.000.000	4.710.000.000
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.879.910.978	2.042.948.985	2.220.126.700
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	368.489.600	-	-
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.300.000.000	6.300.000.000	6.300.000.000
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa	157.757.772.300	180.303.766.732	180.840.311.329
7	Belanja Bunga	-	-	-
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6.500.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.500.000.000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B)	**458.571.770.895**	**502.335.503.275**	**519.009.965.991**

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 3.18-B
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	APBD	Proyeksi	
		2021	2022	2023
A	**BELANJA**	**622.593.940.287**	**743.828.173.485**	**775.188.595.340**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**437.501.434.179**	**549.528.891.242**	**570.961.250.161**
5.1.01	Belanja Pegawai	335.913.402.545	443.547.833.755	456.194.140.968
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	216.341.946.578	228.675.278.842	241.316.944.414
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	83.475.442.331	162.834.211.101	162.838.852.743
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.141.830.250	17.141.830.250	17.141.830.250
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.825.644.100	13.825.644.100	13.825.644.100
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	358.389.462	358.389.462	358.389.462
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	712.480.000	712.480.000	712.480.000
	Belanja Pegawai BLUD	4.057.669.824	-	-
	BPJS	-	20.000.000.000	20.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.588.031.634	105.981.057.487	114.767.109.192
	Gaji Honorer	*87.860.517.055*	*92.253.542.908*	*101.039.594.613*
	Telepon, Air, Listrik, Internet, Surat Kabar	*13.727.514.579*	*13.727.514.579*	*13.727.514.579*
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**185.092.506.108**	**194.299.282.243**	**204.227.345.179**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.284.351.708	7.239.298.698	7.248.581.982
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	177.808.154.400	187.059.983.545	196.978.763.198
	Dana Desa	111.355.806.000	116.923.596.300	122.769.776.115
	Alokasi Dana Desa	66.207.348.400	69.886.387.245	73.958.987.083
	Lainnya (sewa traspoder)	245.000.000	250.000.000	250.000.000
B	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**12.963.000.000**	**22.462.500.000**	**22.462.500.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.963.000.000	22.462.500.000	22.462.500.000
	Bank Kalteng	12.963.000.000	12.962.500.000	12.962.500.000
	PDAM	-	2.000.000.000	2.000.000.000
	PERUSDA	-	7.500.000.000	7.500.000.000
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B)	**635.556.940.287**	**766.290.673.485**	**797.651.095.340**

Sumber: Hasil Analisis

3) Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan pengolahan data–data yang disajikan diatas, selanjutnya disajikan proyeksi Riil Kemampuan Keuangan daerah. Untuk mengetahui kapasitas Rill, akan dikelompokkan penerimaan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sudah menjadi hak daerah serta pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah sehingga dapat diketahui besaran dana untuk mendanai pembangunan Kabupaten Seruyan.

Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2018-2023

Uraian	APBD	Proyeksi RPJMD Murni		APBD	Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	**1.112.473.041.178**	**1,207,997,858,946**	**1.280.093.128.222**	**1.121.389.869.552**	**1.243.799.140.774**	**1.290.984.287.293**
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	66.878.505.608	98,209,083,129	68.200.081.744	129.499.833.181	134.352.679.491	65.947.862.549
Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-
Total penerimaan	**1.179.351.546.786**	**1,306,206,942,075**	**1.348.293.209.966**	**1.250.889.702.733**	**1.378.151.820.265**	**1.356.932.149.843**
Dikurangi						
Pengeluaran pembiayaan	6.500.000.000	2,000,000,000	2.000.000.000	12.963.000.000	22.462.500.000	22.462.500.000
Belanja Tidak Langsung	497.816.184.345	499,361,521,444	541.557.257.529	-	-	-
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**675.035.362.440**	**804,845,420,631**	**804.735.952.437**	**1.237.926.702.733**	**1.355.689.320.265**	**1.334.469.649.843**

Sumber: Hasil Analisis

4) Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan Alokasi Anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta merupakan sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas program. Mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan terutama untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik.

Kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya, selanjutnya dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Pengalokasian kedalam 3 (tiga) prioritas menggambarkan urgensi belanja untuk mendanai pembangunan selama 5 (lima) tahun.

a. **Prioritas I,** dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat.
b. **Prioritas II,** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Secara keseluruhan proyeksi rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan Keuangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	Proyeksi RPJMD Murni		APBD	Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	**804,845,420,631**	**804,735,952,437**	**1.237.926.702.733**	**1.355.689.320.265**	**1.334.469.649.843**
PRIORITAS I	91,667,103,332	91,667,103,332	635.556.940.287	766.290.673.485	797.651.095.340
PRIORITAS II	397,103,849,480	461,691,452,686	483.558.464.891	552.469.341.251	505.033.480.286
PRIORITAS III	316,074,467,819	251,377,396,419	118.811.297.555	36.929.305.529	31.785.074.217

Sumber: Hasil Analisis

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Analisis Dampak Covid-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi di Indonesia meskipun baru satu tahun menyebar ke negera ini. Tak terkecuali di segi ketenagakerjaan, penduduk usia kerja di Kabupaten Seruyan juga terkena dampaknya. Dampak yang paling dirasakan adalah terjadinya pengurangan jam kerja akibat pandemi COVID-19. Pengurangan jam kerja ini adalah salah satu kebijakan yang diterapkan para pengusaha dan lembaga pemerintah dalam menekan tingkat penyebaran pandemi. Di Kabupaten Seruyan, sekitar 90,14 persen penduduk usia kerja mengalami hal ini. Pengurangan jam kerja diharapkan dapat meminimalkan kontak antar individu sehingga menekan angka penularan virus.

Pengaruh lain yang dialami oleh penduduk usia kerja di Kabupaten Seruyan akibat COVID-19 adalah adanya penduduk yang sementara tidak bekerja. Kondisi ini dialami oleh sekitar 7,74 persen penduduk usia kerja. Kemudian, penduduk usia kerja yang diperkirakan menjadi tuna karya karena COVID-19 adalah sekitar 1,33 persen. Angka tersebut memang terhitung kecil, namun kesejahteraan setiap penduduk adalah hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan. Diharapkan bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu membahu agar setiap penduduk Seruyan dapat melalui pandemi ini hingga kondisi sosial ekonomi secara dapat pulih kembali.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan

besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan.

Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak Covid- 19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global Tahun 2008.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya Non Performing Loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari

Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir Tahun 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi. Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di Tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi.

Dari analisa umum di atas, maka dapat dijabarkan bagaimana implikasi dari dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Seruyan, sebagai fokus utama dalam upaya penanganan dan pemulihan dampak Covid-19 ke depannya, yaitu :

1) Pembangunan Sosial

COVID-19 merupakan penyakit menular, sekaligus juga berbahaya, terlebih bagi mereka para lansia dengan kondisi tubuh yang rentan terhadap penyakit. Sebagian besar pasien yang dinyatakan positif corona adalah para lansia dengan jumlah kematian yang juga cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan khususnya dalam pembatasan ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas.

Kebijakan pemerintah membatasi segala aktivitas masyarakat di sebagian besar sektor mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Kondisi ini begitu berdampak pada masyarakat menengah kebawah yang bergantung pada pendapatan harian. Masyarakat ini harus terus memenuhi kebutuhannya akan tetapi mereka juga kehilangan pendapatan, sehingga masyarakat dan keluarga rentan ini akan makin terpuruk dan berada di bawah garis kemiskinan.

Pembatasan aktivitas masyarakat juga dapat berdampak pada sektor pangan. Daerah yang bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah akan kesulitan dalam penyediaan pangan karena keterbatasan ruang gerak distributor. Hal yang bisa terjadi adalah kelangkaan bahan makanan karena produksi dan kontribusi yang terganggu. Efek domino yang ditimbulkan yaitu kenaikan harga bahan pokok hingga penimbunan stok pangan, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan.

Dari segi pendidikan, selama penyebaran pandemi ini masih terus berlangsung, pemerintah tetap mengalami opsi agar sekolah dari berbagai jenjang diliburkan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh via online antara siswa dengan gurunya. Pada kenyataannya, proses pembelajaran via online ini tidak begitu efektif, juga masih ada sebagian siswa yang tidak dapat mengakses pembelajaran via online akibat keterbatasan yang

dimiliki.

Peran perempuan dalam menghadapi penyebaran COVID-19 bisa dikatakan dominan. Sebagian besar tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam pemutusan rantai penyebaran virus ini merupakan perempuan. Mereka bertaruh nyawa dan meninggalkan keluarganya demi menyelamatkan kehidupan orang lain. Disisi lain, di tengah pandemi ini, perempuan juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga akibat keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

2) Pembangunan Ekonomi

Adanya himbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah, secara tidak langsung akan menyebabkan gangguan pada akses listrik. Kondisi ini dapat terjadi akibat kekurangan pasokan dan personel dalam memastikan akses terhadap energi yang digunakan masyarakat. Dampak yang lebih lanjut yaitu melemahnya respons dan kapasitas sistem kesehatan akibat pasokan energi yang terganggu.

Efek domino adanya pembatasan kegiatan penduduk yaitu berdampak besar terhadap bagi kehidupan sehari-hari. Hal yang dirasakan secara langsung akibat penyebaran virus corona yang begitu cepat ini yaitu banyaknya kegiatan ekonomi ditangguhkan, pendapatan lebih rendah, lebih sedikit waktu kerja dan pengganguran untuk pekerjaan tertentu terutama bagi para pekerja yang bersifat kontrak disuatu perusahaan atau pabrik.

Upaya pencegahan COVID-19 berupa penerapan kebijakan lockdown. Lockdown merupakan tindakan yang mampu menutup total akses dari segala penjuru. Hal ini berakibat pada lumpuhnya aktivitas ekonomi sehingga banyak pekerja industri yang dirumahkan/ PHK dan berhentinya pekerjaan-pekerjaan infrastruktur guna membatasi kegiatan fisik antar individu yang berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Seruyan.

Selama kondisi Covid-19, terlihat bagaimana kesenjangan masyarakat terlihat, salah satunya dalam mengakses fasilitas kesehatan. Keterbatasan inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya fenomena

gunung es dimana masyarakat tidak mampu atau bahkan tidak ingin dilakukan tes Covid-19 setelah merasakan gejala pada tubuhnya. Selain itu, banyak masyarakat yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan akibat dari penyebaran virus corona disebabkan oleh letak permukiman pada daerah berbukit sehingga jauh dari rumah sakit rujukan Covid-19.

Selama ini terjadi persaingan berbagai negara dalam kaitan perekonomian, fasilitas ketahanan negara, perkembangan pembangunan infrastruktur di tiap negara dan sebagainya. Hal ini menjadikan negara satu dengan negara lain berlomba-lomba untuk "memenangkan" status menjadi negara terbaik. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 yang merupakan permasalahan internasional ini, maka seluruh negara bekerjasama dalam mencari solusi bagaimana menekan atau menghilangkan penyebaran Covid-19. Kemudian pada saatnya nanti, seluruh negara juga akan bekerjasama saling membantu dalam membangun kembali berbagai sektor pembangunan yang terpuruk sebagai dampak Covid-19, khususnya perekonomian yang tampak nyata dampaknya.

3) Pembangunan Lingkungan

Salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai langkah preventif pencegahan penularan virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. Namun, terdapat gangguan pasokan dan akses yang belum memadai terhadap air bersih sehingga akan berdampak terhadap kualitas pola hidup bersih dan sehat melalui mencuci tangan.

Salah satunya adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh, yakni permukiman yang dekat dengan pinggiran sungai dengan kualitas air yang rendah. Selain potensi terjangkit COVID-19 karena kepadatan yang tinggi dan kondisi sanitasi yang buruk, juga akan berdampak pada penyakit lainnya.

Salah satu upaya dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dampak dari penerapan lockdown atau PSBB untuk

mencegah penyebaran Covid-19 ini menyebabkan masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah besar yang berakibat pada kelangkaan bahan keperluan medis maupun keperluan pokok lain. Hal ini juga berimplikasi terhadap penurunan produktivitas karena kelangkaan bahan baku akibat dampak lainnya seperti distribusi barang dan jasa juga mengalami kendala.

Dengan adanya pembatasan kegiatan di luar ruangan, penggunaan transportasi maupun kendaraan pun berkurang sehingga tingkat polusi udara dan gas rumah kaca di Kabupaten Seruyan menunjukkan penurunan yang signifikan di tengah pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 menyadarkan manusia untuk tetap menjaga lingkungan dan mengambil tindakan nyata agar kejadian sama tidak terulang kembali.

Lingkungan menjadi lebih baik karena berkurangnya aktivitas manusia, khususnya aktivitas perekonomian. Namun, penggunaan disinfektan pada seluruh daerah di Kabupaten Seruyan guna mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara berlebihan menjadi potensi baru dalam pencemaran lingkungan. Pada dasarnya, cairan disinfektan ini bertujuan membunuh berbagai macam bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme berbahaya lain yang terdapat pada ruangan atau permukaan benda, namun dampaknya ketika limbah tersebut dibuang sembarangan akan berakibat pada keseimbangan ekosistem lingkungan (tanah dan air).

4.1.1. Kebijakan Mitigasi Dampak Covid-19

Dihadapkan pada dampak yang besar, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam PERPU ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha diantaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

Untuk mewujudkan tahap keempat berjalan efektif maka arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk (1) pemulihan industri pariwisata dan investasi, (2) reformasi sistem kesehatan nasional, (3) reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan (4) reformasi sistem ketahanan bencana.

Terkait munculnya Pandemi Covid-19 serta percepatan pemulihan dampak sosial dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, sampai dengan bulan Maret 2021 berdasarkan data pantauan Covid-19 di Kabupaten

Seruyan telah terkonfirmasi positif sebanyak 476 kasus, dengan total kesembuhan sejumlah 461 orang, dan meninggal sejumlah 4 orang.

Data perkembangan sebaran Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa Kabupaten Seruyan berada di posisi ke dua terendah berdasarkan dari segi jumlah orang terkonfirmasi positif setelah Kabupaten Lamandau. Meskipun demikian Pandemi Covid-19 tetap mempengaruhi kondisi di Seruyan sebagai imbas dampak Kabupaten dan Kota di sekitar. Data yang akan digunakan untuk analisis ini adalah data statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis kondisi ini dilihat dari persentase perusahaan yang mengurangi pegawai di tengah Pandemi, sektor yang paling terdampak dengan turunnya permintaan, dan persentase perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan.

Persentase perusahaan yang mengurangi pegawai di tengah Pandemi Covid-19 paling besar berada pada jasa perusahaan yaitu sebanyak 60,00% diikuti oleh akomodasi dan makan minum sebanyak 52,27% dan jasa konstruksi sebanyak 45,83%. Sementara itu perusahaan yang paling sedikit mengurangi pegawai di masa Pandemi berada pada industri pengolahan yaitu sebanyak 39,66 %. Secara lebih detil bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Persentase Perusahaan yang Mengurangi Pegawai di Masa Pandemi

Sumber: *kalteng.bps.go.id*

Sementara itu sektor paling terdampak disebabkan turunnya permintaan di tengah Pademi Covid-19 berada pada sektor konstruksi sebanyak 95,83% diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 90,92% dan akomodasi makan minum sebanyak 88,64 %. Sedangkan sektor yang paling rendah terdampak akibat turunnya permintaan klien berada pada jasa perusahaan yaitu sebanyak 77,78%.

Gambar 4.2
Sektor Terdampak Covid-19 Berdasarkan Turunnya Permintaan

Sumber: *kalteng.bps.go.id*

Dua kondisi di atas membuat perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah mengalami penurunan pendapatan. Sektor yang mengalami penurunan pendapatan tertinggi adalah sektor jasa secara umum yaitu sebanyak 96,30% diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 95,45%, akomodasi dan makan minum sebanyak 93,18%, dan konstruksi sebanyak 91,67%.

Gambar 4.3
Persentase Perusahaan yang Mengalami Penurunan Pendapatan di Kalimantan Tengah

Sumber: *kalteng.bps.go.id*

4.1.2. Antisipasi Pemulihan Pembangunan Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses transformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan baru. Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

4.1.3. Alternatif Skenario dan Rekomendasi di Masa Pandemi Covid-19

Berubahnya tatanan sosial akibat Covid-19 memunculkan permasalahan dan isu baru dalam perencanaan kebijakan. Setidaknya ada dua faktor yang paling menentukan alternatif skenario terkait Covid-19 yaitu tingkat penyebaran di tingkat global dan tingkat penyebaran di Indonesia, khususnya di daerah-daerah. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah upaya harmonisasi antara aspek ekonomi dan kesehatan. Faktor ekonomi meliputi alokasi sumber daya secara menyeluruh (sumber daya alam, tenaga kerja, aset, finansial) yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Sementara kesehatan mempengaruhi beragam sumber berusaha yang dimiliki oleh masyarakat.

Alternatif skenario terhadap dampak Covid-19 ini didasarkan kepada model penanganan ekonomi di masa pandemi dengan konteks nasional. Secara lebih jelas, faktor jumlah kematian juga akan dipertimbangkan, dengan asumsi bahwa kematian akan mengurangi kesejahteraan dengan memasukkan nilai mortalitas sebagai bagian ongkos ekonomi. Sebagai acuan, dampak Covid-19 akan didekati dengan memanfaatkan mekanisme berikut ini :

1. Berkurangnya aktivitas parawisata dan seni budaya;
2. Disrupsi produksi dikarenakan penerapan protokol kesehatan;
3. Disrupsi rantai produksi global;
4. Meningkatnya penurunan dukungan tenaga kerja *(labor suppy)*, ketidakpercayaan pasar yang disertai oleh turunnya kualitas *human capital;*
5. Kerugian fiskal negara.

Berdasarkan lima mekanisme di atas maka alternatif proyeksi yang berkaitan dengan Covid-19 bisa dipetakan dalam beberapa poin berikut ini :

1. Optimalisasi *Teleworking* Secara Digital dan Virtual.

Bekurangnya aktivitas pariwisata, seni budaya, dan produksi yang bersifat publik diakibatkan oleh penerapan protokol kesehatan telah mengubah lanskap media dan komunikasi digital dan virtual. Aktivitas yang dilakukan secara langsung *(real time)* sebelum pandemi telah diubah ke dalam bentuk digital dengan sangat baik, sehingga mampu menjadi alternatif utama. Penggunaan platform-platform digital yang menawarkan interaksi virtual, baik secara *live* maupun tunda menjadi basis mekanisme baru yang mesti dikembangkan dengan lebih baik. Selain itu, efektivitas waktu dan efisiensi pembiayaan merupakan sisi tawar baru dalam interaksi digital.

2. Meningkatkan Bantuan Modal Usaha Unggulan.

Terjadinya disrupsi rantai produksi secara global berpengaruh terhadap sektor eskpor-import, dan GDP Indonesia. Selain itu, disrupsi global ini juga akan berpengaruh pada kesempatan kerja, investasi, dan stok kapital. Pada sektor industri, persoalan tenaga kerja merupakan asal masalah yang kemudian secara gradual menimbulkan kerugian, sehingga mulai terjadi pengurangan atau perumahan tenaga kerja. Akibatnya terjadi peralihan jenis pekerjaan yaitu munculnya usaha-usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru. Dengan demikian, peningkatan bantuan modal terhadap usaha unggulan yang bisa dipastikan tidak termodali

dengan baik akan meningkatkan sebuah adaptasi dan mitigasi perubahan ekonomi dari bawah.

3. Meningkatkan Penyerapan Fiskal ke dalam program dan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

Terjadinya pergeseran asumsi dasar ekonomi makro semenjak bulan Maret tahun 2020 menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan naiknya angka pengangguran. Untuk mengantisipasi keadaan, pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa relaksasi di sektor Pajak, bea-cukai, perbankan, perdagangan, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan, serta untuk kepentingan UMKM. Rangkaian stimulus ini terangkum dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk menangani Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Secara makro penggelontoran stimulus fiskal ini berpotensi akan mampu mengkondisikan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara berkelanjutan, anggaran daerah harus digunakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Upaya ini diharapkan mampu mengalihkan insentif yang berasal dari pemerintah ke dalam perekrutan tenaga kerja dan belanja negara yang berdampak pada keberlangsungan kegiatan perekonomian pada tataran mikro, baik di tengah Pandemi maupun setelahnya.

4.2. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didaya gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Kabupaten Seruyan 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut:

4.2.1. Aspek Sosial Budaya

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pada aspek sosial budaya di Kabupaten Seruyan, dapat dipilah menjadi beberapa masalah pokok, yaitu:

A. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan

   Masalah pokok ini dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah, sebagai berikut:

   1. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seruyan.

      IPM Kabupaten Seruyan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan yaitu 62,39 persen pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi 67,58 persen pada tahun 2020. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, IPM Kabupaten Seruyan masih dibawah IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

2. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/MA/SMK.

   APK di Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 untuk jenjang SMA/MA/SMK sebesar 60,81 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 84,47 persen, namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya sampai dengan tahun 2020 hingga menjadi 50,26 persen.

3. Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA.

   Berdasarkan data pada BAB II diketahui bahwa APM Kabupaten Seruyan untuk jenjang SMA pada tahun 2015 sebesar 52,70 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 50,40 persen, namun meningkat kembali pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 52,10 dan 52,59 persen, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 51,39 persen dan 47,87 persen.

4. Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA.

   APS Jenjang SMA di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 52,70 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 50,40 persen, namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 52,10 persen, pada tahun 2018 turun menjadi 36,54 persen, dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 51,39 persen, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga menjadi 47,87 persen.

5. Menurunnya angka kelulusan tingkat SMA.

   Angka kelulusan SMA di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 99,03 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 98,13 persen, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 98,56 persen dan 98,89 persen, namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 91,31 persen.

6. Terjadinya penurunan Angka Melanjutkan untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK.

   Angka melanjutkan di Kabupaten Seruyan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 92,17 persen, mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 82,64 persen. Meskipun pada tahun berikutnya sempat mengalami peningkatan sampai tahun 2019 menjadi 96,46 persen, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 95,97 persen.

   Angka melanjutkan di Kabupaten Seruyan dari SMP/MTs ke SMA/SMK pada tahun 2015 sebesar 69,77 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 65,94 persen, namun pada tahun berikutnya terjadi kenaikan hingga tahun 2019 menjadi 75,80 persen, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 67,52 persen.

7. Meningkatnya Angka Kematian Bayi.

   Berdasarkan data pada BAB II AKB Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 sebesar 2,43 per 1.000 kelahiran hidup, terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 menjadi 9,85, dan sempat mengalami penurunan pada tahun berikutnya sampai tahun 2018 menjadi 5,2, namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 6,6 per 1.000 kelahiran hidup.

8. Masih rendahnya AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi).

   AKHB di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015

   Berdasarkan data pada BAB II AKB Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 sebesar 2,43 per 1.000 kelahiran hidup, terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 menjadi 9,85, dan sempat mengalami penurunan pada tahun berikutnya sampai tahun 2018 menjadi 5,2, namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 6,6 per 1.000 kelahiran hidup

9. Menurunnya Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk.

   Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk pada tahun 2012 sebesar 0,54 per 1.000 penduduk, mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi 0,50, dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan hingga menjadi 0,63 per 1.000 penduduk, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sehingga menjadi 0,544 per 1.000 penduduk.

10. Menurunnya Rasio dokter per satuan penduduk.

    Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 sebesar 0,23 per 1.000 penduduk, mengalami penurunan pada tahun berikutnya hingga tahun 2016 menjadi 0,14, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,26 dan 26 per 1.000 penduduk, dan kembali turun pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 11,2 dan 0,971 per 1.000 penduduk.

11. Menurunnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

    Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Seruyan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2015 sebesar 75,1 persen, mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 menjadi 65,72 persen, sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 70 persen, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 67 persen dan 28,45 persen.

12. Menurunnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.

    Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Seruyan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2015 sebesar 15 persen, naik pada tahun 2016 menjadi 29 persen, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 menurun menjadi 16 persen dan 14,77 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 53,29 persen, namun kembali turun pada tahun 2020 menjadi 15,81 persen.

13. Menurunnya Cakupan kunjungan bayi.

    Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 70 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 95 persen, pada tahun 2017 turun menjadi 69 persen, dan tahun 2018 kembali naik menjadi 73,15 persen, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 61 persen dan 29,48 persen.

14. Adanya Pandemi Covid-19.

    Sampai dengan bulan Maret 2021 berdasarkan data pantauan Covid-19 di Kabupaten Seruyan telah terkonfirmasi positif sebanyak 476 kasus, dengan total kesembuhan sejumlah 461 orang dan meninggal sejumlah 4 orang.

B. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

   Masalah pokok ini dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah, sebagai berikut:

   1. Akuntabilitas kinerja pemda masih rendah.

      NIlai SAKIP Pemda Seruyan masih berada pada predikat B dengan nilai 61,55. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan.

2. Penataan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional belum maksimal.

   Berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi, dan pedoman pelaksanaan lainnya yang menyasar delapan area perubahan melingkupi organisasi, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan budaya kinerja sehingga dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan, "Good Governance" atau "Tata Kelola yang Baik". Penataan reformasi birokrasi menuju "good governance" di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan sampai saat ini masih tergolong belum optimal karena kurangnya sosialisasi tentang penerapan reformasi birokrasi, belum optimalnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dan rendahnya kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan.
3. Pelayanan arsip belum optimal.

Keterkaitan masalah pokok, masalah dan akar masalah untuk aspek sosial budaya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Keterkaitan Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah
Aspek Sosial Budaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kualitas pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan	1. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Jenjang SMA/MA/SMK	a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh orang tua murid. b. Kurangnya kesadaran adanya regulasi PPDB (penerimaan peserta didik baru). c. Kurangnya sarana dan prasarana.
		2. Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA	a. Faktor ekonomi b. Faktor geografis (jarak ke sekolah yang jauh) c. Lingkungan keluarga tidak mendukung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA	a. Faktor ekonomi b. Kenakalan remaja/ minat sekolah rendah. c. Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. d. Belum maksimalnya daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah e. Belum meratanya siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yg lebih tinggi
		4. Menurunnya angka kelulusan tingkat SMA	a. Faktor ekonomi b. Angka putus sekolah tinggi c. Kenakalan remaja d. Tidak memiliki buku penunjang e. kurangnya pemahaman terhadap materi/ pembelajaran
		5. Terjadinya penurunan Angka Melanjutkan untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK	a. Minat sekolah rendah b. Faktor ekonomi c. Jarak tempat tinggal Kesekolah yang jauh
		6. Meningkatnya Angka Kematian Bayi	a. Asfiksia, BBLR, kelainan bawaan. b. Faktor geografis wilayah yang jauh dari faskes c. Kualitas SDM yang masih rendah
		7. Masih rendahnya AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi)	a. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; b. Menurunnya status kesehatan ibu dan anak c. Kurangnya kesadaran ibu untuk berprilaku hidup sehat d. Kondisi Lingkungan yang tidak sehat e. Perawatan selama kehamilan serta perawan neonatal yg tidak adekuat f. Penanganan selama persalinan yang tidak tepat dan tidak bersih
		8. Menurunnya Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Pertumbuhan jumlah penduduk tidak sesuai dengan fasilitas kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		9. Menurunnya Rasio dokter per satuan penduduk	a. Dokter melakukan mutasi/tugas belajar dengan tidak ada dokter pengganti b. Kuota pemenuhan dokter sering tidak terisi pada formasi CPNS dan formasi penugasan khusus
		10. Menurunnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	a. Tidak meratanya distribusi penempatan tenaga bidan disetiap desa b. Sarana prasarana yang tidak memadai/tidak sesuai standart c. Letak geografis/transfortasi, ekonomi dan sosial budaya
		11. Menurunnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	a. Kurangnya Edukasi kemasyarakat pentingnya memeriksakan diri untuk diagnosa TB; b. Target estimasi terlalu tinggi, terus naik tiap tahun, sesuai absolut penemuan tetap; c. Adanya pendemi Covid -19 kunjungan ke Faskes jadi berkurang; d. Tidak terlaksananya kegiatan rutin seperti aktif ketuk pintu, survei aktif e. Penyesuaian penggunaan aplikasi SITB, beberapa faskes tidak bisa menggunakan, belum selesai entry
		12. Menurunnya Cakupan kunjungan bayi	a. Adanya pandemi Covid-19, berdampak terhadap kunjungan faskes b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang ke Faskes/Posyandu
		13. Minat baca masyarakat masih rendah	a. Akses terhadap perpustakaan keliling masih rendah b. Alat transportasi untuk pelaksanaan perpustakaan keliling terbatas, terkait wilayah geografis yang akan dilayani. c. Koleksi bahan pustaka /buku masih terbatas d. Keterbatasan ketrampilan SDM (belum ada tenaga pustaka maupun non pustakawan yang kompeten) e. Sarana dan prasarana yang masih kurang seperti

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			sempitnya ruang baca, kurang memadainya meja dan kursi pengunjung, dan juga sarana untuk layanan sirkulasi.
		14. Adanya Pandemi Covid-19	a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, yang diantaranya (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dalam melakukan aktifitas kesehariannya.
2.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	15. Akuntabilitas kinerja pemda masih rendah	a. Penilaian SAKIP yang masih memperoleh predikat B dengan nilai 61,55 disebabkan perencanaan yang belum fokus dan terukur b. Belum konsistennya antara perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
		16. Penataan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional belum maksimal	a. Belum ditetapkanya Road Map Reformasi Birokrasi b. Rendahnya tingkat profesionalisme aparatur c. Masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai d. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah e. Belum optimalnya penataan sistem manajemen SDM aparatur
		17. Pelayanan arsip belum optimal	a. Sarana dan prasarana penyimpanan arsip belum tersedia. b. Terbatasnya SDM pengelola arsip

Sumber: hasil analisis

4.2.2. Aspek Perekonomian

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pada aspek perekonomian di Kabupaten Seruyan berdasarkan kondisi beberapa tahun terakhir, dapat dijelaskan dengan masalah pokok, belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah. Masalah pokok ini dipicu oleh masalah dan akar masalah yang beragam, antara lain:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi.

   Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan dari tahun 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan kecenderungan fluktuasi. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan sempat meningkat pada tahun 2014 menjadi 5,31 persen, namun mengalami penurunan kembali sampai dengan tahun 2019 hingga menjadi 5,09 persen, dan pada tahun 2020 minus 2,23 persen.
2. Persentase Penduduk Miskin masih tinggi.

   Persentase penduduk miskin di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Secara bertahap tingkat kemiskinan menurun, pada tahun 2015 sebesar 8,5 persen dan pada Tahun 2020 turun menjadi 6,85 persen. Namun angka ini masih jauh diatas tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 4,62 persen pada Tahun 2020. Berdasarkan data selama 6 (enam) tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Seruyan selalu berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Terjadinya penurunan persentase Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

   Persentase nilai investasi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 230 persen, menurun pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 228 persen dan 46 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 58 persen dan 67,69 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 57,60 persen.

4. Adanya kecenderungan penurunan jumlah wisatawan.

   Kunjungan wisatawan ke Kabupten Seruyan selama tahun 2015-2020 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan sebanyak 42.168 orang, mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 30.505 orang, pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 34.870 orang pada tahun 2018 dan 40.505 orang pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi 19.164 orang.
5. Belum optimalnya pengelolan objek wisata.
6. Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya tidak mengalami peningkatan.

   Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Seruyan tidak mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2015 sampai tahun 2019 stagnan pada 2 festival seni dan budaya yang dilaksanakan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat dan juga masyarakat pelaku seni dan budaya.
7. Penerimaan beberapa jenis pajak daerah masih rendah.

Hubungan masalah pokok, masalah dan akar masalah dari permasalahan pada aspek perekonomian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Keterkaitan Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah
Aspek Perekonomian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah	1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Selama 4 tahun terakhir mengalami kecenderungan pelambatan. Hal ini utamanya disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan Asuransi.
		2. Persentase Penduduk Miskin masih tinggi	a. Penduduk Seruyan pada umumnya hidup di sektor pertanian. Kondisi yang ada, pendapatan petani masih rendah. b. Masih rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga tidak berdaya saing untuk berusaha dan/atau memenuhi kualifikasi lapangan pekerjaan. c. Masih terbatasnya intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. d. Infrastruktur wilayah masih terbatas
		3. Terjadinya penurunan persentase Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	a. Melemahnya nilai tukar rupiah b. Faktor global (Pandemi Covid-19) yang berimbas pada perekonomian domestik c. Tertundanya beberapa investasi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
		4. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan	a. Belum optimalnya pengelolan objek wisata. b. Sarana transportasi ke objek wisata masih minim. c. Akses jalan ke tempat wisata masih minim d. Menurunnya Jumlah Penyelengaraan Seni dan Budaya
		5. Penerimaan beberapa jenis pajak daerah masih rendah	a. Data potensi pajak belum di gali secara optimal b. Data wajib pajak belum akurat c. Kurangnya kesadaran wajib pajak.

Sumber: hasil analisis

4.2.3. Aspek Infrastuktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup Kabupaten Seruyan dapat difokuskan menjadi masalah pokok. Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur ke seluruh wilayah, munculnya masalah pokok ini disebabkan oleh masalah dan akar masalah, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik.

   Panjang jalan kabupaten pada tahun 2020 memiliki total 1050,89 km, dimana baru 213,03 km yang dalam kondisi baik, 141,15 km dalam kondisi sedang, 40,80 km dalam kondisi rusak, dan 655,91 km dalam kondisi rusak berat.
2. Masih rendahnya Persentase rumah tangga berakses air minum.

   Persentase rumah tangga berakses air minum di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 5,63 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 4,351 persen dan 0,279 persen.
3. Menurunnya Rasio Rumah layak huni.

   Rasio rumah layak huni di Kabupaten Seruyan dari 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana Rasio rumah layak huni pada tahun 2015 sebesar 73 persen, menurun pada tahun 2016 menjadi 46,07 persen. Meskipun pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 47,92 persen dan 54,56 persen, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 52,57 persen.
4. Masih rendahnya Persentase rumah tinggal bersanitasi.

   Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 47 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 33,22 persen, pada tahun 2017 naik menjadi 41,53 persen, namun pada tahun 2018 turun menjadi 30,29 persen, meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar 54,85 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 27,02 persen.

5. Menurunnya Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan.

   Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 28 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 21,67 persen dan 9,09 persen, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 12,05 persen, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 1,18 persen dan 0,82 persen.

Penjelasan sistematis dari keterkaitan masalah pokok, masalah dan akar masalah pada aspek infrastuktur, tata ruang dan lingkungan hidup disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Keterkaitan Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah Aspek Infrastuktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur ke seluruh wilayah	1. Masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik	Terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah, sedangkan wilayah yang harus dilayani luas.
		2. Masih rendahnya Persentase rumah tangga berakses air minum	a. Karena masyarakat masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari hari. b. Terbatasnya anggaran untuk pembuatan sarana dan prasaran air minum untuk masyarakat. c. Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Khusus untuk penyediaan sarana prasarana air minum berskala besar.
		3. Menurunnya Rasio Rumah Layak Huni	a. Kurangnya kesadaran masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat b. Meningkatnya jumlah penduduk miskin
		4. Masih rendahnya Persentase rumah tinggal bersanitasi	a. Perilaku masyarakat yang sebagian besar masih BAB di sungai. b. Terbatasnya anggaran untuk sarana prasarana air limbah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Sarana dan prasarana air limbah yang sudah terbangun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat
		5. Menurunnya Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB

Sumber: hasil analisis

4.3. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Seruyan disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Seruyan ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional. Isu-isu strategis perlu dikorelasikan dengan isu dan kebijakan nasional maupun regional khususnya yang memberikan manfaat atau pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan Kabupaten Seruyan.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan Kabupaten Seruyan.
2. Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Seruyan.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Seruyan.
4. Kebijakan pembangunan Kabupaten Seruyanyang antara lain terdiri dari RPJPD Kabupaten Seruyan, termasuk hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

4.3.1. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals)*

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar untuk *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership* atau yang dikenal dengan prinsip 5P. Pembangunan global yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan,

dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sustainable Development Goals

NO	Tujuan SDGs
1.	Tanpa Kemiskinan
2.	Tanpa Kelaparan
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4.	Pendidikan Berkualitas
5.	Kesetaraan Gender
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak
7.	Energi Bersih dan Terjangkau
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9.	Industri, Inovasi dan Infrasruktur
10.	Berkurangnya Kesenjangan
11.	Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12.	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13.	Penanganan Perubahan Iklim
14.	Ekosistem Lautan
15.	Ekosistem Daratan
16.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global, Pemerintah Indonesia terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global ini merupakan kontribusi yang positif dari Indonesia sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang telah diarusutamakan dalam RPJMN 2020-2024.

4.3.2. Telaahan Isu Strategis Nasional

1. Telaahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa muatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan warna baru bagi pelaksanaan urusan pemerintahan, baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satu hal yang berubah dari peraturan sebelumnya, yaitu mengenai urusan pemerintahan konkuren. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain urusan wajib dan pilihan, terdapat juga fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah yang terdiri dari a.perencanaan; b.keuangan; c.kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d.penelitian dan pengembangan; dan e.fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan wajib terkait pelayanan dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial. Sementara itu, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan.

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, dalam Undang-Undang ini dimanatkan untuk setiap daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dansasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Telaahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan **Standar Pelayanan Minimal**.

Dalam PP No 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat; dan
6. Sosial.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

3. Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan SDM.
2. Pembangunan Infrastruktur.
3. Penyederhanaan Regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir sebagaimana berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, melalui:
   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, melalui:

1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
3. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
4. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
5. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui:
   1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   6. Pengentasan kemiskinan; dan
   7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui
   1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
   2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
   3. Moderasi beragama; dan
   4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, melalui:
   1. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
   2. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   3. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
   4. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
   5. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, melalui:
    1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
    2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
    3. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui:
    1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
    2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
    3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
    4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
    5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
    6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

4.3.3. Telaahan Isu Strategis Provinsi

A. Telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Selain telaahan terhadap isu nasional, hal yang perlu diperhatikan juga dalam menyusun isu strategis Seruyan, yaitu kebijakan atau isu di provinsi. Telaahan terhadap isu/kebijakan provinsi dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan beberapa isu atau kondisi terkini yang ada di Kalimantan Tengah.

Beberapa Isu strategis yang menjadi isu pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut:

a. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.
b. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing.
c. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah.
d. Pemerataan kesejahteraan masyarakat.
e. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan.
f. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.
g. Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi.
h. Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh.

Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan Visi pembangunan Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2016 – 2021 adalah:

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat Amanah, dan Harmonis)”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam; dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas
   Sasaran: Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten, dengan indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang.
2. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas
   Sasaran:
   a. Meningkatnya konektivitas antar daerah, dengan indikator persentase jalan mantap dan persentase konektivitas jalan.
   b. Meningkatnya ketercukupan energi, dengan indikator meningkatnya rasio desa berlistrik dan Rasio elektrifikasi.
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, Daerah Pesisir dan Pantai
   Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator produktivitas padi, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan
4. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
   Sasaran:
   a. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam pembentukan

PDRB Kalimantan, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

b. Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator Laju Inflasi dan PDRB perkapita.

5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara Konsisten

Sasaran:

a. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau, dengan indikator Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB.
b. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan tingkat pengangguran terbuka.

6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran:

a. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.
b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator IndeksKepuasan Masyarakat (IKM).
c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
d. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran:

a. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator IPM, rata-rata lama sekolah dan angka harapan usia sekolah
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka harapan hidup

8. Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata

   Sasaran:

   Terpasarkannya destinasi wisata, dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan.

9. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

   Sasaran:

   Menurunnya degradasi lingkungan, dengan indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

10. Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan

    Sasaran:

    Meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, persentase PAD terhadap totalpendapatan transfer dan persentase belanja langsung (BL) terhadap APBD.

B. Telaahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Seruyan, dilakukan telaahan terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Seruyan belum memiliki Perda tentang RTRW, sehingga untuk melengkapi aspek spasial dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Seruyan berpedoman pada RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomiwilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadudalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;

3. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukungpengembangan pertanian;
4. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
5. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
6. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
7. pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, rencana strukturruang wilayah provinsi terdiri atas:

1. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
2. Sistem Jaringan Prasarana utama; dan
3. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan **Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan**.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama meliputi:

1. Sistem jaringan transportasi darat:
   a. Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan, mencakup:
      Rencana pengembangan jaringan jalan:
      1) Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi:

Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – **Kuala Pembuang** – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km; Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km; dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km;

2) Rencana pengembangan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi: Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanamang – Tumbang Kaburai – Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km;

3) Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :

a) Sampit – Samuda sepanjang 35,38 Km;

b. Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:

1) Jaringan angkutan sungai dan danau:

a) Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru – Pembuang Hulu - Telaga Pulang - Kuala Pembuang;

2. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian;

a. Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah, meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), **Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan),** dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:

1. Rencana sistem jaringan energi, mencakup:
   a. Pembangkit Tenaga Listrik
      1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, **Kabupaten Seruyan** dan Kabupaten Kapuas;
      2) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, **Seruyan**, dan Barito Utara;
      3) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) diKabupatenSukamara, **Seruyan**, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas;
      4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.
      1) Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
      2) Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
   b. Gardu Induk (GI), terdiri atas; pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, **Seruyan**, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu;

2. Rencana sistem sumberdaya air, terdiri atas:
   a. Wilayah Sungai (WS), mencakup:
      1) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi:
         a) Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu **DAS Seruyan** dan DAS Segintung.
   b. Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak, terdiri dari:
      1) Daerah Rawa (DR)
         a) Daerah Rawa Kewenangan Pusat, meliputi:
            - **DR di Kabupaten Seruyan** (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lokasi);
         b) Daerah Rawa Kewenangan Provinsi, meliputi:
            - **DR di Kabupaten Seruyan** (Luas Pelayanan 15.515 Ha/8 lokasi);
   c. Pengamanan Pantai, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, dan di Seruyan:
      1) pantai di **Kabupaten Seruyan** (Pantai Sungai Bakau);
   d. Instalasi Pengolahan Air Minum, mencakup:
      Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi:
      1) Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota.
   e. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.

Adapun rencana pola ruang provinsi pada kawasan budidaya terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
   a. hutan produksi terbatas (HPT) seluas ±3.335.571 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
   b. hutan produksi tetap (HP) seluas ±3.896.706 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
   c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas ±2.258.274 Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas ±624.101.04 Ha yang tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Non kawasan hutan seluas ±2.629.779 Ha dengan peruntukan sebagai berikut:
   a. kawasan peruntukan pertanian meliputi:
      1) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas +187.814,65 Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
      2) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas 178.572,86 Ha dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas ± 64,001,81 Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
      3) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas ± 37,385 Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
      4) Kawasan Tanah Adat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas 900.000 Ha;
      5) Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kanan dan 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
      6) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000

meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.

b. Kawasan Peternakan yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
d. Kawasan peruntukan perikanan laut seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah;
e. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
    1) kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
    2) Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, **Kabupaten Seruyan**, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
f. Kawasan peruntukan pariwisata disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia;
g. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:
    1) kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar di seluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
    2) kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
h. Kawasan peruntukan transmigrasi yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

i. Kawasan peruntukan technopark perkebunan, technopark pertambangan, technopark perikanan, technopark kehutanan, technopark pertanian, technopark peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

j. Kawasan peruntukan lainnya, yaitu:
   1) kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
   2) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan geostrategic nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
   3) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ±65 Ha di Kota Palangka Raya; dan
   4) Hutan Monumental seluas ±600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wilayah pertambangan dan energi terdiri atas:

1. kawasan peruntukan pertambangan yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
2. kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi di 14 Kabupaten/Kota.

4.3.4. Telaahan Isu Strategis Kabupaten Seruyan

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025, merupakan pedoman pembangunan 20 tahun Kabupaten Seruyan. RPJPD ini memuat pedoman pembangunan5 (lima) tahunan yaitu RPJMD.

Salah satu bagian penting dalam dokumen RPJPD yang perlu diperhatikan dalam merumuskan RPJMD, yaitu penelaahan isu strategis pembangunan jangka panjang. Berikut ini disajikan isu strategis jangka panjang Kabupaten Seruyan yang dikelompokkan dalam 24 bidang untuk memudahkan analisis.

Tabel 4.5
Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

No	Bidang	Isu Strategis
1.	Penduduk	a. Perlu adanya penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan dan pedalaman. b. Perlu adanya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin terutama penduduk miskin yang tinggal di wilayah perdesaan dan pedalaman. c. Perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih bermutu.
2.	Pendidikan	a. Perlu adanya pemerataan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan, wilayah terpencil dan pedalaman. b. Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional. c. Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan khusus terutama bagi penduduk dengan kemampuan khusus. d. Perlu adanya penguatan keterkaitan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan.
3.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	a. Perlu adanya pemanfaatan hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi kesejahetaraan rakyat dan kemajuan daerah; b. Perlu adanya pengembangan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha/industri swasta besar dan perguruan tinggi kepada masyarakat; c. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam

No	Bidang	Isu Strategis
		pengembangan riset unggulan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
4.	Kesehatan	a. Perlu adanya peningkatan dan pengembangan perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat; b. Perlu adanya pemerataan jangkauan layanan kesehatan ke seluruh kecamatan terutama wilayah perdesaan dan pedalaman melalui pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis; c. Perlu peningkatan mutu layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional.
5.	Ketenagakerjaan	a. Perlunya adanya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja; b. Perlunya pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru; c. Perlu adanya perbaikan iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja; d. Perlunya adanya sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
6.	Peranan Wanita	a. Perlu adanya pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundangan-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran; b. Perlu adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik; c. Perlu adanya upaya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik.
7.	Pemuda dan Olah raga	a. Perlu adanya penguatan dan pembinaan prestasi bagi pemuda dalam bidang pendidikan sesuai dengan standar nasional; b. Perlu adanya peningkatan prestasi olah raga di setiap cabang olahraga sesuai dengan standar nasional; c. Perlu adanya peningkatan peran pemuda dalam upaya pelestarian seni dan budaya Kabupaten seruyan.
8.	Agama	Perlu adanya peningkatan kehidupan beragama dalam mendorong perilaku masyarakat yang lebih toleran, jujur, bermoral, dan menjaga keharmonisan kehidupan antarpemeluk agama sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat Kabupaten Seruyan yang semakin maju, bermutu dan bermartabat.
9.	Kesejahteraan Sosial	a. Perlu adanya pengembangan sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan; b. Perlu adanya peningkatan mutu pelayanan sosial terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; c. Perlu adanya peningkatan profesionalisme dalam penanganan masalah sosial; d. Perlu adanya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang sosial masyarakat.
10.	Pembangunan	a. Perlu adanya kelembagaan yang mampu mengelola informasi dan komunikasi serta mampu mengoptimalkan

No	Bidang	Isu Strategis
	dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	keterlibatan lembaga sosial masyarakat dalam pembangunan dan dapat mempercepat proses pengembangan organisasi; b. Perlu adanya peningkatan prasarana dan sarana untuk meningkatkan akses dan mendukung proses produksi, pengolahan dan pemasaran; c. Perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat mendorong produktivitas, kewirausahaan dan ketahanan sosial.
11.	Perekonomian Daerah	a. Perlu adanya perubahan struktur ekonomi Kabupaten Seruyan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian; b. Perlu adanya peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan pemanfatan sumberdaya lokal secara cermat, efisien, efektif, dan berkelanjutan; c. Perlu adanya penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi ke seluruh kecamatan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antarkecamatan di Kabupaten Seruyan.
12.	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	a. Perlu adanya pengembangan agribisnis tanaman pangan di Kabupaten Seruyan dalam penyediaan bibit, pupuk, irigasi, pengolahan, penyuluh, dan jaringan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani. b. Perlu adanya penguatan sistem pertanian pangan melalui intensifikasi dan perluasan area pertanian untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu lumbung beras. c. Perlu adanya peningkatan jaringan irigasi teknis
13.	Perkebunan	a. Perlu adanya pengembangan agribisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahetaraan penduduk Kabupaten Seruyan; b. Perlu adanya pemantapan struktur perkebunan melalui pengelolaan dari hulu-hilir termasuk peningkatan mutu sumber daya manusia, diversifikasi produksi, penggunaan teknologi tepat guna baik dalam peningkatan produksi, pengolahan hasil produksi dan diversifikasi hasil olahan; c. Perlu adanya penguatan kerjasama dan keterkaitan antar bidang khususnya dengan peternakan untuk menghasilkan nilai tambah perkebunan.
14.	Kehutanan	a. Perlu adanya pengelolaan sumber daya hutan secara efisien dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan; b. Perlu adanya pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan yang ada; c. Perlu upaya mempertahankan keseimbangan lingkungan ekosistem dalam jangka panjang; d. Perlu adanya rehabilitasi dan pengayaan hutan dengan menerapkan penanaman dua jenis pohon, yaitu pohon yang tumbuh cepat dan pohon meranti unggulan lokal; e. Perlu adanya upaya pemulihan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.
15.	Peternakan	a. Perlu adanya pengembangan ternak secara efisien terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat; b. Perlu adanya peningkatan fasilitas produksi, pengolahan

No	Bidang	Isu Strategis
		hasil ternak dan pencegahan penyakit ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; c. Perlu adanya pembinaan dan perlindungan usaha bagi peternak skala kecil, serta menjamin kepastian hukum lokasi industri ternak ayam; d. Perlu adanya perluasan jaringan pemasaran ternak yang mampu melayani pasar lokal sampai regional.
16.	Kelautan dan Perikanan	a. Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan berbasis masyarakat dan kemitraan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha perikanan; b. Belum tertatanya manajemen perikanan dan kelautan untuk meningkatkan jumlah, mutu, daya saing dan diversifikasi produksi perikanan mulai dari hulu sampai hilir; c. Rendahnya kualitas SDM perikanan yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan manajemen perikanan bagi nelayan dan pengusaha perikanan, langkanya pelatihan teknologi budidaya perikanan, dan kurang berkembangnya lembaga pendidikan keahlian perikanan; d. Rendahnya kualitas SDM berdampak pada rendahnya pendapatan, rendahnya konsumsi, dan rendahnya mutu gizi masyarakat dan selanjutnya akan berujung pada rendahnya produktivitas. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan pendidikan keahlian teknologi perikanan dan kelautan dalam upaya peningkatan tenaga kerja perikanan yang profesional; e. Rendahnya investasi di bidang perikanan laut skala besar dengan teknologi tinggi dengan radius jelajah dan kapasitas kapal yang besar.
17.	Investasi Daerah	a. Perlu penataan kelembagaan termasuk regulasi dalam mengantisipasi peningkatan investasi; b. Perlu adanya penyederhanaan prosedur investasi dan perijinan usaha; c. Perlu adanya penciptaan iklim investasi dengan mengacu pada perlakuan standar internasional; d. Perlu adanya penyediaan infrastruktur penunjang khususnya transportasi dan telekomunikasi; e. Perlu adanya pengembangan jaringan informasi dan promosi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.
18.	Perindustrian dan Perdagangan	a. Belum tertatanya sistem pengembangan industri kecil dan menengah; b. Terbatasnya pemasaran baik dari segi promosi, jaringan dan fasilitas bagi koperasi dan para pengusaha kecil dan menengah; c. Belum optimalnya pembinaan manajemen usaha bagi koperasi dan pengusaha kecil; d. Belum optimalnya pengembangan permodalan dalam mendukung usaha koperasi dan pengusaha kecil dan menengah; e. Rendahnya minat masyarakat terhadap usaha dibidang industri.
19.	Pariwisata	a. Belum tertatanya sistem pariwisata sesuai dengan standar nasional dan internasional; b. Belum optimalnya prasarana dan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, informasi dan

No	Bidang	Isu Strategis
		promosi, dan pengelolaan tempat wisata; c. Belum terpadunya manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata.
20.	Transportasi	a. Belum tertatanya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antarwilayah b. Belum optimalnya pelayanan transportasi yang efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan pedalaman. c. Belum optimalnya pelayanan transportasi, sungai, darat, laut dan udara yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran. d. Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan transportasi di Kabupaten Seruyan.
21.	Energi Listrik	a. Belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kabupaten Seruyan. b. Belum meratanya jaringan listrik antarwilayah yang dapat menjangkau daerah perdesaan dan pedalaman. c. Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik. d. Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik.
22.	Politik dan Pemerintahan	a. Belum tertatanya sistem dan manajemen kinerja organisasi dan aparat pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional. b. Belum berkembangnya sistem informasi manajemen dalam mendukung peningkatan kapasitas, profesionalitas dan kapabilitas dari organisasi dan aparat pemerintah daerah. c. Belum meratanya pelayanan antarwilayah terutama di kawasan pedalaman. d. Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah dan swasta dalam penguatan kelembagaan. e. Belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah.
23.	Hukum	a. Perlu adanya pemerataan akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat . b. Perlu adanya peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan kapabilitas organisasi dan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pelanggaran hukum, mengurangi kriminalitas dan menyelesaikan berbagai kasus hukum.
24.	Penataan Ruang	a. Perlu konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. b. Perlu percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. c. Perlu pengembalian mutu lingkungan di kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi khususnya kawasan bekas penambangan dan bekas penebangan hutan.

No	Bidang	Isu Strategis
		d. Perlu pengembangan kegiatan yang berbasis keberlanjutan ekologis untuk menjaga mutu lingkungan.

Sumber: Perda Kab. Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJP Kab. Seruyan Tahun 2005-2025

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Seruyan 2005-2025, memiliki visi:

"***TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA*** "

Visi "Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Adil Dan Sejahtera" mengandung makna sebagai berikut:

a. **Madani** adalah masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi berbagai permasalahan baik selalu dihadapi dengan sopan santun dan berperadaban serta mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mufakat. Madani menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam pembangunan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi madani adalah terpeliharanya eksistensi agama ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat; terpelihara dan terjaminnya keamanan dan ketertiban serta keselamatan; tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh silaturrahmi dan tenggang rasa; terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi; terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah;
b. **Adil** adalah masyarakat Kabupaten Seruyan yang ditandai oleh tata kehidupan yang memberi kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan

bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaanyang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Masyarakat yang adil adalah masyarakat Kabupaten Seruyan yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat, serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;

c. **Sejahtera** adalah masyarakat Kabupaten Seruyan yang terpenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seruyan tersebut, misi pembangunan Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
b. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
c. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
e. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Seruyan saat ini berada pada tahap ketiga dan tahap keempat. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahap ketiga dan keempat dalamRPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seruyan
Tahap Ketiga dan Keempat

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
1.	Pengembangan SDM	1. Pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dalam dua periode telah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga menunjukkan daya saing yang makin tinggi. Secara umum hasil pembangunan SDM yang dilaksanakan dalam periode ini menjadikan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Seruyan telah setara dengan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat makin meningkat, dan semakin mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan; 2. Dalam periode ini pendidikan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh meratanya pelaksanaan pendidikan ke segenap kawasan perkotaan dan perdesaan, wajib belajar telah mencapai 12 tahun, sekolah unggulan dan sekolah kejuruan sudah berkembang, serta kualitas pendidikan secara umum telah setara dengan rata-rata nasional. Pada perkotaan utama sudah dikembangan pendidikan unggulan bertaraf nasional. Peningkatan kualitas pendidikan ini akan menjadi pilar utama peningkatan kualitas SDM; 3. Meningkatnya kualitas pendidikan ini sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditopang oleh litbang dan iptek.; 4. Peningkatan kesadaran akan kesehatan dan lebih baiknya perilaku hidup sehat, serta semakin meratanya distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis-paramedis menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Seruyan	1. Kualitas SDM dalam periode ini sudah berada dalam kondisi mapan, tingkat dan kualitas pendidikan membaik, kesehatan rata-rata masyarakat tinggi, peran wanita dan pemuda dalam berbagai program pembangunan semakin menampakan hasil. Dalam konteks ini maka kemandirian masyarakat telah mencapai tingkat mapan, dan daya saingnya tinggi. 2. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah ada dalam tingkat kesadaran yang tinggi yang ditunjukkan oleh pelaksanaan pendidikan ke segenap wilayah telah mencapai 12 tahun dan pendidikan tinggi sudah merupakan kebutuhan. Mayoritas penduduk dalam usia sekolah (dan kuliah) mengenyam dunia pendidikan dengan spesialisasi yang lebih terfokus pada kebutuhan pasar kerja. Sekolah unggulan dan sekolah kejuruan telah berkembang di setiap kecamatan, serta kualitas pendidikan umumnya telah ada diatas rata-rata nasional. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat dan nilai kelulusan yang ada diatas rata-rata nasional, kualitas pengajar pendidikan dasar dan menengah telah berpendidikan minimal S1, dan pembinaan - pelatihan telah berjalan menerus. 3. Lebih lanjut perkembangan kualitas SDM ini terus ditopang oleh litbang dan iptek yang juga merupakan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Kebutuhan akan litbang dan iptek ini terus mendorong berbagai lembaga untuk memanfaatkan jasa tersebut, dan berbagai

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		semakin baik. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik ini juga ditandai oleh semakin meningkatnya usia harapan hidup rata-rata masyarakat, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin dapat ditekan, semakin baiknya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat masyarakat, wabah dan endemi lokal semakin dapat ditangani secara mandiri. Masyarakat kurang mampu juga semakin mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang prima; 5. Peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia yang telah diperoleh menjadikan daya saing semakin meningkat, pendapatan semakin membaik, juga spesialisasi tenaga kerja semakin terjadi. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, semakin tertekannya pengangguran, dan produktivitas kerja juga semakin mantap. Berbagai kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro seperti kebutuhan tenaga teknik, medis, perencanaan, management, pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup dapat dipenuhi dari masyarakat Kabupatwn Seruyan sendiri. Demikian juga dengan peluang usaha swasta dibidang telematika, dan berbagai jasa telah berkembang dengan cukup baik. Pada sisi lain, dengan semakin terbukanya peluang usaha yang besar dengan peluang pemasaran nasional dan eksport ke luar negeri menjadikan perkembangan kewirausahaan menjadi tinggi; 6. Meningkatnya partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan semakin mendorong terciptanya kesetaraan gender semakin luasnya peran wanita dalam politik, pemerintahan dan	produk litbang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini ditandai oleh semakin berkembangnya wacana tentang perlunya penggunaan hasil penelitian, serta makin munculnya litbang dan pengunaan iptek canggih pada lembaga pemerintah dan swasta. 4. Pada tahap ini perbaikan pendidikan dan pengetahuan masyarakat juga menjadikan kesadaran akan kesehatan terus meningkat, perilaku hidup sehat telah memasyarakat. Pelayanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan serta tenaga medis-paramedis telah terdistribusi dengan baik yang ditandai oleh semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, dan hal ini juga terjangkau oleh masyarakat miskin. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat ini ditandai oleh semakin tingginya usia harapan hidup rata-rata masyarakat yang mencapai diatas rata-rata nasional, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin kecil, wabah semakin dini dapat diatasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik. Secara umum pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk dalam pelayanan prima. 5. Pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tiga periode sebelumnya meningkatkan indeks pembangunan manusia dan daya saing semakin tinggi, pendapatan masyarakat semakin membaik, serta spesialisasi tenaga kerja semakin terbentuk. Pola ini secara keseluruhan akan semakin mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja baik dalam pengetahuan maupun keahlian, semakin kecilnya angka pengangguran, dan secara umum produktivitas

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		berbagai kegiatan kemasyarakatan. Peran pemuda dalam pembangunan juga menunjukkan adanya kemapanan yang ditunjukkan oleh banyaknya organisasi pemuda khususnya di bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga. Prestasi olahraga di Kabupaten Seruyan semakin membaik yang ditandai oleh semakin banyaknya pertandingan dalam skala kabupaten dan semakin berperannya Kabupaten Seruyan dalam pengembangan olahraga Kalimantan Tengah; 7. Dalam bidang keagamaan juga menunjukan peningkatan dimana kerukunan antar umat semakin membaik, kegiatan keagamaan semakin marak, dan fasilitas peribadatan juga semakin berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Sekolah berbasis keagamaan semakin mapan, dan terdistribusi ke berbagai daerah; 8. Peningkatan berbagai bidang ini juga semakin meningkatkan kualitas SDM secara umum, kesejahteraan sosial masyarakat juga makin membaik yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan kesejahteraan sosial, dan kemandirian masyarakat semakin membaik.	kerja juga semakin membaik. Penyediaan tenaga kerja yang memadai dan handal sudah tersedia di Kabupaten Seruyan yang sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro. Tenaga kerja dengan keahlian spesifik sesuai bidang pembangunan dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Peningkatan kemampuan ini berbagai bidang ini juga semakin membuka peluang usaha dibidang telematika, dan berbagai jasa umum dan konstruksi semakin berkembang dengan cukup baik. Dalam tahap ini kegiatan kewirausahaan makin nyata dan sebagian besar masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor formal. 6. Peningkatan partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan semakin mantap dan kesetaraan gender semakin menunjukkan peran wanita dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya peran pemuda juga menunjukkan perkembangan yang semakin membaik, organisasi pemuda di bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga juga semakin berkembang, bukan hanya pada tingkat kabupaten akan tetapi sampai pada tingkat kecamatan dan desa. Berbagai peningkatan prestasi bidang olahraga unggulan Kabupaten Seruyan juga semakin membaik yang ditandai oleh semakin meningkatnya peringkat dalam skala regional, semakin banyaknya petandingan dan eksebisi, serta bertambah semaraknya organisasi atau perkumpulan kepemudaan berbasis olahraga. 7. Dalam tahapan keempat ini bidang keagamaan menunjukan semakin baiknya kerukunan antar

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
			umat beragama, kegiatan keagamaan semakin marak yang ditandai oleh semakin banyaknya kegiatan keagamaan oleh masyarakat, dan fasilitas peribadatan semakin merata dan berkembang sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk agama. Sekolah keagamaan semakin mapan dan mampu bersaing dalam skala nasional, dan terdistribusi ke berbagai daerah. 8. Dalam tahap ini kualitas SDM secara umum semakin membaik demikian juga dengan kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, dimana anak asuh dan terlantar semakin mendapat pelayanan sosial yang setara dengan anak lain. Pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dan semakin meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
2.	Pengembangan Ekonomi Wilayah	1. Bila pada tahap ke-2 perubahan struktur ekonomi sudah mulai mapan, investasi mulai masuk dan semakin meningkat, ketergantungan pada sumberdaya alam primer juga semakin berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya, maka pada tahap ke-3 secara keseluruhan juga akan semakin berkembang dan mapan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan perekonomian juga menunjukkan peningkatan. Masyarakat banyak semakin tergabung dalam pengembangan koperasi dan berbagai UKM semakin meningkat menjadi besar. Perkembangan dan kondisi perekonomian termasuk investasi di dalamnya sudah sedikit	1. Perubahan struktur ekonomi masyarakat sudah menunjukkan pola yang semakin mapan, investasi sektor produktif semakin meningkat, pertanian dalam arti luas semakin menjadi tumpuan, ketergantungan pada sumberdaya alam primer yang tidak terbarukan semakin berkurang, industri pengolahan semakin berperan dalam memantapkan struktur perekonomian dari hulu sampai hilir dan keterkaitan antar sektor makin tinggi, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya dalam lingkup regional dan nasional. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perekonomian semakin tinggi, dan masyarakat banyak semakin tergabung dalam koperasi dan berbagai UKM. 2. Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		diatas rata-rata nasional; 2. Dalam tahap ini penyediaan kebutuhan pangan dan hortikultura dapat dipenuhi secara mandiri, pada saat puncak panen bahkan mulai dapat mengeksport hasil. Perkembangan ini juga didukung oleh berkembangnya teknologi pangan sehingga mulai berkembang diversifikasi penyediaan pangan. Selanjutnya sentra produksi dan pemasaran mulai dari unit paling kecil sampai konsumen telah ada dalam sistem jaringan jang saling menguntungkan. Agropolitan sistem telah tumbuh, infrastruktur pertanian juga semakin berkembang. Kegiatan masyarakat juga telah berbasis pada agribisnis dan agro industri yang secara keseluruhan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya sistem informasi pertanian termasuk informasi pasar juga semakin dikenal oleh petani; 3. Perkebunan unggulan telah mencapai tingkat mapan dan produknya telah memiliki daya saing dipasaran nasional. Target penyediaan lahan perkebunan telah tercapai, pengembangan telah dilakukan, peran perkebunan menjadi dominan, karena mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan industri pengolahan dari hulu-hilir. Pengolahan hasil perkebunan menjadi pendongkrak perekonomian dan ketenagakerjaan, baik jumlah maupun kualitasnya. Dalam tahap ini sektor perkebunan akan lebih dimantapkan. Sentra perkebunan sudah berkembang yang ditandai juga oleh semakin berkembangnya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat berkegiatan utama perkebunan juga semakin berkembang	tanaman pangan dan hortikultura dalam tahap ini menunjukkan bahwa penyediaan lahan baik pada lahan sawah – tegal maupun gambut untuk kebutuhan pangan dan hortikultura telah dapat dipenuhi secara mandiri, ketahanan pangan sudah mapan, beberapa produk unggulan sudah dieksport dalam kemasan yang memenuhi standar perdagangan. Diversifikasi pangan sudah dikenal masyarakat dan didukung oleh teknologi pangan yang memenuhi standar kesehatan. Pada tahap ini perkembangan pertanian dan hortikultura telah ditunjang oleh sistem pemasaran dalam sistem jaringan nasional. Agropolitan sistem menjadi andalan pengembangan, infrastruktur pertanian telah mapan. Kegiatan pertanian berbasis pada agribisnis dan agro industri yang memberi nilai tambah produk pertanian semakin terarah. 3. Pada tahapan keempat ini perkebunan unggulan telah menjadi salah satu tumpuan ekonomi wilayah, memiliki daya saing tinggi dipasaran nasional dan internasional. Peran perkebunan menjadi lebih penting, karena mampu mengembangkan bidang lain dengan berkembangnya industri pengolahan dari hulu-hilir dengan pangsa pasar eksport. Pengembangan perkebunan ini juga ditandai oleh berbagai diversifikasi hasil, menyerap tenaga kerja yang makin baik, membentuk pusat permukiman berbasis perkebunan, serta mampu menjadi pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan. Pada tahap ini, kerjasama dengan berbagai stakeholders semakin mantap dan masyarakat semakin mendapatkan nilai tambah dari pengembangan perkebunan.

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		kegiatannya. Pada tahap ini, maka pemasaran dan pengembangan prasarana pendukung pengembangan perkebunan, serta kerjasama dengan berbagai stakeholders untuk mengembangan industri pengolahan hasil perkebunan semakin meningkat; 4. Sumberdaya hutan telah memasuki pengelolaan lestari, kawasan hutan lindung semakin memiliki peran dalam keseimbangan lingkungan dan tetap dipertahankan, sementara hutan produksi dikelola secara efisien dan hasilnya dikelola dan diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penanganan hasil hutan sudah berjalan lebih efektif, dimana penebangan kayu ilegal sudah dapat ditangani dan penegakan hukum juga lebih efektif. Terhadap tanah yang rusak karena bekas penebangan hutan juga semakin tertangani sebagai bagian dari program reboisasi menerus. Pada tahap ini partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan semakin baik dan masyarakat juga semakin merasakan manfaat pengelolaan hutan lestari, dan penegakan hukum terhadap perusakan semakin tertangani dan pencurian hasil hutan semakin minim; 5. Peternakan pada tahap ini sudah ada pada kondisi yang semakin mantap dalam pengertian peternakan sudah mampu menjadi salah satu penopang ekonomi unggulan, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya mendorong pengembangan industri pengolahan. Kemandirian dapat memenuhi kebutuhan akan ternak telah tercapai, dan selanjutnya hasil ternak ungulan mulai dapat dieksport. Indikator keberhasilan ini adalah semakin meningkatnya	4. Sumberdaya hutan yang telah dikelola selama tiga periode dalam tahapan keempat ini dapat dikatagorikan sebagai pengelolaan lestari dan terkontrol oleh stakeholders, kawasan hutan lindung semakin berfungsi sebagai penyeimbanga lingkungan hidup dan memiliki keanekaragaman hayati yang makin tinggi; sementara hutan produksi semakin dikelola dengan arif dan efisien. Ekspor bahan mentah sudah tidak dilakukan, pengolahan hasil hutan dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya juga lebih tinggi. Penegakan hukum terhadap pelaku liar penebangan kayu sudah dapat ditangani dengan lebih sistematis. Penanganan kerusakan tanah pasca penebangan hutan semakin tertangani yang dilaksanakan dari program reboisasi menerus. Partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan sudah mendukung pada pembentukan dan pengelolaan hutan lestari. 5. Pengembangan peternakan dalam tahapan keempat ini sudah ada pada kondisi yang mantap, mulai dari bibit ternak ungul sampai pengolahan produk ternak sudah dapat dilakukan secara mandiri, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya merupakan sebuah rangkaian menerus dari pengembangan peternakan. Pada tingkat ini beberapa produk ternak sudah diolah dan menjadi komoditas eksport. Indikator keberhasilan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas produk peternakan, industri produk ternak menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dan berbagai penyakit ternak sudah dapat dideteksi secara dini dan ditangulangi dengan dini pula. Tenaga

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		iklim usaha peternakan, semakin tertanggulanginya penyakit ternak. Sumberdaya manusia dalam pengolahan ternak juga semakin baik yang ditandai oleh meningkatnya jumlah usaha ternak, tenaga ahli bidang peternakan, dan lembaga penelitian dan penyediaan ternak unggulan semakin berkembang; 6. Dalam bidang kelautan dan perikanan terjadi peningkatan produk yang bukan saja menghasilkan dan memasarkan ikan segar, tetapi juga pengolahan hasil penangkapan ikan. Perkembangan perikanan ini ditopang oleh kualitas SDM yang semakin baik, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Selanjutnya sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, investasi dan kemitraan perikanan semakin diminati, juga kualitas lingkungan perikanan semakin terpelihara dengan indikasi semakin terkendalinya pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga; 7. Perkembangan kualitas SDM, struktur ekonomi yang makin makin mantap dan kepastian hukum yang semakin baik dan transparan, mendorong investasi daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan investasi ini diikuti oleh meluasnya pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi, dan pasar dalam skala nasional dan internasional; 8. Berbagai produk andalan dan investasi yang makin berkembang memerlukan pemasaran yang luas sehingga peran perdagangan menjadi sentral. Industri mulai mapan dan kawasan	ahli bidang peternakan semakin meningkat jumlahnya, dan lembaga penelitian dan penyediaan bibit ternak unggulan semakin berkembang, serta kotoran ternak sudah dapat diolah menjadi pupuk kandang dalam kemasan yang mudah didistribusikan. 6. Pada tahap ini bidang kelautan dan perikanan memiliki peran semakin penting dengan pengambilan hasil kelautan yang mendukung laut lestari, didukung oleh teknologi yang memadai, pemasaran ikan bukan hanya ikan segar segar, tetapi juga ikan olahan. Hal ini berarti juga industri opengolahan ikan semakin berkembang. Untuk ini maka investasi bidang perikanan terus dipromosikan, pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM semakin ditingkatkan, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, kualitas lingkungan permukiman nelayan semakin baik dan pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga pengolah ikan semakin terkendali. 7. Berbagai kemudahan dalam penanaman modal atau investasi yang kondusif semakin meningkatkan minat investasi daerah berbagai bidang, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembentukan kawasan ekonomi potensial, kawasan strategis yang dipromosikan makin diminati investor, yang perlu terus dijaga kondisinya. Promosi berbagai peluang investasi mudah diakses melalui sarana elektronik maupun melalui promosi langsung. 8. Perkembangan perindustrian telah mendorong

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		industri telah berkembang. Struktur industri mulai mapan, perkebangan produk hulu – hilir makin berkembang dan berkaitan. Perdagangan produk unggulan makin berkembang, kerjasama antar wilayah dalam menjalin perdagangan makin mapan dan kontinyu, serta neraca perdagangan semakin positif. Dalam tahap ini peran BUMD dalam mengembangkan ekonomi semakin penting dan makin terwujud kemitraan antara BUMD dengan mitra usaha lainnya sekaligus sebagai salah satu sumber PAD; 9. Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian menjadi semakin penting, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya semakin terbentuk kemitraan dalam pemenuhan bahan baku, proses produksi dan jaminan pasar untuk menjamin kontinuitas produk; 10. Pariwisata di Kabupaten Seruyan semakin meningkat perannya, terutama wisata berbasis ekologi atau ecotourism, budaya dan alam. Jaringan wisata nasional semakin mantap yang ditandai oleh adanya integrasi antar kunjungan wisata, semakin berkembangnya akomodasi dan industri wisata. Kemasan wisata yang makin menarik melalui pengembangan jalur wisata dan kalender wisata yang makin menarik dikemas. Obyek wisata yang ada semakin tertata dan memiliki ciri yang khas sehingga secara keseluruhan membentuk atraksi yang saling melengkapi. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas SDM dan manajemen kepariwisataan.	terciptanya struktur ekonomi yang mantap, pertumbuhan yang besar diatas rata-rata nasional. Produk ungulan daerah sudah dapat bersaing dalam pasar nasional. SDM perindustrian telah memiliki specsialisasi yang tinggi dengan dukungan kelembagaan yang mendorong pengembangan SDM dan kegiatan perindustrian. Secara umum perdagangan telah memasuki pasar eksport, terdapat kerjasama regional yang baik dan neraca perdagangan yang makin positif. Peran BUMD sudah mapan, berbagai program kemitraan antara BUMD dengan berbagai lembaga semakin meningkat. Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian sudah ada dalam tingkat mapan, pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian semakin meningkat yang pelakunya adalah masyarakat sendiri. 9. Pemeliharaan kualitas lingkungan yang semakin baik dan budaya yang makin terpelihara menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan memiliki peran makin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Wisata berbasis ekologi atau ecotourism, budaya dan alam makin diminati masyarakat, jaringan wisata nasional sudah terbentuk sehingga Kabupaten Seruyan sudah masuk dalam tujuan utama wisata Indonesia. Kalender wisata sudah menjadi bagian dari perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara. Akomodasi wisata dan industri wisata memiliki ciri atau muatan lokal yang makin menarik. Obyek wisata memiliki ciri khas yan saling melengkapi, biodeversity semakin melengkapi daya tarik wisata yang sudah

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		11. Pertambangan sampai tahap ini tetap memiliki peran penting dalam perekonomian meskipun secara proporsional dan bertahap menurun perannya. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan peningkatan efisiensi melalui diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan. Selanjutnya pengelolaan hasil-hasil penambangan yang ada semakin dikembangkan lebih efisien dan terkendali.	berkembang. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin tingginya spesialisasi keahlian bidang pariwisata dan arah kebijakan pengembangan wisata didukung oleh berbagai sektor lain sebagai satu sistem pembangunan yang utuh. 10. Pada tahap keempat ini pertambangan tetap memegang peran penting yang secara proporsional menunjukkan penurunan jumlah produksi tetapi diikuti peningkatan kualitas pengolahan. Selanjutnya peningkatan efisiensi tetap dilakukan secara menerus, diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan semakin dilakukan secara intensif. Pengembangan telah mampu mengeksport pengolahan hasil sebagai industri hilir. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang, maka setiap area bekas tambang ditingkatkan kualitasnya melalui penghijauan untuk kawasan lindung maupun budidaya.
3.	Prasarana Dasar	1. Peran transportasi darat semakin penting sebagai penghubung antar pusat permukiman dan pusat produksi yang ditandai oleh semakin banyaknya panjang jalan yang dibangun, semakin terpeliharanya jaringan jalan yang ada, serta semakin berkembangnya angkutan darat antar wilayah, antar provinsi maupun pada kawasan pedalaman. Permukiman dan sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik dengan pusat pemasaran. Dalam skala luas pengembangan jaringan jalan ini dibangun secara lebih terpadu dengan sistem transportasi lain; 2. Peningkatan ekonomi dalam tahap ini akan lebih didukung oleh perkembangan transportasi	1. Pembangunan yang ada pada tahap yang mapan menjadikan transportasi darat memiliki peran sangat penting dan hubungan antar pusat permukiman dan pusat produksi sudah terhubungkan secara keseluruhan. Hal ini ditandai oleh telah terwujudnya jalan lintas Kalimantan, jalan dalam provinsi yang dibangun sudah mencapai pelosok, telah dikembangkan jalan antar provinsi. Jalan yang telah dibangun dapat dipelihara secara memadai. Permukiman perkotaan dan perdesaan serta sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik ditandai oleh semakin baiknya kondisi jalan sebagai penghubung dengan pusat produksi. Pengembangan jaringan jalan ini terus dipacu

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		khususnya sebagai gerbang eksport-import, yang ditandai oleh semakin besarnya nilai eksport-import. Pelabuhan laut akan semakin berperan dalam mendorong kelancaran distribusi barang dan manusia, yang ditandai oleh makin besarnya bongkar-muat di pelabuhan; 3. Transportasi udara pada tahap ini sudah menjadi kebutuhan utama baik untuk pergerakan lokal, nasional. Bandara perintis telah memasuki masa mapan yang ditandai oleh semakin lancarnya pelayanan penerbangan, semakin bertambahnya peran bandara udara, dan semakin baiknya hubungan intermoda di Kabupaten Seruyan; 4. Sistem irigasi semakin mampu mendorong pencetakan sawah baru, meningkatkan produk pertanian, yang ditandai oleh semakin besarnya produk pertanian. Perbaikan irigasi ini telah dapat menunjang swasembada pangan. Penyediaan pangan yang mandiri sangat didukung oleh perkembangan irigasi, yang ditandai oleh semakin mapannya sistem irigasi, semakin luasnya sawah yang dapat diairi, semakin besarnya produk pertanian, dan semakin optimalnya pemanfaatan sumberdaya air. Pemanfaatan irigasi ini semakin didukung oleh pengembangan bendungan dan waduk/embung sebagai cadangan air; 5. Perkembangan ekonomi dan kegiatan masyarakat yang menuju kemapanan dalam pembentukan masyarakat sejahtera juga semakin didukung oleh pasokan listrik yang lebih baik. Peningkatan pasokan melalui pembuatan pembangkit baru, pengembangan	untuk membentuk sistem intermoda yang lebih baik. 2. Pada tahap ini pelabuhan laut yang ditetapkan telah berfungsi secara penuh yang bermanfaat dalam mendorong perdagangan dalam skala nasional maupun internasional melalui kegiatan eksport – import. Berbagai deregulasi bidang kepabeanan akan mendorong volume perdagangan antar wilayah yang tentunya akan melalui pelabuhan laut. 3. Perkembangan kegiatan antar wilayah lebih mendorong aktivitas transportasi udara, dan transportasi udara merupakan kebutuhan utama baik untuk pergerakan lokal, dan regional. Bandara perintis mampu melayani dengan lebih efisien dan lebih baik, frekuensi penerbangan semakin banyak dan jumlah bongkar muat barang dan orang juga terus meningkat. 4. Peningkatan produktivitas tanah untuk pertanian semakin meluas dan sistem irigasi semakin mampu mengairi dalam jangka panjang serta dapat mengairi sawah yang diperluas. Perbaikan irigasi ini ditandai oleh kemampuan penyediaan pangan secara mandiri bahkan sudah dapat mengeksport. Sebagai pendukung pengembangan irigasi ini pembangunan bendungan dan waduk/embung juga semakin bertambah jumlahnya. 5. Persediaan energi listrik telah mencapai tahap mapan, pasokan listrik untuk permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan industri dan berbagai kebutuhan lain telah dapat dipenuhi meskipun pada saat beban puncak. Pengembangan sistem terpadu, diversifikasi

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		jaringan yang saling berhubungan atau interconected system, serta diversifikasi sumber pembangkit menjadikan tahap ini tidak kekurangan pasokan pada saat beban puncak terjadi. Pada wilayah yang tersebar dalam jumlah kecil masih dilayani oleh PLTD secara mandiri yang jumlahnya semakin berkurang karena pasokan dari interconneced system semakin luas jangkauannya.	sumber pembangkin dan sistem pengamanannya telah memenuhi standar kebutuhan. Hanya sebagian kecil wilayah yang tersebar dalam jumlah kecil masih dilayani oleh PLTD mandiri.
4.	Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum	1. Pada tahap ketiga ini peran pemerintah terus meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya semakin nyata. Efisiensi tingkat pelayanannya telah sama dengan rata-rata nasional, standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah telah terpenuhi. Kualifikasi sumberdaya manusia dalam bidang ini sudah baik, yang ditandai oleh tingkat pendidikan pegawai yang lebih tinggi, setiap bidang memiliki spesifikasi keahlian yang memadai, serta pada daerah terpencil, terisolir dan pedalaman juga memiliki pelayanan yang sudah memenuhi standar. 2. Pada tahap ketiga berbagai perangkat hukum telah memiliki infrastruktur sarana dan prasarana hukum yang memadai, baik pada wilayah yang telah maju maupun baru. Pada tahap ini penegakan hukum sudah lebih efektif dijalankan, kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM melalui berbagai penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, bagi aparat hukum. Berbagai regulasi bidang hukum juga lebih dapat dilaksanakan secara efektif, demikian juga alokasi anggaran APBD di sektor hukum dan	1. Pada tahap ini pemerintah telah berjalan dengan mapan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat telah berlaku prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya pada berbagai sektor. Proses perijinan telah berjalan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga lebih mendorong investasi daerah. Berbagai proses debirokratisasi terus dijalankan dengan cara yang lebih bertangungjawab, pelayanan publik sudah menyentuh wilayah terpencil, terisolir dan pedalaman. Kualitas SDM juga semakin meningkat yang ditandai oleh penggunaan alat yang lebih canggih organisasi yang lebih sederhana, dan tingkat kecepatan pelayanan yang lebih hemat waktu. 2. Pada tahap ke empat ini bidang hukum telah menduduki tempat sentral dalam perikehidupan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin lengkapnya perangkat hukum pada berbagai wilayah. Penegakan hukum sudah berjalan dengan lebih efektif dimana kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM dengan semakin baiknya tingkat pendidikan bagi aparat hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum juga semakin membaik. Berbagai deregulasi bidang

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		keamanan serta ketertiban masyarakat telah memadai.	hukum juga lebih banyak dihasilkan, dan alokasi anggaran untuk bidang hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah cukup untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum yang diperlukan.
5.	Penataan Ruang dan Lingkungan	1. Pada tahap ini kaidah penataan ruang mulai dipahami dengan cukup baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha, sehingga berbagai program pembangunan diarahkan sesuai dengan tencana tata ruang wilayah. Secara lebih spesifik, struktur ruang yang dibentuk menunjukkan terbentuknya keseimbangan perkembangan antara perkotaan dan perdesaan yang didukung oleh prasarana yang memadai, telematika telah berkembang sampai tingkat perdesaan, dan kegiatan ekonomi utama semakin mendukung perkembangan wilayah. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah semakin terwujud yang ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfaatan ruang. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah, yang ditandai oleh semakin berkembangnya kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus, maupun pusat-pusat produksi semakin diminati oleh investor. 2. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, dan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup, maka kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik yang ditandai oleh terpenuhinya perumahan	1. Pelaksanaan pembangunan selama tiga tahap telah menunjukkan hasil yang makin baik, berbagai pelaksanaan program pembangunan lebih mengacu pada rencana tata ruang wilayah, masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha lebih memiliki pemahaman yang baik tentang rencana tata ruang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya produk turunan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam bentuk rencana detail-teknis ruang tertentu. Berbagai program pembangunan juga lebih bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang wilayah dalam skala Kabupaten maupun Kecamatan menunjukkan terbentuknya keseimbangan yang lebih baik, angka kesenjangan yang makin menurun, dan berbagai prasarana dasar sudah melayani perkembangan kegiatan ekonomi utama seperti pada kawasan industri, kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus, dan sebagainya. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung semakin mantap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan penyimpangan pemanfaatan ruang semakin terkendali yang ditandai oleh menurunnya simpangan pemanfaatan ruang. Konsistensi terhadap penataan ruang ini juga semakin mendorong investasi daerah sesuai dengan potensi masing-masing. 2. Semakin meningkatnya indeks kualitas SDM menjadikan pendapatan juga meningkat dan

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		masyarakat berpendapatan rendah, meningkatnya kualitas permukiman secara rata-rata, serta semakin berkurangnya pemukiman Kumuh. Berbagai permukiman tradisional yang ada juga tetap terjaga, sebagian merupakan aset wisata dan budaya, dengan kualitas lingkungan yang lebih sehat. 3. Permukiman transmigrasi semakin menunjukkan peningkatan kualitas yang ditandai oleh semakin mapannya tingkat hunian, sebagian kawasan transmigrasi telah tumbuh menjadi kawasan perdesaan dan memiliki fungsi sebagai pusat perekonomian. Beberapa permukiman transmigrasi yang potensial telah terbentuk sebagai pusat perekonomian baru yang mampu berkembang sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis. 4. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan akan lingkungan hidup bagi masyarakat, maka kesadaran akan keseimbangan alam juga semakin baik, sehingga berbagai upaya pelestarian sumberdaya sudah dilakukan dengan kesadaran yang tinggi. Pendidikan lingkungan sudah mulai terintegrasi dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat dan hal tersebut ditunjukkan oleh semakin menurunnya perusakan alam, meningkatnya kualitas lingkungan, dan semakin tegaknya hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Amdal sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berbagai upaya pengembalian kualitas lingkungan yang rusak semakin tertangani dengan baik, dan berbagai upaya penyelamatan lingkungan juga dilakukan dengan kesadaran	kesadaran lingkungan juga semakin baik sehingga kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik dan memenuhi standar kesehatan lingkungan hunian. Masyarakat berpendapatan rendah dapat menyediakan rumah layak dengan lingkungan yang memadai, serta pemukiman kumuh semakin dapat ditangani. Permukiman tradisional yang menyimpan berbagai nilai budaya tetap terjaga dengan baik, masyarakat juga mendapat keuntungan dari permukiman tradisional mereka diantaranya sebagai aset wisata. 3. Permukiman transmigrasi semakin berkembang yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas hunian yang semakin sempurna, meningkatnya kegiatan masyarakat, pasar lokal yang makin maju dan beberapa kawasan transmigrasi tumbuh menjadi kawasan kota terpadu mandiri sebagai pusat perekonomian dengan jaringan regional, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan permukiman transmigrasi yang potensial dan telah terbentuk pusat perekonomian baru terus berkembang sebagai sentra pemasaran baru sekaligus semakin berperan sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis. 4. Pada tahap keempat ini pengetahuan masyarakat akan lingkungan hidup semakin baik, kepatuhan akan pengelolaan juga semakin meningkat, dan upaya menjaga keseimbangan alam juga semakin baik. Berbagai upaya penyelamatan lingkungan hidup terus dilakukan, perlindungan flora dan fauna yang termasuk dalam katagori dilindungi terus

NO	BIDANG	ARAH PEMBANGUNAN	
		TAHAP KETIGA	TAHAP KEEMPAT
		yang tinggi.	dilakukan dan biodiversity semakin terjaga. Berbagai kegiatan berkaitan dengan alam dan penyelamatan lingkungan terus berkembang, pendidikan lingkungan dilakukan dengan terintegrasi dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan semakin ditegakkan. Berbagai ketentuan dalam pengelolaan lingkungan sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.

Sumber: Perda Kab. Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJP Kab. Seruyan Tahun 2005-2025

4.3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039. Mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJMD dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Untuk itu, berikut ini disajikan inti dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD khususnya terkait dengan pengambilan kebijakan terkait ruang.

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu pusat ekonomi wilayah provinsi yang maju dan sejahtera berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Seruyan, terdiri atas:

1. Mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi;
2. Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan;
3. Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah;
4. Peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya;
5. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;

6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
7. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
8. Pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan;
9. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
10. Mendorong peningkatan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.

Strategi yang dilakukan dalam mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi, meliputi:

a. pengembangan kawasan ekonomi terpadu dalam suatu pengembangan kawasan di Teluk Segintung;
b. pembangunan pelabuhan *multipurpose* dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul;
c. pembangunan kawasan industri terpadu berbasis pertanian, perikanan dan pertambangan;
d. pembangunan pusat perdagangan dan jasa regional;
e. pembangunan pusat distribusi dan koleksi dengan pengembangan trasnportasi multi moda antara transportasi darat dan transportasi laut; dan
f. Pembangunan sarana dan prasarna pendukung untuk mewujudkan kawasan ekonomi terpadu.

Strategi yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan, meliputi:

a. peningkatan pembangunan untuk mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perdesaan;
b. pengembangan interaksi kawasan dengan pengembangan transportasi antar wilayah dan antar kecamatan;
c. pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
d. peningkatan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan transportasi reguler antar wilayah;
e. peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas transportasi dan perdagangan; dan
f. pengembangan dan pembangunan desa-desa tertinggal.

Strategi yang dilakukan dalam pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah, meliputi:

a. peningkatan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perikanan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
b. peningkatan pengembangan kawasan agropolitan, kebun swadayabersertifikasi dan minapolitan yang berkelanjutan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian dan perikanan kawasan;
c. peningkatan pengembangan industri berbasis pertanian dan perikanan serta sarana pendukungnya;
d. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarna pendukung untuk menciptakan destinasi wisata;
e. peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan di Kota Kuala Pembuang sebagai PKL; dan

f. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi pertanian, perikanan, pertambangan dan kegiatan pariwisata.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya, meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah dalam upaya pengembangan perekonomian daerah;
b. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal; dan
c. peningkatan prasarana transportasi laut dan udara dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.

Strategi yang dilakukan dalam pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan, meliputi:

a. penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya;
b. penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
c. peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
d. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
e. peningkatan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah Kabupaten Seruyan;
f. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
g. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya masyarakat; dan
h. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, meliputi:

a. peningkatan produktivitas hasil perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
b. pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapata masyarakat;
c. peningkatan teknologi perkebunan, tanaman pangan, hortikultura , peternakan, perikanan dan kehutanan;
d. pemanfaatan pestisida secara terbatas dalam kerangka peningkatan produktivitas perkebunan, tanaman pangan, hortikultura , peternakan, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
e. penguatan pemasaran hasilperkebunan, tanaman pangan, hortikultura , peternakan, perikanan dan kehutanan;
f. penetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dan mengembangkan kegiatan unggulan di dalam kawasan beserta prasarana;
g. pengembangan dan pelestarian kawasan budi daya untuk mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Seruyan;
h. pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian nasional; dan
i. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, meliputi:

a. pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar dengan memperhatikan prinsip-prinsip agroindustri dan agribisnis;
b. pengembangan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
c. peningkatan kegiatan agro melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung.

Strategi yang dilakukan dalam pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan, meliputi:

a. peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
b. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan bahan galian serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi; dan
c. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.

Strategi yang dilakukan dalam pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, meliputi:

a. pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);
b. peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara dengan fokus prioritas transportasi darat yang menghubungkan wilayah utara dan selatan yang aman dan lancar guna mendukung transportasi laut dan udara yang berada di Kuala Pembuang;
c. pengembangan prasarana telekomunikasi dengan prioritas prasarana telepon seluler terutama di kawasan terisolasi (*blank spot area*);

d. peningkatan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik dengan fokus prioritas PLTMH, PLTS, dan PLN;
e. peningkatan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
f. peningkatan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas yang focuspada distribusi BBM dengan membangun depot BBM di Kuala Pembuang serta SPBU di setiap PKL dan PPK.

Strategi yang dilakukan dalam mendorong peningkatan pelayanan transportasi, meliputi:

a. peningkatan dan penambahan ruas jalan;
b. peningkatan dan penambahan panjang run way bandara Kapten Mulyono Kuala Pembuang untuk menjadi Bandara Pengumpul;
c. peningkatan pengembangan pelabuhan laut di Teluk Segintung;
d. peningkatan pelayanan transportasi darat, laut maupun udara; dan
e. penyediaan dan pengembangan trayek darat, laut dan udara.

4.3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Sedangkan KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023 memberikan masukan bagi RPJMD. Adapun alternatif skenario dan rekomendasi yang menjadi masukan bagi RPJMD, diuraikan pada bagian berikut.

1. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Seruyan

Pendekatan lingkungan dalam penyusunan RPJMD sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD, diharapkan dapat meningkatkan kualitas RPJMD agar lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pendekatan lingkungan dalam Permendagri lebih ditekankan tentang bagaimana upaya untuk memastikan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 dapat diintergrasikan ke dalam RPJMD.

Terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 diharapkan menjadi instrumen yang dapat memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam penyusunan RPJMD yang berbasis pada KLHS ini, daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem dijadikan pertimbangan dalam merumuskan target-target. Pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem merupakan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi sumberdaya yang dimiliki, kebutuhan akan generasi akan datang, selain mempertimbangkan tujuan pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian target TPB, ditemukan permasalahan-permasalahan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Seruyan. Dalam perencanaan skenario, diperlukan gagasan dan sintesa informasi sebagai alternatif dalam mencapai tujuan perencanaan. Alternatif-alternatif skenario yang disusun berupa sintesa gambaran umum dan hasil analisis pencapaian TPB yang bersifat strategis. Alternatif skenario ini berupa ide pengembangan Kabupaten Seruyan di masa depan yang memungkinkan dalam implementasinya. Setiap skenario dianalisa bagaimana implikasinya terhadap capaian indikator TPB. Adapun alternatif skenario terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Alternatif Skenario dan Rekomendasi pencapaian TPB terkait Daya Dukung dan Daya Tampung

DDDT	Isu Strategis	ALTERNATIF SKENARIO	Rekomendasi
Penyediaan air	Peningkatan luas tutupan hutan	Mengoptimalisasikan pemanfaatan air sungai untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan irigasi lahan pertanian/perkebunan	1. Mempertahankan tutupan hutan seluas 477.342 ha di bagian utara Kabupaten Seruyan 2. Restorasi daerah sempadan sungai seluas 15.305 ha
	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		1. Peningkatan kapasitas air permukaan melalui pembangunan embung atau waduk sebagai sumber air baku yang didukung Instalasi Pengolah Air
	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.		1. Pemberian insentif dalam penghematan air pertanian/perkebunan dan industri
Penyediaan pangan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan	Memenuhi kebutuhan pangan baik secara mandiri maupun dengan mengadakan kerjasama dengan daerah lain	1. Ekstensifikasi pertanian
	Peningkatan produktivitas tanaman pangan		1. Intensifikasi pertanian
	Penurunan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.		1. Melakukan kerjasama dengan daerah pemasok pangan terkait pemenuhan kebutuhan pangan untuk menutupi deifisit energi pangan sekitar 85.000 KKal pada tahun 2016 dan diperkirakan mencapai 121.000 KKal pada tahun 2023
Pengaturan air	Peningkatan luas tutupan hutan	Optimalisasi peran ekosistem hutan dalam siklus hidrologi	1. Mempertahankan tutupan hutan seluas 477.342 ha di bagian utara Kabupaten Seruyan 2. Restorasi daerah sempadan sungai seluas 15.305 ha 3. Penyusunan tata ruang dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan
Pemurnian air	Peningkatan kualitas air sungai sebagai air baku	Peningkatan kualitas air sungai dan danau berbasis teknologi dan ekologi	1. Restorasi daerah sempadan sungai seluas 15.305 ha
	Peningkatan kualitas air danau		1. Restorasi daerah sempadan danau seluas 3.708 ha

DDDT	Isu Strategis	ALTERNATIF SKENARIO	Rekomendasi
	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		1. Restorasi kualitas air sungai dari limbah padat dengan pemilahan limbah basah (organik) dan limbah kering (anorganik) oleh masing-masing rumah tangga. 2. Pembangunan dan perbaikan tata kelola instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.
Mitigasi banjir	Rehabilitasi lahan kritis	Peningkatan kemampuan lahan dalam memitigasi bencana banjir sehingga berkurangnya kejadian banjir	1. Rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur seluas 281.998 ha
	Peningkatan luas tutupan hutan		1. Mempertahankan tutupan hutan seluas 477.342 ha di bagian utara Kabupaten Seruyan 2. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
	Pembuatan peta kerawanan banjir		1. Identifikasi daerah rawan terkena banjir 2. Identifikasi daerah pemasok air banjir
Mitigasi longsor	Rehabilitasi lahan kritis	Peningkatan kemampuan lahan dalam memitigasi bencana tanah longsor sehingga berkurangnya kejadian tanah longsor	1. Rehabilitasi hutan dan lahan di area dengan kelerengan >45% seluas 19.293 ha
	Pembuatan peta kerawanan longsor		1. Identifikasi daerah rentan tanah longsor
Mitigasi kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan luas tutupan hutan	Peningkatan kemampuan lahan dalam memitigasi bencana kebakaran sehingga berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan	1. Rehabilitasi hutan dan lahan di area Tanam Nasional seluas 103.174 ha 2. Pelibatan dan pemberian insentif kepada masyarakat dalam menjaga lahan dari resiko kebakaran
	Rehabilitasi lahan kritis		1. Rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur seluas 281.998 ha 2. Pengelolaan lahan terbuka dan semak secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Pembuatan peta kerawanan kebakaran		1. Identifikasi daerah rawan kebakaran 2. Pemetaan titik api dari tahun ke tahun untuk melihat pola kejadian kebakaran hutan
Keanekaragaman hayati	Peningkatan habitat flora dan fauna	Menambah ruang hidup satwa liar dan tumbuhan alam dan menjaga keberadaannya	1. Restorasi daerah sempadan sungai seluas 15.305 ha 2. Mempertahankan tutupan hutan seluas 477.342 ha di bagian utara Kabupaten Seruyan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023

2. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan

Penilaian terhadap capaian indikator TPB di Kabupaten Seruyan menghasilkan 15 isu strategis yang terdiri dari indikator-indikator yang belum mencapai target dan indikator dengan data yang tidak tersedia. Isu tersebut merupakan bagian dari target TPB yang akan dicapai pada periode waktu tertentu.

Alternatif skenario dengan upaya tambahan merupakan alternatif skenario yang diperlukan bagi indikator-indikator TPB yang belum mencapai target RPJMN, baik untuk indikator-indikator yang sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan. Dari total 37 indikator yang menjadi prioritas Kabupaten Seruyan, terdapat 15 indikator yang memerlukan upaya tambahan, dengan rincian: 9 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, dan 6 indikator belum tersedia data. Secara keseluruhan, alternatif skenario dan rekomendasi untuk masing-masing isu strategis di Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8
Alternatif Skenario dan Rekomendasi dengan Upaya Tambahan

No. TPB	TUJUAN TPB	ISU STRATEGIS	SESUAI TARGET	ALTERNATIF SKENARIO	REKOMENDASI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Tidak	Perbaikan atas kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisi untuk sekolah menengah	1. Membantu pengembangan manajemen dan pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah 2. Menyediakan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin 3. Mendorong program beasiswa untuk membantu siswa dari kalangan miskin dalam masa transisi dari sekolah dasar ke sekolah lanjutan.
		Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Tidak	Pemberian Hak Penggunaan Tanah bagi Penduduk Miskin	1. Mempercepat program sertifikasi tanah secara dramatis 2. Mengkaji ulang dan memperbaiki peraturan daerah terkait pertanahan, kehutanan, dan pertanian 3. Mengakomodasi kepemilikan komunal atas tanah sebagai salah satu bentuk kepemilikan 4. Mendukung adanya penyelesaian masalah pertanahan secara kekeluargaan, disamping membentuk peradilan khusus mengenai masalah pertanahan 5. Mempersiapkan peraturan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat miskin yang tinggal di area perhutanan.
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan	Tidak ada data	Penerapan strategi pengembangan peningkatan konsumsi ikan	1. Pemberian pengetahuan dan informasi kepada masyarakat sesuai dengan media yang tepat dan pengenalan variasi produk olahan, 2. Mendekatkan ikan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau

No. TPB	TUJUAN TPB	ISU STRATEGIS	SESUAI TARGET	ALTERNATIF SKENARIO	REKOMENDASI
	Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).			3. Pengenalan dan penganjuran konsumsi ikan sejak usia dini 4. Mengembangkan produk segar seperti ikan Lele, ikan Kembung dan ikan Mas 5. Pengembangan produk olahan seperti Bakso ikan, Nugget ikan dan Ikan dalam kaleng
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Tidak	Pembangunan unit pelayanan kesehatan masyarakat	1. Pembangunan kembali unit pelayanan kesehatan Puskesmas, terutama jenis keliling dan posyandu 2. Peningkatan kegiatan pelayanan kesehatan pada unit Puskesmas 3. Pemberian bantuan operasional kesehatan pada unit Puskesmas 4. Peningkatan pelayanan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal 5. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan status gizi masrakat 6. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) 7. Penggalakan Germas (Gerakan Masyarakat Sehat)
		Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	Tidak ada data	Penerapan upaya pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi korban dalam penanggulangan dampak penyalahgunaan narkoba	1. Penerapan secara tegas Undang-undang dan Keputusan Menteri Kesehatan terkait penyalahgunaan narkoba 2. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan narkoba 3. Pembinaan dan pemberdayaan eks pengguna narkoba

No. TPB	TUJUAN TPB	ISU STRATEGIS	SESUAI TARGET	ALTERNATIF SKENARIO	REKOMENDASI
		Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Tidak	Penyuluhan manfaat penggunaan MKJP	Pemberian pengetahuan dan informasi kepada masyarakat sesuai dengan media yang tepat dan pengenalan jenis-jenis serta manfaat MKJP
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Tidak	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	1. Penerapan program wajib belajar sembilan tahun 2. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas sekolah 3. Penyediaan bantuan operasional sekolah 4. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pendidikan sesuai standar nasional 5. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar untuk semua kalangan
		Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Tidak	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	
		Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Tidak ada data	Peningkatan angka rata-rata lama sekolah	

No. TPB	TUJUAN TPB	ISU STRATEGIS	SESUAI TARGET	ALTERNATIF SKENARIO	REKOMENDASI
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Tidak	1. Peningkatan Produk Domestik Bruto 2. Meningkatkan kegiatan ekonomi disegala tingkat	1. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah 3. Pendirian unit penanganan pengaduan 4. Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional 5. Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 6. Pengembangan potensi unggulan daerah 7. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak	Peningkatan kesempatan kerja	1. Penyelenggaraan pendidikan Non-formal dan pelatihan 2. Pembangunan sarana dan pra sarana pelatihan 3. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
		Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Tidak	1. Pengembangan potensi-potensi pariwisata daerah 2. Pengelolaan kekayaan sumberdaya alam dan kebudayaan	1. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 5. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

No. TPB	TUJUAN TPB	ISU STRATEGIS	SESUAI TARGET	ALTERNATIF SKENARIO	REKOMENDASI
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	Tidak ada data	Meningkatkan akses terhadap perumahan	1. Pengembangan perumahan 2. Peningkatan lingkungan sehat perumahan 3. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 4. Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 5. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu6. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
		Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Tidak ada data	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan	1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, termasuk didalamnya pembangunan TPA ramah lingkungan 3. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan 4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 5. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 6. Bimbingan teknis persampahan 7. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 8. Koordinasi pengelolaan persampahan 9. Koordinasi pengelolaan sampah antar daerah 10. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

No. TPB	TUJUAN TPB	ISU STRATEGIS	SESUAI TARGET	ALTERNATIF SKENARIO	REKOMENDASI
14	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Tidak ada data	Meningkatkan luas area berhutan	1. Rehabilitasi hutan dan lahan di area semak dan lahan terbuka 2. Pelibatan dan pemberian insentif kepada masyarakat sekitar area berhutan 3. Pengelolaan lahan terbuka dan semak secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023

Tabel 4.9
Capaian Indikator TPB Kabupaten Seruyan Tahun 2013 hingga 2020

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN INDIKATOR TPB DAERAH								SESUAI TARGET
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	7,91	8,77	8,50	8,08	7,46	7,43	7,19	6,85	Ya
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	92,23	95,20	95,60	95,50	95,08	95,60	92,39	97,99	Ya
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	78,86	67,34	70,30	70,40	74,70	74,75	64,91	81,28	Tidak
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi balita gizi kurang	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	1.50%	1.79%	1.62%	1.25%	0.07%	n/a	n/a	n/a	Ya
		Persentase balita gizi buruk/ kurang gizi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0.36%	0.13%	0.15%	0.13%	0.10%	n/a	n/a	n/a	Ya

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN INDIKATOR TPB DAERAH								SESUAI TARGET
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Konsumsi ikan	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/ kapita/ tahun).	26,97	22,95	37,43	45,01	46,95	46,95	52,24	52,50	Tidak ada data
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	242.52	336.42	228.05	271.64	135.23	133,87	257,15	131,20	Ya
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3	3	6	4	3	n/a	n/a	n/a	Ya
			Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	216	240	247	217	225	n/a	n/a	n/a	Tidak
			Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	-0.67	0.33	1.25	1.11	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak ada data

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN INDIKATOR TPB DAERAH								SESUAI TARGET
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	22.52%	20.35%	22.35%	24.47%	12.15%	n/a	n/a	n/a	Tidak
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,33	2,36	2,68	2,83	3,13	3,55	3,60	6,62	Ya
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Angka partisipasi kasar	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	114.64	108.31	114.62	106.88	106.74	111,11	93,39	116,48	Tidak
		Angka partisipasi kasar	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	99.62	95.3	95.23	92.38	93.22	101,39	70,54	87,42	Tidak
		Angka rata-rata lama sekolah	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	7,81	7,03	7,45	7,49	7,75	7,98	7,75	7,79	Tidak ada data
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	16%	20%	20%	20%	20%	20%	12%	12%	Ya
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang	Pertumbuhan PDRB	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	6,28	5,31	5,17	5,02	5,15	5,21	5,19	n/a	Ya

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN INDIKATOR TPB DAERAH								SESUAI TARGET
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	PDRB per Kapita	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	32,73	34,44	35,829	37,898	39,928	40,748	41,601	n/a	Tidak
		Tingkat pengangguran terbuka	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4,52	4,40	4,64	n/a	4,79	4,28	4,45	4,30	Tidak
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	1.13%	1.13%	1.19%	1.20%	1.19%	0,024	0,014	0,014	Tidak
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	6.77%	7.86%	5.79%	5.73%	7.83%	31,93	31,38	32,80	Ya
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Indeks Gini	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	0.29	0,300	0,292	0,314	0,288	0,287	0,336	n/a	Ya
		Presentase penduduk di atas garis kemiskinan	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	7,91	8,77	8,50	8,08	7,46	7,43	7,19	6,85	Ya

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN INDIKATOR TPB DAERAH								SESUAI TARGET
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Rasio rumah layak huni	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	64,59	49	73	46,07	n/a	47,92	54,56	52,57	Tidak ada data
		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	38,20	16,45	14,38	n/a	n/a	16,53	51	51	Tidak ada data
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	63.62%	63.62%	63.62%	63.62%	63.62%	n/a	n/a	n/a	Tidak
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan,		(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3	0	1	3	0	n/a	n/a	n/a	Ya
			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	85.18%	79.42%	78.38%	80.22%	82.22%	n/a	n/a	n/a	Ya

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN INDIKATOR TPB DAERAH								SESUAI TARGET
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	16%	20%	20%	20%	20%	20%	12%	12%	Ya
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan		Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	13.84%	12.91%	11.14%	13.11%	12.17%	n/a	n/a	n/a	Ya

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023

3. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan

Alternatif skenario tanpa upaya tambahan adalah bentuk-bentuk skenario pilihan yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Seruyan untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator yang telah mencapai target nasional. Dari total 37 indikator yang menjadi prioritas Kabupaten Seruyan, 16 diantaranya telah mencapai target nasional. Berikut adalah beberapa alternaif skenario Kabupaten Seruyan tanpa upaya tambahan:

a. Mempertahankan program dan kegiatan untuk pelaksanaan seluruh TPB yang sudah mencapai target nasional (*Business as Usual*).
b. Mempertahankan program dan kegiatan untuk indikator TPB yang sudah mencapai target nasional, berdasarkan skala prioritas.

Skenario pertama untuk TPB yang telah mencapai target nasional adalah dengan mempertahankan alokasi APBD untuk pelaksnaan TPB. Asumsi yang digunakan untuk skenario ini adalah tersedianya anggaran yang cukup bagi Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan indikator TPB, termasuk indikator-indikator yang telah mencapai target nasional. Pertimbangan penerapan skenario ini adalah, belum semua indikator yang telah mencapai target nasional di Seruyan cukup kuat untuk dibiarkan tanpa intervensi lanjutan. Sehingga masih dibutuhkan penganggaran lanjutan. Dikhawatirkan apabila tidak dianggarkan pada APBD, capaian yang telah mencapai target nasional masih akan mengalami penurunan pencapaian.

Skenario kedua untuk TPB yang sudah mencapai target nasional adalah dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan yang sudah mencapai target nasional. Kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan indikator yang telah mencapai target nasional akan tetap dialokasikan, namun tidak secara keseluruhan. Namun demikian, tidak seluruh indikator yang telah mencapai target nasional akan dialokasikan. Harus ditentukan skala prioritas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Asumsi ini dipilih dengan catatan karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan TPB yang sudah mencapai target nasional. Sehingga hanya beberapa

kegiatan yang dianggap prioritas yang masih harus dialokasikan ke dalam program dan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan.

4.3.7. Telaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.10
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

NO	DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT
1	Kabupaten Lamandau	2018-2023	Visi: Bergerak cepat membangun Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)
			Misi: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera; 3. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup; 4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal; dan 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2	Kabupaten Katingan	2018-2023	Visi: Katingan bermartabat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
			Misi: 1. Untuk menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum; 2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan; 3. Memantapkan pembangunan perdesaan; 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

NO	DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT
			melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender; 5. Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi; 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan; 7. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya.
3	Kabupaten Kotawaringin Timur	2016-2021	Visi: Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera
			Misi: 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak. 2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.
		2021-2026	Visi: Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional
			Misi: 1. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari. 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia. 3. Mengembangkan Industri Pengolahan. 4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur. 5. Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman. 6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial. 7. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa. 8. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi.

NO	DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT
			9. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman. 10. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana. 11. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. 12. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
4	Kabupaten Kotawaringin Barat	2017-2022	Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Yang Ikhlas Melalui Iptek Dan Infrastruktur, Ketaqwaan, Harmonis, Langgeng, Aman, Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional
			Misi: 1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga. 3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis. 6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.
5	Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat	2016-2021	Visi: Kabupaten Melawi Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru
			Misi: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

4.3.8. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan.

Berpijak dari penelaahan terhadap isu international, nasional, provinsi, RPJPD Kabupaten Seruyan serta permasalahan pembangunan Kabupaten Seruyan, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Penataan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional.
2. Peningkatan pelayanan pendidikan.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan kondisi perekonomian masyarakat
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dengan memprioritaskan aksebilitas dari Kuala Pembuang ke Pelabuhan Laut Sigintung, ke wilayah tengah dan wilayah utara Kabupaten Seruyan, serta ke sentra-sentra produksi.
6. Pengelolaan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Peningkatan dan Pengembangan potensi pariwisata, serta pelestarian seni dan budaya lokal yang mendukung pariwisata.
8. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah kesejahteraan sosial.
9. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar umat beragama.

Tabel 4.11
Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan
Tahun 2018-2023

ISU STRATEGIS					
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		**RPJMD KABUPATEN SERUYAN**		**RPJPD KABUPATEN SERUYAN**	
RPJMD PROV 1	Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.	1	Penataan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional. (RPJMD PROV 8, RPJPD 22)	RPJPD1	Penduduk
RPJMD PROV 2	Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing.	2	Peningkatan pelayanan pendidikan (RPJMD PROV 2, RPJPD 2, 3, 6, 7)	RPJPD2	Pendidikan
RPJMD PROV 3	Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah.	3	Peningkatan pelayanan kesehatan (RPJMD PROV 2, RPJPD 4)	RPJPD3	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RPJMD PROV 4	Pemerataan kesejahteraan masyarakat.	4	Peningkatan kondisi perekonomian masyarakat (RPJMD PROV 3, RPJPD 11)	RPJPD4	Kesehatan
RPJMD PROV 5	Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan.	5	Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dengan memprioritaskan pengembangan Pelabuhan Laut Sigintung. (RPJMD PROV 6, RPJPD 20,21, 24, 25)	RPJPD5	Ketenagakerjaan
RPJMD PROV 6	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.	6	Pengelolaan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat (RPJMD PROV 7, RPJPD 12-18)	RPJPD6	PerananWanita
RPJMD PROV 7	Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi.	7	Pengembangan potensi pariwisata dan pelestarian seni dan budaya local. (RPJMD PROV 7, RPJPD 19)	RPJPD7	Pemuda dan Olah raga
RPJMD PROV 8	Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh.	8	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalahan kesejahteraan sosial. (RPJMD PROV 4, RPJPD 1, 5, 9, 10)	RPJPD8	Agama
		9	Peningkatan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar umat beragama. (RPJMD PROV 2, RPJPD 8, 23)	RPJPD9	Kesejahteraan Sosial
				RPJPD10	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

ISU STRATEGIS					
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		RPJMD KABUPATEN SERUYAN		RPJPD KABUPATEN SERUYAN	
				RPJPD11	Perekonomian Daerah
				RPJPD12	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
				RPJPD13	Perkebunan
				RPJPD14	Kehutanan
				RPJPD15	Peternakan
				RPJPD16	Kelautan dan Perikanan
				RPJPD17	Investasi Daerah
				RPJPD18	Perindustrian dan Perdagangan
				RPJPD19	Pariwisata
				RPJPD 20	Transportasi
				RPJPD21	Energi Listrik
				RPJPD22	Politik dan Pemerintahan
				RPJPD23	Hukum
				RPJPD24	Penataan Ruang
				RPJPD25	Kebencanaan

Sumber: data diolah

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dapat diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan atau grand strategi (*goals*) serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya.

Proses perumusannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategik dengan melakukan analisis internal dan eksternal dan memperhatikan program-program yang ditawarkan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan terpilih periode 2018-2023.

5.1 Visi

Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Seruyan 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Seruyan sebagaimana yang dicita-citakan. Adapun rumusan visi Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 adalah:

"MEWUJUDKAN KABUPATEN SERUYAN SEHAT
(Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman dan Tentram)"

Sejahtera dapat diartikan sebagai suatu keadaan aman sentosa dan makmur. Suatu keadaan sejahtera tersusun dari tiga unsur, yakni

pertama adalah seluruh permasalahan sosial dapat dikendalikan dengan baik, *kedua* segala macam kebutuhan hidup dapat terpenuhi, dan yang *ketiga* adalah tersedianya seluruh kesempatan bagi siapapun untuk dapat maju kearah yang lebih baik.

Konsep sejahtera sangat erat sekali dengan bentuk kesejahteraan sosial yang dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui kegiatan menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu, standar hidup, dan hubungan sosial.

Elok dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik, cantik, dan enak dipandang. Dalam hal ini elok juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang baik dan jauh dari kegiatan-kegiatan negatif.

Harmonis dapat diartikan sebagai suatu kondisi bersangkut paut dengan harmoni yang seiya sekata. Harmonis dalam kehidupan merupakan suatu keadaan dimana setiap orang dapat saling merangkul bersama di setiap masalah sehingga terjadi keselarasan hidup guna mencapai kebahagiaan bersama.

Aman dalam hal ini mencerminkan suatu kondisi yang bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi dan tidak mengandung resiko. Aman juga merupakan kondisi dimana kita bisa mengidentifikasi resiko yang ada dan mengurangi resiko seminimal mungkin ke level yang bisa diterima dengan baik.

Tentram dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak merasa takut bahkan khawatir. Tentram juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan). Di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran).

5.2 Misi

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, maka misi pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. **Menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional.**

   Pemerintah Kabupaten Seruyan bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik yang prima dan profesional. Dalam pelaksanaannya, dilakukan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan yang terpadu, serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara.

2. **Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal.**

   Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Seruyan. Dalam mewujudkan SDM yang andal, perlu dibekali dengan pendidikan yang bermutu. Pelayanan Pendidikan diarahkan untuk melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan kabupaten bagi seluruh masyarakat yang berhak.

3. **Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat.**

   Selain Pendidikan, pembangunan SDM Seruyan juga diarahkan untuk pemenuhan SPM kesehatan. Kebijakan pembangunan difokuskan bagi pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh daerah, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. **Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi.**

   Peningkatan perekonomian masyarakat diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan agroindustri serta peningkatan kinerja kelembagaan dan kelompok usaha masyarakat dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan memperkuat perekonomian masyarakat. Dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan, yang pada gilirannya dapat mengendalikan tingkat kemiskinan dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

5. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.**

   Pembangunan Seruyan didukung dengan infrastruktur yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah secara proporsional. Infrastruktur wilayah menjadi pendukung berbagai aktivitas pembangunan dan menunjang pelayanan publik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan transportasi, air bersih, sanitasi dan berbagai infrastruktur wilayah lainnya, diharapkan dapat memenuhi SPM dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

6. **Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan.**

   Konektivitas daerah menjadi hal yang penting dalam meningkatkan aksesibilitas. Kemajuan sebuah wilayah salah satunya diukur dari konektivitas dan aksesibilitas. Dengan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, diharapkan dapat meningkatkan distribusi barang, orang dan jasa.

7. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan komitmen bersama seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan beragam, tidak membuat masyarakat serta merta melakukan pemanfaatan tanpa mengindahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijak untuk meningkatnya kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, pengembangan pertanian dalam arti luas juga diarahkan untuk ketahanan pangan daerah.

8. Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya.

Pengembangan sektor unggulan pariwisata sebagai penggerak perekonomian diarahkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata khususnya yang berbasis seni dan budaya. Peningkatan daya saing pariwisata diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan yang meningkat dari tahun ke tahun.

9. Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka dibutuhkan sumber penghidupan yang baik. Angkatan kerja yang memiliki pekerjaan, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan penanganan yang terpadu. Upaya meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

10. Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI.

Aktivitas masyarakat dan pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan lancar bila didukung oleh adanya kondisi daerah yang aman, tentram dan harmonis. Kondisi yang aman, tentram dan harmonis ini juga ditandai dengan terjaganya kualitas kehidupan beragama. Guna menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan serta kerukunan umat beragama, maka peran serta seluruh pelaku pembangunan sangat dibutuhkan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya adalah penegasan kembali visi dan misi pembangunan Kabupaten Seruyan secara lebih terinci, lebih tergambar dengan jelas. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Untuk menjabarkan misi agar lebih fokus, maka ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Seruyan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan.
4. Meningkatknya kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatknya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur.
6. Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja.
7. Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis.

Keterkaitan antara Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Pendidikan Berkualitas
		Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan.	Tanpa Kemiskinan
		Tanpa Kelaparan
		Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
4	Meningkatknya kualitas lingkungan hidup.	Air Bersih dan Sanitasi Layak
		Energi Bersih dan Terjangkau
		Penanganan Perubahan Iklim
		Ekosistem Lautan
		Ekosistem Daratan
5	Meningkatknya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur.	Industri, Inovasi dan Infrasruktur
		Berkurangnya Kesenjangan
		Kota dan Permukiman Berkelanjutan
6	Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja.	Kesetaraan Gender
7	Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Selanjutnya pada tabel dibawah ini dimuat atau digambarkan secara jelas keterkaitan antara visi dan misi serta tujuan dan sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja pencapaian dari masing-masing sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Tabel 5.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

VISI DAN MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
VISI: MEMAJUKAN KABUPATEN SERUYAN SEHAT, SEJAHTERA, ELOK, HARMONIS, AMAN DAN TENTRAM										
MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional.										
	T1.1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik	IKU 1. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC (55,55)	B (60,03)	B (60,19)	B (68,99)	BB (73,47)	BB (77,95)	BB (77,95)
	S1.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.	a. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		b. Nilai SAKIP	Predikat	B (60,47)	B (61,55)	B (62,60)	B (64,00)	B (65,50)	B (67,00)	B (67,00)
	S1.1.2. Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi.	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	80,03	78,64	81,85	82,21	82,95	83,69	83,69
MISI 2: Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal.										
	T2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	IKU 2. Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	67,04	67,57	67,58	69,30	70,12	70,94	70,94
	S2.1.1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan.	a. Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,98	7,75	7,79	8,73	8,99	9,26	9,26
		b. Harapan lama sekolah	Tahun	11,68	11,62	12,33	12,35	12,54	12,74	12,74
		c. Angka Melek Huruf	Persen	98,89	98,87	98,87	98,93	98,95	98,97	98,97

VISI DAN MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
MISI 3: Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat.										
	T3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	IKU 2. Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	67,04	67,57	67,58	69,30	70,12	70,94	70,94
	S3.1.1. Meningkatnya akses dan derajat kesehatan masyarakat.	Angka harapan hidup	Tahun	69,24	69,25	69,26	70,55	70,79	71,03	71,03
MISI 4: Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi.										
	T4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	IKU 3. Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	40,75	41,54	40,96	49,85	52,69	55,69	55,69
		IKU 4. Laju Inflasi	Persen	6,02	2,02	1,62	3,64	3,73	3,82	3,82
	S4.1.1. Menurunnya tingkat kemiskinan.	Persentase penduduk miskin	Persen	7,43	7,19	6,85	6,55	6,29	6,03	6,03
	S4.1.2. Meningkatnya sektor Koperasi dan UMKM	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	31,93	31,38	32,80	33,18	33,48	33,80	33,80
	S4.1.3. Berkembangnya agroindustri	Kontribusi Agroindustri terhadap PDRB sektor Industri	Persen	1,09	1,31	1,62	1,48	1,61	1,74	1,74
MISI 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.										
	T5.1. Meningkatkan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur	IKU 5. Indeks Aksesibilitas	Poin	53,45	n/a	n/a	58,25	60,75	63,25	63,25
	S5.1.1. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana pemukiman.	a. Persentase rumah tangga berakses air minum	Persen	5,63	4,351	0,279	6,53	6,93	7,23	7,23

VISI DAN MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		b. Rasio elektrifikasi	Persen	47,10	49,78	57	61,19	66,14	71,09	71,09
		c. Rasio Rumah layak huni	Persen	46,07	49,91	48,21	50,71	53,21	55,71	55,71
	S5.1.2. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana transportasi	Persentase wilayah desa yang terhubung dengan jalan kondisi baik	Persen	39	17,98	20,78	46	48	50	50
MISI 6: Mewujudkan Pelabuhan Laut TelukSegintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan.										
	T6.1. Meningkatkan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur	IKU 5. Indeks Aksesibilitas	Poin	53,45	n/a	n/a	58,25	60,75	63,25	63,25
	S6.1.1. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana transportasi	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Segintung	Persen	n/a	5	4,87	5	5	5	5
MISI 7: Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan.										
	T7.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	IKU 6. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,21	5,09	-2,23	5,29	5,32	5,36	5,36
		IKU 7. Indeks Gini	Poin	0,287	0,336	0,32	0,283	0,282	0,281	0,281
	S7.1.1. Meningkatnya pengelolan potensi sumber daya alam petanian, peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan	Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	36,56	37,04	37,04	38,09	38,59	39,09	39,09
	S7.1.2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	Poin	91,50	79,6	80,1	94,50	95,50	96,50	96,50
	T7.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKU 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	n/a	54,98	56,70	77,40	79,40	81,40	81,40

VISI DAN MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	S7.2.1. Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	n/a	54,98	56,70	77,40	79,40	81,40	81,40
MISI 8: Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya.										
	T8.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	IKU 6. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,21	5,09	-2,23	5,29	5,32	5,36	5,36
		IKU 7. Indeks Gini	Poin	0,287	0,336	0,32	0,283	0,282	0,281	0,281
	S8.1.1. Meningkatnya sektor industri pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,24	0,14	0,14	0,29	0,30	0,31	0,31
MISI 9: Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja.										
	T9.1. Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja.	IKU 9. Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,28	4,45	4,30	3,99	3,79	3,66	3,66
	S9.1.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,5	71,09	65,04	81,21	83,45	85,74	85,74
MISI 10: Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI.										
	T10.1. Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis	IKU 10. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6
	S10.1.1. Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas	Persen	3,96	4,12	4,65	4,55	4,45	4,35	4,35
	S10.1.2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6

Tabel 5.3

Kesesuaian dan Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Seruyan terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018-2023
1	Misi 1 : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.	Misi 5 : Meningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2	Misi 2 : Pengelolaan Infrastruktur.	Misi 5 : Meningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
3	Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai.	Misi 6 : Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Kabupaten Seruyan.
4	Misi 4 : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Misi 4 : Mengembangkan dan Menghidupkan Perekonomian Rakyat yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan. Mulai dari Industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan koperasi. Misi 9 : Menciptakan Lapangan Pekerjaan, serta Menjamin Hak Tenaga Kerja.
5	Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik Serta Profesional

	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018-2023
6	Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	Misi 2 : Mewujudkan Mutu Pendidikan yang Lebih Berkualitas, baik Pendidikan Formal maupun Non Formal Misi 3 : Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Prima Serta Berkualitas kepada Masyarakat. Misi 8 : Mengembangkan Sektor Pariwisata, Seni dan Budaya. Misi 10 : Menciptakan Rasa Aman, Kehidupan yang Damai, Rukun, Harmonis, Agamis dan Tentram dalam Bingkai NKRI
7	Misi 7 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Misi 7 : Meningkatkan, Mengembangkan dan Memberdayakan Potensi Sumber Daya Alam, Pertanian, Peternakan, Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan.
8	Misi 8 : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Misi 4 : Mengembangkan dan Menghidupkan Perekonomian Rakyat yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan. Mulai dari Industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan koperasi.

Tabel 5.4

Kesesuaian dan Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Seruyan terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026	MISI RPJMD KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018-2023
1	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.	Misi 4 : Mengembangkan dan Menghidupkan Perekonomian Rakyat yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan. Mulai dari Industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan koperasi. Misi 5 : Meningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas. Misi 6 : Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Kabupaten Seruyan. Misi 8 : Mengembangkan Sektor Pariwisata, Seni dan Budaya.
2	Misi 2 : Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipasi Perubahan Global.	Misi 7 : Meningkatkan, Mengembangkan dan Memberdayakan Potensi Sumber Daya Alam, Pertanian, Peternakan, Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan. Misi 9 : Menciptakan Lapangan Pekerjaan, serta Menjamin Hak Tenaga Kerja.

	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026	MISI RPJMD KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018-2023
3	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.	Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik Serta Profesional.
4	Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.	Misi 2 : Mewujudkan Mutu Pendidikan yang Lebih Berkualitas, baik Pendidikan Formal maupun Non Formal. Misi 3 : Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Prima serta Berkualitas kepada Masyarakat.
5	Misi 5 : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.	Misi 10 : Menciptakan Rasa Aman, Kehidupan yang Damai, Rukun, Harmonis, Agamis dan Tentram dalam Bingkai NKRI.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Sub bab ini memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Seruyan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Selanjutnya, strategi akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan dapat didefinisikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode perencanaan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 6.1 dibawah.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
T1.1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik		
S1.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.	Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah
S1.1.2. Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi		Peningkatan profesionalitas pelayanan publik
		Peningkatan peran kecamatan dalam pembangunan
		Peningkatan tata kelola, tata laksana dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang menerapkan prinsip good governance
T2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
S2.1.1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan	Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun
		Peningkatan kualitas dan penataan distribusi guru
		Peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan
		Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar dari Kabupaten Seruyan
T3.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
S3.1.1. Meningkatnya akses dan derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Peningkatan Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan
		Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pemberian subsidi BPJS
T4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan		
S4.1.1. Menurunnya tingkat kemiskinan.	Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan	Peningkatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif
		Pengembangan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan pedesaan
		Pengembangan kapasitas keluarga dalam kerangka kemandirian penduduk miskin dan rentan
		Peningkatan peran aktif perempuan dalam pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup
S4.1.2. Meningkatnya sektor koperasi dan UMKM	Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM	Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, serta kemudahan berusaha
		Menumbuhkan Lembaga Keuangan dan Lembaga Usaha Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan PAD
		Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan usaha
		Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pasar
S4.1.3. Berkembangnya agroindustri	Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Mikro Pengolahan Produk Pertanian (Pisang Kepok, Ikan Pipih, Ikan Tenggiri, Ikan Bandeng)
		Meningkatkan dan menumbuhkan usaha-usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
T5.1. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur		
S5.1.1. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana pemukimam.	Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman	Peningkatan pemenuhan kebutuhan transportasi yang memadai dan menghubungkan antar wilayah
		Peningkatan dan Perluasan Pemanfaatan Jaringan Pengairan
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
		Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
T6.1 Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur.		
S6.1.1. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana transportasi.	Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi laut	Standarisasi dan spesifikasi teknis sarana dan prasarana transportasi laut

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
T7.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan		
S7.1.1. Meningkatnya potensi sumber daya pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan.	Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati.	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
		Melakukan Kajian-kajian Terhadap Potensi Sumber Daya Alam, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan lain-lain.
S7.1.2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman pangan yang aman dan terjangkau
T7.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
S7.1.3. Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan	Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup
		Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim
		Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan dan DAS
T8.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan		
S8.1.1. Meningkatnya sektor industri pariwisata	Peningkatan daya saing kepariwisataan	Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan
	Peningkatan apresiasi, pelestarian dan promosi karya seni dan karya budaya	Perlindungan, pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya lokal
T9.1. Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja.		

TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
S9.1.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.	Peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja
		Peningkatan kualitas pelayanan penempatan, pemberdayaan tenaga kerja dan penerapan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan
T10.1. Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis		
S10.1.1. Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Peningkatan kerukunan dan ketentraman	Peningkatan peran masyarakat dan penegakan hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan
		Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
S10.1.2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.		Peningkatan toleransi umat beragama

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Reformasi Birokrasi	1	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah		x	x	x	x
		2	Peningkatan profesionalitas pelayanan publik		x	x	x	x
		3	Peningkatan peran kecamatan dalam pembangunan		x	x	x	x
		4	Peningkatan tata kelola, tata laksana dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang menerapkan prinsip good governance		x	x	x	x
2	Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan	5	Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun	x	x	x	x	x
		6	Peningkatan kualitas dan penataan distribusi guru	x	x	x	x	x
		7	Peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan	x	x	x	x	x
		8	Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar dari Kabupaten Seruyan	x	x	x	x	x
3	Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	9	Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	x	x	x	x	x
		10	Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	x	x	x	x	x
		11	Peningkatan Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan	x	x	x	x	x
		12	Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pemberian subsidi BPJS	x	x	x	x	x

Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan				
				2019	2020	2021	2022	2023
4	Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan	13	Peningkatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	x	x	x	x	x
		14	Pengembangan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan pedesaan	x	x	x	x	x
		15	Pengembangan kapasitas keluarga dalam kerangka kemandirian penduduk miskin dan rentan	x	x	x	x	x
		16	Peningkatan peran aktif perempuan dalam pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup	x	x	x	x	x
5	Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM	17	Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, serta kemudahan berusaha	x	x	x	x	x
		18	Menumbuhkan Lembaga Keuangan dan Lembaga Usaha Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan PAD		x	x	x	x
		19	Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan usaha	x	x	x	x	x
		20	Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran	x	x	x	x	x
		21	Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pasar	x	x	x	x	x
6	Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri	22	Penyebaran dan Penumbuhan Industri		x	x	x	x
		23	Mikro Pengolahan Produk Pertanian (Pisang Kepok, Ikan Pipih, Ikan Tenggiri, Ikan Bandeng)		x	x	x	x

Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan				
				2019	2020	2021	2022	2023
		24	Meningkatkan dan menumbuhkan usaha-usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan		x	x	x	x
7	Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman	25	Peningkatan pemenuhan kebutuhan transportasi yang memadai dan menghubungkan antar wilayah	x	x	x	x	x
		26	Peningkatan dan Perluasan Pemanfaatan Jaringan Pengairan		x	x	x	x
		27	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat	x	x	x	x	x
		28	Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	x	x	x	x	x
		29	Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	x	x	x	x	x
8	Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi laut	30	Standarisasi dan spesifikasi teknis sarana dan prasarana transportasi laut		x	x	x	x
9	Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati.	31	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.		x	x	x	x
		32	Melakukan Kajian-kajian Terhadap Potensi Sumber Daya Alam, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan lain-lain.		x	x	x	x
		33	Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman pangan yang aman dan terjangkau		x	x	x	x

Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan				
				2019	2020	2021	2022	2023
10	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan	34	Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup		x	x	x	x
		35	Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim		x	x	x	x
		36	Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan dan DAS		x	x	x	x
11	Peningkatan daya saing kepariwisataan	37	Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan		x	x	x	x
12	Peningkatan apresiasi, pelestarian dan promosi karya seni dan karya budaya	38	Perlindungan, pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya lokal		x	x	x	x
13	Peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	39	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja	x	x	x	x	x
		40	Peningkatan kualitas pelayanan penempatan, pemberdayaan tenaga kerja dan penerapan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan	x	x	x	x	x
14	Peningkatan kerukunan dan ketentraman	41	Peningkatan peran masyarakat dan penegakan hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan		x	x	x	x
		42	Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air		x	x	x	x
		43	Peningkatan toleransi umat beragama		x	x	x	x

Pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD akan menjadi pedoman bagi prioritas pembangunan tahunan. Dalam RKPD Kabupaten Seruyan akan ditetapkan prioritas pembangunan sebagai pelaksanaan dari RPJMD. Adapun prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Seruyan, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi.
2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan.
3. Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
4. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan.
5. Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri.
6. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.
7. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman.
8. Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi laut.
9. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati.
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan.
11. Peningkatan daya saing kepariwisataan.
12. Peningkatan apresiasi, pelestarian dan promosi karya seni dan karya budaya.
13. Peningkatan kesempatan kerja.
14. Peningkatan kerukunan dan ketentraman.

Masih terkait dengan pedoman perencanaan pembangunan tahunan selama periode 2019 sampai dengan 2023, maka ditetapkan fokus atau tema pembangunan. Fokus atau tema tersebut akan memberi arah pembangunan tahunan secara umum dan dirinci dengan prioritas pembangunan tahunan sebagaimana telah ditetapkan sejumlah 14 prioritas. Adapun fokus atau tema pembangunan tahunan Kabupaten Seruyan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6.1
Fokus/Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2023

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dengan memperhatikan Perda RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039, memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan terkait pemanfaatan ruang selama periode RPJMD Tahun 2018-2023. Arah kebijakan dimaksud meliputi pengembangan kawasan strategis, pengembangan kawasan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

6.2.1. Pengembangan Kawasan Strategis

1. Terdapat 5 (lima) kawasan strategis yang mempunyai nilai ekonomi di Kabupaten Seruyan, yaitu:
   a) Kawasan **Hanau** merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet serta pengembangan jasa.
   b) Kawasan **Sembuluh** merupakan kawasan pengembangan terpadu untuk kelapa sawit, perikanan darat dan pariwisata.

c) Kawasan **Perkotaan Kuala Pembuang** sebagai pusat perdagangan regional.

d) Kawasan **Segintung** merupakan kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas, pergudangan, dan simpul transportasi darat, laut serta udara.

e) Kawasan **Segitiga Kudaman** (Tumbang Kubang, Tumbang Darap dan Tumbang Manjul) merupakan kawasan tertinggal di sebelah utara dengan potensi unggulan berupa hutan dan perkebunan karet rakyat.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati yaitu Kawasan **Danau Sembuluh**.

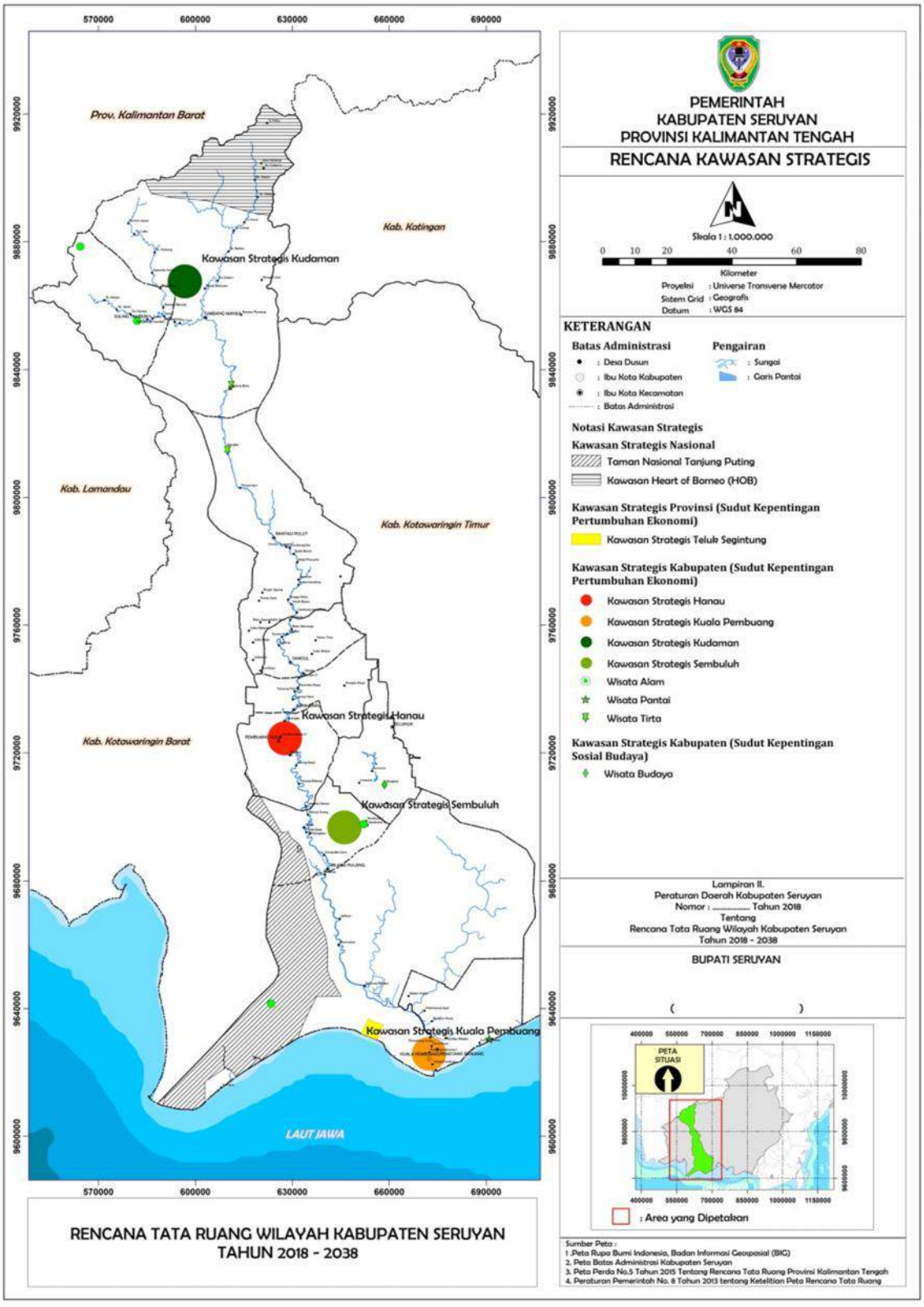

Gambar 6.2
Peta Kawasan Strategis

Sumber: RTRW Kabupaten Seruyan 2019 – 2039

6.2.2. Pengembangan Kawasan Ekonomi

Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, sebagai berikut:

a. Kawasan lindung yang terdiri atas:
   1) kawasan hutan lindung;
   2) kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
   3) kawasan perlindungan setempat;
   4) kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam; dan
   5) kawaan rawan bencana alam.

b. Kawasan budidaya yang terdiri atas:
   1) kawasan peruntukan hutan produksi;
   2) kawasan peruntukan pertanian;
   3) kawasan peruntukan perikanan;
   4) kawasan peruntukan pertambangan;
   5) kawasan peruntukan permukiman;
   6) kawasan peruntukan industri;
   7) kawasan peruntukan pariwisata;
   8) kawasan peruntukan pertahanan; dan
   9) kawasan Outline.

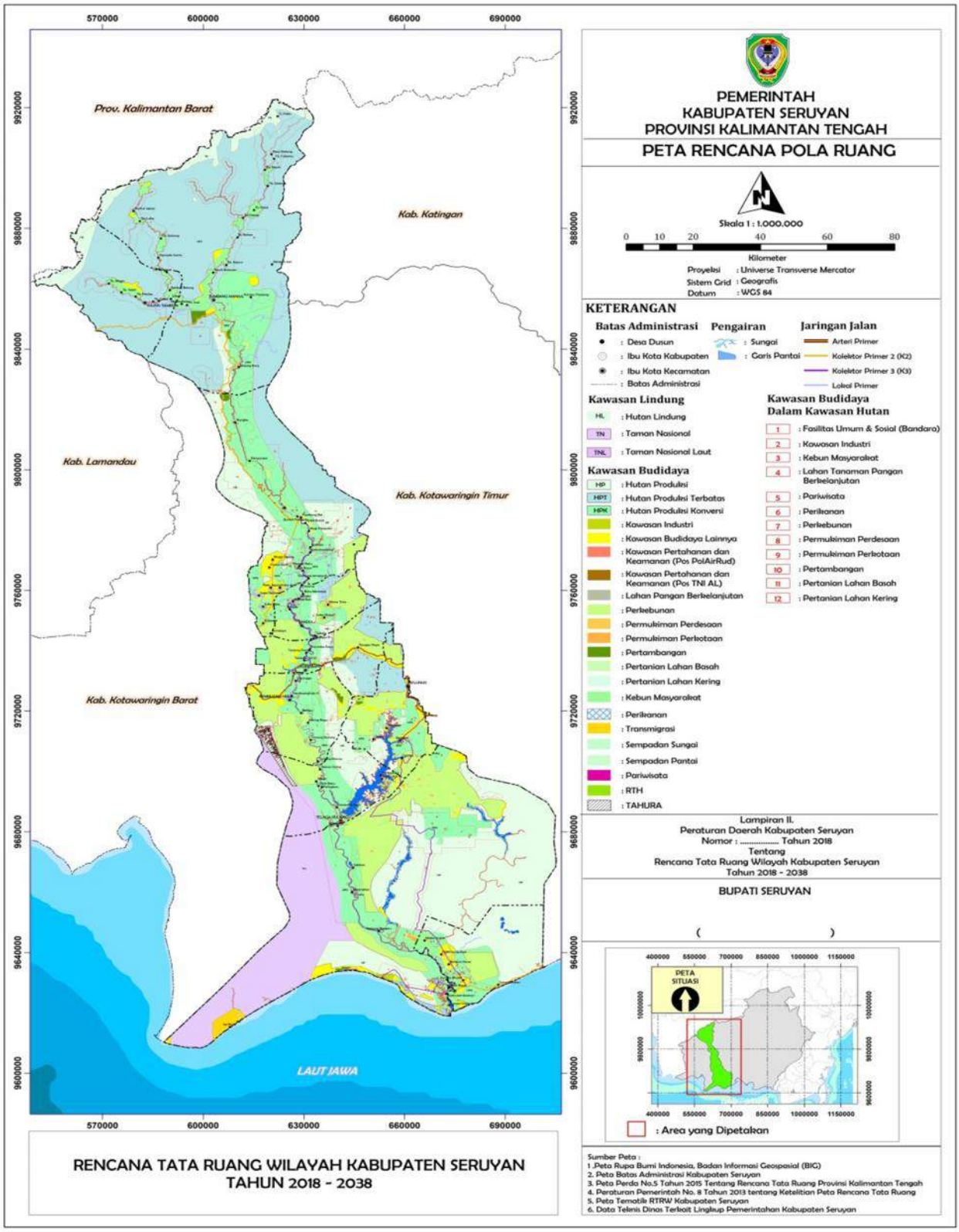

Gambar 6.3
Pola Ruang (Pengembangan Kawasan Ekonomi)
Sumber: RTRW Kabupaten Seruyan 2019 - 2039

6.2.3. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kegiatan utama yang membentuk struktur ruang Kabupaten Seruyan dengan rencana pengembangan sistem perkotaan, sebagai berikut:

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kota Kuala Pembuang yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kegiatan utama sebagai:
   a) Pusat Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten
   b) Pusat industri perikanan-laut regional
   c) Pusat distribusi-koleksi barang umum regional
   d) Pusat jasa transportasi darat regional
   e) Pusat jasa transportasi laut regional
   f) Pusat perdagangan, bisnis keuangan dan jasa skala lokal dan atau regional
   g) Kawasan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
   h) Kawasan pengembangan minapolitan
   i) Pusat jasa pariwisata regional
   j) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan

2) PKL-p Pembuang Hulu dan Rantau Pulut sebagai:
   a) pusat administrasi pemerintahan kecamatan;
   b) simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai;
   c) pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan;
   d) pusat pengembangan perkebunan dan kehutanan;
   e) pusat pengembangan perikanan darat (danau dan sungai);
   f) pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
   g) pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
   h) pusat pengembangan wisata.

3) PPK Pematang Panjang memiliki peran sebagai :
   a) pusat administrasi pemerintahan kecamatan;

b) simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai;
c) pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
d) pusat pengembangan perikanan laut, darat (sungai) dan tambak;
e) pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
f) pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
g) pusat pengembangan wisata.

4) PPK Telaga Pulang, Selunuk, Asam Baru, Sandul dan memiliki peran sebagai:
a) pusat administrasi pemerintahan kecamatan;
b) simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai;
c) pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan;
d) pusat pengembangan perkebunan dan kehutanan;
e) pusat pengembangan perikanan darat (danau dan sungai);
f) pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
g) pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
h) pusat pengembangan wisata.

5) PPK Tumbang Manjul dan Tumbang Langkai memiliki peran sebagai:
a) pusat administrasi pemerintahan kecamatan;
b) simpul transportasi lokal baik darat maupun sungai;
c) pusat pengembangan kehutanan dan perkebunan;
d) pusat pengembangan pertanian lahan kering dan peternakan;
e) pusat pengembangan perikanan darat (sungai);
f) pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
g) pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
h) pusat pengembangan wisata.

6) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Bangkal dan Sembuluh Satu memiliki peran sebagai:
a) pusat pengembangan permukiman pedesaan;

b) simpul transportasi darat dan sungai skala regional;
c) pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal;
d) pusat pengembangan perkebunan;
e) pusat pengembangan perikanan air tawar; dan
f) pusat pengembangan wisata.

Memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada dan rencana pembangunan pelabuhan laut di Teluk Segintung di Kecamatan Seruyan Hilir, maka untuk pengembangan jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Seruyan diuraikan sebagai berikut:

a. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Pembuang Hulu – Asam Baru sepanjang ± 25 Km;
b. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Pembuang Hulu – Desa Baung sepanjang ± 100 Km;
c. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Asam Baru – Rantau Pulut sepanjang ±74.42 Km;
d. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Sukorejo – Rantau Pulut – Tumbang Manjul – Tumbang Langkai sepanjang ±183,83 Km;
e. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Manjul – Tanjung Paku sepanjang ±120 Km;
f. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Langkai – Tumbang Magin sepanjang ±18 Km;
g. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Manjul – Mongoh Juoi sepanjang ±40 Km;
h. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Salau – Buntut Sapau sepanjang ±47 Km;
i. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Rungau Raya – Wanatirta sepanjang ± 35 Km.
j. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Kuala Pembuang – Tanjung Rangas sepanjang ± 30 Km.

k. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Desa Baung – Muara Dua sepanjang± 35 Km;
l. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Tumbang Langkai – batas kabupaten bagian barat (Kabupaten Lamandau) sepanjang ±30,78 Km;
m. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Terawan – Lanpasa sepanjang ±38 Km;
n. Jaringan jalan kolektor primer (JKP-4) yang berstatus jalan kabupaten yaitu ruas jalan Desa Muara Dua – Jalan Provinsi sepanjang ±9 Km;
o. Jaringan jalan lokal primer (JLP) yang berstatus jalan kabupaten meliputi :
    1) Ruas Jalan di Kecamatan Seruyan Hilir:
    2) Ruas Jalan di Kecamatan Danau Sembuluh:
    3) Ruas Jalan di Kecamatan Seruyan Raya:
    4) Ruas Jalan di Kecamatan Hanau:
    5) Ruas Jalan di Kecamatan Danau Seluluk:
    6) Ruas Jalan di Kecamatan Batu Ampar:
    7) Ruas Jalan di Kecamatan Seruyan Tengah:
    8) Ruas Jalan di Kecamatan Seruyan Hulu:
    9) Ruas Jalan di Kecamatan Suling Tambun:

Rencana pengembangan transportasi jaringan lalu lintas di Kabupaten Seruyan, diuraikan sebagai berikut:

1) Rencana Pembangunan Jaringan prasarana lalu lintas

Pengembangan simpul transportasi terdiri dari pembangunan terminal di:

a) Terminal penumpang Tipe B berada di Kuala Pembuang;
b) Terminal penumpang Tipe C berada di Telaga Pulang;
c) Terminal penumpang Tipe C berada di Pembuang Hulu;
d) Terminal penumpang Tipe C berada di Asam Baru;
e) Terminal penumpang Tipe C berada di Rantau Pulut; dan
f) Terminal penumpang Tipe C berada di Tumbang Manjul.

2) Rencana Pembangunan Jaringan pelayanan lalu lintas

a) Trayek angkutan barang dan penumpang Palangkaraya – Kuala Pembuang;
b) Trayek angkutan barang dan penumpang Sampit – Kuala Pembuang;
c) Trayek angkutan barang dan penumpang Kuala Pembuang – Nanga Bulik;
d) Trayek angkutan barang dan penumpang Kuala Pembuang – Pangkalan Bun; dan
e) Trayek angkutan barang dan penumpang Pulang Pisau – Kuala Pembuang.

3) Rencana Pembangunan Jembatan

Selain pembangunan jembatan besar Sei Seruyan di Kuala Pembuang yang sudah selesai, dan jembatan yang sudah eksisting di Asam Baru, paling tidak dibutuhkan 2 (dua) buah pembangunan jembatan besar serta jembatan kecil lainnya, yaitu:

a) Jembatan besar di Rantau Pulut, melintasi Sungai Seruyan.
b) Jembatan besar di Tumbang Manjul, melintasi Sungai Manjul.
c) Pemeliharaan jembatan yang telah ada.
d) Pembangunan jembatan kecil.

4) Rencana Pembangunan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Rencana Jaringan sungai di Provinsi Kalimantan Tengah masih mengikuti jalur yang sudah ada, jaringan Sungai Seruyan: Mojang Baru – Rantau Pulut – Asam Baru – Pembuang Hulu – Telaga Pulang – Kuala Pembuang;

Transportasi sungai melalui Sungai Seruyan hanya layak dikembangkan mulai dari Kuala Pembuang hingga ke Rantau Pulut dan rute angkutan danau/sungai lainnya. Untuk itu, direncanakan perbaikan dan pembangunan dermaga sungai serta pemeliharaan sungai pada ruas:

a) Kuala Pembuang – Rantau Pulut (melalui Telaga Pulang, Pembuang Hulu, Asam Baru dan Sandul)
b) Bangkal - Telaga Pulang (jalur danau sembuluh) dengan klotok dan long boad sesuai permintaan.
c) Kuala Pembuang - Telaga Pulang – Pembuang Hulu, secara regular (tiap hari) dilayani oleh long boat dengan kapasitas 60 0rang dan speed boad.
d) Pembuang Hulu – Rantau Pulut menggunakan speed boad dan long boad.
e) Rantau Pulut – Tumbang Manjul menggunakan *speed boad* dan *long boad*.

Untuk melayani transportasi sungai (layanan kapal motor kapasitas < 1 ton) di wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, perlu juga dibangun dermaga sungai di Tumbang Manjul.

5) Rencana Pengembangan Transportasi Laut

Penetapan pelabuhan ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan ditetapkan dengan kriteria:
   a. berada di lokasi yang berhubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan
   b. memperhitungkan keselamatan penyeberangan.
2. Pelabuhan nasional ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan bagian dari infrastruktur penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi;
   b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
   c. memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
   d. berada di luar kawasan lindung; dan

e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter.

3. Pelabuhan regional ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan bagian dari infrastruktur penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antar provinsi;
   b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
   c. memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
   d. berada di luar kawasan lindung; dan
   e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat) meter.
4. Pelabuhan lokal ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan bagian dari infrastruktur penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
   b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;
   c. berada di luar kawasan lindung;
   d. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter; dan
   e. dapat melayani pelayaran rakyat.

Untuk pembangunan sistem jaringan laut provini, arahan pengembangan yang dapat dikemukakan adalah Pelabuhan Laut Sekunder untuk sektor tengah Segintung di Seruyan. Rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Seruyan terdiri dari pembangunan pelabuhan regional, meliputi:

1. Pembangunan pelabuhan laut Teluk Segintung di Kecamatan Seruyan Hilir yang merupakan satu-satunya pelabuhan laut di Kalimantan Tengah yang terletak langsung di pinggir Laut Jawa.

Pelabuhan ini direncanakan sebagai Pelabuhan Umum atau Pelabuhan Utama yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas Pelabuhan Teluk Segintung di Kecamatan Seruyan Hilir untuk bongkar muat barang.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas dan peralatan Pelabuhan Teluk Segintung di Kecamatan Seruyan Hilir, untuk melayani kebutuhan muat CPO dan bongkar muat angkutan barang.
4. Pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran agar selalu dapat dilayari kapal-kapal dengan kapasitas yang cukup besar.
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas rute pelayaran yang telah ada, baik untuk pergerakan penumpang maupun barang.
6. Peningkatan pelayanan untuk melayani pergerakan penumpang dan atau barang dalam skala regional, nasional maupun internasional.
7. Peningkatan kualitas dan kapasitas moda angkutan laut sesuai dengan karakter pelabuhan Teluk Segintung.

6) Rencana Pengembangan Bandar Udara

Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Pengembangan bandar lama di Kuala Pembuang sulit dilakukan mengingat keterbatasan lahan sehingga perlu dikembangkan bandara baru pada lokasi yang lebih layak. Adapun rencana yang akan dilakukan terkait transportasi udara, yaitu:

a) Peningkatan bandar udara Kuala Pembuang sebagai bandar udara pengumpul.
   - Peningkatan panjang dan lebar landasan (*run way*).

b) Pengembangan bandara di Kalab (sekitar perbatasan Seruyan dan Kotawaringin Timur).

- Lokasi ini sangat strategis, berada di pinggir laut, memiliki lahan yang sangat luas
- Struktur tanah cukup baik dan sangat mendukung untuk pengembangan bandara.
- Lahan yang masih kosong (belum terbangun) memungkinkan perencanaan bandara yang lebih leluasa dan fleksibel.
- Rencana rute penerbangan meliputi: Kuala Pembuang – Tjilik Riwut – Palangka Raya.

Adapun peta terkait rencana pengembangan infrastruktur di Seruyan, disajikan pada gambar dibawah.

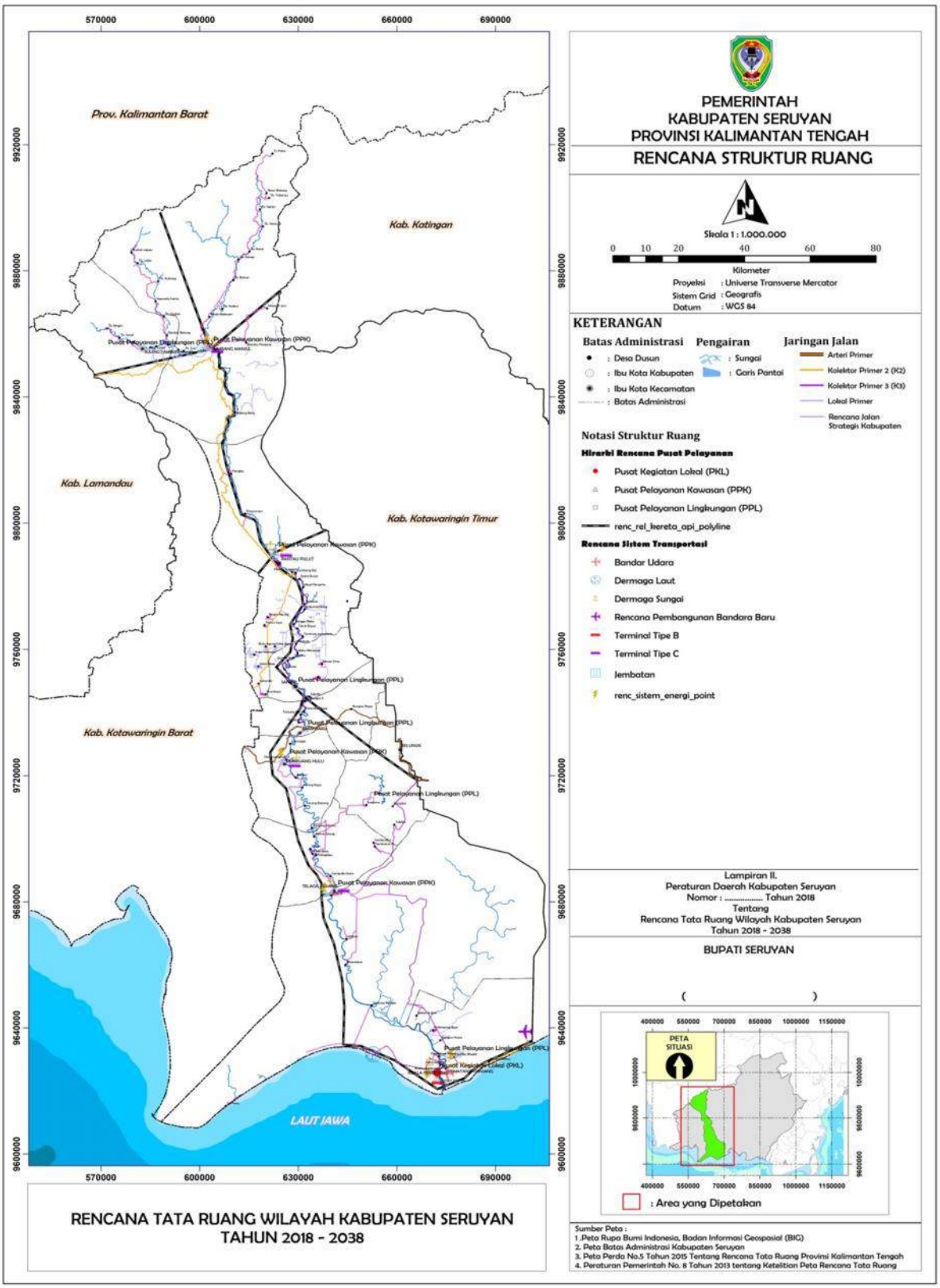

Gambar 6.4
Struktur Ruang (Rencana Pengembangan Infrastruktur)
Sumber: RTRW Kabupaten Seruyan 2019 - 2039

6.3. Program Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih sebagai cara atau upaya untuk mencapai sasaran, selanjutnya akan dijabarkan dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Penentuan program pembangunan daerah merupakan proses pemilahan program perangkat daerah berdasarkan *outcome*-nya yang dinilai dapat menunjang secara langsung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Seruyan selama 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan misi, tujuan dan sasaran. Hal ini dimaksudkan agar dapat terlihat hubungan langsung antara setiap sasaran dengan program yang akan mendukungnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3-A dan Tabel 6.3-B berikut:

Tabel 6.3-A
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang disertai Pagu Indikatif
Tahun 2018-2020

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional.				**19,285,547,899**		**21,404,756,150**		**26,484,872,541**	
	T1.1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC (55,55)		B (60,03)		B (60,19)		
	S1.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.	a. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP		WTP		WTP		
		b. Nilai SAKIP	Predikat	B (60,47)		B (61,55)		B (62,60)		
	Program:									
4.06.4.06.01.22.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat Efesiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah dan Pengawasan Pembangunan	Persen	90%	2,446,245,000	90%	3,894,371,500	90%	4,607,139,042	Inspektorat
4.06.4.06.01.24.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Persen	85%	641,407,000	85%	891,000,000	85%	692,582,287	Inspektorat
4.06.4.06.01.25.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang terverifikasi	Persen	90%	301,775,000	90%	340,625,000	90%	759,162,986	Inspektorat
4.06.4.06.01.26.	Program non pengawasan	Persentase kegiatan non pengawasan yang mencapai target	Persen	0	-	90%	233,407,500	90%	377,925,093	Inspektorat
4.01.4.01.01.15.	Program Pengembangan data/informasi	Persentase Pemutakhiran Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	80%	668,977,000	80%	819,899,800	80%	1,100,098,807	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.01.4.01.01.20.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase SDM Perangkat Daerah bidang Perencanaan yang memadai (%)	Persen	0%	-	100%	296,610,000	100%	971,807,383	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program tahunan (RKPD dan Renja-PD) Terhadap Program Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra-PD) (%)	Persen	80%	2,732,068,000	100%	1,688,764,500	100%	2,044,184,952	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.25.	Program perencanaan pembangunan ekonomi, prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Konsistensi Program tahunan (RKPD dan Renja-PD) Terhadap Program Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra-PD) bidang Ekonomi (%)	Persen	60%	561,256,000	0%	-	100%	485,903,691	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.23.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase Konsistensi Program tahunan (RKPD dan Renja-PD) Terhadap Program Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra-PD) bidang SOSBUDPEM (%)	Persen	100%	193,990,000	100%	483,635,000	100%	1,056,030,689	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.02.4.02.01.17.	Program peningkatan dan pengembangan Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase perda dan perkada APBD tepat waktu	Persen	100%	2,604,715,000	100%	1,192,900,000	100%	1,078,550,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.23.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Keuangan Kabupaten/kota	Persentase Penerbitan SP2D tepat Waktu	Persen	100%	929,645,000	100%	802,160,000	100%	689,130,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Tepat Waktu	Persen	0	-	0%	-	100%	197,380,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.05.4.02.01.21.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase SKPD melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis IT	Persen	100%	206,800,000	100%	496,500,000	100%	496,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.05.4.02.01.77.	Program Pengelolaan BMD	Persentase BMD yang tercatat.	Persen	100%	2,740,185,299	100%	2,795,115,000	100%	4,119,715,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.02.50.	Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan objek pajak	Persen	100%	1,836,432,200	80%	1,119,333,950	80%	1,253,236,538	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.02.4.02.02.51.	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan laporan penerimaan pendapatan	Persen	100%	408,651,800	80%	433,814,200	80%	581,628,662	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
	Program pelayanan pendapatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendapatan	Persen	100%	82,400,000	0%	-	80%	88,974,365	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.05.4.05.03.48.	Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu (%)	Persen	100%	52,000,000	0%	-	100%	64,787,159	Sekretariat Daerah
4.07.4.03.01.16.	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya	Persen	0%	-	100%	1,648,315,500	100%	1,648,315,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.07.4.03.01.20.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	Persen	100%	2,134,873,100	100%	2,802,323,200	100%	2,570,134,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.07.4.03.01.66.	Program Pengembangan data, arsip dan informasi kepegawaian	Tingkat keakuratan data, arsip dan informasi yang dipublikasikan	Persen	0%	-	100%	645,620,000	100%	237,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	S1.1.2. Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi.	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	80,03		78,64		81,85		
	Program:									
2.12.2.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jenis investasi yang dipromosikan	jumlah	100%	270,000,000	100%	210,850,000	100%	286,143,285	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase kerjasama Investasi yang terealisasi PMA/PMDN	Persen	100%	212,827,500	100%	153,548,000	100%	291,542,215	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.19.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentae Penerbitan jenis Ijin tepat waktu	Persen	0	-	90%	193,715,000	90%	340,132,584	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.26.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase jenis pelayanan ijin berbasis TI	Persen	90%	261,300,000	90%	262,248,000	90%	371,282,783	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.27.	Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan Secara Terpadu	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	0%	-	0%	-	90%	75,585,019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	MISI 2: Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal.				**55,611,192,260**		**63,074,212,841**		**63,859,647,000**	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	T2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	67,04		67,57		67,58		
	S2.1.1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan.	a. Rata-rata lama sekolah.	Tahun	7,98		7,75		7,79		
		b. Harapan lama sekolah.	Tahun	11,68		11,62		12,33		
		c. Angka Melek Huruf	Persen	98,89		98,87		98,87		
	Program:									
1.01.1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Persen	86.53%		87.00%	3,034,613,001	88.00%	3,137,122,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	Persen	APK SD = 106%, APK SMP=100,1%	35,965,793,441	APK SD = 117,2%, APK SMP=100,2%	35,772,988,850	APK SD = 130,2%, APK SMP=103,4%	36,455,920,000	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs	Persen	93.22%		93.22%		94.35%		
1.01.1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun yang mendapat Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan	Persen	57.14%	2,906,023,294	57.71%	2,285,264,137	62.29%	2,285,263,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	94.50%	16,739,375,525	95.00%	18,590,284,728	96.00%	18,590,283,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.21.	Program Manajemen Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan informasi managemen pendidikan	Persen	80%		82%	847,900,000	84%	847,900,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.31.	Program Pengembangan Prestasi Siswa	Persentase siswa SD/MI berprestasi	Persen	SD = 4%, SMP=3%		SD = 5%, SMP=4%	2,543,162,125	SD = 6%, SMP=5%	2,543,159,000	Dinas Pendidikan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	MISI 3: Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat.				**41,850,706,365**		**43,043,339,598**		**78,121,463,728**	
	T3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	67,04		67,57		67,58		
	S3.1.1. Meningkatnya akses dan derajat kesehatan masyarakat.	Angka harapan hidup	Tahun	69,24		69,25		69,26		
	Program:									
1.02.1.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	95	1,089,143,000	95	1,357,559,992	95	1,079,785,981	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilayani	Persen		18,684,863,975	100	18,005,369,975	100	41,175,654,178	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kasus obat dan makanan yang tidak aman yang ditangani (%)	Persen	100	153,942,000	100	121,040,000	100	215,957,196	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga (%)	Persen	n/a	620,706,190	20	568,725,000	25	674,866,238	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Persen	100	147,000,000	100	642,619,000	100	485,903,691	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Persen	0	-	40	664,680,000.00	50	431,914,392	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	100	862,635,000	100	913,907,000	100	1,403,721,775	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	Persen	0	-	50	2,020,105,000	60	1,188,229,752	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.02.1.02.01.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan puskesmas	Persen	120	12,261,362,200	120	8,799,016,381	120	12,502,841,875	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, anak dan remaja	Persentase anak balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	70	191,229,000	100	219,614,000	100	423,276,105	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	7.84	150,785,000	100	173,485,000	100	161,967,897	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	Persentase bayi baru lahir mendapatkan Yankes bayi baru lahir sesuai standar	Persen	68	556,140,000	100	586,235,000	100	1,678,641,518	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.35.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	0	-	100	253,750,000	100	539,892,991	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan RS Kuala Pembuang	Persen		1,500,000,000	98%	2,050,000,000	98%	3,239,357,943	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.16.	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai kelas rumah sakit	Persen	0	-	95%	148,500,000	95%	133,564,595	RSUD Kuala Pembuang
	Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	Cakupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan RS klinis dan non-klinis sesuai standar (%)	Persen	0	-	0%	-	95%	1,761,459,802	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.34.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD (poin)	poin	0	-	98%	4,000,000,000	98%	6,478,715,886	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.03.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan RS Kuala Pembuang	Persen		334,000,000	98%	2,518,733,250	98%	1,000,000,000	RSUD Hanau
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai kelas rumah sakit	Persen	0	-	0%	0	0%	-	RSUD Hanau

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	Cakupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan RS klinis dan non-klinis sesuai standar (%)	Persen		5,282,000,000	0%	-	95%	1,545,711,912	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.34.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD (poin)	poin		16,900,000	0%	-	98%	2,000,000,000	RSUD Hanau
	MISI 4: Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi.				**24,486,452,500**		**21,656,698,000**		**14,444,471,472**	
	T4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	a. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	40,75		41,54		40,96		
		b. Indeks Gini	Poin	6,02		2,02		1,62		
	S4.1.1. Menurunnya tingkat kemiskinan.	Persentase penduduk miskin	Persen	7,43		7,19		6,85		
	Program:									
1.06.1.06.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	- Persentase PMKS skala Kab. yang menerima Program Pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	60%	59,000,000	70%	700,790,000	75%	619,907,157	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Persentase penyandang disabilitas telantar skala Kab./Kota yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar diluar panti (%)	Persen	84%	712,985,000	87%	324,320,000	92%	619,907,157	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.23.	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase KPM yang menerima manfaat (%)	Persen	0%	-	95%	247,008,000	96%	619,907,158	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	S4.1.2. Meningkatnya sektor Koperasi dan UMKM	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	31,93		31,38		32,80		
	Program:									
2.11.2.11.01.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99.55%	360,000,000	-	-	99.42%	306,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.11.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	0.78%	123,884,500	-	-	0.78%	714,250,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UKM Non BPR/LKM UKM (Unit)	Persen	87.82%	262,930,000	-	-	85.21%	1,850,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	82.01%	63,518,000	-	-	82.56%	343,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	S4.1.3. Berkembangnya agroindustri	Kontribusi agroindustri terhadap PDRB sektor industri	Persen	1,09		1,31		1,62		
	Program:									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
3.07.2.11.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen	2,29%	620,715,000	-	-	2.58%	726,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.07.2.11.01.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Presentase IKM yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	Persen	4.76%	85,280,000	4.91%	50,000,000	5.07%	315,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.07.2.11.01.19.	Program Penataan Industri dan Pengembangan Sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra Industri Yang Dikembangkan	Jumlah	2	22,198,140,000	1	20,334,580,000	1 Sentra	7,555,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan Pemenuhan Kawasan Industri	Persen	0	-	-	-	16.67%	775,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	MISI 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.				**230,595,174,220**		**197,324,469,200**		**220,338,340,236**	
	T5.1. Meningkatkan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur	Indek aksesbilitas	Persen	53,45		53,25		55,75		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	S5.1.1. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana pemukiman.	a. Persentase rumah tangga berakses air minum	Persen	5,63		4,351		0,279		
		b. Rasio elektrifikasi	Persen	47,10		49,78		57		
		c. Rasio Rumah layak huni	Persen	46,07		49,91		48,21		
	Program:									
1.04.1.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang di tangani	Persen	0	-	65%	6,904,810,000	65%	675,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.18.	Program pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase rumah yang direhabilitasi akibat bencana alam	persen	0	-	0%	-	70%	150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.47.	Program Penataan Kawasan Permukiman	Cakupan sarana prasarana di permukiman	persen	0	-		9,541,500,000	60%	8,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program Lingkungan sehat perumahan	Cakupan layanan sehat perumahan	persen	0	-	-	-	55%	4,200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program pengelolaan fasilitas umum	Cakupan layanan pengelolaan fasilitas umum	persen	0	-	-	-	50%	1,500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.03.1.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sistem air limbah	Persen		1,400,000,000	20%	911,000,000	20%	1,490,104,654	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.03.1.03.01.30.	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Persentase Desa memiliki infrastruktur sesaui kebutuhan	Persen		7,160,025,000	20%	15,111,656,000	20%	7,569,739,106	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	S5.1.2. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana transportasi	Persentasi wilayah yang terhubung dengan jalan kondisi mantap	Persen	39		17,98		20,78		
	Program:									
1.03.1.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	KM		126,600,000,000	25 Km	99,559,581,250	25 Km	115,105,185,581	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase/Gorong-gorong dalam kondisi baik	Meter		2,565,000,000	3450 M	17,073,333,950	3000 M	14,257,950,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan yang di rehab/dipelihara/ditingkatkan menjadi jalan kondisi baik	KM		92,870,149,220	8 Km	48,222,588,000	10 Km	67,390,360,896	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	MISI 6: Mewujudkan Pelabuhan Laut TelukSegintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan.				**3,793,450,000**		**3,246,970,000**		**4,359,332,368**	
	T6.1. Meningkatkan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur	Indek aksesbilitas	Persen	53,45		53,25		55,75		
	S6.1.1. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana transportasi	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Sigintung	Persen	n/a		5		4,87		
	Program:									
2.09.2.09.01.15.	Program Pengembangan sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	Persentase pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sesuai	Persen	100%	3,413,790,000	100%	2,964,125,000	100%	3,021,008,345	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
		standar								
2.09.2.09.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang melaksanakan Uji KIR	Persen	100%	48,000,000	0%	-	100%	103,659,454	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.19.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase wilayah yang dilakukan pengaturan pengamanan / pengawasan lalu lintas	Persen	100%	331,660,000	100%	282,845,000	100%	279,664,569	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.22.	Program Peningkatan Transportasi Pedesaan	Persentase sarana dan prasarana transportasi pedesaan	Persen	0%	-	0%	-	100%	955,000,000	Dinas Perhubungan
	MISI 7: Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan.				**21,804,357,505**		**41,774,893,402**		**44,414,859,317**	
	T7.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	a. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,21		5,09		-2,23		
		b. Indeks Gini	Poin	0,287		0,336		0,32		
	S7.1.1. Meningkatnya pengelolan potensi sumber daya alam petanian, peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan	Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	36,56		37,04		37,04		
	Program:									
3.03.2.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	Persen	100	505,370,900	100	365,929,500	100	464,307,972	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.03.01.17.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persen	100	110,000,000.00	-	-	100	242,951,846	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.03.01.18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan yang ramah lingkungan	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persen	100	120,000,000.00	-	-	85	529,095,131	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
3.03.2.03.01.19.	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produktivitas Pertanian/ Perkebunan	Persen	100	9,370,814,824	100	9,002,271,540	100	10,629,413,198	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.03.01.26.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan	Persen	80	174,960,000	85	35,740,000	90	64,787,159	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.03.01.23.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penyakit ternak Yang Ditangani	Persen	100	467,514,860	100	416,583,500	100	269,946,495	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.03.01.24.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	100	779,811,000	100	1,011,066,230	100	1,490,104,654	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.03.01.25.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase kesejahteraan ekonomi peternak meningkat	Persen	-	-	-	-	85	53,989,299	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.03.01.28.	Program Peningkatan Penerapan teknologi peternakan	Peningkatan persentase populasi dan produksi ternak	Persen	-	-	-	-	85	97,180,738	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.03.01.30.	Penanggulangan wabah penyakit/hama	Persentase Penyakit/ Hama Tanaman dapat ditangani	Persen	100	200,000,000	-	-	85	80,983,949	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.01.3.01.01.31.	Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Perikanan	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Perikanan	Persen	-	-	91.25%	923,441,000	100%	1,457,171,181	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.32.	Program Produksi Perikanan	Persentase Produksi Perikanan	Persen	-	-	95.00%	8,874,585,000	95%	3,517,296,897	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Yang Dilatih	Persen	-	-	0%	-	100%	1,092,743,413	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Teknologi Perikanan	Persentase Penerapan Teknologi Perikanan	Jumlah	-	-	-	-	24	820,637,346	Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	S7.1.2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	Poin	91,50		79,6		80,1		
	Program:									
3.03.2.03.01.16.	Program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun	Persen	100	1,803,566,921	-	-	100	2,103,423,091	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.03.01.29.	Program peningkatan keamanan pangan	Persentase pangan aman dikonsumsi	Persen	80	50,000,000	-	-	85	53,989,299	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.03.01.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persen	100	133,100,000	80	117,600,000	85	215,957,196	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.03.01.31.	Program Kelembagaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Petani dan BP3K	Persentase Pengembangan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Petani dan BP3K	Persen	100	173,000,000	100	50,000,000	100	161,967,897	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	T7.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	n/a		54,98		56,70		
	S7.2.1. Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	n/a		54,98		56,70		
	Program:									
2.05.2.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Ditangani	Persen	36,73	5,228,355,000	40%	7,023,976,632	45%	5,645,504,433	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Status Mutu Air	Status	Cemar ringan	1,707,154,000	%	955,465,000	Cemar ringan	1,843,360,957	Dinas Lingkungan Hidup
		- Status Kualitas Udara	Status			Baik		Baik		
2.05.2.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Lahan Potensi Abrasi yang direhabilitasi	Persen		282,710,000		284,535,000		305,266,295	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.05.2.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Lingkungan Hidup Yang digunakan Untuk Kebijakan	Persen	100%	328,000,000	100%	350,000,000	100%	354,169,802	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH	Persen	75%	100,000,000	1.128	200,000,000	1.128	107,978,598	Dinas Lingkungan Hidup
3.04.2.05.01.16.	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas lahan APL yang direhabilitasi	Ha	-	-	150 Ha	11,595,900,000	300 Ha	12,521,090,258	Dinas Lingkungan Hidup
3.04.2.05.01.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Tingkat Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persen	-	270,000,000	80%	567,800,000	80%	291,542,215	Dinas Lingkungan Hidup
	MISI 8: Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya.				**1,629,500,000**		**1,771,493,500**		**1,695,641,915**	
	T8.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	a. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,21		5,09		-2,23		
		b. Indeks Gini	Poin	0,287		0,336		0,32		
	S8.1.1. Meningkatnya sektor industri pariwisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,24		0,14		0,14		
	Program:									
3.02.2.13.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Persen	100%	1,092,900,000	100%	938,063,500	100%	1,072,119,501	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.16.2.13.01.15.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Nilai Kekayaan Budaya	- Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik (%)	Persen	75%	536,600,000	88%	833,430,000	85%	623,522,415	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	MISI 9: Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja.				**588,245,789**		**3,492,016,789**		**5,341,493,582**	
	T9.1. Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,28		4,45		4,30		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	angkatan kerja.									
	S9.1.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	74,5		71,09		65,04		
	Program:									
2.01.2.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	75%	148,485,000	80%	310,000,000	80%	360,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	80%	151,620,789	80%	220,815,789	80%	220,815,789	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.19.01	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	40%	120,000,000	0%	-	45%	191,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.20.01	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar Yang Mendapatkan Upah Sesuai UMK/UMSK	Persen	100%	91,380,000	0%	-	100%	91,380,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.2.07.01.16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Aktif dan Berkembang di Pedesaan	Persen	12%	76,760,000	25%	221,075,000	47%	431,914,392	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.28.	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan	Persentase Desa yang Mengoptimalkan SDA dan Penerapan TTG	Persen	0	-	25%	227,000,000	46%	431,914,392	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.29.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan baik	Persen	0	-	75%	458,480,000	80%	1,300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.30.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase Desa yang Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Aset sesuai dengan Peraturan	Persen	0	-	75%	357,515,000	80%	628,855,537	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
		Perundang-Undangan								
2.07.2.07.01.31.	Program Peningkatan Peran Kelembagaan di Pedesaan	Persentase Lembaga Aktif di Pedesaan	Persen	0	-	20%	946,471,000	30%	873,546,859	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.32.	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar dan Evaluasi Perkembangan Desa	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pelayanan Sosial Dasar dan Evaluasi Perkembangan Desa	Persen	0	-	20%	750,660,000	30%	811,566,612	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	MISI 10: Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI.				**2,212,858,000**		**315,000,000**		**2,631,330,526**	
	T10.1. Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a		4,3		4,3		
	S10.1.1. Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas	Poin	3,96		4,12		4,65		
	Program:									
1.05.1.05.01.20.	Program Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	0	-	-	-	100%	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.21.	Program Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Persentase cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Persen	100%	362,568,000	-	-	100%	270,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.22.	Program Pelindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	0	-	-	-	100%	121,330,526	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.23.	Program penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	100%	100,000,000	-	-	100%	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
	S10.1.2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a		4,3		4,3		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Program:									
1.05.1.05.02.17.	Program pembinaan wawasan kebangsaan dan Pembauran	Rasio masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan per-10.000 penduduk	Rasio	53.17	478,900,000	0	-	53.53	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.18.	Program Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa	Persentase pembinaan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persen	100	312,000,000	0	0	100	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.21.	Program pembinaan politik dan kemasyarakatan	- Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per-10.000 penduduk	Rasio	22.14	551,390,000	0	-	28.14	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		- Persentase ormas dan LSM yang ber-SKT	Persen	0.00	-	0		64.10		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.26.	Program penanganan konflik dan kewaspadaan dini	Persentase konflik sosial yang ditangani (%)	Persen	70	408,000,000	0	-	80	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.32.	Program peningkatan ketahanan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rasio masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekonomi(per-10.000 penduduk)	Rasio	0	0	30.19	315,000,000	32.70	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		JUMLAH			**401,857,484,538**		**397,103,849,480**		**461,691,452,686**	

Tabel 6.3-B
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang disertai Pagu Indikatif
Tahun 2021-2023

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
			MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional.				**29.220.265.447**		**20.403.020.285**		**23.383.182.066**		
			T1.1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik	IKU 1. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B (68,99)		BB (73,47)		BB (77,95)		BB (77,95)	
			S1.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.	a. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP	
				b. Nilai SAKIP	Predikat	B (64,00)		B (65,50)		B (67,00)		B (67,00)	
			Program :										
6	1	2	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	70%	2.250.117.250	75%	2.649.186.800	80%	2.613.272.000	80%	INSPEKTORAT DAERAH
				Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	2,0%		2,0%		1,50%		1,50%	INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah Temuan BPK	Rekomendasi	26		24		22		22	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah	Persen	85%	410.943.000	85%	463.229.000	85%	433.379.000	85%	INSPEKTORAT DAERAH
5	2	2	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	Persen	0,6%	200.736.317.977	0,5%	217.315.025.687	0,5%	228.489.971.743	0,5%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	18,9%		19,9%		21,0%		21,0%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	12,7%		12,6%		13,3%		13,3%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase SILPA Terhadap APBD	Persen	10,5%		9,9%		4,9%		4,9%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Program Dalam APBD yang Dilaksanakan	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Kegiatan Dalam APBD yang Dilaksanakan	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	Program pengelolaan barang milik daerah	persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	persen	100%	1.109.192.724	100%	545.540.000	100%	497.800.000	100%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10%	2.194.730.000	11%	1.977.792.500	12%	2.099.671.584	12%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	1	2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	Persen	100%	1.698.923.900	100%	1.370.000.000	100%	1.725.000.000	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan DenganPERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100%	960.718.000	100%	818.000.000	100%	1.090.000.000	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Sesuai/Persen	Sesuai (50%)		Sesuai (50%)		Sesuai (50%)		Sesuai (50%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	3	2	Program kepegawaian daerah	Persentase ASN yang memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Karier	Persen	90%	2.005.068.928	100%	2.284.919.232	100%	2.294.919.232	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	Orang	3.810		4.110		4.410		4.410	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	90%	1.713.803.424	100%	1.808.819.493	100%	1.816.757.148	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	5,00%		5,00%		5,00%		5,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	5,00%		5,00%		5,00%		5,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat	Persen	100%	5.684.767.000	100%	2.276.395.288	100%	2.495.032.786	100%	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan	Persen	100%	2.104.357.263	100%	1.473.554.425	100%	1.619.884.954	100%	SEKRETARIAT DAERAH
			S1.1.2. Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi.	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	82,21		82,95		83,69		83,69	
			Program :										
2	18	2	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rupiah)	Persen	77	165.143.616	79	125.000.000	81	160.000.000	81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3	Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	44	98.545.808	44	55.000.000	44	75.000.000	44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	18	4	Program pelayanan penanaman modal	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	1.071.428.571.400	417.569.080	1.071.428.571.400	160.000.000	1.071.428.571.400	265.000.000	1.071.428.571.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Persen	80		85		90		90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaksanaan Pengendalian PMA dan PMDN Penanaman Modal	Persen	100%	473.243.324	100%	463.500.000	100%	463.500.000	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	6	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pengelolaan Perizinan dan Informasi Berbasis Secara Elektronik	Persen	100%	152.593.616	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	12	2	Program pendaftaran penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan (%)	Persen	100%	1.110.854.000	100%	366.812.000	100%	622.419.000	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Rasio	96%		97%		98%		98%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	96%		97%		98%		98%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	Program pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil (%)	Persen	100%	272.560.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	99,81%		99,83%		99,85%		99,85%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	55		58		61		61	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase penerbitan akta kelahiran	Persen	99,81%		99,83%		99,85%		99,85%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data dan dokumen kependudukan oleh Perangkat Daerah	Persen	68,69	447.854.000	70,73	450.000.000	73,17	450.000.000	73,17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada/Tidak ada	Ada		Ada		Ada		Ada	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	Program pengelolaan profil kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86,9	111.661.000	87,14	100.000.000	87,56	100.000.000	87,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	16	2	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	66%	1.769.532.400	70%	1.135.000.000	70%	1.274.000.000	70%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	53		53		53		53	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	Persen	98%		99%		99%		99%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	87%	1.146.495.245	87%	738.552.054	87%	796.454.798	87%	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	54.054.000	100%	21.450.000	100%	24.620.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	2.020.000	100%	40.000.000	100%	51.000.000	100%	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	10.060.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	87%	2.236.000	87%	5.000.000	87%	5.000.000	87%	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	25.845.000	100%	25.845.000	100%	25.845.000	100%	KECAMATAN HANAU
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0	-	100%	5.000.000	100%	7.500.000	100%	KECAMATAN BATU AMPAR
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	90.420.000	100%	17.855.703	100%	12.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN TENGAH

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	31.395.000	100%	29.177.860	100%	70.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	24.750.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	KECAMATAN SULING TAMBUN
			MISI 2: Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal.				**78.836.442.813**		**112.680.372.943**		**123.293.059.221**		
			T2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	IKU 2. Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	69,3		70,12		70,94		70,94	
			S2.1.1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan.	a. Rata-rata lama sekolah.	Tahun	8,73		8,99		9,26		9,26	
				b. Harapan lama sekolah.	Tahun	12,35		12,54		12,74		12,74	
				c. Angka Melek Huruf	Persen	98,93		98,95		98,97		98,97	
			Program :										
1	1	2	Program pengelolaan pendidikan	APK SD /MI	Persen	116,89	75.377.522.503	117,3	107.609.148.863	117,71	118.149.477.589	117,71	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMP/MTs	Persen	105,35		106,7		108,07		108,07	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMA/SMK/MA	Persen	74,04		74,8		75,56		75,56	DINAS PENDIDIKAN
				APM SD/MI	Persen	98,5		99		99,5		99,5	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMP/MTs	Persen	81,32		81,36		81,4		81,4	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMA/MA/SMK	Persen	54,08		54,59		55,11		55,11	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	Persen	98,37		98,75		99,13		99,13	DINAS PENDIDIKAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	81,69		82,1		82,51		82,51	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	48,68		49,49		50,3		50,3	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	Program pengembangan kurikulum	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	Persen	80%	292.334.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	90%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya(%)	Persen	100%	1.560.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.600.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Masyarakat penyelengara PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Izin operasional (%)	Persen	69%	139.980.800	84%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN
2	23	2	Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	Persen	70%	400.970.700	75%	521.224.080	80%	493.581.632	80%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	72.300		72.600		73.000		73.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	37,00%		37,25%		37,50%		37,50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	6,01%		6,13%		6,22%		6,22%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	19	2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berprestasi (%)	Persen	100%	1.065.634.810	100%	1.300.000.000	100%	1.600.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			MISI 3: Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat.				**68.331.184.724**		**61.815.233.183**		**65.999.548.775**		
			T3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	IKU 2. Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	69,3		70,12		70,94		70,94	
			S3.1.1. Meningkatnya akses dan derajat kesehatan masyarakat.	Angka harapan hidup	Tahun	70,55		70,79		71,03		71,03	
			Program :										
1	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Sesuai Standar	Persen	100	47.922.593.658	100	41.396.283.377	100	45.182.512.947	100	DINAS KESEHATAN
1	2	3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000	0,26	64.048.000	0,26	64.048.000	0,26	64.048.000	0,26	DINAS KESEHATAN
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000	9.64		12.66		15.68		15.68	DINAS KESEHATAN
1	2	4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Obat dan makanan yang tidak aman yang ditangani	Persen	90	364.612.000	100	364.612.000	100	383.592.000	100	DINAS KESEHATAN
1	2	5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan promotif preventif bidang kesehatan	Persen	50	377.000.000	100	227.000.000	100	427.000.000	100	DINAS KESEHATAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan RS klinis dan non-klinis sesuai standar (%)	Persen	95%	9.000.000.000	95%	9.000.000.000	95%	9.000.000.000	95%	RSUD KUALA PEMBUANG
1	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan RS klinis dan non-klinis sesuai standar (%)	Persen	98%	7.245.710.192	98%	7.595.102.000	98%	7.595.102.000	98%	RSUD HANAU
1	2	5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95%	1.575.000	0%	-	0%	-	0%	RSUD HANAU
2	14	2	Program pengendalian penduduk	Cakupan Kebiajakan daerahdan pemetaan perkiraan profil / karakteristik	Persen	100%	263.781.000	100%	249.045.276	100%	263.753.372	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif untuk pasangan usia subur (PUS)	Persen	100%	2.531.028.874	100%	2.389.636.783	100%	2.522.763.299	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	100%	560.836.000	100%	529.505.747	100%	560.777.157	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
			MISI 4: Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi.				**18.974.666.396**		**16.954.408.000**		**17.173.629.993**		
			T4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	IKU 3. Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	49,85		52,69		55,69		55,69	
				IKU 4. Laju Inflasi	Persen	3,64		3,73		3,82		3,82	
			S4.1.1. Menurunnya tingkat kemiskinan.	Persentase penduduk miskin	Persen	6,55		6,29		6,03		6,03	
			Program :										
1	6	2	Program pemberdayaan sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	98	258.026.000	98	166.000.000	98	190.000.000	98	DINAS SOSIAL
				Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	98		98		98		98	DINAS SOSIAL
1	6	4	Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	98	479.478.184	98	250.000.000	98	300.000.000	98	DINAS SOSIAL
				Persentase PMKS yang tertangani	Persen	98		98		98		98	DINAS SOSIAL

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	98		98		98		98	DINAS SOSIAL
				Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	95		95		95		95	DINAS SOSIAL
1	6	5	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	98	93.032.500	98	250.000.000	98	300.000.000	98	DINAS SOSIAL
1	6	6	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	97	452.552.500	98%	250.000.000	99%	300.000.000	99%	DINAS SOSIAL
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	97		97		97		97	DINAS SOSIAL
2	13	2	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	13,40%	60.000.000	13,40%	198.000.000	13,40%	270.000.000	13,40%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	78,83%		86,65%		96,69%		96,69%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	13	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Lembaga Ekonomi Aktif	Persen	10%	60.000.000	10%	198.000.000	10%	240.000.000	10%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai Peraturan	Persen	80%	2.071.589.929	80%	2.038.207.000	80%	1.780.207.000	80%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Desa Yang Memiliki Lembaga Aktif	Persen	14,56%	1.890.436.251	14,56%	1.096.000.000	17.48%	1.440.000.000	24.45%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	274		354		434		434	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase PKK aktif	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Angka	71,87		84,75		100		100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase LPM Berprestasi	Persen	10,30%		20,61%		30,91%		30,91%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase Posyandu aktif	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
			S4.1.2. Meningkatnya sektor Koperasi dan UMKM	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	33,18		33,48		33,8		33,8	
			Program :										
2	17	3	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	87,17	30.500.000	87,53	135.000.000	0	-	87,53	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	5	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan/ bimtek/ workshop dan lain sebagianya tentang pengelolaan koperasi/ keuangan/ manajerial koperasi	Persen	0	-	100%	159.457.500	100%	479.752.876	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	6	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi aktif dan berkualitas serta terlindungi	Persen	100%	101.604.000	100%	152.000.000	100%	100.000.000	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	Persen	82,46	76.154.000	81,72	296.971.250	79,98	399.246.064	79,98	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase BPR/LKM aktif	Persen	16,94		18,28		20,02		20,02	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	90		90		85		85	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	8	Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang berdaya saing	Persen	3,94	76.203.000	4,94	305.160.000	5,94	1.664.083.750	5,94	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			S4.1.3. Berkembangnya agroindustri	Kontribusi agroindustri terhadap PDRB sektor industri	Persen	1,48		1,61		1,74		1,74	
			Program :										
3	30	3	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	persentase sarana distribusi perdagangfan yang di tingkatkan	persen	100%	144.060.000	100%	3.658.217.617	100%	4.800.000.000	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan Bina kelompok Perdagangan/usaha informal	Persen	86,76%	80.375.000	86,85%	437.520.000	90,45%	364.400.000	90,45%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Alat UTTP yang ditera ulang	persen	100%	123.786.000	100%	122.305.000	100%	48.620.250	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	Program perencanaan dan pembangunan industri	persentase pembangunan industri yang direncanakan	persen	100%	11.643.904.000	100%	5.302.675.000	100%	4.497.320.053	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	0,18%		10%		12%		12%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			MISI 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.				**162.673.600.400**		**229.855.519.860**		**230.902.327.660**		
			T5.1. Meningkatkan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur	IKU 5. Indeks aksesibilitas	Persen	58,25		60,75		63,25		63,25	
			S5.1.1. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana pemukiman.	a. Persentase rumah tangga berakses air minum	Persen	6,53		6,93		7,23		7,23	
				b. Rasio elektrifikasi	Persen	61,19		66,14		71,09		71,09	
				c. Rasio Rumah layak huni	Persen	50,71		53,21		55,71		55,71	
			Program :										
1	3	2	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	47	34.662.956.800	47	32.015.600.000	49	31.999.000.000	49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Rasio Jaringan Irigasi	Persen	31,81		34,51		37,43		37,43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	Persen	6,53	9.838.662.100	6,93	10.498.481.310	7,23	10.048.481.310	7,23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	7	Program pengembangan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda4	Persen	49,72	8.326.700.000	34,64	12.556.523.400	18,30	13.156.523.400	18,30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	9	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	Persen	33,98	11.031.280.000	35,78	14.845.000.000	37,69	14.395.000.000	37,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	77		79		81		81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	3,4		5,88		9,34		9,34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	3,75	2.564.933.350	4,8	7.686.000.000	5,9	7.670.000.000	5,9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	9,21		9,32		9,5		9,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Ketaatan terhadap RTRW	Persen	15,45		16,2		17,01		17,01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	4	2	Program pengembangan perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	52,91	1.204.190.000	53,21	775.000.000	55,71	775.000.000	55,71	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	80		90		100		100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3	Program kawasan permukiman	Rasio permukiman layak huni	Persen	55,07	4.751.851.000	57,57	2.583.247.000	60,07	2.583.247.000	60,07	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Persentase pemukiman yang tertata	Persen	80		85		85		85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	20		10		10		10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	4	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	80	1.502.315.000	90	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	30		20		10		10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			S5.1.2. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana transportasi	Persentasi wilayah desa yang terhubung dengan jalan kondisi baik	Persen	46		48		50		50	
			Program :										
1	3	10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	23,8	88.790.712.150	26,17	148.895.668.150	28,54	150.425.075.950	28,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			MISI 6: Mewujudkan Pelabuhan Laut TelukSegintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan.				**5.818.300.279**		**2.958.527.500**		**2.642.880.753**		
			T6.1. Meningkatkan Aksesbilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur	IKU 5. Indeks aksesibilitas	Persen	58,25		60,75		63,25		63,25	
			S6.1.1. Meningkatnya aksesbilitas sarana prasarana transportasi	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Sigintung	Persen	5		5		5		5	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
			Program :										
2	15	2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	3.442	2.792.444.120	3.662	1.330.734.700	3.895	1.118.282.953	3.895	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	6.546		6.765		6.984		6.984	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	100		102		104		104	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	1.07		1.31		1.61		1.61	DINAS PERHUBUNGAN
				Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Persen	0.05		0.05		0.06		0.06	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	Program pengelolaan pelayaran	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi	Persen	100%	3.025.856.159	100%	1.627.792.800	100%	1.524.597.800	100%	DINAS PERHUBUNGAN
			MISI 7: Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan.				**54.876.354.827**		**45.059.446.785**		**33.590.599.123**		
			T7.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	IKU 6. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,29		5,32		5,36		5,36	
				IKU 7. Indeks Gini	Poin	0,283		0,282		0,281		0,281	
			S7.1.1. Meningkatnya pengelolan potensi sumber daya alam petanian, peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan	Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	38,09		38,59		39,09		39,09	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
			Program :										
3	27	2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persen	1,2	1.896.440.003	1,2	485.543.476	1,2	1.102.261.420	1,2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Persentase Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	1,2		1,2		1,2		1,2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	3	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	Persen	158,74%	1.352.310.524	164,73%	226.765.747	170,94%	536.765.747	170,94%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	100%	542.614.666	100%	112.302.320	100%	322.302.320	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	100%	1.195.041.273	100%	128.282.104	100%	338.282.104	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	6	Program perizinan usaha pertanian	Persentase peningkatan perizinan usaha pertanian	Persen	0	-	100%	50.000.000	100%	115.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	7	Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok petani	Persen	100%	886.529.600	100%	137.004.968	100%	407.004.968	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	28	4	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Rehabilitasi TAHURA	Persen	80	15.319.138.750	80	15.384.801.919	80	300.000.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Kerusakan kawasan TAHURA	Persen	4		4		4		4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
3	25	3	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Produkasi perikanan Tangkap	Persen	100%	8.913.119.000	100%	1.510.000.000	100%	1.610.000.000	100%	DINAS PERIKANAN
3	25	4	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Produkasi perikanan Budidaya	Persen	100%	3.242.180.000	100%	570.000.000	100%	670.000.000	100%	DINAS PERIKANAN
3	25	5	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan dan Undang-undang yang berlaku	Persen	80%	176.840.000	80%	250.000.000	85%	310.000.000	85%	DINAS PERIKANAN
3	25	6	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Produksi Perikanan	Persen	98,18	569.148.000	98,29	250.000.000	98,65	370.000.000	98,65	DINAS PERIKANAN
				Persentase Konsumsi Ikan	Persen	96,3		97,5		98,6		98,6	DINAS PERIKANAN
			S7.1.2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	Poin	94,5		95,5		96,5		96,5	
			Program :										
2	9	2	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persen	0	-	100%	100.500.000	100%	175.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	3	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Persen	38,32	604.695.648	39,47	270.915.243	40,66	470.915.243	40,66	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	4	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Persen	100%	148.079.000	100%	139.806.791	100%	349.806.791	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	5	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	100%	98.904.500	100%	93.379.350	100%	208.894.128	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			T7.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKU 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77,4		79,4		81,4		81,4	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
			S7.2.1. Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77,4		79,4		81,4		81,4	
			Program :										
2	11	2	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	1	75.000.000	1	82.000.000	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	3	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Persen	50,2	385.000.000	50,3	849.594.897	50,4	628.561.648	50,4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Persen	84,66		84,76		84,86		84,86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	4	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Lahan Keanekaragaman Hayati yang terkelola	Persen	80	50.000.000	80	75.000.000	80	100.000.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	5	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengelolaan B3 dan limbah B3 yang di awasi	persen	80%	100.000.000	80%	554.594.896	80%	500.000.000	80%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	6	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab	Persen	25	175.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Lembaga	1	-	1	200.000.000	1	462.115.200	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Penetapan Hak MHA	Ketetapan	1		1		1		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	8	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase organisasi dan masyarakat yang menjadi kader lingkungan hidup yang melaksanakan PPLH	persen	100%	94.200.000	100%	160.000.000	100%	200.000.000	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	9	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	25.752.863	Ada	30.000.000	Ada	45.000.000	Ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan yang di laporkan	persen	100%	50.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11	Program pengelolaan persampahan	Presentase Penanganan Sampah	Persen	25,11	5.776.222.000	28,86	6.056.444.803	33,18	6.837.179.284	33,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen	10		11		12		12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	Buah	2		2		3		3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1	3	5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Sistem Air limbah yang terkelola dengan baik	Persen	57,4	13.225.139.000	59,9	14.022.832.500	62,4	14.022.832.500	62,4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	57,4		59,9		62,4		62,4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
			MISI 8: Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya.				**1.328.766.405**		**683.604.395**		**683.604.395**		
			T8.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	IKU 6. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,29		5,32		5,36		5,36	
				IKU 7. Indeks Gini	Poin	0,283		0,282		0,281		0,281	
			S8.1.1. Meningkatnya sektor industri pariwisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,29		0,3		0,31		0,31	
			Program :										
2	22	2	Program pengembangan kebudayaan	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	Persen	100%	698.777.000	100%	303.604.395	100%	303.604.395	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	3	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang ada di Kab. Seruyan	Persen	100%	50.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budya yang dilestarikan dan dikelola oleh Kabupaten Seruyan	Persen	0	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	6	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman di Kabupaten Seruyan	Persen	0	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	2	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Pengembangan Daya Tarik Destinasi pariwisata	Jumlah	10 Destinasi	200.721.765	2 Destinasi	195.000.000	2 Destinasi	195.000.000	2 Destinasi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	3	Program pemasaran pariwisata	Persentase Pemasaran	Persen	100%	379.267.640	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA,

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Pariwisata yang dilaksanakan									PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah	24.189		29.214		34.329		34.329	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			MISI 9: Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja.				**3.330.808.300**		**2.412.491.300**		**2.674.431.300**		
			T9.1. Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja.	IKU 9. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,99		3,79		3,66		3,66	
			S9.1.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	81,21		83,45		85,74		85,74	
			Program :										
2	7	3	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	85%	142.532.000	85%	142.200.000	85%	298.640.000	85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	Program penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	50%	99.387.000	55%	75.000.000	60%	114.000.000	60%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	Program hubungan industrial	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	85%	313.243.000	85%	120.000.000	85%	155.000.000	85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	Persen	21,31%		21,31%		20%		20%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	Persen	13		13		12		12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	85%		85%		85%		85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostekl	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Kelesematan dan perlindungan	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	85%	1.754.146.300	85%	1.675.153.300	85%	1.706.653.300	85%	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	100%	1.021.500.000	100%	400.138.000	100%	400.138.000	100%	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
			MISI 10: Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI.				**4.932.301.050**		**3.646.717.000**		**4.690.217.000**		
			T10.1. Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis	IKU 10. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	4,4		4,5		4,6		4,6	
			S10.1.1. Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas	Poin	4,55		4,45		4,35		4,35	
			Program :										
1	5	2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	49,38	449.916.000	0	-	0	-	49,38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Keamanan, Keindahan)	Persen	80		0		0		80	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	4	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	- Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	100%	325.091.000	0	-	0	-	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
				- Persentase Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran yang ditangani	Persen	100%		0		0		100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	0		50,76	500.000.000	52,14	700.000.000	52,14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Keamanan, Keindahan)	Persen	0		83		85		85	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi korban dan terdampak Kebakaran dan non kebakaran	Persen	0	-	100%	500.000.000	100%	700.000.000	100%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15		15		15		15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	5	3	Program penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Penanggulangan Pra Bencana, Bencana dan Pasca Bencana yang Ditangani	Persen	100%	932.866.000	100%	865.000.000	100%	1.395.000.000	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			S10.1.2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	4,4		4,5		4,6		4,6	
			Program :										
8	1	2	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang dibina dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	4,75%	941.840.000	5,00%	910.217.000	5,00%	960.217.000	5,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik	Persen	4,75%	867.182.850	72,64%	100.000.000	76,91%	100.000.000	76,91%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT	Persen	68,37%	702.214.000	4,90%	210.000.000	5,00%	245.000.000	5,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Laju Pertumbuhan pembinaan ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persen	4,75%	456.764.500	100%	288.500.000	100%	310.000.000	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	90%	256.426.700	90%	273.000.000	100%	280.000.000	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				JUMLAH			**483.558.464.891**		**552.469.341.251**		**505.033.480.286**		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan yang akan membiayai belanja pembangunan di Kabupaten Seruyan. Kerangka pendanaan untuk pembangunan 5 (lima) tahun, tidak terlepas dari hasil proyeksi pada kerangka pendanaan pada Bab III RPJMD ini. Proyeksi kerangka pendanaan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Lebih rinci mengenai kerangka pendanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1-A dan Tabel 7.1-B.

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer akan didistribusikan ke belanja program perangkat daerah. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah akan disajikan berdasarkan urusan (wajib dan pilihan) dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Daftar program perangkat daerah yang akan dilaksanakan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7.2-A dan Tabel 7.2-B.

Penentuan program perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Penjabaran Sasaran Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi daerah periode 2018-2023.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai urusan dan fungsi penunjang/pendukung pemerintahan daerah yang diampu.
4. Upaya menjawab permasalahan atau isu strategis daerah.
5. Dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 7.1-A
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2018-2020

URAIAN	KERANGKA PENDANAAN RPJMD MURNI		
	2018	2019	2020
KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**675.035.362.441**	**804.845.420.631**	**804.735.952.437**
BELANJA	**1.172.851.546.787**	**1.304.206.942.075**	**1.346.293.209.966**
Belanja Tidak Langsung	**497.816.184.346**	**499.361.521.444**	**541.557.257.529**
Belanja Pegawai	288.013.998.596	284.642.824.722	322.939.527.962
Belanja Subsidi	1.800.000.000	2.000.000.000	1.800.000.000
Belanja Hibah	40.407.133.800	16.505.355.000	20.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	443.897.200	4.488.000.000	5.443.897.200
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.300.000.000	7.948.324.947	7.440.138.588
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	157.757.772.300	180.303.766.732	180.840.311.329
Belanja Tidak Terduga	3.093.382.450	3.473.250.043	3.093.382.450
Belanja Langsung	**675.035.362.441**	**804.845.420.631**	**804.735.952.437**
Belanja Pegawai	83.091.490.846	113.872.235.514	99.056.603.174
Belanja Barang dan Jasa	251.961.910.380	322.126.344.403	300.373.608.864
Belanja Modal	339.981.961.215	368.846.840.714	405.305.740.399

Tabel 7.1-B
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	APBD	PROYEKSI APBD	
		2021	2022	2023
5.	**BELANJA**	**1.237.926.702.733**	**1.355.689.320.265**	**1.334.469.649.843**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**802.448.190.422**	**864.745.513.954**	**813.755.415.160**
5.1.01	Belanja Pegawai	335.913.402.545	443.547.833.755	456.194.140.968
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.236.066.577	340.898.958.899	247.262.552.892
5.1.03	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5.1.04	Belanja Hibah	62.413.121.300	62.413.121.300	92.413.121.300
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	15.885.600.000	15.885.600.000	15.885.600.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**238.979.424.392**	**285.237.942.257**	**305.080.307.692**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.325.231.933	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.774.600.448	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	115.712.092.311	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.167.499.700	-	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**11.406.581.811**	**11.406.581.811**	**11.406.581.811**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.406.581.811	11.406.581.811	11.406.581.811
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**185.092.506.108**	**194.299.282.243**	**204.227.345.179**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.284.351.708	7.239.298.698	7.248.581.982
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	177.808.154.400	187.059.983.545	196.978.763.198
	Dana Desa	111.355.806.000	116.923.596.300	122.769.776.115
	Alokasi Dana Desa	66.207.348.400	69.886.387.245	73.958.987.083
	Lainnya (sewa traspoder)	245.000.000	250.000.000	250.000.000

Tabel 7.2-A
Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Seruyan yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2018-2020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				**439,792,273,170**		**531,159,734,451**		**533,327,453,508**	
	BIDANG PENDIDIKAN				**64,821,402,740**		**77,552,876,028**		**78,213,063,186**	
	Dinas Pendidikan				**64,821,402,740**		**77,552,876,028**		**78,213,063,186**	
1.01.1.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	7,363,309,043	100%	8,757,990,000	100%	9,001,585,186	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	1,562,680,000	100%	4,962,231,750	100%	4,957,610,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	261,200,000	0%	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	80%	284,221,437	80%	284,221,437	80%	284,221,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0%	-	100%	110,000,000	100%	110,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Persen	0.00%	-	87.00%	3,034,613,001	88.00%	3,137,122,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	Persen	APK SD = 106%, APK SMP=100,1%	35,965,793,441	APK SD = 117,2%, APK SMP=100,2%	35,772,988,850	APK SD = 130,2%, APK SMP=103,4%	36,455,920,000	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs	Persen			93.22%		94.35%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.01.1.0 1.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun yang mendapat Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan	Persen	57.14%	2,906,023,294	57.71%	2,285,264,137	62.29%	2,285,263,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	94.50%	16,739,375,525	95.00%	18,590,284,728	96.00%	18,590,283,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.21.	Program Manajemen Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan informasi managemen pendidikan	Persen	0%	-	82%	847,900,000	84%	847,900,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.25.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM) masyarakat Kabupaten Seruyan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	0%	-	100%	12,000,000	0%	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.31.	Program Pengembangan Prestasi Siswa	Persentase siswa SD/MI berprestasi	Persen	0.00	-	SD = 5%, SMP=4%	2,543,162,125	SD = 6%, SMP=5%	2,543,159,000	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SMP/MTs berprestasi	Persen			3%		3%		
1.01.1.0 1.01.32.	Program Pendidikan Kesetaraan	Angka Melek Huruf	Persen	0%	-	100%	91,020,000	0%	-	Dinas Pendidikan
	BIDANG KESEHATAN				**71,622,206,383**		**106,942,709,234**		**114,140,825,166**	
	Dinas Kesehatan				**45,912,784,707**		**58,118,086,983**		**73,789,483,820**	
1.02.1.0 2.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100	8,973,415,842	100	11,302,084,207	100	9,251,114,983	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100	690,047,500	100	462,500,000	100	1,095,982,771	Dinas Kesehatan
1.02.1.0 2.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	196,000,000	0%	-	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.02.1.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100	1,456,660,000	100	966,427,000	100	1,349,732,476	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100	74,855,000	100	95,762,000	100	130,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	95	1,089,143,000	95	1,357,559,992	95	1,079,785,981	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilayani	Persen		18,684,863,975	100	18,005,369,975	100	41,175,654,178	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang memanfaatkan dana BOK diatas >60%	Persen			33		42		
1.02.1.02.01.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kasus obat dan makanan yang tidak aman yang ditangani (%)	Persen	100	153,942,000	100	121,040,000	100	215,957,196	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga (%)	Persen	n/a	620,706,190	20	568,725,000	25	674,866,238	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Persen	100	147,000,000	100	642,619,000	100	485,903,691	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Persen	0	-	40	664,680,000.00	50	431,914,392	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	100	862,635,000	100	913,907,000	100	1,403,721,775	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen			100		100		
		Persentase desa/kelurahan UCI	Persen			70		71		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.02.1.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	Persen	0	-	50	2,020,105,000	60	1,188,229,752	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.24.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani	Persen	0	-	100	7,109,530,000	0	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan puskesmas	Persen	120	12,261,362,200	120	8,799,016,381	120	12,502,841,875	Dinas Kesehatan
		Cakupan puskesmas pembantu	Persen			83		85		
		Cakupan poskesdes	Persen			45		48		
1.02.1.02.01.28.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan kemitraan pelayanan Kesehatan	Persen	0	-	100	3,659,677,428	0%	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, anak dan remaja	Persentase anak balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	70	191,229,000	100	219,614,000	100	423,276,105	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen			65		70		
1.02.1.02.01.30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	7.84	150,785,000	100	173,485,000	100	161,967,897	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	Persentase bayi baru lahir mendapatkan Yankes bayi baru lahir sesuai standar	Persen	68	556,140,000	100	586,235,000	100	1,678,641,518	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen			70		75		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	Persen			75		80		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.02.1.02.01.35.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	0	-	100	253,750,000	100	539,892,991	Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita hipertensi mendapatkan Yankes sesuai standar	Persen			10		20		
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan Yankes sesuai standar	Persen			10		20		
		Persentase ODGJ berat mendapatkan Yankes jiwa sesuai standar	Persen			100		100		
	RSUD Kuala Pembuang				**11,102,700,676**		**24,647,891,905**		**23,998,161,434**	
1.02.1.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen		8,854,410,676	95%	9,385,788,905	95%	10,711,394,937	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen		353,290,000	90%	490,130,000	90%	849,791,567	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	90,000,000	0%	-	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen		395,000,000	90%	330,300,000	90%	809,839,486	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0	-	0%	-	95%	14,037,218	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan RS Kuala Pembuang	Persen		1,500,000,000	98%	2,050,000,000	98%	3,239,357,943	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.16.	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai kelas rumah sakit	Persen	0	-	95%	148,500,000	95%	133,564,595	RSUD Kuala Pembuang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.02.1.02.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Persen	0	-	100%	11,100,000	0%	-	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang terstandarisasi	Persen	0	-	100%	401,200,000	0%	-	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar kesehatan	Persen	0	-	100%	7,454,173,000	0%	-	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara	Persen	0	-	100%	286,700,000	0%	-	RSUD Kuala Pembuang
	Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	Cakupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan RS klinis dan non-klinis sesuai standar (%)	Persen	0	-	0%	-	95%	1,761,459,802	RSUD Kuala Pembuang
1.02.1.02.02.34.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD (poin)	poin	0	-	98%	4,000,000,000	98%	6,478,715,886	RSUD Kuala Pembuang
	RSUD Hanau				**14,606,721,000**		**24,176,730,346**		**16,353,179,912**	
1.02.1.02.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen		8,486,446,000	95%	12,798,602,096	95%	10,843,368,000	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen		289,200,000	90%	156,300,000	90%	764,100,000	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	26,400,000	0%	-	RSUD Hanau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.02.1.02.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang	Persen		198,175,000	90%	160,295,000	90%	200,000,000	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0	-	0%	-	0%	-	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan RS Kuala Pembuang	Persen		334,000,000	98%	2,518,733,250	98%	1,000,000,000	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Persen	0	-	100%	268,000,000	0%	-	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Persen	0	-	100%	13,400,000	0%	-	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar kesehatan	Persen	0	-	100%	8,175,000,000	0%	-	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara	Persen	0	-	100%	60,000,000	0%	-	RSUD Hanau
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai kelas rumah sakit	Persen	0	-	0%	0	0%	-	RSUD Hanau
	Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	Cakupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan RS klinis dan non-klinis sesuai standar (%)	Persen	95%	5,282,000,000	0%	-	95%	1,545,711,912	RSUD Hanau
1.02.1.02.03.34.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD (poin)	poin	98%	16,900,000	0%	-	98%	2,000,000,000	RSUD Hanau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**282,554,852,447**		**275,672,828,293**		**276,308,899,901**	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**282,554,852,447**		**275,672,828,293**		**276,308,899,901**	
1.03.1.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen		5,389,266,000	100%	6,253,271,793	100%	10,043,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen		16,515,500,046	100%	22,474,035,600	100%	20,415,902,267	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	603,500,000	0%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang	Persen		326,320,000	100%	998,545,000		836,834,135	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen		301,500,000	100%	1,240,725,000	100%	539,892,991	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	KM		126,600,000,000	25 Km	99,559,581,250	25 Km	115,105,185,581	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase/Gorong-gorong dalam kondisi baik	Meter		2,565,000,000	3450 M	17,073,333,950	3000 M	14,257,950,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.03.1.03.01.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Panjang Jalan yang di rehab/dipelihara/ditingkatkan menjadi jalan kondisi baik	KM		92,870,149,220	8 Km	48,222,588,000	10 Km	67,390,360,896	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Jumlah jembatan yang dipelihara	Unit			5 Unit		5 Unit		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.23.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persen		709,900,000	20%	2,637,000,000	20%	9,039,182,149	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik	Ha		14,042,000,000	14.2 Ha	29,859,816,500	16.95 Ha	15,162,354,746	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sistem air limbah	Persen		1,400,000,000	20%	911,000,000	20%	1,490,104,654	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.29.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	Km		3,405,000,000	21.5 Km	24,010,830,200	22 Km	3,563,293,737	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.30.	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Persentase Desa memiliki infrastruktur sesaui kebutuhan	Persen		7,160,025,000	20%	15,111,656,000	20%	7,569,739,106	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.31.	Program Penyediaan Prasarana Olah Raga	Jumlah Gedung Olahraga dalam Kondisi Baik	Unit		6,328,000,000	2	3,048,505,000	2	6,694,673,083	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.03.1.03.01.35.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kelengkapan dokumen Tata Ruang	Persen		4,724,128,681	100%	1,975,000,000	100%	1,850,213,279	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.36.	Program Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang		0%	-	0%	-	100%	1,850,213,279	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.46.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase SDM Bidang Konstruksi bersertifikasi	Persen		218,063,500	20%	1,693,440,000	20%	499,999,898	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**3,749,869,500**		**20,450,161,100**		**18,646,198,300**	
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				**3,749,869,500**		**20,450,161,100**		**18,646,198,300**	
1.04.1.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	2,652,829,500	100%	2,374,631,100	100%	2,796,198,300	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	730,440,000	100%	940,720,000	100%	950,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	113,500,000	0%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang	Persen	100%	366,600,000	100%	375,000,000	100%	375,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
										dan Pertanahan
1.04.1.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang di tangani	Persen	0	-	65%	6,904,810,000	65%	675,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.18.	Program pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase rumah yang direhabilitasi akibat bencana alam	persen	0	-	0%	-	70%	150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.47.	Program Penataan Kawasan Permukiman	Cakupan sarana prasarana di permukiman	persen	0	-	60%	9,541,500,000	60%	8,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.48.	Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Kumuh	Cakupan layanan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Kumuh	persen	0	-	100%	200,000,000	0%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program Lingkungan sehat perumahan	Cakupan layanan sehat perumahan	persen	0	-	-	-	55%	4,200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program pengelolaan fasilitas umum	Cakupan layanan pengelolaan fasilitas umum	persen	0	-	-	-	50%	1,500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				**13,721,043,420**		**45,890,410,384**		**41,367,717,543**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran				**6,209,266,216**		**8,501,372,000**		**6,977,980,526**	
1.05.1.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	5,267,598,216	100%	6,313,056,096	100%	5,972,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	421,600,000	100%	366,650,000	100%	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	535,570,000	0%	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100%	57,500,000	100%	72,316,952	100%	94,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0	-	100%	12,500,000	100%	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	0	-	100%	68,435,000	0%	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persen	0	-	100%	830,787,952	0%	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persen	0	-	100%	20,606,000	0%	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.19.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	Persen	0	-	100%	281,450,000	0%	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.20.	Program Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	0	-	-	-	100%	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.21.	Program Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Persentase cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Persen	100%	362,568,000	-	-	100%	270,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
1.05.1.05.01.22.	Program Pelindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	Persen	0	-	-	-	100%	121,330,526	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
		(Linmas)								dan Kebakaran
1.05.1.05.01.23.	Program penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	100%	100,000,000	-	-	100%	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
		- Persentase Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran yang ditangani	Persen							
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**3,647,867,200**		**4,260,017,480**		**4,569,533,045**	
1.05.1.05.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100	1,055,377,200	100	1,289,317,480	100	1,487,033,045	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	23.59	665,200,000	30	940,500,000	30	752,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0.00	-	100%	158,200,000	-	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100	112,000,000	100	126,000,000	100	130,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100	65,000,000	100	131,000,000	100	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.17.	Program pembinaan wawasan kebangsaan dan Pembauran	Rasio masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan per-10.000 penduduk	Rasio	53.17	478,900,000	0	-	53.53	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.18.	Program Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa	Persentase pembinaan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persen	100	312,000,000	0	0	100	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.05.1.05.02.21.	Program pembinaan politik dan kemasyarakatan	- Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per-10.000 penduduk	Rasio	22.14	551,390,000	0.00	-	28.14	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		- Persentase ormas dan LSM yang ber-SKT	Persen	59.83		0.00		64.10		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.26.	Program penanganan konflik dan kewaspadaan dini	Persentase konflik sosial yang ditangani (%)	Persen	70	408,000,000	80	-	80	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.32.	Program peningkatan ketahanan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rasio masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekonomi(per-10.000 penduduk)	Rasio	0	0	30.19	315,000,000	32.70	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat	Persen	0	0	100%	287,600,000	0%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pembinaan kemitraan pengambangan wawasan kebangsaan	Persen	0	0	100%	112,400,000	0%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.21.	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pembinaan politik dan kemasyarakatan	Persen	0	0	100%	575,000,000	0%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.26.	Program Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing	Persentase Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing	Persen	0	0	100%	212,000,000	0%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.27.	Program Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam	Persentase Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam	Persen	0	0	100%	113,000,000	0%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**3,863,910,004**		**33,129,020,904**		**29,820,203,972**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
5.01.5.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	1,730,591,504	100%	1,630,254,904	100%	1,879,112,311	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	222,540,000	100%	189,020,000	100%	395,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	57,750,000	0%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100%	52,500,000	100%	86,630,000	100%	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0%	-	100%	56,500,000	100%	67,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.07.	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	- Cakupan Layanan Pencegahan terhadap Bencana	Persen	100%	718,275,000	100%	74,675,000	100%	455,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		- Persentase aparatur dan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana yang ikut pelatihan	Persen							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		- Persentase jumlah masyarakat yang mendapat layanan pusdalops	Persen							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.08.	Program Mitigasi Bencana	Meningkatnya Sistem Migitasi Bencana	Persen	0	-	100%	384,115,000	0%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.08.	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Cakupan ketersediaan layanan informasi rawan bencana	Persen	0%	-	0%	-	100%	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
5.01.5.01.01.10.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana dapat tercapai dengan baik	Persen	0%	-	100%	354,804,500	0%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.10.	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Persen	100%	54,750,000	0%	-	100%	385,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.11.	Program Logistik dan Peralatan	Persentase pemenuhan Keperluan akan Peralatan dan Logistik Bencana	Persen	100%	168,500,000	100%	163,925,000	100%	227,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	- Tingkat penurunan titik HOTSPOT	persen	100%	839,968,500	100%	30,002,835,000	100%	26,041,091,661	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		- Persentase penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	persen							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.13.	Program Pasca Bencana	Persentase Penilaian akan Kebutuhan Pasca Bencana	persen	0	0	100%	128,511,500	0%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.01.5.01.01.14.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase pelaksanaan Rehabilitasi dan rekontruksi Daerah terdampak bencana	persen	100%	76,785,000	0%	-	100%	185,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	BIDANG SOSIAL				**3,322,898,680**		**4,650,749,412**		**4,650,749,412**	
	Dinas Sosial				**3,322,898,680**		**4,650,749,412**		**4,650,749,412**	
1.06.1.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	91%	1,892,106,200	93%	2,000,850,412	95%	1,941,813,940	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	95%	326,965,000	95%	289,239,000	95%	561,214,000	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	151,975,000	0%	-	Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.06.1.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	60%	152,442,480	65%	168,000,000	73%	238,000,000	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	52%	179,400,000	67%	180,685,000.00	78%	50,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	- Persentase PMKS skala Kab. yang menerima Program Pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	60%	59,000,000	70%	700,790,000	75%	619,907,157	Dinas Sosial
		- Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan	Persen							Dinas Sosial
1.06.1.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Persentase penyandang disabilitas telantar skala Kab./Kota yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar diluar panti (%)	Persen	84%	712,985,000	87%	324,320,000	92%	619,907,157	Dinas Sosial
		- Persentase anak dan lansia telantar dan skala Kab./Kota yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar diluar panti (%)	Persen							Dinas Sosial
		- Persentase gelandangan dan pengemis skala Kab./Kota yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar diluar panti (%)	Persen							Dinas Sosial
		- Persentase eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh pembinaan (%)	Persen							Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.06.1.06.01.18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial	Persen	0%	-	100%	128,845,000	0%	-	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase penyandang lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	0%	-	100%	27,825,000	0%	-	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh pembinaan	Persen	0%	-	100%	79,010,000	0%	-	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan	Persen	0%	-	100%	149,210,000	0%	-	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.22.	Program keluarga harapan	Persentase KPM yang tertangani	Persen	0%	-	100%	202,992,000	0%	-	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.23.	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase KPM yang menerima manfaat (%)	Persen	0%	-	95%	247,008,000	96%	619,907,158	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR				**64,469,237,055**	-	**87,398,795,149**	-	**96,447,352,758**	
	BIDANG TENAGA KERJA				**2,771,019,057**		**3,338,464,296**		**3,338,464,296**	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				**2,771,019,057**		**3,338,464,296**		**3,338,464,296**	
2.01.2.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	1,265,306,447	100%	1,737,353,507	100%	1,720,353,507	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	890,367,275	100%	455,195,000	100%	554,415,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	99,220,000	0%	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.01.2.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100%	83,809,546	100%	175,000,000	100%	175,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100%	20,050,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	75%	148,485,000	80%	310,000,000	80%	360,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Lowongan Pekerjaan Baru	Persen	0%	-	100%	224,500,000	0%	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	80%	151,620,789	80%	220,815,789	80%	220,815,789	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.18.	Program Penyusunan Kebijakan Pengupahan	Persentase Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap kebutuhan hidup layak (KHL)	Persen	0%	-	100%	91,380,000	0%	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.19.01	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	40%	120,000,000	0%	-	45%	191,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.20.01	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar Yang Mendapatkan Upah Sesuai UMK/UMSK	Persen	100%	91,380,000	0%	-	100%	91,380,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK				**3,375,997,639**		**3,394,498,127**		**3,398,937,161**	
	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana				**3,375,997,639**		**3,394,498,127**		**3,398,937,161**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.02.2.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	2,488,132,639	100%	2,499,962,627	100%	2,499,962,627	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.02.2.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	178,250,000	100%	63,000,000	100%	81,000,000	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.02.2.02.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	18,000,000	0%	-	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.02.2.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100%	198,570,000	100%	89,740,000	100%	94,179,034	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.02.2.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0%	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.02.2.02.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	Persen	40%	254,005,000	100%	117,025,000	100%	117,025,000	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.02.2.02.01.18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	- Persentase perempuan di lembaga pemerintah	Persen	95%	257,040,000	96%	606,770,500	97%	606,770,500	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		- Persentase kursi dididuki perempuan di DPRD	Persen	28%		30%		32%		Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
		- Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	2,6%		2,8%		30%		Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	BIDANG PANGAN				**9,118,407,120**		**6,802,298,063**		**7,596,093,217**	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				**9,118,407,120**		**6,802,298,063**		**7,596,093,217**	
2.03.2.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	5,234,254,339	100	5,280,117,203	100	4,263,318,989	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	942,260,000	100	478,160,000	100	386,671,360	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.03.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100	168,035,000	0%	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	90	750,225,860	100	663,885,860	100	323,935,794	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	95	32,000,000	100	44,500,000	100	86,829,590	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.03.01.16.	Program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun	Persen	100	1,803,566,921	-	-	100	2,103,423,091	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.03.01.29.	Program peningkatan keamanan pangan	Persentase pangan aman dikonsumsi	Persen	80	50,000,000	-	-	85	53,989,299	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.03.2.03.01.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persen	100	133,100,000	80	117,600,000	85	215,957,196	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.03.01.31.	Program Kelembagaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Petani dan BP3K	Persentase Pengembangan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Petani dan BP3K	Persen	100	173,000,000	100	50,000,000	100	161,967,897	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	BIDANG PERTANAHAN				**-**		**4,206,829,000**		**2,850,000,000**	
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				**-**		**4,206,829,000**		**2,850,000,000**	
2.04.1.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Luas wilayah yang terdata	persen	0	-	35%	3,890,677,000	35%	2,750,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.04.1.04.01.17.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Cakupan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	persen	0	-	70%	116,152,000	70%	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.04.1.04.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	cakupan layanan pengembangan sistem informasi pertanahan	persen	0	-	100%	200,000,000	0%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
									-	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**10,246,574,188**		**23,259,547,233**		**24,151,283,225**	
	Dinas Lingkungan Hidup				**10,246,574,188**		**23,259,547,233**		**24,151,283,225**	
2.05.2.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran administrasi	Persen	100%	1,732,373,188	100%	1,734,918,201	100%	1,892,937,820	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.05.2.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur	Persen	100%	318,444,000	100%	300,952,400	100%	372,526,163	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	106,000,000	0%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya sumber daya aparatur	Persen	100%	279,538,000	100%	140,000,000	100%	654,938,788	Dinas Lingkungan Hidup
2.06.2.06.01.06.	Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persen	0%	-	0%	-	100%	161,967,897	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Ditangani	Persen	36,73	5,228,355,000	40%	7,023,976,632	45%	5,645,504,433	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Status Mutu Air	Status	Cemar ringan	1,707,154,000	Cemar ringan	955,465,000	Cemar ringan	1,843,360,957	Dinas Lingkungan Hidup
		- Status Kualitas Udara	Status	-	-	Baik		Baik		
2.05.2.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Lahan Potensi Abrasi yang direhabilitasi	Persen	100%	282,710,000	100%	284,535,000	100%	305,266,295	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Lingkungan Hidup Yang digunakan Untuk Kebijakan	Persen	100%	328,000,000	100%	350,000,000	100%	354,169,802	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH	Persen	75%	100,000,000	1.128	200,000,000	1.128	107,978,598	Dinas Lingkungan Hidup
3.04.2.05.01.16.	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas lahan APL yang direhabilitasi	Ha	-		150 Ha	11,595,900,000	300 Ha	12,521,090,258	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
3.04.2.05.01.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Tingkat Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persen	-	270,000,000	80%	567,800,000	80%	291,542,215	Dinas Lingkungan Hidup
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**7,132,236,750**		**5,100,735,205**		**7,583,013,545**	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**7,132,236,750**		**5,100,735,205**		**7,583,013,545**	
2.06.2.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100	3,244,421,750	100	2,363,867,205	100%	3,534,513,545	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	75	428,537,500	85	729,500,000	85%	1,236,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	76,360,000	0%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	30	93,300,000	40	195,900,000	40%	470,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0	-	100	70,815,000	100%	248,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	0	-	100%	1,664,293,000	0%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan (%)	Persen	94.64	1,682,988,750	0	-	100%	955,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil (%)	Persen	0.00	-	0	-	100%	425,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Penduduk (%)	Persen	99.80	1,682,988,750	0	-	100%	363,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase Perangkat Daerah yang memafaatkan Data Kependudukan (%)	Persen	0	-		-	75%	351,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**3,455,647,000**		**6,054,716,800**		**7,814,782,591**	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**3,455,647,000**		**6,054,716,800**		**7,814,782,591**	
2.07.2.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	90%	2,793,300,000	90%	2,628,065,800	90%	2,700,425,962	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	90%	344,927,000	80%	126,000,000	80%	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	87,750,000	0%	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	90%	240,660,000	90%	71,600,000	90%	296,941,145	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0	-	90%	180,100,000	90%	164,617,692	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Aktif dan Berkembang di Pedesaan	Persen	12%	76,760,000	25%	221,075,000	47%	431,914,392	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.07.2.07.01.28.	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan	Persentase Desa yang Mengoptimalkan SDA dan Penerapan TTG	Persen	0	-	25%	227,000,000	46%	431,914,392	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.29.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan baik	Persen	0	-	75%	458,480,000	80%	1,300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.30.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase Desa yang Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Aset sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persen	0	-	75%	357,515,000	80%	628,855,537	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.31.	Program Peningkatan Peran Kelembagaan di Pedesaan	Persentase Lembaga Aktif di Pedesaan	Persen	0	-	20%	946,471,000	30%	873,546,859	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.32.	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar dan Evaluasi Perkembangan Desa	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pelayanan Sosial Dasar dan Evaluasi Perkembangan Desa	Persen	0	-	20%	750,660,000	30%	811,566,612	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**3,797,690,000**		**4,281,710,000**		**4,242,722,914**	
	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana				**3,797,690,000**		**4,281,710,000**		**4,242,722,914**	
2.08.2.02.01.15.	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif untuk pasangan usia subur (PUS)	Persen	100%	2,744,570,000	100%	3,156,281,500	100%	3,048,955,111	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
										keluarga berencana
2.08.2.02.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja yang mendapat bimbingan mengenai kesehatan reproduksi	Jumlah	0	-		-	100%	33,473,365	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.08.2.02.01.17.	Program pelayanan kontrasepsi	Rasio Aseptor KB	Persen	0	-		-	100%	34,865,937	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.08.2.02.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	100%	1,024,608,000	100%	1,101,513,500	100%	1,101,513,500	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.08.2.02.01.24.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Cakupan keluarga prasejahtera dan sejahtera 1	Persen	100%	28,512,000	100%	23,915,000	100%	23,915,000	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
										berencana
	BIDANG PERHUBUNGAN				**8,687,759,460**		**11,460,266,810**		**9,780,130,596**	
	Dinas Perhubungan				**8,687,759,460**		**11,460,266,810**		**9,780,130,596**	
2.09.2.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran Kantor	Persen	100%	3,375,369,460	100%	3,017,372,960	100%	3,719,239,633	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	1,160,980,000	100%	546,014,350	100%	1,208,139,593	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	180,000,000	0%	-	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100%	299,000,000	100%	178,936,500	100%	429,754,820	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100%	58,960,000	100%	58,960,000	100%	63,664,181	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.15.	Program Pengembangan sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	Persentase pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sesuai standar	Persen	100%	3,413,790,000	100%	2,964,125,000	100%	3,021,008,345	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Persen	0%	-	100%	73,000,000	0%	-	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang melaksanakan Uji KIR	Persen	100%	48,000,000	0%	-	100%	103,659,454	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.09.2.09.01.18.	Program Pembangunan, Sarana Prasana Perhubungan	Pembangunan, Sarana Prasana Perhubungan	Persen	0%	-	100%	334,013,000	0%	-	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.19.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase wilayah yang dilakukan pengaturan pengamanan / pengawasan lalu lintas	Persen	100%	331,660,000	100%	282,845,000	100%	279,664,569	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.22.	Program Peningkatan Transportasi Pedesaan	Persentase sarana dan prasarana transportasi pedesaan	Persen	0%	-	0%	-	100%	955,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.22.	Program Peningkatan Perekonomian Pedesaan	Cakupan sarana dan prasarana transportasi pedesaan	Persen	0%	-	100%	3,825,000,000	0%	-	Dinas Perhubungan
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**3,344,424,100**		**5,690,879,065**		**5,142,397,063**	**-**
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				**3,344,424,100**		**5,690,879,065**		**5,142,397,063**	
2.10.2.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	2,293,232,100	100%	2,352,394,100	100%	2,294,627,098	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100%	220,500,000	100%	220,500,000	100%	397,849,965	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	177,349,965	0%	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang	Persen	100%	302,460,000	100%	282,230,000	100%	282,230,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	0	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi	Cakupan Jaringan Komunikasi,Informasi dan	Persen	0	-	100%	482,690,000	0%	-	Dinas Komunikasi,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	dan Media Massa	Media Massa								Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.16.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Cakupan Kajian penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persen	0	-	100%	150,000,000	0%	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang difasilitasi	Persen	100%	156,032,000	100%	71,915,000	100%	727,690,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.18.	Program kerjasama informasi dan media massa	Cakupan kerjasama informasi dan media massa	Persen	0	-	100%	1,475,000,000	0%	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.21.	Program Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki infrstruktur TIK	Persen	100%	372,200,000	100%	320,000,000	100%	85,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.22.	Program Pengembangan Aplikasi Informasi	Cakupan Pengembangan Aplikasi Informasi	Persen	0%	-	100%	148,800,000	0%	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.2.10.01.27.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Layanan Berbasis TIK	Persen	0	-	0%	-	100%	1,345,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				**3,776,341,000**		**2,064,653,450**		**6,290,633,450**	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				**3,776,341,000**		**2,064,653,450**		**6,290,633,450**	
2.11.2.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran administrasi	Persen	100%	1,424,096,250	100%	1,448,581,400	100%	1,594,912,750	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.11.2.1 1.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur	Persen	100%	1,462,746,250	100%	456,494,250	100%	1,361,100,700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.1 1.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	41,237,000	0%	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.1 1.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya sumber daya aparatur	Persen	100%	70,266,000	100%	102,890,800	100%	105,060,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.1 1.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100%	8,900,000	100%	15,450,000	100%	15,810,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.1 1.01.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99.55%	360,000,000	-	-	99.42%	306,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.1 1.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	0.78%	123,884,500	-	-	0.78%	714,250,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.1 1.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UKM Non BPR/LKM UKM (Unit)	Persen	87.82%	262,930,000	-	-	85.21%	1,850,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.11.2.1 1.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	82.01%	63,518,000	-	-	82.56%	343,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	BIDANG PENANAMAN MODAL				**2,209,146,407**		**3,195,203,868**		**3,195,203,868**	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				**2,209,146,407**		**3,195,203,868**		**3,195,203,868**	
2.12.2.1 2.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	1,221,650,907	100%	1,734,110,868	100%	1,308,236,301	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.1 2.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	91,400,000	100%	402,220,000	100%	170,271,451	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.1 2.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	102,280,000	0%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.1 2.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100%	151,968,000	100%	127,232,000	100%	319,616,650	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.1 2.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	0%	-	100%	9,000,000	100%	32,393,579	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
										Pintu
2.12.2.1 2.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jenis investasi yang dipromosikan	jumlah	100%	270,000,000	100%	210,850,000	100%	286,143,285	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.1 2.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase kerjasama Investasi yang terealisasi PMA/PMDN	Persen	100%	212,827,500	100%	153,548,000	100%	291,542,215	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.1 2.01.19.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentae Penerbitan jenis Ijin tepat waktu	Persen	0	-	90%	193,715,000	90%	340,132,584	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.1 2.01.26.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase jenis pelayanan ijin berbasis TI	Persen	90%	261,300,000	90%	262,248,000	90%	371,282,783	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.1 2.01.27.	Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan Secara Terpadu	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	0%	-	0%	-	90%	75,585,019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**3,935,110,552**		**3,648,888,552**		**5,798,828,724**	
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan				**3,935,110,552**		**3,648,888,552**		**5,798,828,724**	**-**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.13.2.1 3.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	1,301,095,552	100%	1,504,018,552	100%	1,410,303,667	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2.1 3.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	254,830,000	100%	236,320,000	100%	275,161,862	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2.1 3.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	85,600,000	0%	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2.1 3.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100%	33,460,000	100%	50,240,000	100%	101,085,244	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2.1 3.01.16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	178,590,000	0%	-	100%	173,775,357	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berprestasi (%)	Persen	96%	1,220,685,000	98%	1,053,850,000	97%	1,338,150,177	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2.1 3.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi (%)	Persen	90%	755,600,000	90%	580,810,000	92%	988,652,044	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.2.1 3.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga kondisi baik milik pemda (%)	Persen	90%	190,850,000	90%	138,050,000	95%	1,511,700,373	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	STATISTIK				**73,600,000**		**82,050,000**		**80,960,000**	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				**73,600,000**		**82,050,000**		**80,960,000**	
2.14.2.10.01.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase Data Statistik Sektoral Yang disajikan	Persen	100%	73,600,000	100%	82,050,000	100%	80,960,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	BIDANG PERSANDIAN				**-**		**-**		**-**	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				**-**		**-**		**-**	
2.14.2.10.01.16.	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Aparatur Yang Memahami Persandian	Persen	0	-	0	-	0	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	BIDANG KEBUDAYAAN				**536,600,000**		**833,430,000**		**623,522,415**	
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan				**536,600,000**		**833,430,000**		**623,522,415**	
2.16.2.13.01.15.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Nilai Kekayaan Budaya	- Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik (%)	Persen	75%	536,600,000	88%	833,430,000	85%	623,522,415	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		- Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah (%)	Persen			85%	-	90%		
	BIDANG PERPUSTAKAAN				**1,847,331,783**		**3,501,459,780**		**3,801,423,538**	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				**1,847,331,783**		**3,501,459,780**		**3,801,423,538**	
2.17.2.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	899,421,783	100%	1,081,904,830	100%	1,649,568,527	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.17.2.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	320,300,000	85%	1,529,008,750	85%	586,508,431	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	35,550,000	0%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	33%	85,600,000	33%	121,660,000	33%	323,935,794	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0	-	90%	19,800,000	90%	18,950,244	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persen	0	-	100%	676,311,200	0%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.24.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Cakupan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Persen	0	-	100%	37,225,000	0%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	orang	10,415	478,460,000	0	-	11,657	838,960,541	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan (%)	Persen	35.27%	63,550,000	0	-	41.08%	383,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	BIDANG KEARSIPAN				**161,352,000**		**483,164,900**		**758,956,155**	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				**161,352,000**		**483,164,900**		**758,956,155**	
2.18.2.17.01.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	0	0	100%	205,854,000	0%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18.2.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan dokumen/ arsip daerah yang dikelola	Persen	0	0	100%	45,786,000	0%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18.2.17.01.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	Persen	0	0	100%	55,660,000	0%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2.18.2.1 7.01.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pelayanan informasi yang dilaksanakan	Persen	0	0	100%	175,864,900	0%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pembinaan Kearsipan	Persentase pengelola arsip yang terampil (%)	Persen	4.25%	65,944,000	0%	-	12.50%	137,275,371	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku(%)	Persen	10%	95,408,000	0%	-	25%	621,680,784	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**40,053,972,920**		**55,745,913,416**		**45,405,600,080**	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**3,153,854,836**		**16,531,452,446**		**11,220,220,139**	
	Dinas Perikanan				**3,153,854,836**		**16,531,452,446**		**11,220,220,139**	
3.01.3.0 1.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	2,558,842,836	100%	2,893,323,446	100%	3,227,480,297	Dinas Perikanan
3.01.3.0 1.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100%	430,012,000	100%	384,213,000	100%	834,944,510	Dinas Perikanan
3.01.3.0 1.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Kepatuhan Aparatur	Persen	0%	-	100%	114,000,000	0%	-	Dinas Perikanan
3.01.3.0 1.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100%	150,000,000	100%	126,000,000	100%	215,957,196	Dinas Perikanan
3.01.3.0 1.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100%	15,000,000	100%	10,000,000	100%	53,989,299	Dinas Perikanan
3.01.3.0 1.01.31.	Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Perikanan	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Perikanan	Persen	-	-	91.25%	923,441,000	100%	1,457,171,181	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
3.01.3.01.01.32.	Program Produksi Perikanan	Persentase Produksi Perikanan	Persen	-	-	95.00%	8,874,585,000	95%	3,517,296,897	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.33.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Yang Dilatih	Persen	-	-	100%	3,205,890,000	0%	-	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Yang Dilatih	Persen	-	-	0%	-	100%	1,092,743,413	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Teknologi Perikanan	Persentase Penerapan Teknologi Perikanan	Jumlah	-	-	-	-	24	820,637,346	Dinas Perikanan
	BIDANG PARIWISATA				**1,092,900,000**		**3,588,823,500**		**1,072,119,501**	
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan				**1,092,900,000**		**3,588,823,500**		**1,072,119,501**	
3.02.2.13.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Persen	100%	1,092,900,000	100%	938,063,500	100%	1,072,119,501	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.02.2.13.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persen	0%	-	100%	1,952,535,000	0%	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.02.2.13.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan Program pengembangan Kemitraan	Persen	0%	-	100%	698,225,000	0%	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	BIDANG PERTANIAN				**11,728,471,584**		**12,209,157,470**		**13,922,760,440**	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				**11,728,471,584**		**12,209,157,470**		**13,922,760,440**	
3.03.2.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	Persen	100	505,370,900	100	365,929,500	100	464,307,972	Dinas Ketahanan Pangan dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
										Pertanian
3.03.2.0 3.01.16.	Program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun	Persen	-	-	100	1,377,566,700	0%	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.0 3.01.17.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persen	100	110,000,000.00	-	-	100	242,951,846	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.03.2.0 3.01.18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan yang ramah lingkungan	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persen	100	120,000,000.00	-	-	85	529,095,131	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.0 3.01.19.	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produktivitas Pertanian/ Perkebunan	Persen	100	9,370,814,824	100	9,002,271,540	100	10,629,413,198	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.0 3.01.26.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan	Persen	80	174,960,000	85	35,740,000	90	64,787,159	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.0 3.01.23.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penyakit ternak Yang Ditangani	Persen	100	467,514,860	100	416,583,500	100	269,946,495	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.0 3.01.24.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	100	779,811,000	100	1,011,066,230	100	1,490,104,654	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.0 3.01.25.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase kesejahteraan ekonomi peternak meningkat	Persen	-	-	-	-	85	53,989,299	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.0 3.01.28.	Program Peningkatan Penerapan teknologi peternakan	Peningkatan persentase populasi dan produksi ternak	Persen	-	-	-	-	85	97,180,738	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.03.2.0 3.01.30.	Penanggulangan wabah penyakit/hama	Persentase Penyakit/ Hama Tanaman dapat ditangani	Persen	100	200,000,000	-	-	85	80,983,949	Dinas Ketahanan Pangan dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
										Pertanian
	BIDANG PERDAGANGAN				**1,027,021,500**		**2,829,900,000**		**9,617,500,000**	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				**1,027,021,500**		**2,829,900,000**		**9,617,500,000**	
3.06.2.1 1.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase Alat UTTP yang ditera ulang	Persen	25.25	400,256,500	25.5	1,281,300,000	25.75%	3,328,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.06.2.1 1.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar Yang Memenuhi Standar	Jumlah	2	626,765,000	2	1,548,600,000	2 pasar	5,889,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport	Nilai Eksport Perdagangan	Rupiah (Dalam Rp. Juta)	0	-	-	-	8,032,047.16	400,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	BIDANG PERINDUSTRIAN				**22,904,135,000**		**20,384,580,000**		**9,371,000,000**	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				**22,904,135,000**		**20,384,580,000**		**9,371,000,000**	
3.07.2.1 1.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen	2,29%	620,715,000	-	-	2.58%	726,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
3.07.2.1 1.01.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Presentase IKM yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	Persen	4.76%	85,280,000	4.91%	50,000,000	5.07%	315,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.07.2.1 1.01.19.	Program Penataan Industri dan Pengembangan Sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra Industri Yang Dikembangkan	Jumlah	2	22,198,140,000	1	20,334,580,000	1 Sentra	7,555,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan Pemenuhan Kawasan Industri	Persen	0	-	-	-	16.67%	775,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	TRANSMIGRASI				**147,590,000**		**202,000,000**		**202,000,000**	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				**147,590,000**		**202,000,000**		**202,000,000**	
3.08.2.0 1.01.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Jumlah	1	127,000,000	1	117,000,000	1	117,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.08.2.0 1.01.16.	Program Transmigrasi Lokal	Persentase masyarakat transmigrasi yang terlatih	Persen	0	-	100%	85,000,000	0%	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat Transmigrasi dan Eks transmigrasi yang dibina	Persen	80%	20,590,000	0%	-	80%	85,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				**107,626,591,765**		**130,540,977,616**		**129,555,546,091**	
	PERENCANAAN				**8,847,441,665**		**9,162,366,863**		**11,501,508,880**	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				**8,847,441,665**		**9,162,366,863**		**11,501,508,880**	
4.01.4.0 1.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80%	2,947,580,500	80%	3,215,573,007	80%	3,663,296,300	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
		(%)								Daerah
4.01.4.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	60%	1,056,406,165	70%	1,179,738,056	70%	1,577,259,680	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	229,900,000	0%	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	80%	561,529,000	80%	219,075,000	80%	755,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	80%	125,635,000	80%	150,015,000	80%	170,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.15.	Program Pengembangan data/informasi	Persentase Pemutakhiran Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	80%	668,977,000	80%	819,899,800	80%	768,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.20.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase SDM Perangkat Daerah bidang Perencanaan yang memadai (%)	Persen	0%	-	100%	296,610,000	100%	990,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program tahunan (RKPD dan Renja-PD) Terhadap Program Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra-PD) (%)	Persen	80%	2,732,068,000	100%	1,688,764,500	100%	1,532,452,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Meningkatnya Jumlah Rencana Aksi Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	Persen	0%	-	100%	214,834,700	0%	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Keselarasan Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terhadap RPJMD	Persen	0%	-	100%	664,321,800	0%	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.01.4.01.01.25.	Program perencanaan pembangunan ekonomi, prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Konsistensi Program tahunan (RKPD dan Renja-PD) Terhadap Program Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra-PD) bidang Ekonomi (%)	Persen	60%	561,256,000	0%	-	100%	1,225,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.23.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase Konsistensi Program tahunan (RKPD dan Renja-PD) Terhadap Program Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra-PD) bidang SOSBUDPEM (%)	Persen	100%	193,990,000	100%	483,635,000	100%	820,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	KEUANGAN				**25,347,321,881**		**28,554,413,479**		**29,415,222,218**	
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				**20,310,298,699**		**24,128,142,557**		**24,128,142,557**	
4.02.4.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	6,721,483,400	100%	9,136,883,908	100%	9,136,883,908	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	5,457,120,000	100%	6,078,666,000	100%	6,463,316,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Persen	100%	246,000,000	100%	384,650,000	0%	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100%	1,150,575,000	100%	1,439,617,649	100%	1,439,617,649	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100%	253,775,000	100%	507,050,000	100%	507,050,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.02.4.02.01.17.	Program peningkatan dan pengembangan Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase perda dan perkada APBD tepat waktu	Persen	100%	2,604,715,000	100%	1,192,900,000	100%	1,078,550,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.23.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Keuangan Kabupaten/kota	Persentase Penerbitan SP2D tepat Waktu	Persen	100%	929,645,000	100%	802,160,000	100%	689,130,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Tepat Waktu	Persen	0	-	0%	-	100%	197,380,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.76.	Penataan Regulasi Barang Milik Daerah	Cakupan Penataan Regulasi Barang Milik Daerah (BMD)	Persen	0	-	100%	297,550,000	0%	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.05.4.02.01.21.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase SKPD melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis IT	Persen	100%	206,800,000	100%	496,500,000	100%	496,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.05.4.02.01.32.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah	Persen	0	-	100%	538,300,000	0%	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.05.4.02.01.77.	Program Pengelolaan BMD	Persentase BMD yang tercatat.	Persen	100%	2,740,185,299	100%	2,795,115,000	100%	4,119,715,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.78.	Program Pemutakhiran Sistem Informasi dan Pemutakhiran Data Aset	Cakupan Pemutakhiran sistem informasi dan pemutakhiran data aset	Persen	0	-	100%	163,500,000	0%	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.02.4.02.01.79.	Peningkatan kapasitas BMD	Cakupan Peningkatan kapasitas Barang Milik daerah BMD	Persen	0	-	100%	295,250,000	0%	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah				**5,037,023,182**		**4,426,270,922**		**5,287,079,661**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.02.4.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	2,192,400,682	100%	2,225,942,272	100%	2,445,530,260	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.02.4.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	379,855,000	100%	192,454,000	100%	495,551,579	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.02.4.02.02.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	46,200,000	0%	-	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.02.4.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100%	135,096,000	100%	230,181,000	100%	418,331,765	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.02.4.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100%	2,187,500	100%	8,525,000	100%	3,826,492	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.02.4.02.02.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	0	-	100%	116,485,000	0%	-	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.02.4.02.02.50.	Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan objek pajak	Persen	100%	1,836,432,200	80%	1,119,333,950	80%	1,253,236,538	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.02.4.02.02.51.	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketersediaan laporan penerimaan pendapatan	Persen	100%	408,651,800	80%	433,814,200	80%	581,628,662	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Program pelayanan pendapatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendapatan	Persen	100%	82,400,000	0%	-	80%	88,974,365	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
4.02.4.02.02.52.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Pengelolaan Teknologi Informasi	Persen	0	-	100%	53,335,500	0%	-	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**9,092,818,928**		**12,785,135,140**		**10,532,233,455**	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				**9,092,818,928**		**12,785,135,140**		**10,532,233,455**	
4.03.4.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	4,710,001,328	100%	3,996,499,541	100%	4,059,913,355	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.03.4.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	1,228,460,000	100%	1,166,604,899	100%	1,266,177,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.03.4.03.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	99,000,000	0%	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.03.4.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100%	981,384,500	100%	2,426,772,000	100%	691,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.03.4.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100%	38,100,000	0%	-	100%	59,693,100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.07.4.03.01.16.	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya	Persen	0%	-	100%	1,648,315,500	100%	1,648,315,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.07.4.03.01.20.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	Persen	100%	2,134,873,100	100%	2,802,323,200	100%	2,570,134,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.07.4.03.01.66.	Program Pengembangan data, arsip dan informasi kepegawaian	Tingkat keakuratan data, arsip dan informasi yang dipublikasikan	Persen	0%	-	100%	645,620,000	100%	237,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**1,271,400,000**		**1,340,093,900**		**1,617,639,890**	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				**1,271,400,000**		**1,340,093,900**		**1,617,639,890**	
4.01.4.01.01.30.	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan sesuai RPJMD	Persen	100%	1,125,000,000	100%	1,070,640,000	100%	1,200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.31.	Program penguatan kelembagaan IPTEK	Persentase Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh PD	Persen	100%	146,400,000	80%	269,453,900	80%	417,639,890	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				**36,641,774,800**		**47,447,335,794**		**41,086,516,843**	
	Sekretariat Daerah				**18,839,044,800**		**26,898,808,294**		**22,012,682,800**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.05.4.05.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	9,627,168,240	100%	12,529,584,774	100%	11,190,057,843	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	4,057,610,000	100%	2,040,277,520	100%	3,159,583,355	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	513,475,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100%	708,121,655	100%	735,438,655	100%	614,313,681	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	318,800,000	100%	143,000,000	100%	64,787,159	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.09.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Usulan Raperda/Perbup/Kepbup yang diharmonisasi (%)	Persen	100%	53,200,000	100%	60,000,000	100%	323,935,794	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.11.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	Persen	100%	212,000,000	100%	203,000,000	100%	388,722,953	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.19.	Program Peningkatan Standar Pelayanan	Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan (%)	Persen	0	-	100%	140,000,000	100%	129,574,318	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.18.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu (%)	Persen	100%	3,000,000,000	100%	3,180,000,000	100%	3,239,357,943	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.21.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Pengelolaan Teknologi Informasi	Persen	0	-	100%	264,500,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase usulan pemekaran desa yang ditindaklanjuti	Persen	100%	810,144,905	100%	542,241,226	100%	874,783,111	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.05.4.05.03.32.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persen	0	-	100%	61,000,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.40.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persen	0	-	100%	260,457,319	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.41.	Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi	Persentase Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi	Persen	0	-	100%	60,600,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.42.	Kerjasama dan Informasi dengan Mas Media	Persentase Kerjasama dan Informasi dengan Mas Media	Persen	0	-	100%	204,570,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.43.	Dokumentasi	Persentase kegiatan yang di dokumentasikan	Persen	0	-	100%	1,034,170,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.46.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persen	0	-	100%	24,100,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.48.	Program Pengawasan dan Akuntabilitas	Persentase Pengawasan dan Akuntabilitas	Persen	0	-	100%	63,000,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.56.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	0	-	100%	304,852,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.59.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	0	-	100%	244,750,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.60.	Pemberdayaan Kecamatan dan Desa	PersentasePemberdayaan Kecamatan dan Desa	Persen	0	-	100%	284,793,774	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.64.	Program Pengembangan Daerah	Persentase Pengembangan Daerah	Persen	0	-	100%	270,000,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.65.	Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Persen	0	-	100%	478,002,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.66.	Program Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tahura	Persentase Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tahura	Persen	0	-	100%	249,784,033	0%	-	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.05.4.05.03.67.	Program Pengembangan Sarana Prasarana Perekonomian	Persentase Pengembangan Sarana Prasarana Perekonomian	Persen	0	-	100%	373,257,967	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.68.	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Produksi yang Berwawasan Agribisnis	Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Produksi yang Berwawasan Agribisnis	Persen	0	-	100%	131,680,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.48.	Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu (%)	Persen	100%	52,000,000	0%	-	100%	64,787,159	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.65.	Program Peningkatan Pengendalian Bidang Pembangunan	- Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan (TEPRA, TP, UB) tepat waktu (%)	Persen	0	-	0%	-	100%	472,676,313	Sekretariat Daerah
		- Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi (%)	Persen							Sekretariat Daerah
		- Persentase ketersediaan bahan analisis data perumusan kebijakan bidang pangan dan ESDM (%)								Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.69.	Program Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	0	-	100%	378,840,000	0%	-	Sekretariat Daerah
	Program pengendalian Harga Minyak dan Gas	Persentase kesesuaian harga eceran tertinggi minyak dan gas dengan pasar	Persen	0	-	0%	-	100%	326,527,281	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.70.	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase paket pekerjaan yang selesai ditenderkan	Persen	0	-	100%	679,500,000	100%	440,835,180	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.71.	Program Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan barang/Jasa	Persentase Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan barang/Jasa	Persen	0	-	100%	1,500,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.72.	Program Peningkatan dan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi BPBJ	Persentase Peningkatan dan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Komunikasi BPBJ	Persen	0	-	100%	24,000,000	0%	-	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.05.4.05.03.74.	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Kemitraan	Persen	0	-	100%	64,660,000	0%	-	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.03.75.	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak lingkungan	Persentase Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak lingkungan	Persen	0	-	100%	31,810,000	0%	-	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase PBJ melalui LPSE	Persen	0	-	0%	-	100%	25,914,864	Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	Persentase kasus PBJ yang ditangani	Persen	0	-	0%	-	100%	1,619,679	Sekretariat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase ketersediaan bahan analisis data perumusan kebijakan Sub Bagian II bidang Kesra	Persen	0	-	0%	-	100%	74,505,233	Sekretariat Daerah
		Persentase ketersediaan bahan analisis data perumusan kebijakan Sub Bag III bidang Kesra	Persen							Sekretariat Daerah
4.07.4.05.03.34.	Program Pembinaan Keagamaan	Persentase penerima dana hibah dan dana bantuan sosial keagaamaan yang tepat sasaran	Persen	0	-	100%	593,277,000	100%	620,700,934	Sekretariat Daerah
4.07.4.05.03.65.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (KDH)	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (KDH)	Persen	0	-	100%	728,687,026	0%	-	Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD				**17,802,730,000**		**20,548,527,500**		**19,073,834,043**	
4.05.4.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran	Persen	100%	7,250,419,855	100%	8,033,036,850	100%	8,512,996,850	Sekretariat DPRD
4.05.4.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur prasarana	Persen	65%	2,364,434,145	75%	2,845,780,650	85%	3,129,655,650	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.05.4.05.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	836,600,000	0%	-	Sekretariat DPRD
4.05.4.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	49.1	953,916,000	49.08	1,537,100,000	61.35	1,537,100,000	Sekretariat DPRD
4.05.4.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0	-	0%	-	100%	4,900,000	Sekretariat DPRD
4.05.4.05.01.15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan Dewan yang di fasilitasi	Persen	100%	7,233,960,000	100%	7,296,010,000	100%	5,889,181,543	Sekretariat DPRD
	PENGAWASAN				**7,133,335,210**		**9,188,106,000**		**10,025,173,004**	-
	Inspektorat				**7,133,335,210**		**9,188,106,000**		**10,025,173,004**	
4.06.4.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran	Persen	85%	2,489,101,540	85%	2,681,653,940	85%	2,682,282,786	Inspektorat
4.06.4.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur prasarana	Persen	100%	1,254,806,670	100%	963,998,060	100%	906,080,810	Inspektorat
4.06.4.06.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen			100%	183,050,000	0%	-	Inspektorat
4.05.4.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	0.0	-	0.00	-	0%	-	Inspektorat
4.05.4.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0	-	0%	-	0%	-	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.06.4.06.01.22.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat Efesiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah dan Pengawasan Pembangunan	Persen	90%	2,446,245,000	90%	3,894,371,500	90%	4,607,139,042	Inspektorat
4.06.4.06.01.24.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Persen	85%	641,407,000	85%	891,000,000	85%	692,582,287	Inspektorat
4.06.4.06.01.25.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang terverifikasi	Persen	90%	301,775,000	90%	340,625,000	90%	759,162,986	Inspektorat
4.06.4.06.01.26.	Program non pengawasan	Persentase kegiatan non pengawasan yang mencapai target	Persen	0	-	90%	233,407,500	90%	377,925,093	Inspektorat
	KECAMATAN				**19,292,499,281**		**22,063,526,440**		**25,377,251,800**	
	Kecamatan Seruyan Tengah				**2,259,852,000**	**-**	**3,052,140,000**	**-**	**3,065,393,947**	
4.07.4.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	1,355,422,000	100%	1,731,712,000	100%	1,253,400,450	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	135,000,000	100%	236,610,000	100%	174,925,329	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	159,250,000	0%	-	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100%	185,000,000	100%	88,000,000	100%	239,712,488	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	65,000,000	-	-	100%	84,223,307	Kec. Seruyan Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.07.4.07.01.35.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	100%	75,000,000	-	-	100%	97,180,738	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.36.	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100%	370,580,000	-	-	100%	480,176,507	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.37.	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	100%	73,850,000	-	-	100%	95,690,634	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.34.	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	0	-	100%	50,000,000	100%	97,180,738	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.35.	Program Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Organisasi kemasyarakatan	Persen	0	-	100%	136,000,000	0%	-	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.36.	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0	-	100%	547,918,000	100%	91,781,808	Kec. Seruyan Tengah
4.07.4.07.01.37.	Program Pengembangan Daerah	Cakupan Pengembangan Daerah	Persen	0	-	100%	102,650,000	0%	-	Kec. Seruyan Tengah
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	0	-	-	-	100%	80,983,949	Kec. Seruyan Tengah
	Program Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (%)	Persen	0%	-	0%	-	100%	370,138,000	Kec. Seruyan Tengah
		Persentase masyarakat yang diberdayakan di tingkat kelurahan	Persen							
	Kecamatan Danau Sembuluh				**1,536,431,600**		**1,624,331,600**		**1,918,165,938**	
4.07.4.07.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	880,497,500	100%	1,005,340,200	100%	803,826,806	Kec. Danau Sembuluh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.07.4.07.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	279,300,000	100%	212,580,000	100%	331,494,296	Kec. Danau Sembuluh
4.07.4.07.02.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	58,500,000	0%	-	Kec. Danau Sembuluh
4.07.4.07.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	90%	63,750,000	90%	51,500,000	90%	75,585,019	Kec. Danau Sembuluh
4.07.4.07.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	26,700,000	0%	-	100%	32,393,579	Kec. Danau Sembuluh
4.07.4.07.02.34.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	100%	216,691,100	0%	-	100%	323,935,794	Kec. Danau Sembuluh
4.07.4.07.02.36.	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100%	31,575,000	0%	-	100%	35,093,044	Kec. Danau Sembuluh
4.07.4.07.02.37.	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	90%	37,918,000	0%	-	100%	45,890,904	Kec. Danau Sembuluh
4.07.4.07.02.30.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persen	0%	-	100%	23,200,000	0%	-	Kec. Danau Sembuluh
	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	0	-	100%	179,091,400	100%	97,180,738	Kec. Danau Sembuluh
	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0	-	100%	17,770,000	100%	91,781,808	Kec. Danau Sembuluh
4.07.4.07.02.37.	Program Pengembangan Daerah	Cakupan Pengembangan Daerah	Persen	0	-	100%	76,350,000	0%	-	Kec. Danau Sembuluh
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	0	-	0%	-	90%	80,983,949	Kec. Danau Sembuluh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
									-	
	Kecamatan Hanau				**2,144,943,000**		**2,255,943,000**		**2,553,848,255**	
4.07.4.07.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	99.70%	1,436,897,000	99.70%	1,570,678,000	99.70%	1,242,826,106	Kec. Hanau
4.07.4.07.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	253,670,000	100%	141,615,000	100%	391,962,311	Kec. Hanau
4.07.4.07.03.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	124,800,000	0%	-	Kec. Hanau
4.07.4.07.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100%	73,490,000	100%	22,500,000	100%	97,342,706	Kec. Hanau
4.07.4.07.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	187,650,000	0%	-	100%	232,153,986	Kec. Hanau
4.07.4.07.03.35.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	100%	39,805,000	0%	-	100%	97,180,738	Kec. Hanau
4.07.4.07.03.36.	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	98%	84,231,000	0%	-	98%	84,223,307	Kec. Hanau
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	0%	-	0%	-	100%	97,180,738	Kec. Hanau
	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	0%	-	100%	219,900,000	100%	91,781,808	Kec. Hanau
4.07.4.07.03.35.	Program Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Organisasi kemasyarakatan	Persen			100%	43,500,000	0%	-	Kec. Hanau
	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0%	-	99%	31,400,000	99.80%	80,983,949	Kec. Hanau
4.07.4.07.03.37.	Program Pengembangan Daerah	Cakupan Pengembangan Daerah	Persen	0%	-	100%	101,550,000	0%	-	Kec. Hanau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	100%	69,200,000	0%	-	100%	138,212,606	Kec. Hanau
	Kecamatan Seruyan Hilir				**3,320,774,216**		**4,583,976,216**		**5,500,483,041**	
4.07.4.07.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	1,439,939,500	100%	1,702,242,000	100%	1,647,731,271	Kec. Seruyan Hilir
4.07.4.07.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	220,923,316	100%	211,029,216	100%	238,549,900	Kec. Seruyan Hilir
4.07.4.07.04.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	26,700,000	0%	-	Kec. Seruyan Hilir
4.07.4.07.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	50%	100,180,000	100%	81,250,000	100%	108,172,960	Kec. Seruyan Hilir
4.07.4.07.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	30,245,000	-	-	100%	32,658,127	Kec. Seruyan Hilir
4.07.4.07.04.28.	Program Pengelolaan Administrasi Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Desa	Persen	-	-	100%	30,330,500	0%	-	Kec. Seruyan Hilir
4.07.4.07.04.30.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persen	-	-	100%	51,101,500	0%	-	Kec. Seruyan Hilir
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	0%	-	0%	-	100%	97,180,738	Kec. Seruyan Hilir
	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	-	-	0%	-	100%	91,781,808	Kec. Seruyan Hilir
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	0%	-	0%	-	100%	80,983,949	Kec. Seruyan Hilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.07.4.07.04.34.	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	90%	498,382,900	100%	578,368,500	90%	470,833,011	Kec. Seruyan Hilir
4.07.4.07.04.36.	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	95%	907,875,000	100%	1,777,116,500	100%	972,212,303	Kec. Seruyan Hilir
4.07.4.07.04.37.	Program Pengembangan Daerah	Persentase Pengembangan Daerah	Persen	0%	-	100%	125,838,000	0%	-	Kec. Seruyan Hilir
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	95%	123,228,500	0%	-	100%	120,102,975	Kec. Seruyan Hilir
	Program Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (%)	Persen	0%	-		-	100%	1,640,276,000	Kec. Seruyan Hilir
		Persentase masyarakat yang diberdayakan di tingkat kelurahan	Persen							
	Kecamatan Seruyan Hulu				**1,744,753,218**		**1,829,653,218**		**2,230,031,472**	
4.07.4.07.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	1,045,829,718	100%	1,151,817,400	100%	1,111,697,132	Kec. Seruyan Hulu
4.07.4.07.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	174,696,000	100%	195,750,000	100%	216,767,036	Kec. Seruyan Hulu
4.07.4.07.05.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	50%	71,950,000	80%	81,950,000	80%	88,488,461	Kec. Seruyan Hulu
4.07.4.07.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	196,700,000	0%	-	100%	211,638,052	Kec. Seruyan Hulu
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	100%	58,856,000	0%	-	100%	62,627,587	Kec. Seruyan Hulu
	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100%	59,748,500	0%	-	100%	37,792,509	Kec. Seruyan Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	100%	136,973,000	0%	-	100%	205,159,336	Kec. Seruyan Hulu
4.07.4.07.05.34.	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	0%	-	100%	180,950,000	100%	97,180,738	Kec. Seruyan Hulu
4.07.4.07.05.35.	Program Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan	Persen	0%	-	100%	58,000,000	0%	-	Kec. Seruyan Hulu
4.07.4.07.05.36.	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0%	-	100%	35,280,818	100%	92,861,594	Kec. Seruyan Hulu
4.07.4.07.05.37.	Program Pengembangan Daerah	Persentase Pengembangan Daerah	Persen	0%	-	100%	125,905,000	0%	-	Kec. Seruyan Hulu
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	0%	-	0%	-	100%	105,819,026	Kec. Seruyan Hulu
									-	
	Kecamatan Batu Ampar				**1,596,185,550**		**1,633,785,550**		**1,885,506,677**	
4.07.4.07.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	997,938,450	100%	1,098,145,719	100%	1,077,559,948	Kec. Batu Ampar
4.07.4.07.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	51,314,600	100%	65,057,331	100%	55,408,786	Kec. Batu Ampar
4.07.4.07.06.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	21,750,000	0%	-	Kec. Batu Ampar
4.07.4.07.06.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100%	42,750,000	100%	54,832,500	100%	46,160,851	Kec. Batu Ampar
4.07.4.07.06.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	54,832,500	-	-	100%	59,207,365	Kec. Batu Ampar
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	100%	300,600,000	-	-	100%	324,583,666	Kec. Batu Ampar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100%	34,000,000	-	-	100%	36,712,723	Kec. Batu Ampar
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	100%	38,500,000	-	-	100%	41,571,760	Kec. Batu Ampar
4.07.4.07.06.34.	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	100%	76,250,000	100%	271,600,000	100%	82,333,681	Kec. Batu Ampar
4.07.4.07.06.35.	Program Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan	Persen	0	-	100%	34,000,000	0%	-	Kec. Batu Ampar
4.07.4.07.06.36.	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0	-	100%	50,400,000	100%	64,787,159	Kec. Batu Ampar
4.07.4.07.06.37.	Program Pengembangan Daerah	Persentase Pengembangan Daerah	Persen	0	-	100%	38,000,000	0%	-	Kec. Batu Ampar
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	0	-	-	-	100%	97,180,738	Kec. Batu Ampar
	Kecamatan Seruyan Raya				**1,445,785,809**		**1,479,152,968**		**1,753,341,153**	
4.07.4.07.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	77	852,340,809	90%	882,022,514	90%	1,002,592,955	Kec. Seruyan Raya
4.07.4.07.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	53	196,685,000	90%	160,902,609	90%	153,329,609	Kec. Seruyan Raya
4.07.4.07.07.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	51,590,000	0%	-	Kec. Seruyan Raya
4.07.4.07.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	86	22,385,000	90%	62,862,845	90%	27,966,457	Kec. Seruyan Raya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.07.4.07.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	85	86,000,000	0%	-	85%	92,861,594	Kec. Seruyan Raya
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	85	159,000,000	0%	-	85%	171,685,971	Kec. Seruyan Raya
	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	90	10,000,000	0%	-	90%	10,797,860	Kec. Seruyan Raya
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	90	93,250,000	0%	-	90%	73,695,393	Kec. Seruyan Raya
4.07.4.07.07.30.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persen	0	-	100%	24,200,000	0%	-	Kec. Seruyan Raya
4.07.4.07.07.34.	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	99	26,125,000	90%	159,000,000	90%	28,209,409	Kec. Seruyan Raya
4.07.4.07.07.35.	Program Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan	Persen	0	-	100%	23,000,000	0%	-	Kec. Seruyan Raya
4.07.4.07.07.36.	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0	-	90%	89,450,000	90%	86,382,878	Kec. Seruyan Raya
4.07.4.07.07.37.	Program Pengembangan Daerah	Persentase Pengembangan Daerah	Persen	0	-	100%	26,125,000	0%	-	Kec. Seruyan Raya
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	0	-	-	-	90%	105,819,026	Kec. Seruyan Raya
									-	
	Kecamatan Danau Seluluk				**1,720,206,200**		**1,806,806,200**		**2,178,798,847**	
4.07.4.07.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100	1,114,221,200	100	1,274,483,000	100	1,124,927,730	Kec. Danau Seluluk

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.07.4.07.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100	154,500,000	100	134,090,000	100	166,826,934	Kec. Danau Seluluk
4.07.4.07.08.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0	-	100%	34,575,000	0%	-	Kec. Danau Seluluk
4.07.4.07.08.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100	95,525,000	75	28,950,000	75	146,834,697	Kec. Danau Seluluk
4.07.4.07.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100	189,000,000	0	-	100	223,839,634	Kec. Danau Seluluk
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	100	50,115,000	0	-	100	54,113,474	Kec. Danau Seluluk
	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	39,600,000	0	-	100	45,998,883	Kec. Danau Seluluk
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	100	77,245,000	0	-	100	123,635,495	Kec. Danau Seluluk
4.07.4.07.08.34.	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	0	-	100	176,893,200	100	96,100,952	Kec. Danau Seluluk
4.07.4.07.08.35.	Program Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan	Persen	0	-	100%	64,870,000	0%	-	Kec. Danau Seluluk
4.07.4.07.08.36.	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0	-	100	43,920,000	100	104,739,240	Kec. Danau Seluluk
4.07.4.07.08.37.	Program Pengembangan Daerah	Persentase Pengembangan Daerah	Persen			100%	49,025,000	0%	-	Kec. Danau Seluluk
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	0	-	0	-	100	91,781,808	Kec. Danau Seluluk
	Kecamatan Seruyan Hilir				**1,965,902,688**		**2,042,702,688**		**2,219,934,901**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Timur									
4.07.4.07.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	1,186,193,688	100%	1,089,252,688	100%	1,180,614,979	Kec. Seruyan Hilir Timur
4.07.4.07.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	107,099,000	100%	120,500,000	100%	128,601,431	Kec. Seruyan Hilir Timur
4.07.4.07.09.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	60,900,000	0%	-	Kec. Seruyan Hilir Timur
4.07.4.07.09.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	90%	48,500,000	90%	55,000,000	90%	93,941,380	Kec. Seruyan Hilir Timur
4.07.4.07.09.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	45,000,000	-	-	100%	83,575,435	Kec. Seruyan Hilir Timur
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	100%	70,200,000	0%	-	100%	75,800,976	Kec. Seruyan Hilir Timur
	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100%	305,760,000	-	-	100%	330,155,362	Kec. Seruyan Hilir Timur
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	100%	42,400,000	0%	-	100%	50,361,218	Kec. Seruyan Hilir Timur
4.07.4.07.09.28.	Program Pengelolaan Administrasi Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Desa	Persen	0%	-	100%	70,200,000	0%	-	Kec. Seruyan Hilir Timur
4.07.4.07.09.34.	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	100%	104,000,000	100%	394,650,000	100%	112,297,742	Kec. Seruyan Hilir Timur
4.07.4.07.09.35.	Program Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan	Persen	0%	-	100%	92,850,000	0%	-	Kec. Seruyan Hilir Timur
4.07.4.07.09.36.	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	56,750,000	100%	103,200,000	100%	67,405,640	Kec. Seruyan Hilir Timur
4.07.4.07.09.37.	Program Pengembangan Daerah	Persentase Pengembangan Daerah		0%	-	100%	56,150,000	0%	-	Kec. Seruyan Hilir Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	0%	-	0%	-	90%	97,180,738	Kec. Seruyan Hilir Timur
	Kecamatan Suling Tambun				**1,557,665,000**		**1,755,035,000**		**2,071,747,569**	
4.07.4.07.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	1,080,365,000	100%	1,006,095,000	100%	1,166,562,981	Kec. Suling Tambun
4.07.4.07.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	135,200,000	100%	250,700,000	100%	145,987,065	Kec. Suling Tambun
4.07.4.07.10.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	100%	60,000,000	100%	85,000,000	100%	64,787,159	Kec. Suling Tambun
4.07.4.07.10.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	100%	171,700,000	-	-	100%	185,399,253	Kec. Suling Tambun
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	Persen	100%	40,000,000	-	-	100%	43,191,439	Kec. Suling Tambun
	Program upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100%	70,400,000	-	-	100%	76,016,933	Kec. Suling Tambun
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memanfaatkan ADD dan DD yang sesuai ketentuan	Persen	0	-	-	-	100%	96,100,952	Kec. Suling Tambun
4.07.4.07.10.34.	Program Pembinaan Keagamaan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	0	-	100%	170,500,000	100%	93,941,380	Kec. Suling Tambun
4.07.4.07.10.35.	Program Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan	Persen	0	-	100%	90,000,000	0%	-	Kec. Suling Tambun
4.07.4.07.10.36.	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi layanan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0	-	-	50,890,000	100%	101,499,882	Kec. Suling Tambun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4.07.4.07.10.37.	Program Pengembangan Daerah	Persentase Pengembangan Daerah	Persen	0	-	100%	76,850,000	0%	-	Kec. Suling Tambun
4.07.4.07.10.38.	Pengelolaan Administrasi Desa	PersentasePengelolaan Administrasi Desa	Persen	0	-	100%	25,000,000	0%	-	Kec. Suling Tambun
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persen	0	-	-	-	100%	98,260,524	Kec. Suling Tambun
	JUMLAH				**675.035.362.441**		**804.845.420.631**		**804.735.952.437**	

Tabel 7.2-B
Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Seruyan yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2021-2023

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**689.068.242.961**		**815.525.310.156**		**780.983.104.695**		
1	**1**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**233.381.027.239**		**270.202.771.287**		**280.628.100.013**		
1	**1**		**DINAS PENDIDIKAN**				**233.381.027.239**		**270.202.771.287**		**280.628.100.013**		
1	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	156.011.189.936	100%	159.343.622.424	100%	159.428.622.424	100%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	Program pengelolaan pendidikan	APK SD /MI	Persen	116,89	75.377.522.503	117,3	107.609.148.863	117,71	118.149.477.589	117,71	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMP/MTs	Persen	105,35		106,7		108,07		108,07	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMA/SMK/MA	Persen	74,04		74,8		75,56		75,56	DINAS PENDIDIKAN
				APM SD/MI	Persen	98,5		99		99,5		99,5	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMP/MTs	Persen	81,32		81,36		81,4		81,4	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMA/MA/SMK	Persen	54,08		54,59		55,11		55,11	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	Persen	98,37		98,75		99,13		99,13	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	81,69		82,1		82,51		82,51	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	48,68		49,49		50,3		50,3	DINAS PENDIDIKAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	1	3	Program pengembangan kurikulum	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	Persen	80%	292.334.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	90%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya(%)	Persen	100%	1.560.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.600.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Masyarakat penyelengara PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Izin operasional (%)	Persen	69%	139.980.800	84%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN
1	**2**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**157.107.166.475**		**171.178.975.848**		**177.409.466.014**		
1	**2**		**DINAS KESEHATAN**				**89.969.643.796**		**96.066.536.027**		**100.071.745.597**		
1	2	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	41.241.390.138	100%	54.014.592.650	100%	54.014.592.650	100%	DINAS KESEHATAN
1	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Sesuai Standar	Persen	100	47.922.593.658	100	41.396.283.377	100	45.182.512.947	100	DINAS KESEHATAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	2	3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000	0,26	64.048.000	0,26	64.048.000	0,26	64.048.000	0,26	DINAS KESEHATAN
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000	9.64		12.66		15.68		15.68	DINAS KESEHATAN
1	2	4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Obat dan makanan yang tidak aman yang ditangani	Persen	90	364.612.000	100	364.612.000	100	383.592.000	100	DINAS KESEHATAN
1	2	5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan promotif preventif bidang kesehatan	Persen	50	377.000.000	100	227.000.000	100	427.000.000	100	DINAS KESEHATAN
1	**2**		**RSUD KUALA PEMBUANG**				**37.878.779.326**		**42.350.194.154**		**43.489.981.277**		
1	2	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	28.878.779.326	100%	33.350.194.154	100%	34.489.981.277	100%	RSUD KUALA PEMBUANG
1	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan RS klinis dan non-klinis sesuai standar (%)	Persen	95%	9.000.000.000	95%	9.000.000.000	95%	9.000.000.000	95%	RSUD KUALA PEMBUANG
				Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000	98%		108%		119%			RSUD KUALA PEMBUANG
1	**2**		**RSUD HANAU**				**29.258.743.353**		**32.762.245.667**		**33.847.739.140**		
1	2	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	22.011.458.161	100%	25.167.143.667	100%	26.252.637.140	100%	RSUD HANAU

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan RS klinis dan non-klinis sesuai standar (%)	Persen	98%	7.245.710.192	98%	7.595.102.000	98%	7.595.102.000	98%	RSUD HANAU
				Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000	98%		108%		119%			RSUD HANAU
1	2	5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95%	1.575.000	0%	-	0%	-	0%	RSUD HANAU
1	**3**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**205.901.725.903**		**279.989.895.876**		**282.082.611.384**		
1	**3**		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**205.901.725.903**		**279.989.895.876**		**282.082.611.384**		
1	3	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persen	100	14.299.120.232	100	12.963.830.516	100	13.509.738.224	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	47	34.662.956.800	47	32.015.600.000	49	31.999.000.000	49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Rasio Jaringan Irigasi	Persen	31,81		34,51		37,43		37,43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	3	3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	Persen	6,53	9.838.662.100	6,93	10.498.481.310	7,23	10.048.481.310	7,23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	Persen	61,24	0	73,49	0	85,74	500.000.000	85,74	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Sistem Air limbah yang terkelola dengan baik	Persen	57,4	13.225.139.000	59,9	14.022.832.500	62,4	14.022.832.500	62,4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	57,4		59,9		62,4		62,4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	69,63	6.336.920.000	76,55	8.660.000.000	82,57	8.760.000.000	82,57	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	7	Program pengembangan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda4	Persen	49,72	8.326.700.000	34,64	12.556.523.400	18,30	13.156.523.400	18,30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	Program penataan bangunan gedung	Rasio bangunan ber-IMB per Satuan bangunan	Persen	15,2	15.777.960.000	17,29	16.345.960.000	19,66	16.095.960.000	19,66	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	9	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	Persen	33,98	11.031.280.000	35,78	14.845.000.000	37,69	14.395.000.000	37,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	77		79		81		81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	3,4		5,88		9,34		9,34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	3	10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	23,8	88.790.712.150	26,17	148.895.668.150	28,54	150.425.075.950	28,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase SDM Terampil Konstruksi Bersertifikat	Persen	75	1.047.342.271	85	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	3,75	2.564.933.350	4,8	7.686.000.000	5,9	7.670.000.000	5,9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	9,21		9,32		9,5		9,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Ketaatan terhadap RTRW	Persen	15,45		16,2		17,01		17,01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**4**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**12.741.834.771**		**10.926.027.253**		**11.635.363.146**		
1	**4**		**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**				**12.741.834.771**		**10.926.027.253**		**11.635.363.146**		
1	4	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	5.283.478.771	100%	6.067.780.253	100%	6.777.116.146	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	4	2	Program pengembangan perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	80	1.204.190.000	90	775.000.000	100	775.000.000	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3	Program kawasan permukiman	Rasio permukiman layak huni	Persen	55,07	4.751.851.000	57,57	2.583.247.000	60,07	2.583.247.000	60,07	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Persentase pemukiman yang tertata	Persen	80		85		85		85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	20		10		10		10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	4	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	80	1.502.315.000	90	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	30		20		10		10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**5**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**73.713.623.819**		**77.332.929.953**		**22.981.334.454**		
1	**5**		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**				**12.454.087.665**		**-**		**-**		
1	5	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	11.679.080.665	0	-	0	-	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	5	2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	49,38	449.916.000	0		0		49,38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Keamanan, Keindahan)	Persen	80		0		0		80	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	5	4	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	- Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	100%	325.091.000	0	-	0	-	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
				- Persentase Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran yang ditangani	Persen	100%		0		0		100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
1	**5**		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**						**7.997.446.809**		**8.649.644.002**		
1	5	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	0	-	100%	7.497.446.809	100%	7.949.644.002	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	0		50,76	500.000.000	52,14	700.000.000	52,14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Keamanan, Keindahan)	Persen	0		83		85		85	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**		**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**						**6.286.085.106**		**6.825.233.001**		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	5	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	0	-	100%	5.786.085.106	100%	6.125.233.001	100%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	4	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi korban dan terdampak Kebakaran dan non kebakaran	Persen	0	-	100%	500.000.000	100%	700.000.000	100%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15		15		15		15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**5**		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**61.259.536.154**		**63.049.398.038**		**7.506.457.451**		
1	5	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	5.101.395.904	100%	6.184.398.038	100%	6.111.457.451	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	Program penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Penanggulangan Pra Bencana, Bencana dan Pasca Bencana yang Ditangani	Persen	100%	932.866.000	100%	865.000.000	100%	1.395.000.000	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	5	4	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran	Persentase Penurunan Titik Hotspot Karhutla	Persen	100%	55.225.274.250	100%	56.000.000.000	100%	-	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**6**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**6.222.864.754**		**5.894.709.939**		**6.246.229.684**		
1	**6**		**DINAS SOSIAL**				**6.222.864.754**		**5.894.709.939**		**6.246.229.684**		
1	6	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	4.838.412.320	100%	4.894.709.939	100%	5.046.229.684	100%	DINAS SOSIAL
1	6	2	Program pemberdayaan sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	98	258.026.000	98	166.000.000	98	190.000.000	98	DINAS SOSIAL
				Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	98		98		98		98	DINAS SOSIAL
1	6	4	Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	98	479.478.184	98	250.000.000	98	300.000.000	98	DINAS SOSIAL
				Persentase PMKS yang tertangani	Persen	98		98		98		98	DINAS SOSIAL

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	98		98		98		98	DINAS SOSIAL
				Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	95		95		95		95	DINAS SOSIAL
1	6	5	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	98	93.032.500	98	250.000.000	98	300.000.000	98	DINAS SOSIAL
1	6	6	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	97	452.552.500	98%	250.000.000	99%	300.000.000	99%	DINAS SOSIAL
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	97		97		97		97	DINAS SOSIAL
1	6	7	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	Persen	100	101.363.250	100	84.000.000	100%	110.000.000	100%	DINAS SOSIAL
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**107.731.773.025**		**105.868.497.202**		**113.505.810.300**		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	**7**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**5.935.681.317**		**6.044.300.685**		**6.567.430.978**		
2	**7**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**				**5.935.681.317**		**6.044.300.685**		**6.567.430.978**		
2	7	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	5.380.519.317	100%	5.707.100.685	100%	5.999.790.978	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	85%	142.532.000	85%	142.200.000	85%	298.640.000	85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	Program penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	50%	99.387.000	55%	75.000.000	60%		60%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	Program hubungan industrial	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	85%	313.243.000	85%	120.000.000	85%	155.000.000	85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	Persen	21,31%		21,31%		20%		20%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	Persen	13		13		12		12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	85%		85%		85%		85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase Kelesematan dan perlindungan	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**8**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**6.963.614.816**		**8.331.740.158**		**8.644.888.769**		
2	**8**		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**6.963.614.816**		**8.331.740.158**		**8.644.888.769**		
2	8	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	6.124.162.816	100%	7.529.182.869	100%	7.796.036.792	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase perempuan dilembaga pemerintah	Persen	98%	781.980.000	98%	738.295.875	98%	781.885.953	98%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan yang dillindungin	Persen	0%	-	98%	10.100.000	98%	10.100.000	98%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	8	4	Program peningkatan kualitas keluarga	Cakupan legalitas, keutuhan dan kesetaraan gender	Persen	100%	2.235.000	100%	2.110.145	100%	2.234.771	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	5	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase perempuan dilembaga pemerintah	Persen	100%	10.760.000	100%	10.158.909	100%	10.158.909	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	Program pemenuhan hak anak (pha)	Kabupaten Layak Anak(KLA)	Persen	100%	15.472.000	100%	14.607.680	100%	15.470.382	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	Program perlindungan khusus anak	Rasio KDRT	Persen	100%	29.005.000	100%	27.284.680	100%	29.001.962	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**9**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**17.433.174.266**		**13.032.891.868**		**14.135.660.997**		
2	**9**		**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**				**17.433.174.266**		**13.032.891.868**		**14.135.660.997**		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	9	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	16.581.495.118	100%	12.428.290.484	100%	12.931.044.835	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	2	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persen	0	-	100%	100.500.000	100%	175.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	3	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Persen	38,32	604.695.648	39,47	270.915.243	40,66	470.915.243	40,66	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	4	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Persen	100%	148.079.000	100%	139.806.791	100%	349.806.791	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	5	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	100%	98.904.500	100%	93.379.350	100%	208.894.128	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**1.402.766.200**		**4.135.000.000**		**4.380.000.000**		
1	**4**		**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**				**1.402.766.200**		**4.135.000.000**		**4.380.000.000**		
2	10	2	Program pengelolaan izin lokasi	Penyelesaian izin lokasi	Persen	80	74.926.000	90	25.000.000	100	50.000.000	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	4	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Persen	80	199.920.000	80	25.000.000	85	55.000.000	85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	0	-	90	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	10	6	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Cakupan redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	Persen	87	274.896.000	75	1.060.000.000	85	1.200.000.000	85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	7	Program penetapan tanah ulayat	Cakupan penetapan tanah ulayat	Persen	85	223.504.000	0	-	0	-	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	8	Program pengelolaan tanah kosong	Cakupan pengelolaan tanah kosong	Persen	85	185.568.000	0	-	0	-	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	9	Program pengelolaan izin membuka tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	80	130.694.000	90	-	100	-	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	Program penatagunaan tanah	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan	Persen	100	313.258.200	100	25.000.000	100	75.000.000	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**10.495.972.711**		**15.121.624.420**		**15.978.391.113**		
2	**11**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**				**10.495.972.711**		**15.121.624.420**		**15.978.391.113**		
2	11	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	3.789.797.848	100%	6.620.989.824	100%	6.573.534.981	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	11	2	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	1	75.000.000	1	82.000.000	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	3	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	77,4	385.000.000	79,4	849.594.897	81,4	628.561.648	81,4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Persen	50,2		50,3		50,4		50,4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Persen	84,66		84,76		84,86		84,86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	4	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Lahan Keanekaragaman Hayati yang terkelola	Persen	80	50.000.000	80	75.000.000	80	100.000.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	5	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengelolaan B3 dan limbah B3 yang di awasi	persen	80%	100.000.000	80%	554.594.896	80%	500.000.000	80%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	6	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab	Persen	25	175.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Lembaga	1	-	1	200.000.000	1	462.115.200	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Penetapan Hak MHA	Ketetapan	1		1		1		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	8	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase organisasi dan masyarakat yang menjadi kader lingkungan hidup yang melaksanakan PPLH	persen	100%	94.200.000	100%	160.000.000	100%	200.000.000	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	9	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	25.752.863	Ada	30.000.000	Ada	45.000.000	Ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan yang di laporkan	persen	100%	50.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11	Program pengelolaan persampahan	Presentase Penanganan Sampah	Persen	25,11	5.776.222.000	28,86	6.056.444.803	33,18	6.837.179.284	33,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen	10		11		12		12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	Buah	2		2		3		3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**7.788.220.340**		**7.641.693.667**		**8.105.525.042**		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	**12**		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**7.788.220.340**		**7.641.693.667**		**8.105.525.042**		
2	12	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	5.845.291.340	100%	6.424.881.667	100%	6.633.106.042	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	Program pendaftaran penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan (%)	Persen	100%	1.110.854.000	100%	366.812.000	100%	622.419.000	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Rasio	96%		97%		98%		98%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	96%		97%		98%		98%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	Program pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil (%)	Persen	100%	272.560.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	99,81%		99,83%		99,85%		99,85%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	55		58		61		61	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase penerbitan akta kelahiran	Persen	99,81%		99,83%		99,85%		99,85%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	12	4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data dan dokumen kependudukan oleh Perangkat Daerah	Persen	68,69	447.854.000	70,73	450.000.000	73,17	450.000.000	73,17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada/Tidak ada	Ada		Ada		Ada		Ada	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	Program pengelolaan profil kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86,9	111.661.000	87,14	100.000.000	87,56	100.000.000	87,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**9.400.085.082**		**8.292.893.044**		**8.637.493.785**		
2	**13**		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**9.400.085.082**		**8.292.893.044**		**8.637.493.785**		
2	13	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	90%	3.985.093.870	90%	4.762.686.044	90%	4.907.286.785	90%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	13,40%	60.000.000	13,40%	198.000.000	13,40%	270.000.000	13,40%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	78,83%	0	86,65%	0	96,69%	0	96,69%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Lembaga Ekonomi Aktif	Persen	10%	60.000.000	10%	198.000.000	10%	240.000.000	10%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai Peraturan	Persen	80%	2.071.589.929	80%	2.038.207.000	80%	1.780.207.000	80%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Desa Yang Memiliki Lembaga Aktif	Persen	14,56%	1.890.436.251	14,56%	1.096.000.000	17.48%	1.440.000.000	24.45%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	274		354		434		434	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase PKK aktif	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Angka	71,87		84,75		100		100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase LPM Berprestasi	Persen	10,30%		20,61%		30,91%		30,91%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase Posyandu aktif	Persen	100%		100%		100%		100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**3.355.645.874**		**3.168.187.806**		**3.347.293.828**		
2	**8**		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**3.355.645.874**		**3.168.187.806**		**3.347.293.828**		
2	14	2	Program pengendalian penduduk	Cakupan Kebiajakan daerahdan pemetaan perkiraan profil / karakteristik	Persen	100%	263.781.000	100%	249.045.276	100%	263.753.372	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif untuk pasangan usia subur (PUS)	Persen	100%	2.531.028.874	100%	2.389.636.783	100%	2.522.763.299	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Rasio Aseptor KB	Persen								DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	14	4	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	100%	560.836.000	100%	529.505.747	100%	560.777.157	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**12.236.769.673**		**9.780.754.030**		**10.162.779.418**		
2	**15**		**DINAS PERHUBUNGAN**				**12.236.769.673**		**9.780.754.030**		**10.162.779.418**		
2	15	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	6.418.469.394	100%	6.822.226.530	100%	7.519.898.665	100%	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	3.442	2.792.444.120	3.662	1.330.734.700	3.895	1.118.282.953	3.895	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	6.546		6.765		6.984		6.984	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termin al Bis	Unit	100		102		104		104	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	1.07		1.31		1.61		1.61	DINAS PERHUBUNGAN
				Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Persen	0.05		0.05		0.06		0.06	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	Program pengelolaan pelayaran	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi	Persen	100%	3.025.856.159	100%	1.627.792.800	100%	1.524.597.800	100%	DINAS PERHUBUNGAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**6.876.945.167**		**6.061.299.566**		**6.615.843.979**		
2	**16**		**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**				**6.876.945.167**		**6.061.299.566**		**6.615.843.979**		
2	16	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	4.582.172.267	100%	4.560.299.566	100%	4.980.643.979	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	66%	1.769.532.400	70%	1.135.000.000	70%	1.274.000.000	70%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	53		53		53		53	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	Persen	98%		99%		99%		99%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	Program aplikasi informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	65%	525.240.500	80%	366.000.000	80%	361.200.000	80%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**4.658.542.519**		**7.653.925.868**		**7.809.525.175**		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	**17**		**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				**4.658.542.519**		**7.653.925.868**		**7.809.525.175**		
2	17	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	4.374.081.519	100%	6.605.337.118	100%	5.166.442.485	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	3	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	87,17	30.500.000	87,53	135.000.000	0	-	87,53	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	5	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan/ bimtek/ workshop dan lain sebagianya tentang pengelolaan koperasi/ keuangan/ manajerial koperasi	Persen	0	-	100%	159.457.500	100%	479.752.876	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	6	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi aktif dan berkualitas serta terlindungi	Persen	100%	101.604.000	100%	152.000.000	100%	100.000.000	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	Persen	82,46	76.154.000	81,72	296.971.250	79,98	399.246.064	79,98	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase BPR/LKM aktif	Persen	16,94		18,28		20,02		20,02	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	90		90		85		85	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	8	Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang berdaya saing	Persen	3,94	76.203.000	4,94	305.160.000	5,94	1.664.083.750	5,94	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**5.702.288.952**		**5.421.211.933**		**5.844.067.493**		
2	**18**		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				**5.702.288.952**		**5.421.211.933**		**5.844.067.493**		
2	18	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	4.395.193.508	100%	4.567.711.933	100%	4.805.567.493	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rupiah)	Persen	77	165.143.616	79	125.000.000	81	160.000.000	81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3	Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	44	98.545.808	44	55.000.000	44	75.000.000	44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	Program pelayanan penanaman modal	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	1.071.428.571.400	417.569.080	1.071.428.571.400	160.000.000	1.071.428.571.400	265.000.000	1.071.428.571.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Persen	80		85		90		90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaksanaan Pengendalian PMA dan PMDN Penanaman Modal	Persen	100%	473.243.324	100%	463.500.000	100%	463.500.000	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	6	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pengelolaan Perizinan dan Informasi Berbasis Secara Elektronik	Persen	100%	152.593.616	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**10.524.902.855**		**7.886.980.932**		**8.263.545.880**		
2	**19**		**DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				**10.524.902.855**		**7.886.980.932**		**8.263.545.880**		
2	19	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	5.879.451.874	100%	4.591.980.932	100%	4.618.545.880	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	19	2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berprestasi (%)	Persen	100%	1.065.634.810	100%	1.300.000.000	100%	1.600.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	19	3	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi (%)	Persen	100%	3.048.296.171	100%	1.720.000.000	100%	1.720.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	19	4	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina (%)	Persen	100%	531.520.000	100%	275.000.000	100%	325.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**79.431.000**		**54.000.000**		**72.000.000**		
2	**16**		**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**				**79.431.000**		**54.000.000**		**72.000.000**		
2	20	2	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Pelaksanaan Program Penyelengaraan Statistik Sektoral	Persen	100%	79.431.000	100%	54.000.000	100%	72.000.000	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak ada	Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada		Tidak Ada	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/tidak ada	Ada		Ada		Ada		Ada	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Buku 'PDRB"	Ada/tidak ada	Ada		Ada		Ada		Ada	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**124.210.750**		**156.553.073**		**130.460.455**		
2	**16**		**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**				**124.210.750**		**156.553.073**		**130.460.455**		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	21	2	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase pelaksanaan program penyelenggaraan persandiaan untuk pengamanan informasi	Persen	100%	124.210.750	100%	156.553.073	100%	130.460.455	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	20%		20%		20%		20%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**748.777.000**		**418.604.395**		**418.604.395**		
2	**19**		**DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				**748.777.000**		**418.604.395**		**418.604.395**		
2	22	2	Program pengembangan kebudayaan	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	Persen	100%	698.777.000	100%	303.604.395	100%	303.604.395	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	3	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang ada di Kab. Seruyan	Persen	100%	50.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	22	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budya yang dilestarikan dan dikelola oleh Kabupaten Seruyan	Persen	0	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	6	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman di Kabupaten Seruyan	Persen	0	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**3.751.658.503**		**3.835.842.758**		**4.339.239.543**		
2	**23**		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**3.751.658.503**		**3.835.842.758**		**4.339.239.543**		
2	23	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	3.350.687.803	100%	3.307.618.678	100%	3.838.657.911	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	Persen	70%	400.970.700	75%	521.224.080	80%	493.581.632	80%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	72.300		72.600		73.000		73.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	37,00%		37,25%		37,50%		37,50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	6,01%		6,13%		6,22%		6,22%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase Koleksi Nasional yang Dilestarikan	Persen	0%	-	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**253.086.000**		**238.947.734**		**253.059.450**		
2	**23**		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**253.086.000**		**238.947.734**		**253.059.450**		
2	24	2	Program pengelolaan arsip	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	Persen	100%	253.086.000	100%	218.947.734	100%	198.059.450	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Persentase peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Persen	40,00%		42,86%		62,50%		62,50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Prosentase arsip yang dapat terlindungi dan terselamatkan	Persen	0%	-	25%	20.000.000	25%	55.000.000	50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**53.980.786.787**		**35.301.433.445**		**22.834.861.062**		
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**20.095.397.566**		**7.432.060.559**		**9.331.105.580**		
3	**25**		**DINAS PERIKANAN**				**20.095.397.566**		**7.432.060.559**		**9.331.105.580**		
3	25	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	7.194.110.566	100%	4.852.060.559	100%	6.371.105.580	100%	DINAS PERIKANAN
3	25	3	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Produkasi perikanan Tangkap	Persen	100%	8.913.119.000	100%	1.510.000.000	100%	1.610.000.000	100%	DINAS PERIKANAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
3	25	4	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Produkasi perikanan Budidaya	Persen	100%	3.242.180.000	100%	570.000.000	100%	670.000.000	100%	DINAS PERIKANAN
3	25	5	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan dan Undang-undang yang berlaku	Persen	80%	176.840.000	80%	250.000.000	85%	310.000.000	85%	DINAS PERIKANAN
3	25	6	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Produksi Perikanan	Persen	98,18	569.148.000	98,29	250.000.000	98,65	370.000.000	98,65	DINAS PERIKANAN
				Persentase Konsumsi Ikan	Persen	96,3		97,5		98,6		98,6	DINAS PERIKANAN
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**579.989.405**		**265.000.000**		**265.000.000**		
2	**19**		**DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				**579.989.405**		**265.000.000**		**265.000.000**		
3	26	2	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Pengembangan Daya Tarik Destinasi pariwisata	Jumlah	10 Destinasi	200.721.765	2 Destinasi	195.000.000	2 Destinasi	195.000.000	2 Destinasi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	3	Program pemasaran pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan(%)	Persen	100%	379.267.640	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah	24.189		29.214		34.329		34.329	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,29		0,30		0,31		0,31	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**5.872.936.066**		**1.139.898.615**		**2.821.616.559**		
2	**9**		**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**				**5.872.936.066**		**1.139.898.615**		**2.821.616.559**		
3	27	2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persen	1,2	1.896.440.003	1,2	485.543.476	1,2	1.102.261.420	1,2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Persentase Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	1,2		1,2		1,2		1,2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	3	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	Persen	158,74 %	1.352.310.524	164,73 %	226.765.747	170,94 %	536.765.747	170,94 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	100%	542.614.666	100%	112.302.320	100%	322.302.320	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	100%	1.195.041.273	100%	128.282.104	100%	338.282.104	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	6	Program perizinan usaha pertanian	Persentase peningkatan perizinan usaha pertanian	Persen	0	-	100%	50.000.000	100%	115.000.000	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	7	Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok petani	Persen	100%	886.529.600	100%	137.004.968	100%	407.004.968	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**15.319.138.750**		**15.384.801.919**		**300.000.000**		
2	**11**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**				**15.319.138.750**		**15.384.801.919**		**300.000.000**		
3	28	4	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Rehabilitasi TAHURA	Persen	80	15.319.138.750	80	15.384.801.919	80	300.000.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Kerusakan kawasan TAHURA	Persen	4		4		4		4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**348.221.000**		**4.218.042.617**		**5.213.020.250**		
2	**17**		**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				**348.221.000**		**4.218.042.617**		**5.213.020.250**		
3	30	3	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	persentase sarana distribusi perdagangfan yang di tingkatkan	persen	100%	144.060.000	100%	3.658.217.617	100%	4.800.000.000	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan Bina kelompok Perdagangan/usaha informal	Persen	86,76%	80.375.000	86,85%	437.520.000	90,45%	364.400.000	90,45%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Alat UTTP yang ditera ulang	persen	100%	123.786.000	100%	122.305.000	100%	48.620.250	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**11.643.904.000**		**5.302.675.000**		**4.497.320.053**		
2	**17**		**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				**11.643.904.000**		**5.302.675.000**		**4.497.320.053**		
3	31	2	Program perencanaan dan pembangunan industri	persentase pembangunan industri yang direncanakan	persen	100%	11.643.904.000	100%	5.302.675.000	100%	4.497.320.053	100%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	0,18%		10%		12%		12%	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**121.200.000**		**151.000.000**		**206.798.620**		
2	**7**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**				**121.200.000**		**151.000.000**		**206.798.620**		
3	32	2	Program perencanaan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang direncanakan	Persen	80%	70.521.000	80%	20.000.000	80%	25.000.000	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan permukiman transmigrasi yang dibangun	Persen	65%	38.433.000	65%	90.000.000	65%	130.000.000	65%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	4	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persen	100%	12.246.000	100%	41.000.000	100%	51.798.620	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**88.394.108.085**		**82.008.365.700**		**83.484.631.930**		
4	**1**		**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.882.453.151**		**36.434.664.031**		**37.304.351.282**		
4	**1**		**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.882.453.151**		**36.434.664.031**		**37.304.351.282**		
4	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	Persen	100%	33.093.328.888	100%	32.684.714.318	100%	33.189.433.542	100%	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat	Persen	100%	5.684.767.000	100%	2.276.395.288	100%	2.495.032.786	100%	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase peningkatan perekonomian dan pembangunan	Persen	69,3	2.104.357.263	100%	1.473.554.425	100%	1.619.884.954	100%	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Pemakaian Listrik (kWh)	Persen	69,3		6,54		7,73		7,73	SEKRETARIAT DAERAH
				Produksi Listrik	kwh	69,3		2,174,608		2,282,480		2,282,480	SEKRETARIAT DAERAH
4	**2**		**SEKRETARIAT DPRD**				**47.511.654.934**		**45.573.701.669**		**46.180.280.648**		
4	**2**		**SEKRETARIAT DPRD**				**47.511.654.934**		**45.573.701.669**		**46.180.280.648**		
4	2	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	32.550.153.546	100%	32.671.082.665	100%	33.568.379.630	100%	SEKRETARIAT DPRD

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
4	2	2	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	14.961.501.388	Ada	12.902.619.004	Ada	12.611.901.018	Ada	SEKRETARIAT DPRD
				Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	SEKRETARIAT DPRD
				Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	SEKRETARIAT DPRD
				Jumlah Anggota DPRD	Orang /Anggota	25		25		25		25	SEKRETARIAT DPRD

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase Terlaksananya Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen	95%		95%		95%		95%	SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Pokok Pikiran DPRD yang Terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD	Persen	93%		93%		93%		93%	SEKRETARIAT DPRD
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**244.038.009.360**		**262.447.849.961**		**276.770.681.603**		
5	**1**		**PERENCANAAN**				**9.360.024.468**		**8.877.147.486**		**10.215.924.747**		
5	**1**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**9.360.024.468**		**8.877.147.486**		**10.215.924.747**		
5	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	6.700.382.568	100%	6.689.147.486	100%	7.450.924.747	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	Persen	100%	1.698.923.900	100%	1.370.000.000	100%	1.725.000.000	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100%	960.718.000	100%	818.000.000	100%	1.090.000.000	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Sesuai/Persen	Sesuai (50%)		Sesuai (50%)		Sesuai (50%)		Sesuai (50%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	**2**		**KEUANGAN**				**225.099.491.856**		**243.672.542.898**		**256.252.488.954**		
5	**2**		**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				**215.192.589.484**		**231.086.942.837**		**242.466.888.893**		
5	2	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	13.347.078.783	100%	13.226.377.150	100%	13.479.117.150	100%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	0,6%	200.736.317.977	0,5%	217.315.025.687	0,5%	228.489.971.743	0,5%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	18,9%		19,9%		21,0%		21,0%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	12,7%		12,6%		13,3%		13,3%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase SILPA Terhadap APBD	Persen	10,5%		9,9%		4,9%		4,9%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Program Dalam APBD yang Dilaksanakan	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Kegiatan Dalam APBD yang Dilaksanakan	Persen	100%		100%		100%		100%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	Program pengelolaan barang milik daerah	persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	persen	100%	1.109.192.724	100%	545.540.000	100%	497.800.000	100%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
5	**2**		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**				**9.906.902.372**		**12.585.600.061**		**13.785.600.061**		
5	2	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	7.712.172.372	100%	10.607.807.561	100%	11.685.928.477	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10%	2.194.730.000	11%	1.977.792.500	12%	2.099.671.584	12%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**3**		**KEPEGAWAIAN**				**7.332.289.612**		**7.639.340.084**		**8.015.510.754**		
5	**3**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**7.332.289.612**		**7.639.340.084**		**8.015.510.754**		
5	3	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	5.327.220.684	100%	5.354.420.852	100%	5.720.591.522	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	Program kepegawaian daerah	Persentase ASN yang memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Karier	Persen	90%	2.005.068.928	100%	2.284.919.232	100%	2.294.919.232	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	Orang	3.810		4.110		4.410		4.410	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**4**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.713.803.424**		**1.808.819.493**		**1.816.757.148**		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
5	**3**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**1.713.803.424**		**1.808.819.493**		**1.816.757.148**		
5	4	2	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	90%	1.713.803.424	100%	1.808.819.493	100%	1.816.757.148	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	5,00%		5,00%		5,00%		5,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	5,00%		5,00%		5,00%		5,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**5**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**532.400.000**		**450.000.000**		**420.000.000**		
5	**1**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**532.400.000**		**450.000.000**		**420.000.000**		
5	5	2	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	80%	532.400.000	80%	450.000.000	80%	420.000.000	80%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	80%		80%		80%		80%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	80%		80%		80%		80%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Persentase Kebiakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	80%		80%		80%		80%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.770.538.521**		**10.116.661.408**		**9.971.022.374**		
6	**1**		**INSPEKTORAT DAERAH**				**8.770.538.521**		**10.116.661.408**		**9.971.022.374**		
6	**1**		**INSPEKTORAT DAERAH**				**8.770.538.521**		**10.116.661.408**		**9.971.022.374**		
6	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	90%	6.109.478.271	90%	7.004.245.608	90%	6.924.371.374	90%	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	70%	2.250.117.250	75%	2.649.186.800	80%	2.613.272.000	80%	INSPEKTORAT DAERAH
				Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	2,0%		2,0%		1,50%		1,50%	INSPEKTORAT DAERAH
				Jumlah Temuan BPK	Rekomendasi	26		24		22		22	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah	Persen	85%	410.943.000	85%	463.229.000	85%	433.379.000	85%	INSPEKTORAT DAERAH

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**				**38.432.640.894**		**38.466.885.785**		**40.534.546.891**		
7	**1**		**KECAMATAN**				**38.432.640.894**		**38.466.885.785**		**40.534.546.891**		
7	**1**		**KECAMATAN SERUYAN HILIR**				**8.544.213.475**		**7.913.773.463**		**7.961.201.076**		
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	85%	5.322.164.930	85%	5.365.821.409	85%	4.895.801.986	85%	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	87%	1.146.495.245	87%	738.552.054	87%	796.454.798	87%	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	85%	1.754.146.300	85%	1.675.153.300	85%	1.706.653.300	85%	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	85%	65.463.000	85%	27.596.700	85%	59.450.000	85%	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen	85%	77.680.000	85%	22.400.000	85%	343.150.992	85%	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	85%	178.264.000	85%	84.250.000	85%	159.690.000	85%	KECAMATAN SERUYAN HILIR
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN SERUYAN HILIR
7	**1**		**KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR**				**3.181.427.878**		**2.783.777.853**		**3.008.574.766**		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	2.938.128.878	100%	2.679.264.793	100%	2.873.347.966	100%	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	54.054.000	100%	21.450.000	100%	24.620.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	90%	81.365.000	90%	36.063.060	90%	50.000.000	90%	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	95%	24.980.000	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen	100%	1.835.000	100%	-	100%	1.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	81.065.000	100%	37.000.000	100%	47.606.800	100%	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
7	**1**		**KECAMATAN DANAU SEMBULUH**				**2.702.830.061**		**2.808.902.275**		**3.026.415.415**		
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	2.596.596.761	100%	2.504.827.275	100%	2.686.640.415	100%	KECAMATAN DANAU SEMBULUH

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	2.020.000	100%	40.000.000	100%	51.000.000	100%	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	100%	81.038.300	100%	90.750.000	100%	92.550.000	100%	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	0	-	100%	1.000.000	100%	2.000.000	100%	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen	100%	13.075.000	100%	156.025.000	100%	175.525.000	100%	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	10.100.000	100%	16.300.000	100%	18.700.000	100%	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN DANAU SEMBULUH
7	**1**		**KECAMATAN SERUYAN RAYA**				**2.658.244.064**		**2.813.035.305**		**3.012.389.236**		
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	2.576.974.064	100%	2.713.035.305	100%	2.812.389.236	100%	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	10.060.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN RAYA

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	100%	57.980.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	0	-	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen	0	-	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	13.230.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN RAYA
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN SERUYAN RAYA
7	**1**		**KECAMATAN DANAU SELULUK**				**2.562.063.056**		**2.736.196.482**		**2.954.235.791**		
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	2.479.397.556	100%	2.607.196.482	100%	2.825.235.791	100%	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	87%	2.236.000	87%	5.000.000	87%	5.000.000	87%	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	100%	55.394.500	100%	33.775.000	100%	33.775.000	100%	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	95%	4.810.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	KECAMATAN DANAU SELULUK

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen		-	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	20.225.000	100%	40.225.000	100%	40.225.000	100%	KECAMATAN DANAU SELULUK
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN DANAU SELULUK
7	**1**		**KECAMATAN HANAU**				**3.867.174.687**		**3.918.561.519**		**4.164.294.853**		
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	3.706.977.187	100%	3.758.364.019	100%	4.004.097.353	100%	KECAMATAN HANAU
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	25.845.000	100%	25.845.000	100%	25.845.000	100%	KECAMATAN HANAU
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	100%	31.887.500	100%	31.887.500	100%	31.887.500	100%	KECAMATAN HANAU
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	100%	22.150.000	100%	22.150.000	100%	22.150.000	100%	KECAMATAN HANAU
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen	100%	55.700.000	100%	55.700.000	100%	55.700.000	100%	KECAMATAN HANAU
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	24.615.000	100%	24.615.000	100%	24.615.000	100%	KECAMATAN HANAU

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN HANAU
7	**1**		**KECAMATAN BATU AMPAR**				**2.463.639.702**		**2.782.861.067**		**2.997.845.022**		
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	85%	2.356.359.702	85%	2.737.861.067	85%	2.848.345.022	85%	KECAMATAN BATU AMPAR
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	0	-	100%	5.000.000	100%	7.500.000	100%	KECAMATAN BATU AMPAR
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	85%	38.530.000	85%	30.000.000	85%	31.000.000	85%	KECAMATAN BATU AMPAR
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	0	-	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	KECAMATAN BATU AMPAR
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen	75%	27.750.000	0	-	75%	91.000.000	100%	KECAMATAN BATU AMPAR
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	41.000.000	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	KECAMATAN BATU AMPAR
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN BATU AMPAR
7	**1**		**KECAMATAN SERUYAN TENGAH**				**5.916.951.646**		**5.783.465.304**		**6.041.800.204**		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	4.569.386.646	100%	5.223.327.304	100%	5.371.662.204	100%	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	90.420.000	100%	17.855.703	100%	12.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	100%	1.021.500.000	100%	400.138.000	100%	400.138.000	100%	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	0	-	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen	100%	145.645.000	100%	57.805.980	100%	62.500.000	100%	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	90.000.000	100%	69.338.317	100%	175.500.000	100%	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN SERUYAN TENGAH
7	**1**		**KECAMATAN SERUYAN HULU**				**3.520.236.567**		**3.630.424.000**		**3.854.854.568**		
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	3.157.201.567	100%	3.292.646.140	100%	3.384.854.568	100%	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	31.395.000	100%	29.177.860	100%	70.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HULU

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	100%	101.910.000	100%	78.600.000	100%	90.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	100%	20.400.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen	100%	135.340.000	100%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	73.990.000	100%	70.000.000	100%	130.000.000	100%	KECAMATAN SERUYAN HULU
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN SERUYAN HULU
7	**1**		**KECAMATAN SULING TAMBUN**				**3.015.859.758**		**3.295.888.517**		**3.512.935.960**		
7	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	2.741.419.758	100%	3.116.388.517	100%	3.312.935.960	100%	KECAMATAN SULING TAMBUN
7	1	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persen	100%	24.750.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	KECAMATAN SULING TAMBUN
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	100%	57.180.000	100%	30.000.000	100%	45.000.000	100%	KECAMATAN SULING TAMBUN
7	1	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	Persen	100%	13.930.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	KECAMATAN SULING TAMBUN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
7	1	5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen	100%	108.000.000	100%	94.000.000	100%	95.000.000	100%	KECAMATAN SULING TAMBUN
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100%	70.580.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	KECAMATAN SULING TAMBUN
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	100%		100%		100%		100%	KECAMATAN SULING TAMBUN
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**7.510.603.100**		**5.954.316.608**		**6.384.990.988**		
8	**1**		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**7.510.603.100**		**5.954.316.608**		**6.384.990.988**		
8	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	4.286.175.050	4,90%	273.000.000	5,00%	280.000.000	5,00%P	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang dibina dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Persen	4,75%	941.840.000	5,00%	910.217.000	5,00%	960.217.000	5,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik	Persen	4,75%	867.182.850	72,64%	100.000.000	76,91%	100.000.000	76,91%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
8	1	4	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.	Persen	68,37%	702.214.000	4,90%	210.000.000	5,00%	245.000.000	5,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Laju Pertumbuhan pembinaan ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persen	4,75%	456.764.500	100%	288.500.000	100%	310.000.000	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	90%	256.426.700	90%	273.000.000	100%	280.000.000	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			JUMLAH				**1.237.926.702.733**		**1.355.689.320.265**		**1.334.469.649.843**		

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sementara indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pada RPJMD memuat kinerja dampak (*impact*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator keluaran (output) dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah. Kinerja hasil (*outcom*e) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Bab ini memuat indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan periode 2018-2023 disajikan pada Tabel 8.1, Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan merupakan Indikator Kinerja Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah. Sementara Tabel 8.2 menyajikan Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah dan Tabel 8.3 merupakan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah.

Tabel 8.1

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan
Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	n/a	CC (55,55)	B (60,03)	B (60,19)	B (68,99)	BB (73,47)	BB (77,95)	BB (77,95)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,14	67,04	67,57	67,58	69,3	70,12	70,94	70,94	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
3	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	39,93	40,75	41,54	40,96	49,85	52,69	55,69	55,69	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
4	Laju Inflasi	Persen	3,29	6,02	2,02	1,62	3,64	3,73	3,82	3,82	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
5	Indeks Aksesibilitas	Poin	n/a	53,45	n/a	n/a	58,25	60,75	63,25	63,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	5,21	5,09	-2,23	5,29	5,32	5,36	5,36	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
7	Indeks Gini	Poin	0,288	0,287	0,336	0,32	0,283	0,282	0,281	0,281	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	n/a	n/a	54,98	56,7	77,4	79,4	81,4	81,4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,79	4,28	4,45	4,3	3,99	3,79	3,66	3,66	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	n/a	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Hasil proyeksi

Tabel 8.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN (Dampak/Impact)	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
1	Persentase penduduk miskin	Persen	7,46	7,43	7,19	6,85	6,55	6,29	6,03	6,03	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
2	Angka Melek Huruf	Persen	98,87	98,89	98,87	98,87	98,93	98,95	98,97	98,97	Dinas Pendidikan
3	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,75	7,98	7,75	7,79	8,73	8,99	9,26	9,26	Dinas Pendidikan
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,62	11,68	11,62	12,33	12,35	12,54	12,74	12,74	Dinas Pendidikan
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,23	69,24	69,25	69,26	70,55	70,79	71,03	71,03	Dinas Kesehatan
6	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	72,86	74,5	71,09	65,04	83,45	85,74	85,74	85,74	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	88,64	88,52	89,46	89,44	89,85	90,18	90,51	90,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	70,13	72,38	70,07	70,07	81,04	84,15	87,39	87,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,06	9,74	7,92	6,95	10	11	12	12	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
10	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah; Inspektorat
11	Skor pola pangan harapan	Poin	91,5	92	92,5	84.70	94,5	95,5	96,5	96,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN (Dampak/Impact)	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
13	Kontribusi sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persen	36,56	36,95	37,04	37,55	38,13	38,53	38,93	38,93	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14	Produksi sektor pertanian	Ton	n.a	n.a	n.a	n.a	90,61	90,72	90,84	90,84	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15	Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	n/a	36,56	37,04	37,04	38,09	38,59	39,09	39,09	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Perikanan
16	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	n/a	31,93	31,38	32,8	33,18	33,48	33,8	33,8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	Kontribusi Agroindustri terhadap PDRB sektor Industri	Persen	n/a	1,09	1,31	1,62	1,48	1,61	1,74	1,74	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	n/a	0,24	0,14	0,14	0,29	0,3	0,31	0,31	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
19	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	6,22	6,33	6.48	6.82	6,75	6,88	7,01	7,01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
20	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	31,93	32,51	32.56	31.88	33,18	33,48	33,8	33,8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
21	Pertumbuhan Industri Rumah Tangga	Persen	n/a	2,02	2.29	2.89	2,95	3,16	3,45	3,45	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
22	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jiwa	2.783	2.773	5.401	6.558	2.693	2.663	2.633	2.633	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN (Dampak/Impact)	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	79,32	80,03	78,64	81,85	82,21	82,95	83,69	83,69	Sekretariat Daerah (BAPENDA; DPMPTSP; DISDUKCAPIL; RSUD)
24	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B (60,47)	B (61,55)	B (62,60)	B (64,00)	B (65,50)	B (67,00)	B (67,00	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi); Inspektorat
25	Persentase Koperasi Aktif	Persen	81,82	86,57	86,81	86,81	87,17	87,53	87,89	87,89	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
26	Persentase UMKM yang berdaya saing	Persen	0,94	1,5	1.94	1.94	3,94	4,94	5,94	5,94	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27	Persentase panjang jalan dalam kondisi Baik	Persen	10,84	12	17,98	n/a	23,82	30,96	40,25	40,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	Persen	n/a	5,63	4,351	0,279	6,53	6,93	7,23	7,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Persentase wilayah desa yang terhubung dengan jalan kondisi baik	Persen	n/a	39	17,98	20,78	46	48	50	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Rasio elektrifikasi	Persen	n/a	47,10	49,78	57	61,19	66,14	71,09	71,09	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
31	Rasio rumah layak huni	Persen	46,07	47,92	54,56	52,57	52,91	53,21	55,71	55,71	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
32	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Segintung	Persen	n/a	4,5	5	n/a	5	5	5	5	Dinas Perhubungan
II.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menurut PDRB	Rupiah	n/a	2.873.779	3.698.760	n/a	2.813.281	2.776.807	2.740.805	2.740.805	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN (Dampak/Impact)	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	8.658	8.469	8.564	n/a	7.790	7.554	7.325	7.325	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
3	Angka Kriminalitas	Poin (Angka)	8,96	3,96	4,12	4,65	4,55	4,45	4,35	4,35	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Rasio ketergantungan	Persen	42,48	46	44,15	44,24	41,04	40,51	39,99	39,99	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	Persentase ASN yang berkompeten	Persen	n/a	n/a	60,83	n/a	65	70	75	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa	Persen	1,03	1,03	9,29	1,03	10,3	20,61	30,91	30,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan
7	Nilai Tukar Petani	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: Hasil proyeksi

Tabel 8.3

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
1	**Layanan Urusan Wajib Dasar**										
A	**Pendidikan**										
1	**Pendidikan Dasar**										
1.1	APK SD /MI	Persen	106.74	111,11	93,39	116,48	116,89	117,3	117,71	117,71	Dinas Pendidikan
1.2	Rasio Guru terhadap murid SD/MI	Rasio	n/a	59,85	71,44	71,13	77,88	79,14	80,43	80,43	Dinas Pendidikan
1.3	APK SMP/MTs	Persen	93.22	101,39	70,54	87,42	105,35	106,7	108,07	108,07	Dinas Pendidikan
1.4	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	n/a	73,29	85,83	90,61	91,64	93,76	95,93	95,93	Dinas Pendidikan
2	**Pendidikan Menengah**										
2.1	APK SMA/SMK/MA	Persen	84.47	71,82	57,04	50,26	74,04	74,8	75,56	75,56	Dinas Pendidikan
2.2	Rasio Guru terhadap murid SMA/SMK/MA	Rasio	n/a	73,29	85,83	90,61	91,64	93,76	95,93	95,93	Dinas Pendidikan
3	**APM**										
3.1	APM SD/MI	Persen	95,08	95,6	92,39	97,99	98,5	99	99,5	99,5	Dinas Pendidikan
3.2	APM SMP/MTs	Persen	74,7	74,75	64,91	81,28	81,32	81,36	81,4	81,4	Dinas Pendidikan
3.3	APM SMA/MA/SMK	Persen	52,1	52,59	51,39	47,87	54,08	54,59	55,11	55,11	Dinas Pendidikan
4	**Angka Partisipasi Sekolah**										
4.1	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	Persen	95,08	95,46	92,39	97,99	98,37	98,75	99,13	99,13	Dinas Pendidikan
4.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	74,7	59,96	64,91	81,28	81,69	82,1	82,51	82,51	Dinas Pendidikan
4.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	52,1	36,54	51,39	47,87	48,68	49,49	50,3	50,3	Dinas Pendidikan
5	**Angka Putus Sekolah**										
5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,03	0,03	0,4	0,89	0,03	0,03	0,03	0,03	Dinas Pendidikan
5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,09	0,08	0,8	3,93	0,05	0,04	0,04	0,04	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK	Persen	0,39	0,34	1,37	6	0,2	0,17	0,15	0,15	Dinas Pendidikan
5	**Angka Kelulusan**										
5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	99,12	99,3	96,98	98,53	99,98	100	100	100	Dinas Pendidikan
5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	98,06	98,17	97,53	99,35	99,98	100	100	100	Dinas Pendidikan
5.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK	Persen	98,56	98,89	95,56	91,31	99,88	100	100	100	Dinas Pendidikan
6	**Angka Melanjutkan**										
6.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	Persen	82,64	86,44	96,46	95,97	98,93	100	100	100	Dinas Pendidikan
6.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK (%)	Persen	66,93	69,91	75,8	67,52	79,67	83,21	86,92	86,92	Dinas Pendidikan
7	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	171	173	421	519	521	523	525	525	Dinas Pendidikan
8	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	65	65	97	223	250	270	290	290	Dinas Pendidikan
9	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	21	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Pendidikan
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio	127,05	127,05	124	122,56	127,05	127,05	127,05	127,05	Dinas Pendidikan
11	Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4	Persen	94,6	96,28	85,74	87,68	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
12	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	n.a	n.a	n.a	49,16	50,00	55,00	60,00	60,00	Dinas Pendidikan
B	**Kesehatan**										
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000	6,44	6,27	5,78	6,6	5,8	5,64	5,5	5,5	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000	135.23	133,87	257,15	131,2	129,88	128,57	127,28	127,28	Dinas Kesehatan
3	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 100 balita	0,62	7,11	7,86	6.57	6,31	6,07	5,83	5,83	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	Rasio Puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per 1.000	0,59	0,6	0,63	0,544	0,69	0,73	0,75	0,75	Dinas Kesehatan
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	Per 1.000	0,06	0,06	0,06	0,058	0,06	0,06	0,06	0,06	Dinas Kesehatan
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	Per 1.000	0,09	0,09	0,09	0,097	0,09	0,09	0,09	0,09	Dinas Kesehatan
7	Rasio Pustu persatuan penduduk	Per 1.000	0,41	0,43	0,46	0,388	0,45	0,45	0,45	0,45	Dinas Kesehatan
8	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000	0,62	0,62	0,63	0,971	0,98	1,08	1,19	1,19	Dinas Kesehatan
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000	0,26	0,26	0,112	0,204	0,26	0,26	0,26	0,26	Dinas Kesehatan
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000	3,13	3,55	3,6	6,62	9.64	12.66	15.68	15.68	Dinas Kesehatan
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	7	10	18	29,9	35,4	43,07	50,74	50,74	Dinas Kesehatan
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	65,72	70	67	28,45	73	74	75	75	Dinas Kesehatan
13	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	Persen	77	83	50	62,46	85	85	85	85	Dinas Kesehatan
14	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	16	14,77	53,29	15,81	16	16	16	16	Dinas Kesehatan
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	13,67	15,58	16,5	20,23	23,06	26,28	29,94	29,94	Dinas Kesehatan
18	Cakupan kunjungan bayi	Persen	69	73,15	61	29.48	82,01	85,19	88,5	88,5	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
19	Cakupan puskesmas	Persen	120	120	120	120	130	130	130	130	Dinas Kesehatan
20	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	79	81	82	80	88	92	95	95	Dinas Kesehatan
21	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	n/a	85,73	75,31	62,55	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	n/a	70,39	48,27	50,8	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	n/a	73,06	74,02	74,65	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
24	Persentase pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Persen	n/a	46,76	41,31	57,79	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
25	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	20,39	25,5	28,15	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
26	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	5,89	12,59	23.16	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
27	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	18,59	23,21	28,89	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
28	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	16,05	36,47	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
29	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	72,05	39,67	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	n/a	100	44,88	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
31	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	n/a	100	25.67	12.64	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
32	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	n/a	100	100	22	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
33	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	Per.1000	993,56	993,73	994,22	993,4	994,2	994	993	993	Dinas Kesehatan
34	Cakupan Desa / Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 jam	Persen	n.a	n.a	n.a	52	53	55	55	55	Dinas Kesehatan
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
1	Persentase Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	15,04	16,73	17,98	20,27	23,8	26,17	28,54	28,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	Persen	87,77	81,65	73,4	62,76	49,72	34,64	18,30	18,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	41,53	30,29	57,32	54,9	57,4	59,9	62,4	62,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	42,01	52,53	61,68	61,68	69,63	76,55	82,57	82,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	54,1	49,76	49,76	45,68	47	47	49	49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	22,98	19,32	22,5	22,8	31,81	34,51	37,43	37,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase Sistem Air limbah yang terkelola dengan baik	Persen	41,53	30,29	57,32	54,9	57,4	59,9	62,4	62,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	0,15	0,4	0,9	1,9	3,4	5,88	9,34	9,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	107,24	0,201	75,12	75,12	77	79	81	81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	27,62	25,21	29,09	30,29	33,98	35,78	37,69	37,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	Persen	12,25	24,5	36,75	48,99	61,24	73,49	85,74	85,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	n/a	0,2	2,33	2,33	3,75	4,8	5,9	5,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	0,46	1,19	3,43	4,09	9,21	9,32	9,5	9,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	9,09	12,05	13,23	14,05	15,2	17,29	19,66	19,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	9,27	10,82	12,36	13,91	15,45	16,2	17,01	17,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase SDM Terampil Konstruksi Bersertifikat	Persen	19	40	65	65	75	85	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D	**Perumahan dan Kawasan Pemukiman**										

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Rasio permukiman layak huni	Persen	n/a	46,07	49,91	48,21	55,07	57,57	60,07	60,07	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	80	90	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	80	85	85	85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	20	10	10	10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	80	90	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	30	20	10	10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
E	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**										
1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	49,09	44,37	47,93	48,32	49,38	50,76	52,14	52,14	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	80	83	85	85	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Persentase Penegakan Perda	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Persentase penanganan bencana yang ditangani	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Persentase penanganan kebakaran hutan dan lahan	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Persentase Penurunan Titik Hotspot Karhutla	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi korban dan terdampak Kebakaran dan non kebakaran	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
F	**Sosial**										
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	6	8	4	4	8	8	8	8	Dinas Sosial
2	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	94	94	95	95	98	98	98	98	Dinas Sosial
3	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	94	94	95	95	98	98	98	98	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	98	98	98	98	98	98	98	98	Dinas Sosial
5	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	98	98	98	98	98	98	98	98	Dinas Sosial
6	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	98	98	98	98	98	98	98	98	Dinas Sosial
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak portensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	95	95	95	95	95	95	95	95	Dinas Sosial
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	93	97	97	97	97	97	97	97	Dinas Sosial
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	93	95	97	97	97	97	97	97	Dinas Sosial
2	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**										
A	**Tenaga Kerja**										
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Orang	15	14	339	133	13	13	12	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	85	85	85	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	50	55	60	60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	85	85	85	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	Persentase Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	21,31	21,31	20	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Persentase Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	85	85	85	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Persentase Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Persentase Kelesematan dan perlindungan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
1	Jumlah KDRT	Kasus	2	0	1	1	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Selesai Tindak pidana KDRT	Kasus	2	0	1	1	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	1	1	1	0,96	1,125	0,02	0,02	0,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	20	20	12	12	12	12	12	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	0,37	0,36	0,39	0,38	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	1	1	1	0,96	1,125	0,02	0,02	0,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
C	**Pangan**										
1	Ketersediaan pangan utama	Persen	34,03	35,05	35,8	36,31	38,32	39,47	40,66	40,66	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
D	**Pertanahan**										
1	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	85	90	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Penyelesaian izin lokasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	80	90	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	80	90	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
E	**Lingkungan Hidup**										
1	Presentase Penanganan Sampah	Persen	n/a	16,53	51	51	25,11	28,86	33,18	33,18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen	n/a	6,935	8,96	8,76	10	11	12	12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	Buah	1	1	1	1	2	2	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persen	n/a	4	4	4	5	5	6	6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	n/a	n/a	54,98	56,76	77,4	79,4	81,4	81,4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Persen	55,43	31,25	50	50	50,2	50,3	50,4	50,4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Persen	n/a	78,95	83,72	84,56	84,66	84,76	84,86	84,86	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Penetapan hak MHA	Ketetapan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
11	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	Persentase berkurangnya kerusakan lingkungan hidup	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	75	76	77	77	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Persentase Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	25	21	14	1	25	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
F	**Kependudukan dan Catatan Sipil**										
1	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Persen	89,64	94,63	93,66	95,27	96	97	98	98	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	92,95	95,09	97,77	99,73	99,81	99,83	99,85	99,85	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	30,7	48,42	38,15	37,16	55	58	61	61	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Per 1000	468,628	545,3	576,182	599,89	623,598	647,306	671,014	671,014	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	Ketersedian database kependudukan skala kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	89,64	94,63	93,66	95,27	96	97	98	98	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	Persen	92,95	95,09	97,77	99,73	99,81	99,83	99,85	,99,85	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
G	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	20	80	97	97	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Persentase Posyandu aktif	Persen	91	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	70,10	70,10	70,10	70,10	78,83	86,65	96,69	96,69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	10,3	20,61	30,91	30,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Angka	n.a	n.a	59,37	59,37	71,87	84,75	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Persentase LSM Aktif	Persen	5,54	5,54	5,54	5,54	10,3	20,61	30,91	30,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
H	**Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana**										
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,34	1,34	0,04	0,02	1,22	1,19	1,16	1,16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Kelaurga Berencana dan pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	Persen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan PD KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase Ketersediaan dan Didistribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6	Persentase Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	15	17	21	28	29	30	32	32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Persentase PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPKKS) yang ber KB- mandiri	Persen	10,2	10,2	10,2	11,6	11,6	12	15	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	5	51	56	56	56	60	62	62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Persentase anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	41	41	41	41	41	41	41	41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Persentase anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	20	20	20	20	25	25	25	25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I	**Perhubungan**										
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Terminal Bus	Unit	80	83	96	96	100	102	104	104	Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	2.688	3.014	3.110	3.305	3.442	3.662	3.895	3.895	Dinas Perhubungan
3	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	5.395	5.925	6.106	6.327	6.546	6.765	6.984	6.984	Dinas Perhubungan
4	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	1443	1020	1130	1362	1.478	1.486	1.495	1.495	Dinas Perhubungan
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0,82	0,62	0,62	0,63	1,07	1,31	1,61	1,61	Dinas Perhubungan
6	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	192	209	214	247	250	266	275	275	Dinas Perhubungan
7	Rasio Ijin Trayek Lintas Daerah Kabupaten Dalam Satu Kabupaten	Persen	3	3	3	3	5	8	9	9	Dinas Perhubungan
8	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	10	50	41	47	5	5	5	5	Dinas Perhubungan
9	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,038	0,032	0,034	0,032	0,05	0,05	0,06	0,06	Dinas Perhubungan
J	**Komunikasi dan Informatika**										
1	Jumlah Surat Kabar Nasional	Unit	9	4	11	14	16	18	20	20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Jumlah Surat Kabar Lokal	Unit	10	8	11	13	15	17	19	19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	47	47	53	53	53	53	53	53	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	27	38	43	54	66	70	70	70	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	Proporsi Rumah Tangga Berakses Internet	Persen	25	38	60	65	65	80	80	80	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
K	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**										
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	81,82	86,57	86,81	86,81	87,17	87,53	87,89	87,89	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	Persen	88,69	86,96	86.95	83,3	82,46	81,72	79,98	79,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	81.82	16.869	13.05	16,7	16,94	18,28	20,02	20,02	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99,50	99,50	99,50	99,50	90	90	85	85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
L	**Penanaman Modal**										
1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Persen	46	58	67,69	57,6	80	85	90	90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	n.a	n.a	n.a	n.a	44	44	44	44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	n.a	n.a	n.a	n.a	1.071.428.571.400	1.071.428.571.400	1.071.428.571.400	1.071.428.571.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Persentase Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rupiah)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	77	79	81	81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
M	**Kepemudaan dan Olahraga**										
1	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Persen	45	55	70	60	70	80	90	90	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	45	76	62,5	92	94	96	98	98	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah	40	33	32	32	37	42	47	47	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah	12	9	11	0	11	13	15	15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
N	**Statistik**										
1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Buku PDRB Kabupaten	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
O	**Persandian**										
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggungakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Darah	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	20	20	20	20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
P	**Kebudayaan**										
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	2	2	0	2	3	4	4	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	2	2	2	2	3	4	5	5	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase benda. situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	5	5	24	24	30	35	40	40	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Q	**Perpustakaan**										
1	Jumlah Pengunjung pada Perpustakaan Umum Daerah (dihapus) ganti persentase sesuai rumus PMDN	Orang	9.845	6.144	11.784	7.855	7.900	8.050	8.165	24.115	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persen	6.99	4.59	9.14	5.98	37.00	37.25	37.50	37.50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	32.275	33.371	64.582	71.923	72.300	72.600	73.000	73.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Jumlah Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Desa	Unit	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 45 PD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	35,27	35,27	35,27	35,25	37	37,25	37,5	37,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
R	**Kearsipan**										
1	Pengelolaan Arsip secara baku	Persen	25	10	50	56	62	66	72	72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	0	0	0	300	40	42,86	62,50	62,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**Layanan Urusan Pilihan**										
A	**Pariwisata**										
1	Kunjungan wisata	Orang	30.505	35.288	29.922	19.164	24.189	29.214	34.239	34.239	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
B	**Pertanian**										
1	Persentase Produktivitas padi	Persen	136,9	142,06	144,56	145,07	158,74	164,73	170,94	170,94	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Cakupan bina kelompok petani	Persen	100	100	85	85	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	1,2	1,2	1,2	1,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Persentase Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	1,2	1,2	1,2	1,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
C	**Kehutanan**										
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	n/a	1,93	0,31	0,31	2,28	2,41	2,55	2,55	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	n/a	4	9,48	9,48	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
D	**Energi dan Sumberdaya Mineral**										
1	Persentase Pemakaian Listrik (kWh)	Persen	n/a	3,36	3,97	2.64	5,54	6,54	7,73	7,73	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
2	Produksi Listrik (kWh)	kwh	n/a	1,789,978	1.757.277	2,005,722	2,006,736	2,174,608	2,282,480	2,282,480	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
E	**Perdagangan**										
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	86,22	87,45	87,50	87,50	86,76	86,85	90,45	90,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
F	**Perindustrian**										
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	18,15	9,45	7,85	3,75	0,18	10	12	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
G	**Transmigrasi**										
1	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	80	80	80	80	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Persentase Kawasan permukiman transmigrasi yang dibangun	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	65	65	65	65	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
H	**Kelautan dan Perikanan**										
1	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	4%	4%	4,60%	6,70%	7	7	7	7	Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	Konsumsi ikan	kg/tahun	46,95	46,95	52,24	52,5	54,26	56,96	59,76	59,76	Dinas Perikanan
3	Persentase Konsumsi Ikan	Persen	98,6	98,7	106	101,4	96,3	97,5	98,6	98,6	Dinas Perikanan
4	Produksi Perikanan	ton/tahun	27.030,15	31.755,29	32.160,67	35.276,92	42.389,98	45.256,00	48.365,44	48.365,44	Dinas Perikanan
	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	9.932,00	12.150,71	12.167,69	14.457,88	16.172,60	17.789,85	19.568,84	19.568,84	Dinas Perikanan
	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	17.098,15	19.604,58	19.992,98	20.819,04	22.076,88	23.180,72	24.339,76	24.339,76	Dinas Perikanan
	- Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	ton/tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	4.140,51	4.285,43	4.456,84	4.456,84	Dinas Perikanan
5	Persentase Produksi Perikanan	Persen	87,95	89,76	96,32	98,74	98,18	98,29	98,65	98,65	Dinas Perikanan
6	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	98,18	98,29	98,65	98,65	Dinas Perikanan
7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan dan Undang-undang yang berlaku	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	80	80	85	85	Dinas Perikanan
8	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	68,29	69,35	70,16	70,16	Dinas Perikanan
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**										
A	**Sekretariat Daerah**										
1	Jumlah Informasi Manajemen Pemda	Jumlah	n.a	4	4	9	9	9	9	9	Sekretariat Daerah
B	**Sekretariat DPRD**										
1	Jumlah anggota DPRD	Anggota	25	25	25	25	25	25	25	25	Sekretariat DPRD
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
5	Persentase Terlaksananya Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Rumus : Jumlah Kebijakan Anggaran yang ditetapkan dibagi Jumlah Kebijakan Anggaran yang dibahas x 100%)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	95	95	95	95	Sekretariat DPRD
6	Persentase Pokok Pikiran DPRD yang Terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD (Rumus : Jumlah Pokir yang masuk dalam dokumen RPJM dan RKPD dibagi Jumlah Seluruh Pokir DPRD x 100%)	Persen	n.a	n.a	n.a	93	93	93	93	93	Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**										
A	**Perencanaan Pembangunan**										
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	50	50	50	50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
B	**Keuangan**										
1	Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Tepat / Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	0,6	0,5	0,5	0,5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	18,9	19,9	21	21	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	12,7	12,6	13,3	13,3	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Persentase SILPA Terhadap APBD	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	10,5	9,9	4,9	4,9	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Persentase Program Dalam APBD yang Dilaksanakan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Persentase Kegiatan Dalam APBD yang Dilaksanakan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,06	9,74	7.92	6,95	10	11	12	12	Badan Pendapatan Daerah
C	**Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan**										
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	Orang	3.048	2.952	3.107	3.134	3.810	4.110	4.410	4.410	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	5	5	5	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	5	5	5	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah yang Terisi ASN	Orang	n.a	n.a	n.a	28	30	34	0	34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah yang Terisi ASN	Orang	n.a	n.a	n.a	583	569	671	0	671	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah yang Terisi ASN	Orang	n.a	n.a	n.a	1771	1764	2325	2355	2355	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
D	**Penelitian dan Pengembangan**										
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	80	80	80	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	80	80	80	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	80	80	80	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	80	80	80	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	**Unsur Pengawas**										
A	**Inspektorat**										
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	70	75	80	80	Inspektorat Daerah
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	2	2	1,5	1,5	Inspektorat Daerah
3	Jumlah Temuan BPK	Temuan	n.a	n.a	n.a	n.a	26	24	22	22	Inspektorat Daerah
4	Persentase terlaksananya pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah (level maturitas SPIP Perangkat Daerah)	Persen/Level	n.a	n.a	n.a	n.a	85 / (3)	85 / (3)	85 / (4)	85 / (4)	Inspektorat Daerah
7	**Unsur Kewilayahan**										
A	**Kecamatan**										
1	Persentase Terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Seluruh Kecamatan
2	Persentase Penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Seluruh Kecamatan
3	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100	Seluruh Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8	**Unsur Pemerintahan Umum**										
A.	**Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat**										
1	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang dibina dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	4,75	5	5	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	4,75	72,64	76,91	76,91	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	90	90	90	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Hasil proyeksi

BAB IX
PENUTUP

Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi dari bupati, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seruyan secara terpadu dan konsisten, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, meliputi:

a. RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan Renstra perangkat daerah. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun.
b. Penjabaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Seruyan setiap tahun.
c. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seruyan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD ini.
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD

Seruyan Tahun 2018-2023 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

e. Bupati Seruyan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
f. DPRD Kabupaten Seruyan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang RPJMD Kabupaten Seruyan.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Seruyan Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Seruyan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025 sesuai periode/tahapan berkenaan, berpedoman pada RPJMD dan RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah, dan RKP Tahun 2024.

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR